



**PERATURAN BUPATI
No. 43 Tahun 2025**

TENTANG

PERUBAHAN

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
RKPD
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - b. bahwa agar penjabaran dari program kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah selaras dengan yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 Nomor 12);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025.**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai penyalarsan atas Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.


BUPATI PURBALINGGA,
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang.....	3
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	10
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025.....	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB IV	PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	11
Tabel II. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025.....	22
Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Program pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025.....	24
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	32
Tabel III. 2 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengalami perubahan diiringi dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat

daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD;
- b. adanya penambahan sasaran kegiatan;
- c. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja;
- d. adanya perubahan target indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (output);

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 disusun dengan mendasar pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD 2024. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS) Tahun 2025, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Bappelitbangda 2025 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bappelitbangda 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja OPD Tahun 2025 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian kinerja Renja s/d Triwulan II tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan, dengan memetakan program/ kegiatan yang belum memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 1 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Th 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD pada Triwulan (Th 2025)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Th 2025) (%)		OPD Penanggungjawab
							I		II		III		IV		TOTAL				
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10=6+7+8+9)		(11=10/5*100)		-12
			Indikator	Satu an	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda.		Nilai SAKIP Bappelitbangda	Ang ka	79	5.554.563.000	-	1.353.544.888	-	1.440.720.018					NA	2.794.264.906	0	50,31	Bappelitbangda
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Pers en	100	108.000.000	100	1.620.000	100	-					100	1.620.000	100	1,5	Bappelitbangda
			Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Pers en	100	4.604.916.000	100	1.196.448.810	100	1.290.297.211					100	2.486.746.021	100	54	Bappelitbangda
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Pers en	100	5.200.000	100	453.200	-	-					100	453.200	0	8,72	Bappelitbangda
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pers en	100	552.280.000	100	109.849.876	100	97.730.007					100	207.579.883	100	37,59	Bappelitbangda
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Pers en	100	284.167.000	100	45.173.002	100	52.692.800					100	97.865.802	100	34,44	Bappelitbangda

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Pers en	100	108.000.000	100	1.620.000	100	-					100	1.620.000	100	1,5	Bappelitbangda
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok ume n	2	5.000.000	-	1.114.000	-	-					2	1.114.000	0	22,28	Bappelitbangda
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB)	Dok ume n	5	103.000.000	3	506.000	1	-					8	506.000	80	0,49	Bappelitbangda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti	Pers en	100	4.604.916.000	100	1.196.448.810	100	1.290.297.211					100	2.486.746.021	100	54	Bappelitbangda
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Ora ng	31	4.344.516.000	31	1.171.574.510	31	1.277.416.090					31	2.448.990.600	93	56,37	Bappelitbangda
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok ume n	99	205.760.000	28	23.401.300	18	12.881.121					46	36.282.421	46	17,63	Bappelitbangda
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok ume n	600	54.640.000	37	1.473.000	158	-					195	1.473.000	33	2,7	Bappelitbangda
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Pers en	100	5.200.000	100	453.200	-	-					100	453.200	100	8,72	Bappelitbangda
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap oran	4	5.200.000	1	453.200	-	-					1	453.200	25	8,72	Bappelitbangda
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Ora ng	43	75.000.000	-	5.528.800	-	1.800.000					-	7.328.800	0	9,77	Bappelitbangda

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	11	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0	0	Bappelitbangda
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	43	60.000.000	-	5.528.800	-	1.800.000					-	7.328.800	0	12,21	Bappelitbangda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Bulan	12	70.962.000	3	12.406.900	2	11.172.100					5	23.579.000	42	33,23	Bappelitbangda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	8.800.000	5	1.862.000	-	1.054.000					5	2.916.000	100	33,14	Bappelitbangda
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	9	24.800.000	6	5.046.900	3	2.930.100					9	7.977.000	100	32,17	Bappelitbangda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	996.000	3	190.000	2	285.000					5	475.000	42	47,69	Bappelitbangda
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	10.500.000	3	1.908.000	2	2.303.000					5	4.211.000	42	40,1	Bappelitbangda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	11.466.000	3	3.400.000	2	4.600.000					5	8.000.000	42	69,77	Bappelitbangda
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	24	14.400.000	6	-	4	-					10	-	42	0	Bappelitbangda

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	406.318.000	3	91.914.176	2	84.757.907					5	176.672.083	42	43,48	Bappelitbangda
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	6	630.000	-	-	1	-					1	-	17	0	Bappelitbangda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.640.000	3	16.745.939	2	15.581.046					5	32.326.985	42	45,76	Bappelitbangda
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	1	10.622.000	-	-	-	-					-	-	0	0	Bappelitbangda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	324.426.000	3	75.168.237	2	69.176.861					5	144.345.098	42	44,49	Bappelitbangda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	284.167.000	3	45.173.002	2	52.692.800					5	97.865.802	42	34,44	Bappelitbangda
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	29	254.167.000	14	41.451.002	8	49.812.800					22	91.263.802	76	35,91	Bappelitbangda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	10	10.000.000	6	3.600.000	-	2.880.000					6	6.480.000	60	64,8	Bappelitbangda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	-	122.000	-	-					-	122.000	0	0,61	Bappelitbangda

2	Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan		tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Pers en	96	1.215.355.000	-	97.784.683	-	156.987.387					-	254.772.070	0	20,96	Bappelitbangda
2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	Pers en	100	487.500.000	100	33.907.000	100	81.439.432					200	115.346.432	200	23,66	Bappelitbangda
			Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	Pers en	82.33	48.025.000	-	7.415.000	-	675.000					-	8.090.000	0	16,85	Bappelitbangda
			Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Pers en	100	56.266.000	93.62	1.765.000	53.19	-					146.81	1.765.000	146.81	3,14	Bappelitbangda
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Pers en	100	487.500.000	100	33.907.000	100	81.439.432					200	115.346.432	200	23,66	Bappelitbangda
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok ume n	284	47.880.000	284	2.255.000	284	620.000					284	2.875.000	100	6	Bappelitbangda
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang Kabupaten/Kota	Berit a Acar a	5	199.500.000	4	27.109.000	1	59.231.932					5	86.340.932	100	43,28	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok ume n	5	240.120.000	2	4.543.000	1	21.587.500					3	26.130.500	60	10,88	Bappelitbangda

		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Pers en	100	48.025.000	-	7.415.000	-	675.000					-	8.090.000	0	16,85	Bappelitbangda
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Dok ume n	1	48.025.000	-	7.415.000	-	675.000					-	8.090.000	0	16,85	Bappelitbangda
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	Pers en	100	56.266.000	93.62	1.765.000	53.19	-					53.19	1.765.000	53.19	3,14	Bappelitbangda
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Lap oran	2	22.535.000	-	-	-	-					-	-	0	0	Bappelitbangda
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Lap oran	4	33.731.000	1	1.765.000	1	-					2	1.765.000	50	5,23	Bappelitbangda
3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pers en	97.05	274.211.000	-	28.644.000	-	36.623.888					-	65.267.888	0	23,8	Bappelitbangda

			Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang ekonomi	Pers en	95.1 2	156.329.000	-	9.551.000	-	12.836.600					-	22.387.600	0	14,32	Bappelitbangda
			Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Pers en	94.7 4	193.024.000	-	16.502.683	-	25.412.467					-	41.915.150	0	21,71	Bappelitbangda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dok ume n	34	274.211.000	-	28.644.000	-	36.623.888					-	65.267.888	0	23,8	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dok ume n	28	93.315.000	-	7.486.500	-	12.902.888					-	20.389.388	0	21,85	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dok ume n	6	99.400.000	-	4.226.500	-	18.311.500					-	22.538.000	0	22,67	Bappelitbangda
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RPJMD/RKPD pada bidang pembangunan manusia	Lap oran	6	81.496.000	-	16.931.000	5	5.409.500					5	22.340.500	83	27,41	Bappelitbangda

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang perekonomian dan SDA	Dokumen	6	156.329.000	-	9.551.000	-	12.836.600					-	22.387.600	0	14,32	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	4	71.088.000	-	9.551.000	-	12.836.600					-	22.387.600	0	31,49	Bappelitbangda
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RPJMD/RKPD pada bidang perekonomian	Laporan	4	39.966.000	-	2	-	-					2	-	50	0	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	2	45.275.000	-	-	-	-					-	-	0	0	Bappelitbangda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen renja, renstra dan laporan kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen	6	193.024.000	-	16.502.683	-	25.412.467					-	41.915.150	0	21,71	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	2	71.850.000	-	5.560.300	-	18.423.467					-	23.983.767	0	33,38	Bappelitbangda

		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RPJMD/RKPD pada bidang infrastruktur	Lap oran	2	23.425.000	-	2.770.000	2	1.270.500					2	4.040.500	100	17,25	Bappelitbangda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dok ume n	4	97.749.000	-	8.172.383	-	5.718.500					-	13.890.883	0	14,21	Bappelitbangda
3	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Pers en	76	474.913.000	-	4.230.000	-	2.612.000					-	6.842.000	0	1,44	Bappelitbangda
4		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	Pers en	35.7 1	474.913.000	-	4.230.000	-	2.612.000					-	6.842.000	0	1,44	Bappelitbangda
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	Inov asi	70	474.913.000	-	4.230.000	-	2.612.000					-	6.842.000	0	1,44	Bappelitbangda
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Dok ume n	297	369.760.000	121	4.230.000	105	2.612.000					226	6.842.000	76	1,85	Bappelitbangda
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Lap oran	2	105.153.000	-	-	-	-					-	-	0	0	Bappelitbangda

Penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- Kolom 2 merupakan sasaran strategis Bappelitbangda yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.
- Kolom 3 merupakan kondisi program kegiatan sub kegiatan pemutahiran kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2025.
- Kolom 4 dan 5 merupakan kondisi indikator dan target kinerja bappelitbangda tahun 2025.
- Kolom 6 dan 7 merupakan realisasi kinerja dan anggaran triwulan I dan II tahun 2025.
- Kolom 10 dan 11 merupakan realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II dan capaian renstra 2025.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang sangat mendukung pelaksanaan perencanaan kinerja perangkat daerah seperti SIPD-RI, SI PAKIS BANGGA, SI INTAN dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan serta monev pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang dilakukan oleh ASN Bappelitbangda sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi urusan perencanaan dan penelitian. Tidak hanya faktor pendorong dalam pencapaian kinerja, Bappelitbangda pun menemukan hambatan-hambatan antara lain keterbatasan sumber daya, dalam hal ini terbatasnya anggaran, kuantitas personil, sarana dan prasarana yang digunakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian kinerja kelembagaan dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga

mendapatkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran strategis yang telah ditetapkan membandingkan dengan realisasi kinerjanya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel II. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Pernyataan Tujuan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Satuan	Target	Realisasi 2025				Sumber Indikator
						2025	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		Skor Perencanaan	Persen	23	NA	21.86			Tujuan RENSTRA
			Meningkatkan kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Indeks	79	NA	NA			Sasaran RENSTRA
			Meningkatkan keselarasan dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	97,5	NA	NA			Sasaran RENSTRA
			Meningkatkan peran kelitbang dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Persen	100	NA	NA			Sasaran RENSTRA

Berdasarkan tabel di atas yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai, kondisi sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 pencapaian 4 (empat) indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator yang telah terisi yaitu Skor perencanaan SAKIP 2024 dengan nilai 22,84 atau dengan capaian 99,30% dan 3 (tiga) indikator belum dapat terisi karena realisasi kinerja dari ketiga indikator telah ditargetkan pada triwulan ke 3 dan 4 sesuai rencana aksi Bappelitbangda Tahun 2025 akan tetapi dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda pelaksanaan kegiatan telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Tahun 2025, telah ditetapkan program dan kegiatan sesuai Perbup Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Program pada Renja Bappelitbangda Tahun 2025 secara rinci target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Program pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025

No		PROGRAM	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025				OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV		
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01		PERENCANAAN								
1.01.01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							BAPPELITBANGDA	PEMERINTAHAN
1		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100				
2		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100				

No		PROGRAM	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025				OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV		
3		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100				
4		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	0				
5		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100				
5.01.02	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							BAPPELITBANGDA	PEMERINTAHAN

No		PROGRAM	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025				OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1		Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	persen	82.3	0	0				
2		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100	93.62	53,19				
3		Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	persen	100	100	100				
5.01.03	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							BAPPELITBANGDA	PEMERINTAHAN

No		PROGRAM	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025				OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	97.05	0	0				
2		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	persen	95.12	0	0				
3		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan	persen	94.74	0	0				

No		PROGRAM	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025				OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Pengembangan Wilayah								
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							BAPPELITBANGDA	PEMERINTAHAN
1		Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	persen	35.71	0	0				

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat bahwa 12 (dua belas) indikator kinerja dari 4 (empat) program, 4 (empat) indikator telah tercapai dan 8 (delapan) indikator lainnya belum menunjukkan adanya kinerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan proses perencanaan pembangunan daerah harus sinkron mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta beberapa indikator kinerja program yang ditargetkan pada triwulan III dan IV.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bappelitbangda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- b. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
- c. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- a. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan isu-isu tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkembang, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial;
2. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD), konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Penyelarasan program pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
5. Penyusunan peta jalan kelitbang sebagai pedoman dokumen perencanaan pembangunan berbasis litbang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029, mendasari hal tersebut perangkat daerah untuk dapat menyesuaikan target Perubahan Renja PD 2025 sesuai Renstra 2025-2029 untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang tertuang pada RPJMD 2025-2029 seperti hanya target tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	SATUAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	73,15	ANGKA
	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan	Skor Perencanaan dalam SAKIP	23,34	PERSEN
	Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi	2,4	PERSEN
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	76,5	ANGKA

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel III. 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PAGU INDIKATIF BAPPELITBANGDA KAB. PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							7.547.823.000,00	7.244.831.000,00	6.378.958.000,00	-1.168.865.000,00							7.496.823.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.547.823.000,00	7.244.831.000,00	6.378.958.000,00	-1.168.865.000,00							7.496.823.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							6.566.910.000,00	6.769.918.000,00	6.246.298.000,00	-320.612.000,00							6.515.910.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				100 persen	100 persen	5.271.555.000,00	5.554.563.000,00	5.400.486.000,00	49.000.000,00							5.320.555.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	8.000.000,00	108.000.000,00	104.050.000,00	96.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat		8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.000.000,00	103.000.000,00	101.550.000,00	98.550.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggran yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	4.427.908.000,00	4.604.916.000,00	4.448.400.000,00	20.492.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN		4.427.908.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.167.508.000,00	4.344.516.000,00	4.285.349.000,00	117.841.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			4.167.508.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				210 Dokumen	210 Dokumen	220.000.000,00	205.760.000,00	110.125.000,00	-109.875.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	40.400.000,00	54.640.000,00	52.926.000,00	12.526.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			40.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	5.200.000,00	5.200.000,00	4.550.000,00	-650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	4.550.000,00	-650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya				43 Orang	43 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	60.880.000,00	-14.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN		145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIK ATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	60 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	50.880.000,00	-9.120.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor				12 Bulan	12 Bulan	64.962.000,00	70.962.000,00	71.118.000,00	6.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	BAPPELITBANG DA		70.962.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	24.800.000,00	24.800.000,00	20.431.000,00	-4.369.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			24.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	996.000,00	996.000,00	950.000,00	-46.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			996.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	8.271.000,00	-2.229.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.466.000,00	11.466.000,00	18.266.000,00	6.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			11.466.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2 Dokumen	8.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			14.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	406.318.000,00	406.318.000,00	406.318.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	BAPPELITBANG DA		406.318.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			630.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.640.000,00	70.640.000,00	70.640.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			70.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.622.000,00	10.622.000,00	10.622.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			10.622.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	12 Laporan	324.426.000,00	324.426.000,00	324.426.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			324.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	284.167.000,00	284.167.000,00	292.170.000,00	8.003.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASET BAPPELITBANG DA		244.167.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	254.167.000,00	254.167.000,00	259.170.000,00	5.003.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			214.167.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan				100 persen	100 persen	571.791.000,00	591.791.000,00	526.805.000,00	0,00							571.791.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan				100 Persen	100 Persen	467.500.000,00	487.500.000,00	297.830.000,00	-169.670.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat		467.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				284 Dokumen	45 Dokumen	27.880.000,00	47.880.000,00	12.860.000,00	-15.020.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			27.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	199.500.000,00	199.500.000,00	86.600.000,00	-112.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			199.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	240.120.000,00	240.120.000,00	198.370.000,00	-41.750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			240.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKA TIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan				100 Persen	100 Persen	28.025.000,00	48.025.000,00	53.317.000,00	25.292.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		28.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	28.025.000,00	48.025.000,00	53.317.000,00	25.292.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			28.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun				100 Persen	100 Persen	76.266.000,00	56.266.000,00	175.658.000,00	99.392.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		76.266.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	22.535.000,00	22.535.000,00	151.953.000,00	129.418.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			22.535.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	53.731.000,00	33.731.000,00	23.705.000,00	-30.026.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			53.731.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia				98,23 persen	98,23 persen	723.564.000,00	623.564.000,00	319.007.000,00	-100.000.000,00							623.564.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				34 Dokumen	34 Dokumen	374.211.000,00	274.211.000,00	148.901.000,00	-225.310.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		274.211.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				28 Dokumen	3 Dokumen	93.315.000,00	93.315.000,00	49.191.000,00	-44.124.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			93.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	3 Dokumen	99.400.000,00	99.400.000,00	54.281.000,00	-45.119.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			99.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	10 Laporan	181.496.000,00	81.496.000,00	45.429.000,00	-136.067.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			81.496.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA				6 Dokumen	6 Dokumen	156.329.000,00	156.329.000,00	87.748.000,00	-68.581.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		156.329.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	71.088.000,00	71.088.000,00	35.774.000,00	-35.314.000,00	Kab. Purbalingga , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			71.088.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	12 Laporan	39.966.000,00	39.966.000,00	24.889.000,00	-15.077.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			39.966.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	3 Dokumen	45.275.000,00	45.275.000,00	27.085.000,00	-18.190.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			45.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				6 Dokumen	6 Dokumen	193.024.000,00	193.024.000,00	82.358.000,00	-110.666.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		193.024.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	71.850.000,00	71.850.000,00	41.155.000,00	-30.695.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			71.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	10 Laporan	23.425.000,00	23.425.000,00	12.673.000,00	-10.752.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			23.425.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	97.749.000,00	97.749.000,00	28.530.000,00	-69.219.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			97.749.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							980.913.000,00	474.913.000,00	132.660.000,00	-848.253.000,00							980.913.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan				89,71 persen	90 persen	980.913.000,00	474.913.000,00	132.660.000,00	0,00							980.913.000,00	

	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di fasilitasi				70 Inovasi	70 Inovasi	980.913.000,00	474.913.000,00	132.660.000,00	-848.253.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat		980.913.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				321 Dokumen	321 Dokumen	369.760.000,00	369.760.000,00	35.964.000,00	-333.796.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			369.760.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	611.153.000,00	105.153.000,00	96.696.000,00	-514.457.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			611.153.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	J U M L A H								7.547.823.000,00	7.244.831.000,00	6.378.958.000,00	7.745.136.000,00							7.496.823.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan ,Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PL. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001



RANCANGAN AKHIR **RENJA PERUBAHAN** **Tahun 2025**

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. PURBALINGGA

BerAKHLAK   bangga
melayani
bangsa

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Onje No. 4 Purbalingga

Telepon: (0281) 891098, 893116, 96216

Email: bakeuda.purbalinggakab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.	31
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..Error! Bookmark not defined.	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah	38
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH.	45
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

TABEL	Judul	Hal
2.1	Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025-----	6
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Tahun 2025-----	11
2.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja-----	20
2.4	Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-----	21
2.5	Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d Tahun 2025-----	23
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023-----	29
2.7	Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025-----	35
2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga-----	47
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026-----	52
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025 dan Renstra dan Prakiraan Maju Tahun 2026-----	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) harus disusun dengan mengacu dan menyesuaikan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD). Selain itu, Perubahan Renja OPD juga wajib diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja OPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Dokumen ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)..

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan serta perubahan kebijakan strategis pemerintah daerah. Dokumen Renja Perubahan OPD disusun untuk merespons adanya perubahan yang signifikan terhadap asumsi-asumsi perencanaan awal yang tercantum dalam Renja OPD sebelumnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Renja Perubahan OPD memuat penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), serta tetap mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) OPD. Proses penyusunannya melibatkan tahapan analisis capaian kinerja semester berjalan, identifikasi isu strategis, serta klarifikasi terhadap perubahan kondisi fiskal daerah dan kebijakan nasional atau daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, Renja Perubahan OPD memiliki peran strategis dalam menjamin konsistensi, relevansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien..

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);

- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841)
- f. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

- m. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2019 No. 5);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 05);

- w. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 72);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
- y. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 67);
- z. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

- a. Evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan).
- b. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dengan Tujuan dan Sasaran dalam renstra Badan Keuangan Daerah;

1.3.2. Tujuan

- a. Menjabarkan Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

3.3. Program, dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah ditujukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan dan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis, serta menginventarisir permasalahan yang di hadapi. Realisasi pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Bakeuda pada Tahun 2025 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02	KEUANGAN	432,550,634,000	227,555,163,983	52.61
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,312,014,000	7,196,989,707	44.12
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,826,000	1,775,750	97.25
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	996,000	972,750	97.67
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	830,000	803,000	96.75
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,068,199,000	6,743,969,959	44.76
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,922,634,000	6,723,439,659	45.06
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61,385,000	20,530,300	33.45
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84,180,000		0.00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,820,000	-	0.00
5.02.01.2.03.06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,820,000	-	0.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,000,000	-	0.00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,000,000	-	0.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286,405,000	81,726,763	28.54

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,660,000	717,500	43.22
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116,355,000	70,992,663	61.01
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,640,000	3,396,600	51.15
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,650,000	6,620,000	30.58
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	140,100,000	-	0.00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	980,000	980,000	100.00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	980,000	980,000	0.33
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	660,303,000	238,619,511	36.14
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	572,000	-	0.00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,075,000	111,839,199	35.72
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346,656,000	126,780,312	36.57
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275,481,000	129,917,724	47.16
5.02.01.2.09.0002	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218,704,000	81,907,724	37.45
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,376,000	10,070,000	81.37
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,401,000	37,940,000	85.45
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	413,900,250,000	219,811,426,540	53.11
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	503,813,000	22,147,000	4.40
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	70,150,000	-	0.00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65,481,000	2,238,000	3.42
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	205,377,000	17,343,000	8.44

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	162,805,000	2,566,000	1.58
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	67,594,000	35,530,600	52.56
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7,200,000	2,115,600	29.38
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	17,872,000	8,266,000	46.25
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tumai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,460,000	3,869,000	45.73
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4,510,000	-	0.00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29,552,000	21,280,000	72.01
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	56,856,000	22,160,312	38.98
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	56,856,000	22,160,312	38.98
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	413,271,987,000	219,731,588,628	53.17
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	393,986,919,000	219,644,338,628	55.75
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,000,000,000	87,250,000	4.36
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	17,285,068,000	-	0.00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	440,752,000	161,487,186	36.64

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	440,752,000	161,487,186	36.64
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar harga	156,730,000	95,797,250	61.12
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	17,522,000	9,994,196	57.04
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	222,466,000	41,905,740	18.84
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	28,028,000	13,080,000	46.67
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16,006,000	710,000	4.44
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,897,618,000	385,260,550	20.30
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,897,618,000	385,260,550	20.30
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	136,961,000	48,486,000	35.40
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	295,143,000	141,945,000	48.09
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	153,650,000	125,041,400	81.38
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28,997,000	2,369,750	8.17
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1,073,745,000	10,691,250	1.00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	159,158,000	38,639,250	24.28
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36,783,000	12,260,700	33.33
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	13,181,000	5,827,200	44.21

Secara umum gambaran pelaksanaan capaian program / kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Seluruh target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II masih dalam proses;
2. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II, yaitu :
 - Pertumbuhan Pajak Daerah pada Triwulan II terealisasi sebesar 145.74 persen, hal tersebut dihitung dari nilai pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

- Beberapa faktor yang mendukung pelampauan target tersebut adalah meningkatnya kualitas data wajib pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta adanya penambahan pajak Opsen yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini;
3. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk kedepannya adalah :
- Meningkatkan kapasitas SDM utamanya SDM Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Penatausahaan Aset dan Penatausahaan Pendapatan Daerah. Tingginya dinamika pembangunan membutuhkan inovasi dan kreatifitas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah;
 - Konsisten mengawal ketercapaian program / kegiatan dengan melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program / secara rutin dan berkala;

Ringkasan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakeuda Tahun 2025 sampai dengan triwulan II

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100	64	64
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan	100	0	0
		Persentase penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	50	50
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	45	45
		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	50	50
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100	64	64
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	12	60
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	77	100
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	13	33
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	7	54
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	50	50
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	2	50
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	0
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	0
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100	50	50
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	0	0
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	0	0
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6	50
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	1	100
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	50	50
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6	50
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	6	50
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	6	50
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	50	50
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	20	38
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	9	82

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100	0	0
		Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	90	90	100
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100	0	0
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	0	0
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	0	0
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2	0	0
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Perubahan APBD yang disusun tepat waktu			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100	35	35
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17	8	47
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35978	9218	26
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27	10	37
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	0	0
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151	151	100
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100	50	50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	100
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	50	50
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	12	6	50
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	6	50
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	1	50
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	1	50
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	5	3	60
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100	27	27

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3	3	100
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181	91	50
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengaman Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	6	50
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	6	50
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175	0	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	5	145.74	2915
		Cakupan data base yang valid	100	100	100
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100	51	51
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	6	50
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	614500	648312	106
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	614000	645797	105
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	100	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenjaTahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14	7	50
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36	18	50
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26	13	50
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	1	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki 2 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 060/293 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga,

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. Hal tersebut mempedomani format Pengukuran Kinerja yang termuat dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, serta Permen PAN RP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sesuai dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis Bakeuda yang:

- a) Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu;
- 2) Persentase laporan pengelolaan BMD yang disusun tepat waktu;
- 3) Presentase Kenaikan PAD;
- 4) Nilai SAKIP BAKEUDA

Hasil pengukuran kinerja IKU Bakeuda Tahun 2025 sampai dengan triwulan II disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi s/d TW II	Capaian Rata-rata (%)
			2025	2025	
1	Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang di tetapkan Tepat Waktu	100	50	50
		Presentase Kenaikan PAD	2.5	84.03	33,612
		Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	100	27	27
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	77	-	-

Dari hasil pengukuran kinerja Sasaran diatas, dapat digambarkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam rencana aksi tahun 2025 dan terus berproses sampai berakhirnya tahun anggaran

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Badan Keuangan Daerah, dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu.

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sedangkan dalam Pasal 190 ayat (1) dinyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah / LKPD disusun PPKD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 masih terus berproses dengan harapan pada akhir tahun anggaran dapat tercapai 100%. Adapun Koordinasi yang baik dengan semua OPD menjadi kunci dalam penyusunan Dokumen Anggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban yang tepat waktu. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk mendukung penyusunan dokumen dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu.

Indikator ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran merupakan sangat menunjang dalam rangka perwujudan tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator “Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / LKPD”.

LKPD merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan seluruh SKPD dan BLUD, sehingga berkualitas dan ketepatan waktu penyusunannya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan APBD dan penyusunan LK SKPD pada semua SKPD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu menyampaikan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu, dengan upaya mempercepat pengiriman LKPD setiap tahun. Berikut kami sajikan capaian indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu Status Opini BPK terhadap LKP pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5**Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d tahun 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian 2016-2021	Capaian 2023	Capaian 2024
Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Status Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2024, Status Opini BPK terhadap LKPD Pemkab Purbalingga Tahun Anggaran 2023 adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pencapaian WTP yang kesembilan kalinya setelah sebelumnya memperoleh opini yang sama mulai 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

a) Evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2025.

Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja masing-masing SKPD dalam menyusun laporan keuangan, dimulai dari proses rekonsiliasi aset hingga pengiriman laporan keuangan SKPD kepada Bupati. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi internal, guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2025 agar lebih baik dan tepat waktu.

Beberapa upaya yang dilakukan SKPD sehingga proses penyusunan LKPD dapat dilaksanakan lebih baik dan tepat waktu, antara lain :

- (1) Melakukan belanja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dalam Anggaran Kas. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan SPM pada akhir tahun, yang berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran.
- (2) Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (sebelum tanggal 31 Desember.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara rutin mengajukan SP2B dalam rangka proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS maupun BLUD.

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara periodik mengajukan SP2B/SP3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD.
- (5) Bendahara Penerimaan secara periodik melakukan penyetoran pendapatan asli daerah ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD dan melakukan entry data Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan.
- (6) Segera setelah tahun anggaran berakhir, SKPD agar melakukan stock opname terhadap seluruh persediaan yang dimiliki dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname).
- (7) Secara teratur melakukan proses entry jurnal manual ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan untuk transaksi sebagai berikut :
- Jurnal CTA Pendapatan BOS setiap semester
 - Jurnal CTA Belanja BOS setiap semester
 - Jurnal akrual Pendapatan BOS setiap semester
 - Jurnal akrual Belanja BOS setiap triwulan
 - Jurnal CTA Pendapatan BLUD setiap triwulan
 - Jurnal CTA Belanja BLUD setiap triwulan
 - Jurnal akrual Pendapatan BLUD setiap triwulan
 - Jurnal akrual Belanja BLUD setiap triwulan
- b) Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- Untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD dan BOS dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, telah

dikembangkan dan diimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD dan BOS yang digunakan oleh seluruh BLUD dan sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

c) Rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset semester I Tahun 2025.

Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2025 dapat mengurangi beban kerja pada akhir tahun 2025 maupun awal tahun 2026, sehingga proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2025 dapat berfungsi sebagai media deteksi dini untuk permasalahan yang ada di SKPD, sehingga solusi terbaik dapat ditemukan lebih cepat.

d) Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD bagi bendahara pengeluaran dan pengurus barang.

Untuk tahun 2025 telah beberapa kali perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelola keuangan termasuk di dalamnya penyusun laporan keuangan diberikan pemahaman yang memadai sehingga proses penatausahaan APBD sekaligus pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dapat dilaksanakan dengan baik.

Salah satu dampak dari terbitnya regulasi tersebut adalah adanya perubahan mekanisme penyusunan laporan keuangan SKPD khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara, dimana SKPD tersebut harus mengkonsolidasikan laporan keuangan unit SKPD dibawahnya. Melalui bimbingan teknis dimaksud, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan di 6 SKPD tersebut juga dibekali dengan pengetahuan seputar

teknik rekonsiliasi keuangan dan aset maupun teknik konsolidasi laporan keuangan unit SKPD.

e) Kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan dan pengiriman LK SKPD 2025 antara lain:

- Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi Keuangan dengan Sub Bidang Akuntansi
- Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD)

2) Persentase Kenaikan PAD.

Sesuai pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari :

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang beroperasi dalam wilayah daerah, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak kendaraan bermotor. Retribusi, di sisi lain, merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mencakup pendapatan dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, dan investasi. Semua komponen ini menjadi penting karena PAD memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-undang ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan PAD, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sering kali bersifat terbatas dan terikat pada program tertentu. Dalam rangka itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan inovasi dan strategi dalam memungut pajak dan retribusi, serta memperbaiki pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan PAD secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait pemanfaatan dana tersebut. Dengan pengelolaan PAD yang baik dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, serta mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Semua upaya ini penting untuk mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efektif.

3) Persentase Laporan Pengelolaan BMD yang disusun Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, bahwa Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengelola, yang melakukan pentausahaan BMD pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang, penyusunan pelaporan BMD agar semua data dan informasi BMD dapat disajikan dengan akurat setiap bulan dan semester.

Adapun pembukuan dilakukan dengan mencatat seluruh barang milik daerah dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Proses ini melibatkan pengidentifikasian barang, penentuan nilai aset, dan pengelompokan berdasarkan jenis dan fungsi. Setiap barang harus dicatat dengan detail yang mencakup deskripsi, nomor registrasi, lokasi, dan kondisi fisik. Pembukuan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset dapat dipantau dan dikelola dengan efisien.

Selanjutnya, inventarisasi dilakukan secara berkala, yang bertujuan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi barang milik daerah. Proses ini mencakup pengecekan fisik terhadap barang dan membandingkan hasilnya dengan catatan yang ada. Inventarisasi ini biasanya dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan, dan melibatkan semua unit kerja terkait untuk memastikan bahwa setiap aset terdata dengan akurat. Hasil inventarisasi akan digunakan untuk mengidentifikasi barang yang perlu diperbaiki, dijual, atau dihapus dari daftar aset.

Setelah proses pembukuan dan inventarisasi, pelaporan menjadi langkah krusial dalam tata cara pengelolaan barang milik daerah. Laporan disusun berdasarkan hasil pembukuan dan inventarisasi, dan harus mencakup informasi yang jelas mengenai jumlah, nilai, dan kondisi barang. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang, seperti kepala daerah dan badan pengawas, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan aset. Selain itu, laporan yang transparan juga penting untuk memenuhi regulasi yang ada dan mendukung akuntabilitas publik.

4) Nilai SAKIP BAKEUDA

Indikator ini untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Badan Keuangan Daerah, berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka SAKIP, nilai yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pencapaian kuantitatif, seperti output dan outcome dari program, tetapi juga aspek kualitatif yang menunjukkan dampak dari kebijakan dan program terhadap masyarakat. Evaluasi SAKIP dilakukan melalui serangkaian indikator yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan, serta pelaporan hasil. Rencana kerja yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, di mana setiap instansi diharapkan untuk mencatat dan melaporkan progres kinerja secara berkala..

Selain itu, nilai SAKIP yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang melihat adanya akuntabilitas dalam kinerja instansi cenderung lebih percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Dengan mengimplementasikan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif..

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analaisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 TW II (n)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
2	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	
3	Persentase Kenaikan PAD	%	-	-	2	2	2	2	11.39	64.03	2	2	
4	Persentase Laporan pengelolaan BMD yang disusun tepat waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	27	100	100	
5	Nilai SAKIP BAKEUDA	Angka	-	-	70,27	71,27	71,27	72,27	76.91	-	77	77	
6	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
7	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	%	-	-	88	89	90	91	88	-	90	91	
8	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	Rekemondasi	-	-	5	4	5	5	5	3	5	5	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analaisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 TW II (n)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
11	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	%	-	-	4,5	4,75	5	5	9.03	145.74	5	5	
12	Cakupan data base yang valid	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	%	-	-	100	100	100	100	100	64	100	100	
14	Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	
16	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
17	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	%	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	
18	Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan dampak yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sering berubah-ubah dan terlambatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang penganggaran dan alokasi Transfer Keuangan Daerah, menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah;
2. Masih ada personil SKPD yang kurang memahami terkait anggaran berbasis kinerja, serta masih terdapat kekurangkonsistenan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada SKPD;
3. Masih ada pengelola keuangan desa yang belum memahami mekanisme penyaluran dana transfer, sehingga mengakibatkan penyaluran belanja transfer tidak tepat waktu.;
4. Adanya penyesuaian regulasi dalam penatausahaan keuangan daerah (SIPD, PAPERLES, LAPORAN KEUANGAN, KKPD), yang berdampak terganggunya proses penatausahaan keuangan daerah;
5. Data objek /subyek/wajib Pajak belum sepenuhnya valid, masih kurangnya pemahaman kewajiban perpajakan, dan belum taatnya wajib pajak berdampak target pajak belum sesuai dengan potensi;
6. Adanya perubahan regulasi perpanjakan daerah yang berdampak pada penyesuaian aplikasi dan prosedur pemungutan pajak, sehingga menghambat realisasi pajak dan meningkatkan piutang pajak daerah;
7. Masih terdapat personil OPD yang memiliki keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga berdampak kualitas LK-SKPD Kurang memadai / tidak sesuai standar, dan masih ditemukan adanya temuan berulang pada LHP atas LKPD;
8. Keterbatasan keandalan aplikasi SIPD RI dapat memengaruhi kualitas informasi dan laporan keuangan, hal ini berdampak Pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan belum sepenuhnya berbasis data
9. keterbatasan SDM SKPD dalam menyelesaikan Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan Laporan BMD, serta pelaksanaan inventarisasi BMD berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021, hal ini berdampak keterlambatan dalam menyelesaikan Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan Laporan BMD;

10. Perubahan regulasi SHS dan ASB dapat mengganggu penyusunan rencana kerja anggaran, berdampak penyusunan anggaran menjadi tidak efisien;
11. Pengguna Barang belum sepenuhnya paham terkait pengamanan aset yang menjadi tanggungjawabnya, hal ini berdampak terjadi risiko penyalahgunaan aset, baik oleh internal maupun pihak eksternal.
12. Pencatatan Aset yang belum tertib, hal ini berdampak berisiko kehilangan atau mengalami kerusakan

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu-isu strategis diatas, Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan SIPD menuntut SDM harus lebih meningkatkan kompetensi dalam menguasai IT serta harus lebih komunikatif dengan Pusdatin
2. Menuntut pemahaman dan updating terhadap penyesuaian-penyesuaian regulasi.
3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021 menuntut Pemahaman regulasi dan Keterampilan Pengguna terhadap cara kerja sistem tersebut
4. Data objek pajak belum valid memerlukan pengembangan dalam teknologi yang mendukung integrasi data, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta program edukasi untuk masyarakat agar melaporkan perubahan yang relevan dengan objek pajak mereka.
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk sosialisasi yang intensif, sistem perpajakan yang muda, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan serta menyosialisasikan peraturan baru

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dengan penerapan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, membuka peluang *local tax power* bagi Pemda untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak melalui opsen pajak
2. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD

3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD
4. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman SKPD terhadap anggaran kinerja serta melakukan Konsolidasi penyusunan anggaran dan perencanaan
2. Koordinasi perencanaan anggaran
3. Koordinasi penyaluran belanja transfer dengan desa dan SKPD terkait
4. penyesuaian regulasi penatausahaan keuangan daerah
5. Perlu dilakukan pemuktahiran Data Objek Pajak dan Sosialisasi Pajak Daerah
6. Penagihan dan pemeriksaan pajak serta pelaksanaan Opsen Pajak daerah
7. Menyusun program pembinaan yang terstruktur dan sistematis bagi Penyusun Laporan Keuangan serta Menciptakan instrumen untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan SKPD yang meliputi seluruh aspek (penganggaran, penatausahaan, akap, temuan pemeriksaan.
8. Menyusun database keuangan daerah yang regional dan Mendorong pembentukan Bakeuda sebagai learning organization antara lain melalui pembuatan artikel ilmiah sederhana bidang keuangan daerah
9. Melakukan Pembinaan dan pelatihan serta Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan BMD secara periodik yang bersifat menyeluruh pada tingkat Pengguna Barang
10. melakukan pengujian yang berbasis partisipasi OPD agar didapatkan output Perbup SHS yang reliable sebagai antisipasi Perubahan Perbup SHS dikemudian hari.
11. Melakukan pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab pengamanan aset yang ada di SKPD serta pengamanan aset baik secara hukum, administrasi dan fisik

Penelaahan terhadap RKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap program dan kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah yang tercantum dalam RKPD 2025. Proses ini bertujuan untuk memahami fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran dan kegiatan.
- 2) Membandingkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan hasil rumusan kebutuhan berdasarkan analisis dari tahap-tahap sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan relevan dengan situasi yang ada.
- 3) Menyajikan hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk matriks. Dalam matriks ini, program dan kegiatan yang sama ditempatkan pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis. Penyajian ini membantu tim dalam melihat keselarasan antara program yang ada dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
- 4) Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di Badan Keuangan Daerah merupakan kegiatan lanjutan atau prioritas yang sudah termuat dalam RKPD Perubahan tahun 2025. Ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- 5) menyusun rumusan kebutuhan untuk setiap program dan kegiatan hasil revidi terhadap RKPD Perubahan. Rumusan ini mencakup informasi penting seperti lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolok ukur, serta estimasi dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan yang partisipatoris, maka Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah juga mempertimbangkan dan memverifikasi usulan-usulan dari pemangku kepentingan baik dari warga masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Pada tahap pengumpulan aspirasi dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, masyarakat, organisasi masyarakat, dan perangkat desa mengusulkan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas publik lainnya. Usulan-usulan ini kemudian dibahas dalam Musrenbang desa atau kelurahan untuk menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak.

Selanjutnya, usulan yang telah disaring dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Usulan dari desa dalam satu kecamatan digabungkan dan dievaluasi untuk melihat mana yang menjadi prioritas dan layak diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, usulan yang masih relevan akan dibahas lagi di tingkat kabupaten atau kota agar disesuaikan dengan rencana pembangunan yang lebih luas. Jika ada usulan yang dianggap memiliki dampak lebih besar, usulan tersebut dapat dibawa hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Setelah semua usulan dibahas pada setiap tingkatan, pemerintah menetapkan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendukung prioritas pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Melalui Bakeuda, pemerintah daerah mengelola anggaran dan memastikan bahwa setiap program yang disetujui selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Usulan-usulan Musrenbang yang diprioritaskan Bakeuda akan diarahkan untuk menjawab isu-isu utama, baik dari segi peningkatan ekonomi, stabilitas fiskal, maupun peningkatan daya saing lokal.

Usulan Musrenbang yang sejalan dengan tugas pokok Bakeuda memfokuskan pada kegiatan yang dapat menjadi pendorong ekonomi dan pemerintahan desa, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan

pariwisata, dan pemberdayaan UMKM serta prioritas lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain itu, usulan Musrenbang yang disetujui juga harus mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Setiap daerah memiliki potensi sektor unggulan yang berbeda, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif. Bakeuda berperan dalam mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan sektor-sektor ini, karena sektor unggulan tidak hanya memberikan pendapatan tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional.

Diharapkan usulan yang terpilih tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan usulan Musrenbang sebagai pendorong yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor yang potensial di daerah. Dengan demikian, Bakeuda berfungsi sebagai pengarah utama agar setiap program pembangunan yang direncanakan efektif, efisien, dan memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Berikut jumlah Usulan Masyarakat / Desa / Lembaga pada Musrenbang yang masuk ke Badan Keuangan Daerah yang disajikan dalam table 2.8.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah
1	2	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	411,918,217,000	408,137,746,000
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	411,918,217,000	408,137,746,000
	(1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	402,329,777,000	397,422,907,000
	(2). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,588,440,000	10,714,839,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional terkait hubungan antara Badan Keuangan Daerah dengan Kementerian Keuangan sangat penting dalam upaya menciptakan koordinasi fiskal yang efektif dalam menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan standar nasional.

Adapun Visi dari Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “

Adapun Misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan diatas terhadap tujuan pertama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel“ dalam telaahannya dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah telah sejalan, dimana tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menekankan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara nasional maupun di tingkat daerah. Dengan sinergi ini, visi nasional dapat diterjemahkan dan diterapkan secara optimal di tingkat daerah untuk kesejahteraan bersama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka Badan Keuangan Daerah mendukung untuk mewujudkan visi tersebut yaitu :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“

Dari visi tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Purbalingga yang Mandiri.

Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan..

2. Purbalingga yang Berdaya Saing

Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan

keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

3. Purbalingga yang Sejahtera

Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri. Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

4. Berakhlak Mulia

Bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin..

Dalam mencapai visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dari ke tujuh misi tersebut Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, telah mendukung misi ke satu yaitu ***“Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat “***. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari misi ke satu tersebut adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran dalam RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026, adapun indikator kinerja tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Strategis						Realisasi Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW II		
A	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang di tetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100
		Presentase Kenaikan PAD	%	2	2	2	2	2	2	2	2	3.62	3.3	2
		Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusn tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	27	-
B	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	-	-	44	45	46	47	43	44		-	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	%	69,27	70,27	70,77	71,27	71,77	72,27	76.01	76.96		72,27	

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Badan Keuangan Daerah akan menjalankan empat program, empat belas kegiatan dan empat puluh enam sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitas Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah.
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
3. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
5. Penagihan Pajak Daerah.
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dalam Renstra 2021-2026. Proses ini mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sambil tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga.

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program ini merupakan wujud implementasi dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang menjadi arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perencanaan kinerja akan diukur melalui kegiatan yang dievaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja ini harus mencerminkan berbagai aspek, termasuk input, output, outcome, dan impact, yang sesuai dengan sasaran, rencana program, dan kegiatan yang telah dirumuskan. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di bidang keuangan, program-program yang dilaksanakan harus mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Dengan mengikuti prinsip tersebut, diharapkan hasil pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), dan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dapat memberikan nilai tambah. Hal ini penting agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

RKPD Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 yang dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	%	13,873,878,000	16,675,526,000	2,801,648,000	
		Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	%				
		Presentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	%				
		Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	%				
		Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	100	100	%				
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	%				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dok Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100	100	%	3,652,000	1,826,000	-1,826,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dok	1,992,000	996,000	-996,000	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20	Laporan	1,660,000	830,000	-830,000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	%	12,602,444,000	15,369,324,000	2,766,880,000	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	77	Orang	12,450,845,000	15,223,759,000	2,772,914,000	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	40	Dok	67,359,000	61,385,000	-5,974,000	
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	13	Dok	84,240,000	84,180,000	-60,000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	%	15,520,000	14,820,000	-700,000	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan	15,520,000	14,820,000	-700,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	%	4,000,000	4,000,000	0	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	20	Orang	4,000,000	4,000,000	0	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100	100	%	311,478,000	276,405,000	-35,073,000	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	1,660,000	1,660,000	0	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	141,426,000	116,355,000	-25,071,000	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	6,640,000	6,640,000	0	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	21,652,000	21,650,000	-2,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	Dok	140,100,000	130,100,000	-10,000,000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	%	1,000,000	980,000	-20,000	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	8	Unit	1,000,000	980,000	-20,000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	%	660,303,000	564,490,000	-95,813,000	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	572,000	572,000	0	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan	313,075,000	260,462,000	-52,613,000	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	346,656,000	303,456,000	-43,200,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	%	275,481,000	443,681,000	168,200,000	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	Unit	218,704,000	243,704,000	25,000,000	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11	Unit	12,376,000	25,576,000	13,200,000	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	44,401,000	174,401,000	130,000,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100	100	%	414,771,640,000	410,725,959,000	-4,045,681,000	
		Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	89	89	%				
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100	100	%	647,136,000	463,763,000	-183,373,000	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	Dok	84,347,000	63,310,000	-21,037,000	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	Dok	78,093,000	59,381,000	-18,712,000	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2	2	Dok	284,094,000	197,367,000	-86,727,000	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2	2	Dok	200,602,000	143,705,000	-56,897,000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100	100	%	108,887,000	67,594,000	-41,293,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17	17	Dok	8,300,000	7,200,000	-1,100,000	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35878	35878	Dok	34,530,000	17,872,000	-16,658,000	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27	27	Dok	9,960,000	8,460,000	-1,500,000	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dok Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	Dok	8,300,000	4,510,000	-3,790,000	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151	151	Orang	47,797,000	29,552,000	-18,245,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	%	97,400,000	56,856,000	-40,544,000	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	Dok	96,400,000	56,856,000	-39,544,000	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45	45	orang	1,000,000		-1,000,000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	%	413,918,217,000	410,137,746,000	-3,780,471,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	12	Laporan	402,329,777,000	397,422,907,000	-4,906,870,000	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	12	Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	2	Laporan	9,588,440,000	10,714,839,000	1,126,399,000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	4	4	Dok	625,676,000	1,081,170,000	455,494,000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100	100	%	625,676,000	1,081,170,000	455,494,000	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang Disusun	3	3	Dok	166,634,000	156,730,000	-9,904,000	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181	181	Laporan	22,692,000	27,522,000	4,830,000	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	12	Laporan	363,868,000	852,884,000	489,016,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	12	Dok	51,525,000	28,028,000	-23,497,000	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175	175	orang	20,957,000	16,006,000	-4,951,000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4.75	4.75	%	1,457,443,000	1,800,418,000	342,975,000	
		Cakupan data base yang valid	100	100	%				
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100	100	%	1,457,443,000	1,800,418,000	342,975,000	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	12	Laporan	65,260,000	134,861,000	69,601,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Capaian Kinerja			Pagu			Ket
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	614500	614500	Laporan	1,032,091,000	295,143,000	-736,948,000	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dok Ketetapan Pajak Daerah	614000	614000	Dok	164,680,000	153,650,000	-11,030,000	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	100%	Layanan	50,000,000	28,997,000	-21,003,000	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14	14	Dok	64,000,000	1,073,745,000	1,009,745,000	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36	36	Dok	1,000,000	64,058,000	63,058,000	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26	26	Laporan	63,811,000	36,783,000	-27,028,000	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	4	Laporan	16,601,000	13,181,000	-3,420,000	
						430,728,637,000	430,283,073,000	-445,564,000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan kedepan, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempertegas kewenangan pemungutan pajak di wilayah Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak melalui opsen pajak;
2. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD;
3. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak;
4. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD;

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari aspek kebijakan, pendanaan, hingga sumber daya manusia, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Purbalingga, Juli 2025,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

SISWANTO, S.Pt.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.197205271998031005

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA

Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No.175
Telepon : 891334 Faximile : (0281) 6597252,
email : bkd@purbalingga.go.id
PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perubahan BKPSDM ini menjadi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berikutnya.

Renja Perubahan BKPSDM Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yang menggambarkan Perencanaan Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Renja Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat Program/Kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Purbalingga, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA,

Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, BKPSDM	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	35
3.3 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM.....	39
BAB V. PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RENJA BKPSDM) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BKPSDM merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM sehingga penyusunan Renja BKPSDM berpedoman pada Renstra BKPSDM dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA BKPSDM mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatanPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja BKPSDM.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja BKPSDM Tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Selanjutnya Renja BKPSDM Tahun 2025 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 22 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2025 meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM, Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM.

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023

Tahun 2023 BKPSDM mendapat alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.592.160.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan Capaian Realisasi Sebesar Rp 7.075.443.260,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh rupiah) atau 93,19 % sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM

		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
		Jumlah	7.592.160.000	7.075.443.260	93,19%
		4.02. Kepegawaian	6.960.960.000	6.471.098.110	92,96
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.299.067.000	5.231.483.658	98,72
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.014.000	29.200.138	97,29
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.824.700	97,08
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.014.000	23.375.438	97,34
	2	Administrasi Keuangan	4.820.958.000	4.769.735.314	98,94
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.126.000	4.668.040.389	98,94
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.245.000	64.113.925	98,27
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	37.587.000	37.581.000	99,98
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100,00
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000	3.900.000	100,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.736.000	8.736.000	100,00
	7	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawai berdasarkan tugas dan fungsi	8.736.000	8.736.000	100,00

		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		36.221.000	34.254.990	94,57
			8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.627.000	1.612.500	99,11
			9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.624.000	21.950.990	97,03
			10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	100,00
			11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.250.000	3.207.500	98,69
			12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.220.000	4.184.000	99,15
			13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	2.400.000	66,67
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.000.000	13.000.000	100,00
			14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000	13.000.000	100,00
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		233.998.000	220.645.116	94,29
			15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	415.000	414.500	99,88
			16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.787.000	154.442.541	92,05
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.796.000	65.788.075	99,99
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.240.000	152.012.100	99,85
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	123.132.000	123.130.100	100,00
			19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.010.000	10.787.000	97,97
			20	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.098.000	18.095.000	99,98

2.		KEPEGAWAIAN DAERAH			1.661.893.000	1.239.614.452	74,59
		9	Pengadaan, Pemberhentian dan Infromasi Kepegawaian ASN		278.705.000	46.628.390	16,73
			23	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	258.105.000	26.142.940	10,13
			24	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.000.000	12.981.900	99,86
			25	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.600.000	7.503.550	98,73
		10	Mutasi dan Promosi ASN		417.100.000	269.714.753	64,66
			26	Pengelolaan Mutasi ASN	370.545.000	223.314.153	60,27
			27	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.555.000	46.400.600	99,67
		11	Pengembangan Kompetensi ASN		894.117.000	888.148.295	99,33
			28	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	13.900.000	12.720.500	91,51
			29	Pengelolaan Assesment Center	293.000.000	289.896.925	98,94
			30	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12.873.000	12.776.000	99,25
			31	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	573.520.000	572.019.870	99,74
			32	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	824.000	735.000	89,20
		12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		71.971.000	35.123.014	48,80
			33	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.171.000	15.284.914	94,52
			34	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	38.500.000	3.258.800	8,46
			35	Pembinaan Disiplin ASN	15.300.000	14.747.500	96,39
			36	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.000.000	1.831.800	91,59
		4.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			631.200.000	604.345.150	95,75
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			631.200.000	604.345.150	95,75
		13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		631.200.000	604.345.150	95,75

			35	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	631.200.000	604.345.150	95,75
--	--	--	----	---	-------------	-------------	-------

2. Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan perkiraan capaian tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Profesionalitas ASN	81	70,	78	73,83	94,65	80	80	100
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	0,60	0,45	0,61	0,63	103,27	0,55	0,55	100
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,20	0,12	0.13	0,17	128	0,18	0,18	100
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	68	66,5	57	67	117,54	67	67	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15 dok	199 dok	15 dok	15 dok	100	298 dok	298 dok	100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	450 dok	450 dok	400 dok	474 dok	118,5	300 dok	300 dok	100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	1 dok	4 dok	4 dok	100	2 dok	2 dok	100

	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek mutasi, rotasi, promosi	0,04	0,05	0.05	0.06	128	0,02	0,02	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	24	20	22	26	118.18	23	23	100
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksanan dan Mutasi ASN Antar Daerah	250 dok	311	100 dok	233 dok	233	300 dok	300 dok	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 dok	970 dok	1000 dok	1068 dok	106,8	800 dok	800 dok	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dok	-	-	-	-	50 dok	50 dok	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,22	0,14	0.16	0.19	120	0,20	0,20	100
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah nilai merit system aspek pengembangan karir	80	32,5	65	77	84	78	78	100
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	100 org	2 org	100 org	125	125	13 org	13 org	100
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	30 dok	44 dok	30 dok	164 dok	546	44 dok	44 dok	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	2 org	4 dok	2 org	6 org	300	6 org	6 org	100
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat	30 dok	198 org	102 dok	101 dok	99	19 dok	19 dok	100
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	30 Laporan	198 lap	222 laporan	220 laporan	99	1 Laporan	1 Laporan	100
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	-	-	-	-	300 org	300 org	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,26	0,15	0.17	0.22	128	0,24	0,24	100

5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	64	61	74	87	117.57	62	62	100
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100	50 dok	50 dok	100
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	6 org	1 org	1 org	5 org	500	6 org	6 org	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	10 org	10 org	50 org	50 org	100	10 org	10 org	100
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	10 dok	20 dok	10 dok	29	290	5 dok	5 dok	100
5.04.02.2.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	80	80	80	40	50%	50%	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	100%	100%	99%	99	100%	100%	100
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	120 lap	200 lap	120 laporan	119	99	198 lap	198 lap	100
										100
		Nilai SAKIP	78	73,38	75	75,86	101,14	76	76	100
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	75	75	75	100	133	50	50	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	5 dok	100

5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 lap	4 laporan	4 laporan	100	4 lap	4 lap	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan BKPSDM	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 ob	42 ob	42 o/b	38 ob	90	42 ob	42 ob	100
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dok	60 dok	52 dok	21 dok	40	125 dok	125 dok	100
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100	3 dok	3 dok	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100
5.03.01.2.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	5 lap	5 lap	5 Laporan	5 Laporan	100	5 lap	5 lap	100
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Milik Daerah pada SKPD	36 lap	36 lap	3 lap	3 lap	100	36 lap	36 lap	100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian BKPSDM	Rata-rata capaian SKP	baik	baik	baik	baik	100	baik	baik	100
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 org	1 org	1 orang	1 orang	100	2 org	2 org	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum BKPSDM	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 Paket	100	7 paket	7 paket	100

5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan	10 lap	10 Laporan	13 Laporan	130	10 Laporan	10 Laporan	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 lap	5 Laporan	7 Laporan	140	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dok		3 dok	3 dok	100	3 dok	3 dok	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	10 unit	-	-	-	-	-	100
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	100
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	27 laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	27 Laporan	27 Laporan	100
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	3 Laporan	60	5 Laporan	5 Laporan	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	11%	10%	10%	50 %	500%	10%	10%	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100

5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	23 unit	21 unit	91	23 unit	23 unit	100
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu :

1. Program yang memenuhi target kinerja adalah Program Kepegawaian Daerah yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan Sebagai Berikut :
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan

Pemenuhan target tersebut juga dibuktikan dengan telah diberikan kenaikan pangkat kepada 1.073 orang PNS, pemberian cuti kepada 466 PNS, pelayanan KARIS KARSU kepada 161 PNS, fasilitasi pengurusan pensiun sebanyak 443 PNS, fasilitasi pelaksanaan diklat sebanyak 220 PNS, Fasilitasi Pengadaan PPPK sebanyak 192 org untuk formasi Tahun 2022 dan 283 orang untuk formasi Tahun 2023, pelaksanaan QAP sebanyak 164 ASN, memberikan tugas belajar kepada 2 orang PNS serta melakukan Fit n Proper test untuk mutasi ke Purbalingga sebanyak 23 PNS.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum BKPSDM Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik.. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, dapat kami uraikan analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Adapun capaian indikator pada tahun 2023 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
REKAPITULASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN			73,78	76	78	80	70,34	73,83	80	81	
2	Indeks Penerapan Merit System			-	0,22	0,50	0,55	0,45	0,63	0,55	0,64	
3	Nilai SAKIP BKPSDM				69,20	69,32	76	73,76	75,86	76	78	
4	Indeks Kualifikasi merit sistem , aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			-	0,06	0,1	0,14	0,12	0,16	0,14	0,17	
5	Indeks Kualifikasi merit sistem, aspek mutasi, rotasi, promosi			-	0,02	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	
6	Indeks Kinerja merit sistem, aspek manajemen kinerja dan Indeks Disiplin, aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			-	0,07	0,13	0,16	0,15	0,19	0,16	0,19	
7	Indeks Kompetensi merit sistem, aspek pengembangan karir			-	0,07	0,12	0,09	0,14	0,21	0,09	0,22	

8	Jumlah nilai merit sistem aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			-	28	44	57	66,5	67	57	67	
9	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi			-	11	17	22	20	26	22	28	
10	Jumlah Nilai merit system aspek pengembangan karir			-	32	51	64	32,5	77	64	77	
11	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			-	37	58	74	61	87	74	88	

Dari table di atas dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Th 2023

Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk Tahun 2023 belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Belum maksimalnya pengukuran pada dimensi pengembangan dan kinerja
- b. Belum terintegrasinya system pelayanan kepegawaian
- c. Banyaknya PNS jabatan pelaksana yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi
- d. Kurangnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikannya

Untuk mendukung pencapaian peningkatan IP ASN Tahun 2025 berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis yang sudah dilakukan yaitu :

- a. Memaksimalkan pengukuran dimensi kinerja dengan menginput nilai SKP semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pengaplikasian e kinerja BKN
- b. Membuat surat permintaan data pengembangan kompetensi secara berkala kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja

2. Penerapan Merit Sistem

Nilai Indeks Implementasi Merit Sistem untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Purbalingga Tahun 2021-2026 tetapi masih kendala antara lain:

- a. Belum tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan;
- b. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian;
- c. Belum melaksanakan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
- d. Belum optimalnya system layanan administrasi kepegawaian secara lengkap untuk memudahkan pegawai;
- e. Pembangunan Manajemen Talenta yang belum maksimal.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi BKPSDM

Berikut beberapa isu strategis yang menjadi focus BKPSDM dalam Renja 2025 yaitu untuk memenuhi pencapaian IP ASN dan Penilaian Merit system adalah

1. Diterbitkannya UU nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebabkan adanya beberapa perubahan ketentuan kepegawaian;

2. Pemenuhan dimensi Pengembangan kompetensi yang antara lain pejabat structural yang belum mengikuti diklat PIM;
3. Belum semua ASN memenuhi pengembangan kompetensi 20 Jam pelajaran tiap tahun;
4. Belum optimalnya Manajemen ASN berbasis merit sistem;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk BKPSDM, Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025. Pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, anggaran belanja yang dialokasi untuk BKPSDM Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.7.009.648.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan, Sedangkan rencana anggaran belanja BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp. 7.009.648.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan Secara rinci review terhadap RKPD tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03	Urusan Kepegawaian				7.009.648.000	Urusan Kepegawaian				7.009.648.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.689.863.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.689.863.000
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.500.000
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.302.926.000	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.302.926.000

5.03.01.2.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 OB	5.220.339.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 OB	5.220.339.000
5.03.01.2.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	45.000.000
5.03.01.2.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	37.587..000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	37.587..000
5.03.01.2.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	2.000.000
5.03.01.2.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	2.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	10.000.000

5.03.01.2. 2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	10.000.000
5.03.01.2. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	45.521.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	45.521.000
5.03.01.2. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.627.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.627.000
5.03.01.2.2 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.124.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.124.000
5.03.01.2. 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	1.000.000
5.03.01.2. 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	3.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	3.250.000
5.03.01.2. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6.120.000

5.03.01.2.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	2.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	2.400.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500.000
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	200.264.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	210.264.000
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	139.953.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	139.953.000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.396.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.396.000

5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	115.652.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	115.652.000
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	105.652.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	105.652.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.000.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
5.03	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000
5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,10	1.274.785.000	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi	0,10	1.274.785.000
			Indeks Kualifikasi merit system, aspek mutasi, rotasi, promosi	0,04				Indeks Kualifikasi	0,04	

			Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,13				Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin	0,13	
			Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,12				Indeks Kompetensi	0,12	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	222.600.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	222.600.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300 dok	207.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300 dok	207.000.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dok	8.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dok	8.000.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	7.600.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	7.600.000

5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	360.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	360.000.000
5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200	185.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200	185.000.000
5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dok	25.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dok	25.000.000
5.03.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	150.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	150.000.000
5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	568.885.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	568.885.000
5.03.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	38.150.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	38.150.000
5.03.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dok	68.000.000	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dok	68.000.000
5.03.02.2. 03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	42.873.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	42.873.000

5.03.02.2. 03.0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	300 Dok	404.038.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	300 Dok	404.038.000
5.03.02.2. 03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	398 Laporan	824.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	398 Laporan	824.000
5.03.02.2. 03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	15.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	15.000.000
5.03.02.2. 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	123.300.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	123.300.000
5.03.02.2. 04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen	25.000.000
5.03.02.2. 04.0004	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	73.000.000	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	73.000.000
5.03.02.2. 04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20.300.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20.300.000

5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	5.000.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	5.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			55.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			55.000.000
5.04.02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	55.000.000	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	55.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	55.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	55.000.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 laporan	55.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100laporan	55.000.000

Dari Tabel diatas rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Program dan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga tidak ada yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BKPSDM, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BKPSDM maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

**Tabel 3.1 :
Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB :**

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenpan RB	Permasalahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Smart ASN	Kurang optimalnya Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Masih belum adanya pola karier yang jelas	Rencana pengadaan/ pelaksanaan berbagai macam Bimbingan Teknis bagi ASN
2.	memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Kurang optimalnya Kinerja ASN	Selain SKP, ukuran keberhasilan kinerja ASN belum sepenuhnya terukur	Adanya E-Kinerja memungkinkan terukurnya Kinerja ASN pada saatnya nanti
3.	memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Pembangunan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dilakukan melalui misi ke-1, yaitu : " *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional,*

Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, sehingga mampu memberikan Pelayanan secara Prima kepada Masyarakat” Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP), Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan, Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung *reward and punishment*.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, BKPSDM menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM , yaitu : ***"Meningkatkan profesionalitas ASN"*** dengan indikator kinerja, yaitu Angka Indeks Profesionalitas ASN.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu : ***Penerapan Merit Sistem dengan indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dengan indikator Nilai SAKIP BKPSDM***

Strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu 1 tahun mendatang.

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan & pengadaan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun;

Untuk melakukan penyusunan kebutuhan formasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara tepat dan akurat perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi bezetting.

2. Promosi, Mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan;

Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN diarahkan untuk mencapai kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai ASN dalam melaksanakan tugas / jabatan sehingga dapat memenuhi prinsip *the right man on the right place*.

3. Manajemen Kinerja secara terukur;

Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022

4. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian;

Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya aparatur yang profesional agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dengan dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan penerapan layanan *paperless* akan sangat mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian.

5. Perlindungan pegawai;

Perlindungan kepada PNS dalam hal ini adalah dengan pemberian TASPEN, KARIS/KARSU.

6. Pengembangan karir yang jelas;

Untuk mendukung pengembangan karir ASN, perlu diupayakan peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dari masing-masing pegawai ASN.

7. Penggajian, penghargaan dan disiplin ASN.

8. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.

PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus memiliki disiplin, loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan

tugasnya. Untuk mewujudkan loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu didukung dengan pemberian reward dan punishment.

➤ **Arah Kebijakan BKPSDM**

Merujuk pada strategi tersebut diatas, BKPSDM Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK;
2. Promosi, mutasi dan rotasi sesuai obyektif;
3. Penerapan target kinerja, Evaluasi kinerja berkala, Promosi, mutasi, diklat;
4. Penyediaan sistem pendukung, E-kinerja, e-performance, e-office, SIMPEG;
5. Program perlindungan : Taspen dan Karis/Karsu, Layanan Pegawai : KGB & KP;
6. Kebijakan dan program BKPSDM : Talent pool dan Gap kompetensi;
7. Penggajian berbasis kinerja : berdasar pd peta jabatan dan kelas jabatan, Penghargaan : ASN berintegritas, satyalencana.
8. Peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM sesuai yang ditargetkan.

➤ **Prioritas BKPSDM**

Prioritas daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;

Sebaik apapun kualitas aparatur tanpa didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan mencapai suatu tingkatan kinerja yang optimal. Sebagai konsekuensinya dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai dalam arti agar menghasilkan kinerja yang optimal maka diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan aspek prioritas disamping upaya peningkatan aspek kuantitas, mengingat dinamika dan

perubahan masyarakat yang perkembangannya semakin cepat sebagai dampak langsung dari percepatan era informasi dan globalisasi. Di sisi lain aspek kualitas juga sangat memerlukan adanya peningkatan profesionalisme, tanggungjawab, kejujuran, dan keadilan dalam rangka membentuk pegawai yang responsif, transparan dan akuntabel.

3. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

Dalam manajemen kepegawaian, aspek administrasi merupakan aspek penentu dari proses manajemen. Oleh karena itu tertib administrasi menjadi suatu keharusan bagi terwujudnya kelancaran dalam proses manajemen kepegawaian.

4. Penyediaan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat.

Ketersediaan informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam rangka membuat kebijakan yang efektif, baik tepat dalam hal waktu, jenis informasi ataupun sumbernya.

Untuk lebih jelasnya gambaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Jangka Menengah BKPSDM tersaji dalam matrik dibawah ini

Tabel 3.2 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BKPSDM TH 2025

VISI (RPJMD) : Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang berdaya saing, Sejahtera dan Berakhlak Mulia			
MISI 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
TUJUAN (RPJMD) : Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik			
SASARAN (RPJMD) : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan profesionalitas ASN	1. Penerapan Merit system	1. Perencanaan kebutuhan & pengadaan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun	Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK
		2. Promosi, Mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan.	Promosi, mutasi dan rotasi scr obyektif
		3. Manajemen Kinerja secara terukur	1. Penerapan target kinerja 2. Evaluasi kinerja berkala 3. Promosi, mutasi, diklat
		4. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Penyediaan sistem pendukung 2. E-kinerja, e-performance, e-office 3. SIMPEG
		5. Perlindungan pegawai	1. Program perlindungan : Taspen dan Karis/Karsu 2. Layanan Pegaai : KGB & KP
		6. Pengembangan karir yang jelas	Kebijakan dan program BKPSDM : - Talent pool - Gap kompetensi
		7. Penggajian, penghargaan dan disiplin ASN	1. Penggajian berbasis kinerja : berdasar pd peta jabatan dan kelas jabatan

			2. Penghargaan : ASN berintegritas, satyalencana
	2.Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM sesuai yang ditargetkan

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

1) Keterkaitan dengan RKPD 2024

Dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 Terdapat 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu

1. Peningkatan Kualitas Manusia
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Penguatan Desa
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

Keterkaitan BKPSDM dengan Rancangan RKPD Tahun 2024 adalah Program Prioritas Kabupaten Yang ke 3 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik yang Salah Satu Strategi Intervensinya Yaitu Pembaharuan terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi Dengan demikian focus BKPSDM dalam penyusunan Renja 2024 adalah Optimalisasi Tujuan dan Sasaran BKPSDM dalam hal ini Nilai IP ASN dan Nilai Sistem Merit dengan isu strategis Antara lain Optimalisasi Tiap dimensi dalam pemenuhan IP ASN, kebutuhan ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Integrasi Sistem Kepegawaian

2) Jumlah program dan jumlah kegiatan

Renja 2024 terdapat 3 Program dan 13 Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- b. Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh 4 bidang dengan perincian :
 - Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi oleh Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN oleh Bidang Mutasi dan Promosi

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN oleh bidang pengembangan kompetensi Aparatur
 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur oleh bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- c. Program Pengembangan SDM terdiri dari Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

c. rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Program

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:

4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

4.1.1.2. Program Kepegawaian Daerah;

4.1.1.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.1.2. Kegiatan

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Kepegawaian Daerah :**

- a. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN;
- b. Mutasi dan Promosi ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN;

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2023 tersaji dalam matrik di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				7.009.648.000,00	7.320.202.000,00	6.947.739.000,00	-372.463.000,00					7.709.906.600,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.009.648.000,00	7.320.202.000,00	6.947.739.000,00	-61.909.000,00					7.709.906.600,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN				6.954.648.000,00	7.265.202.000,00	6.909.309.000,00	-45.339.000,00					7.649.406.600,00	
1,	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	5.679.863.000,00	5.882.417.000,00	5.754.217.000,00	578.982.300,00					6.258.845.300,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan dan Persentase dokumen laporan disusun	100 %	100 %	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00			BKPSDM		3.850.000,00	
	5.03.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	490.000,00	-1.010.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.650.000,00
	5.03.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.260.000,00	-740.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.200.000,00
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan</i>	100 %	100 %	5.302.926.000,00	5.505.480.000,00	5.389.933.000,00	87.007.000,00			BKPSDM		5.833.217.000,00
	5.03.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	38 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	5.220.339.000,00	5.422.893.000,00	5.330.673.000,00	110.334.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.742.372.000,00
	5.03.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	30 Dokumen	30 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			49.500.000,00
	5.03.01.2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	37.587.000,00	37.587.000,00	36.760.000,00	-827.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			41.345.000,00

	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD</i>	12 bulan	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00	1.900.000,00			BKPSDM		2.200.000,00
	5.03.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.200.000,00
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			BKPSDM		11.000.000,00
	5.03.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</i>	12 bulan	12 bulan	35.521.000,00	35.521.000,00	27.108.000,00	-8.413.000,00			BKPSDM		50.072.000,00
	5.03.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.789.000,00
	5.03.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	7 Paket	21.124.000,00	21.124.000,00	14.182.000,00	-6.942.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			23.236.000,00
	5.03.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.140.000,00	140.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000,00
	5.03.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	10 Laporan	10 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.575.000,00
	5.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan	6 Laporan	6.120.000,00	6.120.000,00	3.309.000,00	-2.811.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.732.000,00
	5.03.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.640.000,00

	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase tercukupinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	100 %	500.000,00	500.000,00	6.850.000,00	6.350.000,00			BKPSDM		550.000,00
	5.03.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	500.000,00	500.000,00	6.850.000,00	6.350.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000,00
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	12 bulan	209.764.000,00	209.764.000,00	172.291.000,00	-37.473.000,00			BKPSDM		230.739.300,00
	5.03.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	20 Laporan	20 Laporan	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			456.000,00
	5.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	139.953.000,00	139.953.000,00	101.820.000,00	-38.133.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			153.948.300,00
	5.03.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	3 Laporan	69.396.000,00	69.396.000,00	70.056.000,00	660.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			76.335.000,00

	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	12 bulan	12 bulan	115.652.000,00	115.652.000,00	142.385.000,00	26.733.000,00			BKPSDM		127.217.000,00
	5.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	21 Unit	21 Unit	105.652.000,00	105.652.000,00	131.020.000,00	25.368.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			116.217.000,00
	5.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.730.000,00	730.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.500.000,00
	5.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.635.000,00	635.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.500.000,00
2,	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi Indeks kinerja dan disiplin Indeks kompetensi	0,20 0,06 0,16 0,17 angka angka angka	0,17 0,06 0,16 0,20 angka angka angka	1.274.785.000,00	1.382.785.000,00	1.155.092.000,00	115.776.300,00					1.390.561.300,00

	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah nilai merit sistem aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	69 angka	69 angka	222.600.000,00	222.600.000,00	283.153.000,00	60.553.000,00			ASN Kabupaten Purbalingga		244.160.000,00
	5.03.02.2.01.00 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	5 Dokumen	0,00	0,00	194.513.000,00	194.513.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	5.03.02.2.01.00 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK												
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50 Dokumen	50 Dokumen	207.000.000,00	207.000.000,00	80.341.000,00	-126.659.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			227.000.000,00
	5.03.02.2.01.00 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian												
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	400 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.709.000,00	-3.291.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.800.000,00
	5.03.02.2.01.00 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen	100 Dokumen	7.600.000,00	7.600.000,00	3.590.000,00	-4.010.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.360.000,00

	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Nilai merit sistem aspek mutasi, rotasi, promosi	27 angka	27 angka	360.000.000,00	468.000.000,00	375.974.000,00	15.974.000,00			ASN Kabupaten Purbalingga		385.000.000,00
	5.03.02.2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	146.974.000,00	-38.026.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			192.500.000,00
	5.03.02.2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	800 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.500.000,00
	5.03.02.2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	40 Dokumen	40 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	216.500.000,00	66.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Nilai merit sistem aspek pengembangan karir	79 angka	79 angka	568.885.000,00	568.885.000,00	403.638.000,00	-165.247.000,00			ASN Kabupaten Purbalingga		625.771.300,00
	5.03.02.2.03.00 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN												

			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	100 Orang	100 Orang	38.150.000,00	38.150.000,00	12.630.000,00	-25.520.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			41.965.000,00
	5.03.02.2.03.00 02	Pengelolaan Assessment Center												
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	30 Dokumen	30 Dokumen	68.000.000,00	68.000.000,00	59.025.000,00	-8.975.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			74.800.000,00
	5.03.02.2.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>	8 Orang	6 Orang	42.873.000,00	42.873.000,00	1.000.000,00	-41.873.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			47.160.300,00
	5.03.02.2.03.00 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>	20 Dokumen	18 Dokumen	404.038.000,00	404.038.000,00	328.901.000,00	-75.137.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			444.440.000,00
	5.03.02.2.03.00 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN												
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	20 Laporan	20 Laporan	824.000,00	824.000,00	487.000,00	-337.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			906.000,00
	5.03.02.2.03.00 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN												

			<i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina</i>	50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	1.595.000,00	-13.405.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16.500.000,00
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah nilai merit sistem aspek manajemen kinerja penggajian, penghargaan dan disiplin perlindungan</i>	90 angka	90 angka	123.300.000,00	123.300.000,00	92.327.000,00	-30.973.000,00			ASN Kabupaten Purbalingga		135.630.000,00
	5.03.02.2.04.00 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	9.020.000,00	-15.980.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.500.000,00
	5.03.02.2.04.00 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai												
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	6 Orang	6 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	69.865.000,00	-3.135.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.300.000,00
	5.03.02.2.04.00 07	Pembinaan Disiplin ASN												
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>	10 Orang	10 Orang	20.300.000,00	20.300.000,00	10.582.000,00	-9.718.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			22.330.000,00
	5.03.02.2.04.00 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai												

			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>	20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.860.000,00	-2.140.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.500.000,00
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				55.000.000,00	55.000.000,00	38.430.000,00	-16.570.000,00					60.500.000,00
1,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	90 persen	90 persen	55.000.000,00	55.000.000,00	38.430.000,00	5.500.000,00					60.500.000,00
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS</i>	100 persen	100 persen	55.000.000,00	55.000.000,00	38.430.000,00	-16.570.000,00			BKPSDM		60.500.000,00
	5.04.02.2.02.00 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	100 Laporan	100 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	38.430.000,00	-16.570.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.500.000,00
	J U M L A H					7.009.648.000,00	7.320.202.000,00	6.947.739.000,00	7.745.136.000,00					7.709.906.600,00

BAB V

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga tahun 2025, seluruh pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2025 merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan
3. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2025 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2025 tersebut

dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai tata kelola pemerintahan dan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara segera dapat terwujud.

Pubalingga, Juli 2025

Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purbalingga

Drs. Bambang Widjonarko, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690108 198803 1 001



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Rancangan Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Purbalingga, Juli 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ir. PRAYITNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680629 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1 Program Utama	54
4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	54
4.3 Alokasi Anggaran	55
BAB V : PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian, RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Rencana Kerja (Ranhir) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 juga didasarkan dan mengacu pada kebijakan pembangunan tahapan lima tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Renja Tahun 2025 ini diharapkan akan dapat mengantisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3.1 Maksud

- 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana Alam, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2024 dapat tercapai.
- 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Seksi-Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat dua (2) program dan sembilan (9) kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) sampai dengan triwulan IV periode Oktober s.d. Desember 2022 berdasarkan target indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya kekurangan anggaran pada sejumlah kegiatan.
2. Perubahan anggaran tersebut sangat mendasar sehingga berpengaruh pada capaian program dan kegiatan, sehingga perlu untuk segera dilakukan penyesuaian / perubahan rencana kinerja.
3. Perubahan kegiatan sebagai berikut :

Atas perubahan anggaran keuangan secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih +/-
		(Rp.)	(Rp.)	Rp.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.971.904.000	3.787.829.000	(184.075.000)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.460.731.000	3.116.075.000	(344.656.000)
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.565.000	4.565.000	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000	2.490.000	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000	2.075.000	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.522.189.000	2.038.899.000	(483.290.000)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.416.004.000	1.906.264.000	(509.740.000)

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.803.000	94.803.000	20.000.000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.382.000	37.832.000	6.450.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3.900.000	3.900.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3.900.000	3.900.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.150.000	4.150.000	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.150.000	4.150.000	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.525.000	19.125.000	3.600.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.207.000	1.207.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.093.000	8.093.000	-
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.150.000	4.150.000	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.075.000	2.075.000	-
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3.600.000	3.600.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000	118.180.000	33.180.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	118.180.000	33.180.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	610.164.000	613.914.000	3.750.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	830.000	830.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.284.000	54.284.000	-
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.050.000	3.200.000	1.150.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	553.000.000	555.600.000	2.600.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.138.000	313.342.000	94.204.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.278.000	264.108.000	75.830.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.860.000	49.234.000	18.374.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	511.173.000	671.754.000	160.581.000
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	108.920.000	208.920.000	100.000.000
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	100.000.000	100.000.000

2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	108.920.000	108.920.000	-
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.723.000	118.223.000	16.500.000
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	22.241.000	22.241.000	-
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota	31.735.000	48.235.000	16.500.000
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.017.000	6.017.000	-
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	18.790.000	18.790.000	-
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22.940.000	22.940.000	-
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.530.000	344.611.000	44.081.000
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	193.406.000	108.276.000	(85.130.000)
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.962.000	10.962.000	-
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	62.912.000	192.123.000	129.211.000
4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	33.250.000	33.250.000	-
		3.971.904.000	3.787.829.000	(184.075.000)

4. Realisasi keuangan atas perubahan anggaran keuangan secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
		(Rp.)	(Rp.)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.971.904.000	3.787.829.000	95,81
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.460.731.000	3.116.075.000	97,51
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.565.000	4.565.000	97,50
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000	2.490.000	96,91

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000	2.075.000	98,22
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.522.189.000	2.038.899.000	97,49
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.416.004.000	1.906.264.000	97,32
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.803.000	94.803.000	99,95
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.382.000	37.832.000	99,60
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3.900.000	100,00
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3.900.000	100,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.150.000	4.150.000	71,81
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.150.000	4.150.000	71,81
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.525.000	19.125.000	98,66
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.207.000	1.207.000	99,50
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.093.000	8.093.000	96,97
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.150.000	4.150.000	99,91
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.075.000	2.075.000	100,00
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3.600.000	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000	118.180.000	99,65
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	118.180.000	99,65
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	610.164.000	613.914.000	96,12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	830.000	830.000	69,94
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.284.000	54.284.000	82,36
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.050.000	3.200.000	96,68
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	553.000.000	555.600.000	97,51
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.138.000	313.342.000	99,81
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.278.000	264.108.000	99,91
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.860.000	49.234.000	99,28
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	511.173.000	671.754.000	87,90
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	108.920.000	208.920.000	99,89

1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	100.000.000	99,98
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	108.920.000	108.920.000	99,82
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.723.000	118.223.000	95,40
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	22.241.000	22.241.000	87,58
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota	31.735.000	48.235.000	96,83
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.017.000	6.017.000	98,99
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	18.790.000	18.790.000	98,15
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22.940.000	22.940.000	96,80
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.530.000	344.611.000	78,06
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	193.406.000	108.276.000	85,98
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.962.000	10.962.000	99,79
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	62.912.000	192.123.000	72,48
4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	33.250.000	33.250.000	77,41

5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Dalam pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga selalu menggunakan prinsip Akuntabilitas dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan untuk tahun Anggaran 2023 adalah untuk peningkatan kapabilitas SDM personil kebencanaan dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan badan usaha sebagai penanggung jawab bersama urusan penanggulangan bencana.

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rensta Perangkat Daerah

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, implikasi yang timbul adalah:

- a. Belum optimalnya penggunaan peralatan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Belum ada peningkatan Desa Tangguh Bencana yang terbentuk.
- c. Belum optimalnya penanganan darurat bencana.

7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Mengoptimalkan penggunaan peralatan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Meningkatkan jumlah Desa dan Masyarakat yang tangguh bencana.
- c. Meningkatkan penanganan darurat bencana.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dearah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2..01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	5	2	1	1	100%		3	60%

1.05.01.2..01.07		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1.05.01.2..01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	30	5	5	5	100%	10	20	67%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	12	2	2	100%	1	15	50%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	130	52	12	12	100%	12	76	58%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan*)	130	27	13	13	100%	15	55	42%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	24	12	12	100%	12	48	80%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan barang dan pengurus barang		34					34	0%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5		1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	100		6	6	100%		6	6%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100		6	6	100%	5	11	11%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	185	74	37	37	100%		111	60%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	185	74	37	37	100%	10	121	65%

5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	72	24	12	12	100%		36	50%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	1	12	12	100%	1	14	93%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	1	1	1	100%	1	3	60%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	60	14	12	12	100%		26	43%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1	12	12	100%	1	14	280%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4		1	1	100%	1	2	50%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedian ya pengadaa n peralatan dan mesin	21	0	6	6	100%	0	6	29%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	60	24	12	12	100%		36	60%

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	60	24	12	12	100%		36	60%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	2	1	1	100%	1	4	80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	60	24	12	12	100%		36	60%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	72	24	12	12	100%		36	50%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	150	42	20	20	100%		62	41%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	150	42	20	20	100%	24	86	57%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	76	14	12	12	100%		26	34%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			49	49	100%	15	64	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	72	9	1	1	100%		10	14%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	72	9	1	1	100%	1	11	15%
5.02.02	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.02.02.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	1	0	1	1	100%		1	100%
5.02.02.2.01.02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		0	100	100	100%	200	300	0%
5.02.02.2.02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.02.05	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	1000	200					200	20%
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			200	200	100%	240	440	100%
5.02.02.2.02.06	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat kan layanan pusdalop s penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	510	200	4	4	100%		204	40%

		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5.02.02.2.02.07	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	500	200	29	29	100%	21	250	50%
5.02.02.2.02.11	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang mendapatkan pelatihan	500	0	100	100	100%		100	20%
		Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	500		100	100	100%	70	170	34%
5.02.02.2.03.02	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warganegara yang ikut pelatihan	700	0	85	85	100%	168	253	36%
5.02.02.2.04	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.04.09	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	12	12	12	100%		24	

		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15		5	5	100%	1	6	40%
5.02.03.2.01.01	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	Presentas e jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuas i terhadap kejadian bencana	100%		1	1	100%		1	100%
		Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	500		100	100	100%	50	150	30%
5.02.03.2.01.02	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	Presentase logistik penyelam atan dan evakuasi kerban bencana Kab/Kota	100%	100	100	100	100%			
		Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	100	100%	50	150	0%
5.02.03.2.01.03	Aktivasi sistem komando penangan an darurat bencana	presentase jumlah petugas yang aktif dalam penangan an darurat bencana	100%		100	100	100%		100	
		Jumlah Laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota			3	3	100%	1	4	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30.

T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Tujuan / Sasaran/Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 (perkiraan)	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Presentase ketahanan daerah dalam menghadapi bencana		0,51	0,51	0,51	0,53	0,54	0,51	0,52	0,54	0,55	
		Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		40	42	40	45	47	44	NA	47	NA	
		Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Melakukan koordinasi antara BPBD Kabupaten Purbalingga dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah agar ada keselarasan dalam hal program pembangunan dan penanggulangan bencana melalui pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi terkait kebencanaan, pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana, penanganan darurat bencana, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPBD Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan BPBD Kabupaten Purbalingga terutama pada mitigasi bencana, diantaranya:

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mitigasi bencana belum optimal	1. Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai	1. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana 2. Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
		2. Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana	1. Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana 2. Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau 3. Sumber daya aparatur yang terbatas 4. Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka BPBD Kabupaten Purbalingga berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purbalingga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:

1) Kekuatan:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) yang telah mengatur tentang pembentukan BPBD, pelaksanaan Pencegahan

kesiapsiagaan dan logistik bencana maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

- Adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD Kabupaten Purbalingga dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal..

2) Kelemahan:

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana.
- Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana.
- Sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana terbatas.

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang

- Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- Pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Purbalingga.
- Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Pembuatan dokumen rencana kontijensi
- Penanganan keadaan darurat yang responsif.
- Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan

Tingkat risiko bencana Kabupaten Purbalingga didapat dengan menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu daerah terhadap suatu bencana tertentu.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga :

- a) Kabupaten Purbalingga memiliki 1 Gunung yang masih aktif yaitu Gunung Slamet.
- b) Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi secara mendadak yang sering mengakibatkan terjadinya lonsor, banjir dan angin kencang / puting beliung.
- c) Masih terdampaknya kekeringan di 5 Kecamatan 11 Desa (data kejadian tahun 2022).
- d) Peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwasanya Rencana Kinerja Tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

NO.	Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.056.233.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.083.493.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.826.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.652.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	996.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.992.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	830.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.660.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.166.240.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.162.510.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Perbulan	2.084.374.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Perbulan	2.056.917.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.921.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	67.843.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	35.945.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	37.750.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.900.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.900.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.900.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.590.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.379.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2.590.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	19.379.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24.663.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24.961.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.461.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	966.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.778.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.075.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.324.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.320.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purbalingga			0					2.500.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				561.845.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				614.571.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	664.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	664.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.857.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.857.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.050.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	522.324.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	553.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.169.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.020.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	269.740.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	210.579.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6.538.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.891.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.441.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				416.921.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				523.766.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga			34.558.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga			37.136.000	

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	34.558.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	37.136.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				206.868.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				308.348.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	7 Unit	4.959.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	21 Unit	4.814.000,00	

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	25 Orang	17.134.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	70 Orang	18.352.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	10.011.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	15.032.000	

	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	20.150.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	36.150.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	31.770.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	28.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	122.844.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan	206.000.000	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				166.145.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				178.282.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	8.228.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	19.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	78.955.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	69.770.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	71.612.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	62.912.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	7.350.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	26.600.000	

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				9.350.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	9.350.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	
Jumlah					3.473.154.000					3.607.259.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Perbulan	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Purbalingga			
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Purbalingga	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah		
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100	

1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab Purbalingga	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab Purbalingga	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	21 Unit	

2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab Purbalingga	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	70 Orang	
3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	
4	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	

5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	
6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	240	
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab Purbalingga	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	

2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab Purbalingga	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	
4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab Purbalingga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Rencana aksi nasional merupakan penjabaran Renas PB 2018-2023 secara operasional dari program, fokus prioritas, sasaran dan indikator. Rencana aksi ini sudah merupakan komitmen K/L dan non-K/L terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian rencana aksi baru dapat menjadi sebuah dokumen final setelah dilakukannya renstra K/L yang memunculkan indikator.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Dalam pembuatan perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang paling dapat dikaitkan dengan SPPN adalah perencanaan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini kemudian mewujudkan dalam bentuk Renas PB dan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain:

1. Rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
2. Di tingkat nasional, rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi

unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

3. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi dari berbagai aspek dan tahapan penanggulangan bencana terus dilakukan secara sistematis dan holistik oleh BNPB sebagai pemegang utama mandat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini juga tidak terlepas dalam upaya penyusunan Renas PB 2018-2023 beserta dengan rencana aksi sebagai acuan implementasi bagi berbagai Kementerian / Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan hal ini, pendekatan dan landasan dasar dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan Renas Penanggulangan Bencana.
2. Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta Kementerian / Lembaga terkait (37 K/L), dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta Planas PRB.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap prabencana, saat

tanggap darurat dan pascabencana. Arahan dan prioritas nasional sebagaimana ditegaskan pada RPJMN 2018-2023, pengkajian beragam dokumen seperti RPJMN 2009-2014, Renas PB 2010-2014, dan Rencana Aksi Nasional (RAN PRB) 2010-2012, serta memperhatikan capaian 5 (lima) tahun terakhir tentang penanggulangan bencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka fokus prioritas disusun dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Adapun sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2018-2023. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, dan sasaran penanggulangan bencana yang termuat dalam Renas PB 2018-2023 adalah sebagai berikut:

KETERKAITAN PROGRAM, FOKUS PRIORITAS DAN SASARAN PB

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
Penanggulangan Bencana	1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
	2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah
		3) Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana
	3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	4) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dankemandirian daerah
		5) Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
	4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	6) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana
	5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	7) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
	6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
		9) Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
	7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana	10) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah sesuai dengan kewenangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan indikator sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya pemetaan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana Indonesia
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Niai Kematangan Perangkat Daerah

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya pemetaan resiko bencana	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP BPBD	Nilai Sakip BPBD

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2025 BPBD Kabupaten Purbalingga merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota.
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di tabel berikut:

Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
		2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam kurun waktu satu tahun. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pelaksana OPD	72
2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,57

4.3 Alokasi Anggaran

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2025.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanah Bumbu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N+1)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+2)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purbalingga	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100	3.056.233.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	3.797.820.000
							Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sesuai ketentuan	100				100	

							Persentase Pemenuhan Layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100				100	
							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100				100	
							Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100				100	
							Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100				100	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	1.826.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	20.000.000
							Persentase Dokumen Laporan yang disusun	100				100	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	996.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	830.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100	2.166.240.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	2.535.000.000
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Perbulan	2.084.374.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15 Orang / Perbulan	2.354.000.000
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.921.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	170.000.000
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	35.945.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	11.000.000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah	100	3.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	2.600.000
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.600.000

1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pegawai yang mengikuti pelatihan	100	2.590.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	80.000.000
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2.590.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Orang	80.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100	24.663.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	273.720.000
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.461.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Paket	6.000.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.778.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Paket	250.000.000
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.324.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.320.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.000.000

1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.400.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Kebutuhan Jasa kantor yang tersedia	100	561.845.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	640.500.000
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	664.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.500.000

1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.857.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	70.000.000
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	14.000.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	522.324.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	553.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100	295.169.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	246.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	269.740.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		24 Unit	160.000.000
1	05	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6.538.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15 Unit	26.000.000

1	05	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.891.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	60.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kabupaten Purbalingga	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	100	416.921.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	3.471.644.000
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	34.558.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	120.000.000
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	34.558.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4000 Orang	120.000.000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	206.868.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	2.135.000.000

1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	7 Unit	4.959.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		21 Unit	45.000.000
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	25 Orang	17.134.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	140.000.000
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	10.011.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	150.000.000

1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	20.150.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.000.000
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	31.770.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.540.000.000
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	122.844.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200 orang	200.000.000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Purbalingga	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	166.145.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	1.216.644.000

1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	8.228.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	78.955.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	291.644.000
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	71.612.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	660.000.000
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	7.350.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	155.000.000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Purbalingga	Terselesaikannya Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	100	9.350.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	

1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	9.350.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0
TOTAL								3.473.154.000			7.269.464.000

BAB V

P E N U T U P

Demikian Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari Pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

Lebih lanjut Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Renja Tahun 2025 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Aamiin.

Purbalingga, Juli 2025

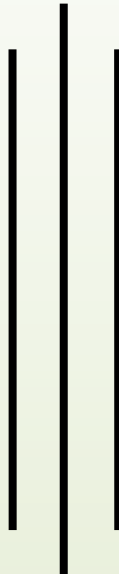
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purbalingga

Ir. PRAYITNO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680629 199003 1 003



RANCANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Tahun 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

RANCANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Tahun 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban bagi setiap satuan unit kerja (Perangkat Daerah) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si

NIP. 19740520 199803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian	23
3.1.3. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan	24
3.2. Tujuan dan Sasaran	24
3.2.1. Tujuan	24
3.2.2. Sasaran	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Untuk mendukung Program Prioritas Kabupaten yaitu Alus Dalane

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Industri, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan kinerja (program dan kegiatan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2025;
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.3.	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif)
BAB V.	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Purbalingga Pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 9 Program 20 kegiatan yang terbagi menjadi 35 Sub Kegiatan dengan Anggaran Perubahan secara keseluruhan adalah sebesar Rp.15.898.086.000,- Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mengalami Penambahan/Perubahan sebesar Rp. 162.326.000,- dari Anggran Efisiensi sebesar Rp.15.735.760.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II untuk rata-rata capaian kinerja seluruh sub kegiatan adalah sebesar 50% dan realisasi kinerja keuangan capaiannya sebesar 41%.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian;
2. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Triwuln II adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Formulir Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
Triwulan I s/d II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
I.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	Persen	90	9.992.000	0	5.136.400	0	0	0	5.136.400	51
01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				4.996.000		2.770.900		0	0	2.770.900	55
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	dok	1	4.996.000	2	2.770.900	2	0	4	2.770.900	55

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
	Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang				4.996.000		2.365.500		0	0	2.365.500	47
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dok	1	4.996.000	1	2.365.500	0	0	1	2.365.500	47
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat layak usaha	Persen	43	2.147.649.000	0	309.467.304		249.863.945	0	559.331.249	26
01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.098.480.000		299.407.304		246.644.945	0	546.052.249	26
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	1	720.000.000	0	2.377.000	0	1.623.500	0	4.000.500	1

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	21	1.378.480.000	21	297.030.304	21	245.021.445	21	542.051.749	39
02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				49.169.000		10.060.000		3.219.000	0	13.279.000	27
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dok	3	49.169.000	3	10.060.000	3	3.219.000	3	13.279.000	27
III.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	Persen	94	2.342.047.000	0	61.996.250		588.975.000	0	650.971.250	28

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				2.321.568.000		58.380.950		588.975.000	0	647.355.950	28
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	lap	1	11.288.000	1	3.556.050	0	0	1	3.556.050	32
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	lap	1	2.310.280.000	1	54.824.900	1	588.975.000	2	643.799.900	28

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				14.485.000		1.205.000		0	0	1.205.000	8
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	lap	1	14.485.000	1	1.205.000	0	0	1	1.205.000	8
03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.994.000		2.410.300		0	0	2.410.300	40
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		1	5.994.000	1	2.410.300	0	0	1	2.410.300	40

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	miliar rupiah	2.278	39.960.000	0	300.000		0	0	300.000	1
01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.960.000		300.000		0	0	300.000	1
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	30	39.960.000	0	300.000	0	0	0	300.000	1
V.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	65	184.152.000	0	47.940.158		18.022.879	0	65.963.037	36
01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				184.152.000		47.940.158		18.022.879	0	65.963.037	36

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	22.000	184.152.000	0	47.940.158	0	18.022.879	0	65.963.037	36
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase Ketersediaan laporan capaian Kinerja	persen	100	11.335.717.000	25	2.672.079.276	25	2.696.128.904	50	5.368.208.180	47
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100		25		25		50	0	
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100		25		25		50	0	
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100		25		25		50	0	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
		Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100		0		100		100	0	
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100		25		25		50	0	
01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan	persen	100	3.300.000		825.400		0	0	825.400	25
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	1.800.000	1	825.400		0	1	825.400	46
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	5	1.500.000	2	0	3	0	5	0	0
02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.022.355.000		1.906.576.232		2.156.983.861	0	4.063.560.093	51
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	64	7.932.364.000	64	1.901.444.282	64	2.156.008.861	64	4.057.453.143	51

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	54.640.000	1	5.131.950		975.000	1	6.106.950	11
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dok	1	35.351.000	1	0		0	1	0	0
03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.331.000		0		0	0	0	0
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	1	2.331.000	0	0		0	0	0	0
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.000.000		0		0	0	0	0

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	2	4.000.000		0		0	0	0	0
04	Kegiatan dministrasi Umum Perangkat Daerah				36.108.000		7.086.000		3.707.000	0	10.793.000	30
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	1.332.000	0	482.000		0	0	482.000	36
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	1	24.652.000	0	6.144.000		2.507.000	0	8.651.000	35
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	1	800.000	1	260.000		0	1	260.000	33

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	6.660.000	1	200.000		1.200.000	1	1.400.000	21
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok	1	2.664.000	0	0		0	0	0	0
07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.353.000		0		4.350.000	0	4.350.000	100
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	4.353.000		0	1	4.350.000	1	4.350.000	100
08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.140.842.000		740.079.644		496.798.043	0	1.236.877.687	39
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	1.165.000		0		0	0	0	0

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	242.564.000	1	38.675.036		33.701.590	1	72.376.626	30
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	1	2.897.113.000	1	701.404.608		463.096.453	1	1.164.501.061	40
09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.428.000		17.512.000		34.290.000	0	51.802.000	42
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	110.768.000	10	17.512.000	10	31.280.000	20	48.792.000	44
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	6.660.000		0	4	3.010.000	4	3.010.000	45

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	5.000.000		0		0	0	0	0
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	275	1.307.542.000	0	98.752.163	0	357.421.297	0	456.173.460	35
01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1.307.542.000		98.752.163		357.421.297	0	456.173.460	35
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dok	1	333.300.000	1	4.296.125	1	122.183.760	2	126.479.885	38

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dok	1	274.242.000	1	85.527.038	1	43.998.537	2	129.525.575	47
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dok	1	700.000.000	1	8.929.000	1	191.239.000	2	200.168.000	29
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	%	88	4.000.000	100	895.000	100	200.000	100	1.095.000	27
01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				4.000.000		895.000		200.000	0	1.095.000	27

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dok	1	4.000.000	1	895.000	1	200.000	2	1.095.000	27
IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	200	4.000.000	520	995.000		895.430	520	1.890.430	47

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Prosen
						TW I (Jan-Mar)		TW II (Apr-Jun)				
1	2	3		4		5		6		(7=5+6)		8
		Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%
01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				4.000.000		995.000		895.430	0	1.890.430	47
3	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dok	1	4.000.000	1	995.000	1	895.430	2	1.890.430	47
JUMLAH TOTAL					17.375.059.000		3.197.561.551		3.911.507.455	0	7.109.069.006	41

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

- a. Program Pengentasan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Daya Saing Pasar Rakyat untuk menghadapi perkembangan Toko Swalayan; Pengendalian Inflasi serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- c. Pengembangan Kawasan terpadu ekonomi, pariwisata dan olahraga di Kawasan GOR Goentoer Darjono dan PFC;
- d. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok;
- e. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
- f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
- g. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
- h. Akses informasi usaha rendah;
- i. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UKM, Usaha Besar dan BUMN);
- j. Kelembagaan yang belum tertata;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian

a. Arah Pembangunan Industri

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

1. Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan swasta;
2. Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3. Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4. Hilirisasi produk pertanian menjadi produk agro industri;
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk produk industri;
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
7. Peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja industri;
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;

9. Penurunan impor;
10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri *intermediate* dan industri hilir;

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah, memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan antara lain

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;

3.2.2. Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;
2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG;
4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan indikator prosentase penggunaan produk dalam negeri;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Purbalingga Pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 9 Program 20 kegiatan yang terbagi menjadi 35 Sub Kegiatan dengan Anggaran Perubahan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.898.086.000,-. Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mengalami Penambahan/Perubahan sebesar Rp. 162.326.000,- dari Anggaran Efisiensi sebesar Rp.15.735.760.000,-. Secara garis besar anggaran perubahan yang mengalami penambahan adalah merupakan pengembalian anggaran yang sebelumnya di anggaran murni, di efisiensi di hilangkan dan kemudian di anggaran perubahan di kembalikan lagi.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 - 9. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 10. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - 11. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 12. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
 - Evaluasi kinerja dan Sosialisasi aplikasi regulasi atas pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - 13. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 14. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
15. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- V. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
16. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- VI. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
17. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
18. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
19. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
- IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
20. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Efisiensi ke 1	Anggaran Perubahan	Tambah/ Kurang	Keterangan
i.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
A	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.992.000	7.247.000	7.247.000	0	
I.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.996.000	3.631.000	3.631.000	0	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.996.000	3.631.000	3.631.000	0	Efisiensi
II.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.996.000	3.616.000	3.616.000	0	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.996.000	3.616.000	3.616.000	0	Efisiensi
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.147.649.000	2.067.535.000	2.637.435.000	569.900.000	
I.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.098.480.000	2.029.533.000	2.499.433.000	469.900.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	720.000.000	686.267.000	1.156.167.000	469.900.000	Berubah / Efisiensi
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.378.480.000	1.343.266.000	1.343.266.000	0	Efisiensi
II.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	49.169.000	38.002.000	138.002.000	100.000.000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	49.169.000	38.002.000	138.002.000	100.000.000	Berubah / Bertambah (Kajian Kelembagaan Pasar Kabupaten)
C	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.342.047.000	922.380.000	872.330.000	-50.050.000	
I.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.321.568.000	906.233.000,	856.183.000	-50.050.000	

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Efisiensi ke 1	Anggaran Perubahan	Tambah/ Kurang	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11.288.000	7.367.000	7.367.000	0	Efisiensi
2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.310.280.000	898.866.000	848.816.000	-50.050.000	Berubah / Efisiensi
II.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	14.485.000	12.165.000	12.165.000	0	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.485.000	12.165.000	12.165.000	0	Efisiensi
III.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.994.000	3.982.000	3.982.000	0	
1	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.994.000	3.982.000	3.982.000	0	Efisiensi
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	39.960.000	24.019.000	1.519.000	-22.500.000	
I.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.960.000	24.019.000	1.519.000	-22.500.000	
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	39.960.000	24.019.000	1.519.000	-22.500.000	Berubah / Efisiensi
E	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	184.152.000	147.557.000	147.557.000	0	
I.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	184.152.000	147.557.000	147.557.000	0	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	184.152.000	147.557.000	147.557.000	0	Efisiensi
ii.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				0	
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.335.717.000	11.287.799.000	10.952.775.000	-335.024.000	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.355.000	1.355.000	0	Efisiensi
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	295.000	295.000	0	Efisiensi
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.022.355.000	7.988.395.000	7.718.271.000	-270.124.000	

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Efisiensi ke 1	Anggaran Perubahan	Tambah/ Kurang	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.932.364.000	7.932.364.000	7.662.240.000	-270.124.000	Berubah / Efisiensi
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.640.000	20.680.000	20.680.000	0	Berubah / Efisiensi
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.351.000	35.351.000	35.351.000	0	Tetap
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.331.000	2.315.000	2.315.000	0	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.331.000	2.315.000	2.315.000	0	Efisiensi
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	Efisiensi
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.108.000	25.816.000	25.816.000	0	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	Tetap
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.652.000	16.392.000	16.392.000	0	Berubah / Efisiensi
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000	800.000	800.000	0	Tetap
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.660.000	4.660.000	4.660.000	0	Berubah / Efisiensi
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.664.000	2.632.000	2.632.000	0	Tetap
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.353.000	4.353.000	4.353.000	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.353.000	4.353.000	4.353.000	0	Tetap
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.140.842.000	3.140.842.000	3.075.942.000	-64.900.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	Tetap
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.564.000	242.564.000	242.564.000	0	Tetap
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.897.113.000	2.897.113.000	2.832.213.000	-64.900.000	Berubah
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.428.000	122.428.000	122.428.000	0	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.768.000	110.768.000	110.768.000	0	Tetap
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000	6.660.000	6.660.000	0	Tetap
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	Tetap
G	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	1.307.542.000	1.273.537.000	1.273.537.000	0	

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Efisiensi ke 1	Anggaran Perubahan	Tambah/ Kurang	Keterangan
	INDUSTRI					
I.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.307.542.000	1.273.537.000	1.273.537.000	0	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	333.300.000	322.806.000	305.072.000	-17.734.000	Berubah / Efisiensi
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	274.242.000	274.242.000	274.242.000	0	Tetap
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	700.000.000	676.489.000	694.223.000	17.734.000	Berubah / Efisiensi
H	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	4.000.000	2.860.000	2.860.000	0	
I.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	2.860.000	2.860.000	0	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	2.860.000	2.860.000	0	Efisiensi
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	4.000.000	2.826.000	2.826.000	0	
I.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	2.826.000	2.826.000	0	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4.000.000	2.826.000	2.826.000	0	Efisiensi
	JUMLAH	17.375.059.000	15.735.760.000	15.898.086.000	162.326.000	

Tabel 4.2
Perubahan Pendapatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No.	Uraian	Target Awal	Target Perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelataran	283.936.000	283.936.000	0	
2	Retribusi Los	1.626.353.000	1.626.353.000	0	
3	Retribusi Kios	1.613.811.000	1.613.811.000	0	
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.826.136.000	1.210.000.000	-616.136.000	Kios Terminal Bukateja (Dipungut Dinhub)
5	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.142.800.000	2.142.800.000	0	
JUMLAH		7.493.036.000	6.876.900.000	-616.136.000	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang telah disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dalam rangka menyesuaikan dengan efisiensi anggaran, pergeseran anggaran maupun penambahan dan perubahan pada indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan agar lebih rasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. AW. SUMARMO. 46 B - Telp. (0281) 894896
Fax. (0281) 6580546 PURBALINGGA 53319

**RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2024

PURBALINGGA, JULI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada segenap aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025.

Renja Perubahan Tahun 2025 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perubahan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang penyusunan perubahannya berdasarkan pada dinamika dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan I, kebijakan prioritas serta mengacu pada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Purbalingga dan Renstra DINRUMKIM tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renja Perubahan 2025 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih bersifat draf, sebab pagu anggaran yang terpasang sementara masih mengacu pada pagu hasil efisiensi, sedangkan pagu anggaran perubahan masih dalam proses. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan terbuka menerima saran, masukan, kritik yang konstruktif demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini dapat membantu dan menjadi acuan jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2025.

Purbalingga, Juli 2025

**PIt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



BAMBANG TRIONO, S.KM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700702 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 .Latar Belakang	1
1.2 .Landasan Hukum	2
1.3 .Maksud dan Tujuan	4
1.4 .Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 .Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 .Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 .Review terhadap Rancangan RKPD	33
2.5 .Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
3.3 Program dan Kegiatan	73
BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V. PENUTUP	92

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja 2025 Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan adalah dokumen perencanaan perubahan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada tindak lanjut penimplementasian hasil efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden.

Proses penyusunan Renja ini telah mempertimbangkan keterkaitan program kegiatan yang ada di RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, agar terjaga adanya keselarasan program dan kegiatan dengan pemerintah tingkat pusat dan tingkat provinsi. Pelaksanaan Renja selanjutnya dievaluasi untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang, prioritas dan capaian kinerja untuk dituangkan dalam dokumen Renja Perubahan.

Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Penyusunan RENJA 2025 Perubahan ini sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga **AKSELERASI PEMBANGUNAN**

KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD DINRUMKIM yaitu :

Misi 2 yaitu, *Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*.

Misi ini ditindaklanjuti melalui program :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Program Penatagunaan Tanah

Misi 3 yaitu, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*.

Misi ini ditindaklanjuti melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Urusan Pertanahan

1.2 Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Landasan penyusunan RENJA PERUBAHAN 2025 adalah :

- a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021- 2026;
- m) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga;

- n) Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
- o) Surat Bupati Purbalingga Nomor 000.7.2.4/3064 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga terhadap suatu rancangan akhir dokumen rencana tahunan di tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga tahun 2025 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman dalam menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025;
2. Sebagai acuan evaluasi capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Perubahan Dinrumkim Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Perubahan 2025 ini disusun dengan sistematika:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang sebagian tugas pokok fungsinya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai tahun ketiga dari Renstra tahun 2021 – 2026, PD Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen APBD 2024 dapat diuraikan secara garis besar sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	1,4%	1,74%	1,39%	1,25%	89,93%	0,50%	0,50%	35,71%
1.	Pengelolaan dan	Bertambahnya	1.000 SR	2.701	3.046	3.079	101,08%	2.137	2.137	213,7%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum		Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rumah Tangga		Rumah Tangga	Rumah Tangga	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 SR	75 SR	628 SR	620 SR	98,73%	0	0	0
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	30 SR	0	15 Desa	15 Desa	100%	10 liter/detik	10 liter/detik	100%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh	30 SR	80 SR	14 Desa	14 Desa	100%	700 SR	700 SR	2.333,33%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
b.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	2,5%	1,49%	0	0	0	0	0	0
2.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan persampahan yang terbangun	100%	100%	0	0	0	0	0	0
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS		150 RT	0	0	0	0	0	0
c.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang	1,42%	0,41%	1,44%	0,44%	30,56%	0,50%	0,50%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
		mendapat akses sanitasi tahun n								
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota	Jumlah SPALD-S yang di bangun	8 Lokasi	4 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	100%	23 Lokasi	23 Lokasi	3,5%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	300 Rumah Tangga	268 Rumah Tangga	968 Rumah Tangga	968 Rumah Tangga	100%	1.209 Rumah Tangga	1.209 Rumah Tangga	100%
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
d.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
4.	Perencanaan,		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
5.	Administrasi Keuangan	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100%	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan	150 Dokumen	156 Dokumen	150 Dokumen	177 Dokumen	118%	150 Dokumen	150 Dokumen	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		administrasi pelaksanaan tugas ASN								
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perundang-undangan yang disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Lainnya yang Disediakan								
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	0	0	0	1 Orang	1 Orang	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
e.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapaianya SPM bidang perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
13.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi	100 Orang	100 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		rumah korban bencana Kabupaten/Kota								
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	25 Orang	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100%
14.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	1 Unit	19 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana	1 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota yang dibangun								
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	100%	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah khuus yang dibina	90%	0	0	0	0	0	0	0
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
16.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
f.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	NA	4,01%	24,88%	18,40%	73,95%	19,79%	19,79%	100%
17.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	NA	4,01%	9 Ha	10,78 Ha	119,77%	5 Ha	5 Ha	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	1 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
g.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	97,41%	97,71%	98,49%	100,80%	98,82%	98,82%	100%
18.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.000 Unit Rumah	1.318 Unit Rumah	1.300 Unit Rumah	2.479 Unit Rumah	190,70%	1.300 Unit Rumah	1.300 Unit Rumah	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.100 Unit Rumah	43 Unit Rumah	43 Unit Rumah	42 Unit Rumah	97,67%	67 Unit Rumah	67 Unit Rumah	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
h.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	84,91%	77,5%	79,25%	100%	126,18%	81,13%	81,13%	100%
19.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditangani	12 Lokasi	1 Lokasi	10 Lokasi	9 Lokasi	90%	10 Lokasi	10 Lokasi	1,08%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perumahan								
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
i.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		mediasi								
20.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	3 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	100%	4 Berita Acara	4 Berita Acara	100%
j.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	53,85%	53,85%	100%	100%	100%
21.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Persentase dokumen masalah ganti	100%	100%	100%	53,85%	53,85%	100%	100%	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
k.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	0,27%	0,56%	0,27%	2,81%	1.040,7%	0,27%	0,27%	100%
22.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota	Persentase tanah Pemda eks-bengkak yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Indikator Cakupan akses air minum layak tahun 2022 mencapai 94,75%. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 96% dari target 95,97%, ada persentase capaian sebesar 100,03%. Persentase meningkat sebesar 1,25%. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM yang bersumber dari dana DAU, kegiatan HAMP, dari dana DAK dengan bentuk pekerjaannya yaitu sistem pengelolaan air minum jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Indikator kinerja meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 93,59%. Pada tahun 2023 dengan target sebesar 93,99% dicapai sebesar 94,03%, dengan persentase capaian sebesar 100,04% dan persentase peningkatan sebesar 0,44%. Capaian tersebut merupakan kontribusi penanganan SPALD-S di 13 desa. SPALD skala komunal 1 bangunan di Kelurahan Kedungmenjangan, serta kontribusi jambanisasi yang dikelola OPD terkait.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh. Pada tahun 2022 telah berhasil mengurangi luasan kumuh Kabupaten sebesar 0,05%, sekaligus menjadikan luasan kawasan tidak kumuh bertambah sebesar 0,05% menjadi 98,97%. Pada tahun 2023 kawasan kumuh yang tertangani diharapkan memberikan kontribusi penurunan sebesar 0,15%, sehingga persentase luasan kawasan tidak kumuh menjadi 99,12% dari target menjadi 99,02%. Persentase luasan kawasan tidak kumuh, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan update data kawasan kumuh dalam SK Bupati nomor 640/212 Tahun 2021, terdapat total kawasan kumuh adalah 344,28

ha , dimana yang 80,24 ha adalah menjadi kewenangan Kabupaten, sedangkan 48,91 ha merupakan kewenangan Provinsidan 214,85 ha kewenangan Pusat.

- d. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Cakupan pemanfaatan tanah pemda eks Bengkulu pada tahun 2022 telah mencapai 92,75%, sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 95,55% dari target 93% , persentase capaian sebesar 102,74%.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu, dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dicapai adalah merupakan bentuk fasilitasi terhadap OPD yang membutuhkan / melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yaitu memberikan fasilitasi pengadaan tanah untuk pengembangan Panti Nugroho pada tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2023 dengan target 100% realisasi sebesar 53,85% dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 53,85%. Namun realisasinya hanya 7 bidang atau 2 lokasi yaitu 5 bidang di 1 lokasi di desa Kajongan dan 2 bidang di 1 lokasi di desa Munjul. 6 bidang di 1 lokasi di desa Kajongan gagal karena tidak ada kesepakatan antar warga dengan harga yang ditawarkan oleh Appraisal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja perangkat daerah dapat disajikan dalam tabel halaman berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN DAN PROYEKSI KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	IPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Catatan Analisis
1	2	3	4	6	7	8		10		11	12	13
1	Nilai Sakip DINRUMKIM		IKK	68,88	69,38	69,88	70,38	72,41	73,01	73,05	73,05	
2	Cakupan akses air minum layak	SPM	IKK	92,45	92,86	93,26	93,53	94,75	95,97	96,05	96,05	
	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	SPM	IKK	0,40	0,40	0,40	0,01	1,74	1,25	0,50	0,50	
3	Cakupan sanitasi layak	SPM	IKK	92,38	92,50	92,62	92,75	93,59	94,03	94,53	94,53	
	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	SPM	IKK	0,12	0,12	0,12	0,12	0,41	0,44	0,50	0,50	
4	Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh		IKK	99,05	99,19	99,32	99,46	98,97	99,12	99,18	99,18	
	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan		IKK	0,13	0,13	0,13	0,13	0,05	0,15	0,13	0,13	
5	Cakupan pemanfaatan tanah pemda		IKK	92,46	92,73	93	93,28	92,75	95,55	93,28	93,28	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	53,85	100	100	

Dari tabel tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, demikian juga realisasi pada tahun 2023.

Peningkatan capaian kinerja berbanding lurus dengan ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahunnya, termasuk yang dikucurkan dari pemerintah pusat, melalui DAK air minum dan sanitasi, dana BSPS dan DAK perumahan untuk rehab rumah tidak layak huni, serta dana Bankeudes dari Provinsi untuk pemugaran/rehab rumah tidak layak huni.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman setiap tahunnya selalu berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan dana dari pemerintah provinsi dan pusat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 yaitu :

- Masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni, sehingga masih diperlukan adanya kepedulian pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin melalui fasilitasi kegiatan untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Disisi lain dari hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya ternyata masih adanya RTLH yang belum masuk dalam database pemugaran RTLH.
- Masih adanya rumah tangga yang belum terakses air minum/air bersih dan sistem sanitasi.
- Masih adanya kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu adanya program/kegiatan yang mendukung pada peningkatan penyediaan prasarana perumahan dan permukiman untuk meningkatkan

kesehatan lingkungan permukiman sekaligus mengurangi permukiman kumuh.

Dari sisi anggaran hasil pelaksanaan anggaran tahun yang lalu masih kurangnya dukungan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya akselerasi dukungan anggaran guna mencapai target terutama dalam penanganan kawasan kumuh..

Dengan adanya program pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga-lembaga lain termasuk CSR dari perusahaan adalah merupakan peluang yang baik guna mendukung pencapaian menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program / kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah pada umumnya sudah terakomodir di dalam RKPD. Hanya besaran anggarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan usulan awal karena adanya kebijakan pengalihan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya yang lebih mendesak atau lebih prioritas.

Disisi lain target capaian kinerja tidak dirubah dan atau tidak ada dukungan anggaran dan kegiatan untuk mencapai/memenuhi target kinerja, sehingga bisa mengakibatkan pada akhir tahun anggaran/pelaksanaan Renja target tidak tercapai.

Hal lain yang kadang terjadi adalah munculnya suatu kegiatan yang tidak diusulkan OPD, namun masih masuk dalam lingkup OPD, sehingga untuk jenis kegiatan yang sifatnya teknis diperlukan koordinasi yang simultan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyusunan perencanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan.

Terkait dengan adanya ketentuan baru dalam penyusunan perencanaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan beberapa perubahan lanjutannya, maka perlu adanya sinkronisasi pogram/kegiatan tahun

sebelumnya yang sudah baku mengalami perubahan total, sehingga ada sebagian program.kegiatan yang tidak/belum bisa tertampung pada urusan/program dan kegiatan sesuai yang ada dalam nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN PURBALINGGA
Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.198.470
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	-	13.879.055	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	-	1.108.470
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota		Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	-	13.879.055	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota		Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	-	1.108.470
	Pembangunan SPAM		Kapasitas Sistem	-	24.000	Pembangunan SPAM		Kapasitas Sistem	-	354.050

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	9.885.955	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	714.420
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	3.969.100	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	40.000
b.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Purbalinga	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	-	-	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Purbalinga	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	-	-
2.	Pengembangan Sistem		Persentase	-	-	Pengembangan Sistem		Persentase	-	-

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		bangunan persampahan yang terbangun			dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		bangunan persampahan yang terbangun		
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-
c.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Purbalinga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	-	12.610.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Purbalinga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	-	90.000
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota		Jumlah SPALD-S yang dibangun	-	12.610.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota		Jumlah SPALD-S yang dibangun	-	90.000
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	12.610.000	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	90.000
B.	Urusan Pemerintahan					Pembangunan/				

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				
d.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.184.246	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.184.246
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinrumkim	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinrumkim	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000
5.	Administrasi Keuangan		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.540.181	Administrasi Keuangan		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.767.481
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan	29 Orang / Bulan	3.408.445	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan	28 Orang / Bulan	3.635.745

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			tunjangan ASN					tunjangan ASN		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	150 Dokumen	73.496	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	150 Dokumen	73.496
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	58.240	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	58.240
6.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	18.527	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	16.800
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	18.527	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	16.800
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100%	35.302	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa	100%	35.737

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			urusan pemerintahan daerah					penunjang urusan pemerintahan daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	681	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	681
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	25.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	25.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	4.956	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	4.956
	Dukungan Pelaksanaan		Jumlah dokumen	2 Dokumen	3.665	Dukungan Pelaksanaan		Jumlah dokumen	2	3.600

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	2.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.500
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	441.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	441.603
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	374	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan	50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	12 Laporan	23.366	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	23.366

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			sumber daya air dan listrik yang disediakan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	432	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	1.079
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	417.108	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	417.108
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Orang	4.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Orang	4.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4.000
11.	Pemeliharaan Barang		Persentase	100%	137.456	Pemeliharaan Barang		Persentase	1 Orang	138.925

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pemeliharaan barang milik daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pemeliharaan barang milik daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	130.456	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	130.456
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	2.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	3.469
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	5.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	5.000
e.	Program Pengembangan Perumahan		Persentase tercapaiannya SPM bidang perumahan		300.787	Program Pengembangan Perumahan		Persentase tercapaiannya SPM bidang perumahan	100%	290.791
12.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau		Persentase terdatanya rumah korban bencana	100%	24.020	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau		Persentase terdatanya rumah korban bencana	1 Dokumen	12.000

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Relokasi Program Kabupaten/Kota		alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota			Relokasi Program Kabupaten/Kota		alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	4.020	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	2.000
13.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	100%	6.976	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	100%	9.000

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Kabupaten/Kota		Program Kabupaten/kota			Kabupaten/Kota		Program Kabupaten/kota		
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	2.956	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	5.000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	25 Orang	4.020	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang	4.000
14.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%	91.167	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%	91.167
	Rehabilitasi Rumah bagi	Kab.	Jumlah rumah	3 Unit Rumah	39.920	Rehabilitasi Rumah bagi		Jumlah rumah	3 Unit	39.920

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Korban Bencana	Purbalingga	korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi			Korban Bencana		korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Rumah	
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Unit Rumah	50.247	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Unit Rumah	50.247
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Unit	1.000	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Unit	1.000
15.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Purbalingga		100%	172.800	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Purbalingga		100%	172.800
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 paket	172.800	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 paket	172.800
16.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan		Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	5.824	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Kab. Purbalingga	Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	5.824

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Perumahan					Perumahan	ga			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Purbalinga	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	5.824	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 paket	5.824
f.	Program Kawasan Permukiman		Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	49,75%	645.434	Program Kawasan Permukiman		Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	49,75%	845.434
17.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas kawasan kumuh yang ditangani	9 Ha	645.434	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Purbalinga	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	2 Ha	645.434
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni	2 Dokumen	645.434	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	8 Dokumen	645.434

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			beserta PSU							
g.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,32%	1.518.348	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas kawasan kumuh yang ditangani	99,32%	931.348
18.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.000 Unit	1.518.348	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	750 Unit	931.348
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tanah Eks. Bengek Kab. Purbalingga	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.000 unit Rumah	1.518.348	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	61 unit Rumah	931.348
h.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang	83,02%	363.462	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	83,02%	844.942

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			didukung PSU layak							
19.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU yang ditangani	12 Lokasi	363.462	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	12 Lokasi	844.942
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Purbalingga	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lokasi	359.942	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	1 Lokasi	844.942
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 Laporan	3.520	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah PSU yang ditangani	1 Laporan	13.516
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Tanah Eks.			249.494	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Tanah Eks.			249.494

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
		Bengkok Kab. Purbalingga					Bengkok Kab. Purbalingga			
i.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	5.108	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Purbalingga	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	5.108
20.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota		Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	5.108	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota		Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	5.108

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 BA	5.108	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 BA	5.108
j.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	88.036	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Tanah Eks. Benkok Kab. Purbalingga	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	88.036
21.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	100%	88.036	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	100%	88.036

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
			Kabupaten/Kota yang diselesaikan					daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	88.036	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.036

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
k.	Program Penatagunaan Tanah		Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	0,27%	156.350	Program Penatagunaan Tanah		Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	0,27%	156.350
22.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota		Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	81,28%	156.350	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota		Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	81,28%	156.350
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	156.350	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	156.350

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
1	2	3	4	5
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1-5, Desa Bedagas, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pasunggingan, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Larangan, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Larangan, Kec. Pengadegan	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
5	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RT 03/01, Kel. Kandanggang, Kec. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Panunggalan, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tegalpingen, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
8	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	RT 001 RW 001 (TEMPURSARI), Desa Rembang, Kec. Bodas Karangjati	Pengadaan Bronjong	
9	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Tegalpingen Dusun I,II,III,IV, Kec. Pengadegan	Pengadaan Bronjong	
10	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa tumanggal, Kec. Pengadegan	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa tumanggal, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Krenceng, Kec. Kejobong	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
13	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Wilayah Dusun 1, dan Wilayah Dusun 4 Desa Karangmalang, Kec. Bobotsari	Pembangunan IPAL Komunal	
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Wanogara Kulon, Kec. Rembang	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	wilayah Dusun 1 dan Wilayah Dusun 4 Desa Karangmalang, Kec. Bobotsari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
16	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Karangwringin RW 1 Desa Baleraksa, Kec. Karangmoncol	Pembangunan IPAL Komunal	
17	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Panunggalan, Kec. Pengadegan	Pengadaan Bronjong	
18	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kelurahan Wirasana, RT 004 RW 001, Kel. Wirasana, Kec. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	
19	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sumampir Semua Dusun,, Kab. Purbalingga, Rembang, Sumampir	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
20	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 3, Desa Nangkod, Kec. Kejobong	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
21	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kelurahan Wirasana RT 004 RW 003, Kec. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
22	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kembaran Kulon Rt 001 Rw 002 , Kec. Purbalingga	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
23	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jl Makam Rt 2 Rw 1, Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	
24	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan lingkaran Dusun 1 dan 3 Desa Mipiran, Kecamatan Padamara	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
25	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Rt 01 Rw 03 Desa Toyareja, Kec. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tangkisan, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
27	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangnangka, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Cipaku, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
29	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Lambur, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
30	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 2 Desa Toyareja, Kec. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	
31	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RW 04 Dusun 1 Karangnangka, Kec. Mrebet	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
32	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Dagan, Kec. Bobotsari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
33	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Tangkisan, Kec. Mrebet	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
34	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 3 RT 002 RW 007, Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
35	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Bojong, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
36	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pekalongan Dusun 5 RT.002 RW.011, Kec. Bojongsari	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
37	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 5, RW 010 dan RW 011 Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
38	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 1 s/d 4, Metenggeng, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
39	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalu antar desa dari metenggeng sampai sumingkir dusun 1 s/d dusun 3 RT 4 s/d RT 12, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
40	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tetel dusun 1,2,3, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 s/d dusun 4 RT 1 s/ RT 18, Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
42	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Bumisari, Kec. Bojongsari	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
43	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
44	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Pasunggingan, Kec. Pengadegan	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
45	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangbanjar, Kec. Bojongsari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
46	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 6 dan dusun 5, Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
47	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Serayukaranganyar, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
48	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Purbalingga Wetan, Kec. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
49	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Serayu Larangan Dusun II RW 04, Kec. Mrebet	Pengadaan Bronjong	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
50	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kec. Mrebet	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
51	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun Karangtengah dan Dusun Gumenggeng, Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Pengadaan Bronjong	
52	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangjoho, Kec. Pengadegan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
53	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
54	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Pembangunan IPAL Komunal	
55	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Rajawana, Kec. Karangmoncol	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
56	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Rajawana, Kec. Karangmoncol	Pengadaan Bronjong	
57	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Muntang Dusun 1 dan Dusun 2, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
58	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 5 RT 21 dan 22 RW 09, Desa Pasunggingan, Kec. Pengadegan	Pengadaan Bronjong	
59	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Muntang Dusun 2 , Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
60	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jl. Teratai Putih II RT. 04 RW. 07 Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
61	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I RT 01 Rw 03 dan Rt 03 Rw 01, Desa Karangreja, Kec. Karangreja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
62	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kutabawa, Kec. Karangreja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
63	DPUPR	RT 03 RW 04 Kelurahan Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga	Pembangunan jalan kabupaten	Bukan Kewenangan Dinrumkim
64	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	dusun 4, Desa Makam Kec. Rembang	Pengadaan Bronjong	
65	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	dusun 4, Desa Makam Kec. Rembang	Pengadaan Bronjong	
66	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun II Desa Palumbungan Wetan, RT 004 RW 002, Kec. Bobotsari	Pengadaan Bronjong	
67	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pandansari, Kec. Kejobong	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
68	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
69	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT 003 DAN 004/002, Kel. Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
70	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Blok Karangsari Desa Kedungbenda, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
71	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Kasih rt 05 rw 02, Kec. Kertanegara	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
72	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Bojanegara Dusun II dan Dusun III RW 02 dan RW 03, Kec. Padamara	Pengadaan Bronjong	
73	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Panican, Kec. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	
74	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kutasari RT 1 s/d 21 , Kec. Kutasari	Rehabilitasi rumah tidak layak	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
			huni	
75	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Raya desa Brakas Dusun III - Ponjen, Desa Brakas, Kec. Karanganyar	Pengadaan Bronjong	
76	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Candiulan Dusun 1 - 5, Kec. Kutasari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
77	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun II, Desa Rembang, Kec. Sumampir	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
78	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Gambarsari, Dusun 1 Rt 02 dan 03 Rw 01, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
79	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Limbangan Dusun I, II, III, Dusun IV, Kec. Kutasari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
80	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Limbangan Dusun I, II, III dan IV, Kec. Kutasari	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
81	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun Pagerjirak Rt.019 Rw. 009, Desa Kejobong, Kec. Kejobong	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
82	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Bantaran sungai klawing Dusun 3, Desa Majasame, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
83	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 1 Paguyangan, Dusun 2 Bandingan, Dusun 3 Sirau, Dusun 4 Pengungsan, dan Dusun 5 Karanggintung, Desa Sirau, Kec. Karangmoncol	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
84	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 1 Paguyangan, Dusun 2 Bandingan, Dusun 3 Sirau, Dusun 4 Pengungsan, Dusun 5 Karanggintung, Desa Sirau, Kec. Karangmoncol	Pengadaan Bronjong	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
85	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Kalialang Rt 001 s.d Rt 011, Desa Kalialang, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
86	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 3 RT 15, 16, dan 17, Desa Jetis, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	
87	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	rt 06 rw 07, rt 05 rw 08, rt 02 rw 02, Desa Makam, Kec. Rembang	Pengadaan Bronjong	
88	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Desa Makam, Kec. Rembang	Pembangunan IPAL Komunal	
89	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Kalialang, Kec. Kemangkon	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
90	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun I RT 01 - RT 05, Kab. Purbalingga, Kemangkon, Jetis	Pengadaan Bronjong	
91	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
92	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun II, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
93	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun III, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
94	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun IV, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
95	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun V, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
96	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karanggedang, Kec Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
97	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jl. Argandaru RW 07 Dusun IV, Desa Bukateja, Kec. Bukateja	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
98	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Tamansari, Kec. Karangmoncol	Pengadaan Bronjong	
99	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tamansari, Kec. Karangmoncol	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
100	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 2 Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari	Pengadaan Bronjong	
101	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Rt 01 dan 02 Rw 02 Dusun1 Desa Kemangkon, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
102	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Gunungkarang, Kec. Bobotsari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
103	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun III RT 001 RT 002 RT 003 RT 004 RW 005, RT 001 RT 002 RW 006, Desa Wirasaba, Kec. Bukateja	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
104	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun II RT 002 RW 004, Desa Wirasaba, Kec. Bukateja	Pengadaan Bronjong	
105	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tidu Dusun 1 2 dan 3 , Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
106	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Lingkungan RT. 1 RW. 1 Dusun 1, Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
107	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Lingkungan RT. 16 RW. 8 Dusun III, Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
108	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Lingkungan RT. 17 RW. 08 Dusun III, Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
109	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Toyareka, Kec. Kemangkon	Pengadaan Bronjong	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
110	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I, II, III, IV, V, Desa Wirasaba, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
111	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Usaha Tani Blok 12 RT 04 RW 02 Dusun I, Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
112	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Drainase JalanLingkungan RT. 06 RW. 03 Dusun I, Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
113	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun1,Dusun 2,Dusun 3, Desa Pelumutan, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
114	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 sampai Dusun 5, Desa Kebutuh, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
115	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	RT 011 - RT 012 Desa Panican, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
116	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	RT 006 - RT 007 Desa Panican, Kec. Kemangkon	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
117	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
118	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RW 01, 02, 03, 04, 05, Desa Majasari, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
119	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun 3, Desa Kebutuh, Kec. Bukateja	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
120	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Karangsantul RT 02 Wilayah RW 01, Kel. Karangsantul, Kec. Padamara	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
121	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Karangsantul RT 03, RT 05, RT 02 Wilayah RW 02, Kel. Karangsantul, Kec. Padamara	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
122	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Karangsantul RT 02, RT 03 wilayah RW 01, Kel. Karangsantul, Kec. Padamara	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
123	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa bajong, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
124	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dusun V, Desa Bajong, Kec. Bukateja	Pembangunan IPAL Komunal	
125	Pembangunan SPAM JARINGAN Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 3, 4 dan 5 Desa Cipawon, Kec. Bukateja	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
126	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dusun1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Desa Kedungjati, Kec. Bukateja	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
127	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kedungjati, Kec. Bukateja	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
128	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT 01 RW 07 Desa Kedungjati, Kec. Bukateja	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	
129	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Selabaya, Kab. Purbalingga, Kalimanah, Selabaya	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
130	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa babakan, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
131	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Talud Barat Perumahan Puri Desa Babakan, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
132	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Desa Sidakangen, Kec. Kalimanah	Pengadaan Bronjong	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Catatan
133	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jalan Durian Desa Kalimanah wetan, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	
134	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Blater, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	
135	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Panunggalan, Kec. Pengadegan	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	
136	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	RT.01 RW.02 dan RT.03 RW.01 Kelurahan Karangmanyar, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
137	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	RT 02 RW 03 dan RT 03 RW 03 Kelurahan Mewek, Kec. Kalimanah	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	
138	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa pepedan Dusun 1,2,3,4,5, Kec. Karangmoncol	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN, SASARAN

1. a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinrumkim antara lain adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana kewenangannya yaitu dalam hal relokasi/penyediaan perumahan bagi korban bencana dan atau akibat program pemerintah, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kinerja pembangunannya dapat dilihat dari indikator luasan kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga menggunakan air bersih.

1.b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinrumkim Kabupaten Purbalingga dengan Renstra Kementerian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1.b.1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan kementerian / lembaga yang memiliki tugas dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2025 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2025 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025. Renstra Kementerian PUPR ditetapkan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2025.

Adapun Renstra Kementerian PUPR memuat Tujuan dan Sasaran Strategis antara lain yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrasetruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terpadu.

1.b.2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dsiperakim) Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki

tugas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Disperakim Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Renstra Disperakim Provinsi Jawa Tengah memuat tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan antara lain yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Strategi :

- 1.a. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan.
- 1.b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
- 1.c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.
- 2.a. Pengurangan kawasan kumuh

- 2.b. Pengembangan PSU
- 2.c. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
- 2.d. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 3.a. Peningkatan tertib administrasi pertanahan
- 3.b. Penanganan permasalahan pertanahan
- 3.c. Peningkatan kapasitas masyarakat

Arah Kebijakan :

- 1.a. Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- 1.b. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan
- 1.c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan
- 1.d. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
- 1.e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan
- 2.a. Penanganan kawasan kumuh Provinsi
- 2.b. Peningkatan pengembangan PSU kawasan permukiman
- 2.c. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
- 2.d. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- 2.e. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- 2.f. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- 3.a. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah

- 3.b. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat
- 3.c. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan
- 3.d. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan pertanahan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada Rencana Kerja Tahun 2025 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatnya akses air;
- c. Meningkatnya akses sanitasi;
- d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sedangkan penjabaran tujuan tersebut per Bidang / Sekretariat adalah sebagai berikut :

*** Sekretariat :**

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan dan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari SKPD/OPD.

*. Bidang

* **Bidang Perumahan:**

- Meningkatkan sarana-prasarana perumahan yang sehat dan memadai bagi masyarakat;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

* **Bidang Permukiman:**

- Meningkatkan fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- Menurunnya wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.

* **Bidang Pertanahan:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan serta penertiban permasalahan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang dan data aset tanah Pemda.
- Meningkatkan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

SASARAN

Sasaran Kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2025 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINRUMKIM (mendukung misi 1)
2. Meningkatkan akses air minum (mendukung Misi 3)
3. Meningkatkan akses sanitasi (mendukung Misi 3)
4. Meningkatkan kawasan tidak kumuh perkotaan (mendukung misi 3).

5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan. (mendukung misi 1)

Sedangkan penjabaran sasaran kinerja tersebut per Bidang/Sekretariat adalah sebagai berikut: :

*** Sekretariat :**

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya jumlah SDM bidang teknis serta sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program / kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan SKPD;

*** Bidang Perumahan :**

- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang sehat dan memadai;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

*** Bidang Permukiman:**

- Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat;
- Mengurangi wilayah permukiman masyarakat kekurangan air bersih akibat padadaerah rawan bencana kekeringan.

*** Bidang Pertanian:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;

- Meningkatkan fasilitas pengadaaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2025 adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang akan berisi program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - e. Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 3.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Kegiatan :

 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 3.4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan :

 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
- 3.5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 3.7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.6. Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota
- 3.7. Program Penatagunaan Tanah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan
Kegiatan :

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah
Kabupaten/Kota

3.8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan
Kegiatan :

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan pada tahun 2025, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	PENDAPATAN		1.131.400.000				1.246.400.000
2	BELANJA		7.844.466.000				7.550.059.000
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		7.365.005.000				7.243.262.000
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		703.005.000				857.055.000
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	568.605.000	DAU		0,01%	822.655.000
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	568.605.000			70 RT	822.655.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100.000.000			10 Liter/Detik	354.050.000
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	428.605.000			10 Liter/Detik	428.605.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	40.000.000			-	40.000.000
b.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	134.400.000	DAU		0,002%	34.400.000
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota	Jumlah SPALD-S yang di bangun	134.400.000			-	34.400.000
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	134.400.000			-	34.400.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Masyarakat						
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		6.662.304.000				6.386.207.000
c.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.950.163.000	DAU			4.161.565.500
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	4.214.000			100%	4.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.222.000			1 Dokumen	2.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1.992.000			3 Dokumen	2.000.000
4.	Administrasi Keuangan	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	3.322.697.000			100%	3.529.299.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.231.168.000			28 Orang / Bulan	3.436.067.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	36.748.000			150 Dokumen	36.748.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		pelaksanaan tugas ASN					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	54.781.000			2 Dokumen	56.484.000
5.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	14.400.000			100%	14.400.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000			1 Dokumen	14.400.000
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	27.624.500			100%	27.892.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.043.000			1 Paket	681.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16.712.000			3 Paket	18.642.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	1.800.000			12 Dokumen	1.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	undangan	perundang-undangan yang disediakan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.469.000			3 Laporan	3.469.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.600.000			1 Dokumen	3.600.000
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	0			100%	2.485.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0			1 Unit	2.485.500
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	440.175.000			100%	437.563.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	50.000			1 Laporan	50.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	23.366.000			12 Laporan	19.866.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		disediakan					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.079.000			2 Laporan	539.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	415.608.000			12 Laporan	417.108.000
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0			1 Orang	4.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0			1 Orang	4.000.000
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	141.053.000			100%	141.425.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	130.456.000			24 Unit	130.456.000
	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin	5.597.000			20 Unit	5.969.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Mesin Lainnya	lainnya yang dipelihara					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	5.000.000			1 Unit	5.000.000
d.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapaannya SPM bidang perumahan	272.064.000			100%	282.564.000
11.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota	4.348.000			100%	10.348.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota	3.348.000			1 Dokumen	8.348.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	0			1 Dokumen	1.000.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1.000.000			1 Dokumen	1.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	5.200.000			100%	7.700.000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	2.000.000			40 Orang	4.500.000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	3.200.000			25 Orang	3.200.000
13.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	86.905.000			100%	88.905.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	36.783.000			3 Unit Rumah	38.783.000
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota	50.122.000			1 Unit Rumah	50.122.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		yang dibangun					
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	0			0	0
14.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun yang terbina dan terkelola	172.571.000			100%	172.571.000
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	172.571.000			1 Dokumen	172.571.000
15.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	3.040.000			100%	3.040.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	3.040.000			1 Laporan	3.040.000
e.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	835.434.000	DAU		16,08%	975.434.500
16.	Peningkatan Kualitas	Luas kawasan kumuh yang	835.434.000			2 Ha	975.434.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ditangani					
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	835.434.000			8 Dokumen	975.434.500
f.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	155.664.000	DAU		91,90%	115.664.000
17.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	155.664.000			1.000 Unit	115.664.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	155.664.000			63 unit Rumah	115.664.000
g.	Program Peningkatan	Cakupan Lingkungan	1.448.979.000			72,65%	850.979.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak					
18.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditangani	1.448.979.000			5 Lokasi	850.979.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1.043.742.000			1 Laporan	843.742.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	5.237.000			1 Laporan	7.237.000
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	400.000.000			0	0
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		479.157.000				306.796.000
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		479.157.000	DAU			306.796.000
h.	Program Penyelesaian	Persentase penanganan	201.608.000			100%	5.108.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sengketa Tanah Garapan	sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
19.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	201.608.000			100%	5.108.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	201.608.000			2 BA	5.108.000
i.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	7.549.000			100%	17.549.000
20.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	7.549.000			100%	17.549.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	7.549.000			1 Dokumen	17.549.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
j.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	270.000.000			0,01%	284.140.000
21.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota	Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	270.000.000			93,26%	284.140.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	270.000.000			13 Dokumen	284.140.000

PENGENDALIAN RESIKO PROGRAM/PAKET PEKERJAAN APBD TAHUN 2025

NO	PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp.)	RESIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah /Kota	160.045.000	Pengadaan tanah gagal	Ada masyarakat pemilik tanah yang tidak sepakat terhadap harga dari Apraisal	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	16.863.501.000	Kualitas pekerjaan kurang berkualitas	Bahan material tidak sesuai spek, terbatasnya debit air, waktu pekerjaan fisik terbatas	Pekerjaan selesai tidak tepat waktu dan hasil pekerjaan tidak fungsional, mudah rusak	Memperketat pengawasan di lapangan dengan pedoman skedul pelaksanaan pekerjaan
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	4.083.625.000	Kualitas pekerjaan kurang berkualitas	Bahan material tidak sesuai spek, terbatasnya waktu pekerjaan fisik	Pekerjaan selesai tidak tepat waktu dan hasil pekerjaan mudah rusak	Memperketat pengawasan di lapangan dengan pedoman skedul pelaksanaan pekerjaan
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	7.801.387.000	Kualitas pekerjaan kurang berkualitas	Bahan material tidak sesuai spek, terbatasnya waktu pekerjaan fisik	Pekerjaan selesai tidak tepat waktu dan hasil pekerjaan mudah rusak	Memperketat pengawasan di lapangan dengan pedoman skedul pelaksanaan pekerjaan

NO	PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp.)	RESIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
5	Program Kawasan Permukiman	1.191.792.000	Penanganan kumuh kurang optimal	Alokasi anggaran untuk penanganan kumuh terbatas	Kawasan kumuh yang ditangani tidak mengurangi luasan kumuh. Kawasan masih bersatus kumuh	Mengalokasikan anggaran yang ada untuk bersinergi dengan sumber anggaran lain.
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.456.270.000	Kualitas pekerjaan kurang berkualitas	Bahan material tidak sesuai spek, terbatasnya waktu pekerjaan fisik	Pekerjaan selesai tidak tepat waktu dan hasil pekerjaan mudah rusak	Memperketat pengawasan di lapangan dengan pedoman skedul pelaksanaan pekerjaan

V. PENUTUP

Bahwa RENJA 2025 Perubahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perubahan perencanaan rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja, sehingga perlu dilakukan perubahan Dokumen Renja 2025.

Semoga perubahan perencanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam RENJA 2025 Perubahan ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan kemajuan dan perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan skala prioritas, walaupun dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Kepada semua jajaran aparat DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan segenap lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi dalam mewujudkan RENJA 2024 Perubahan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Terima kasih .

Purbalingga, Juli 2025

**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**




BAMBANG TRIONO, S.KM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700702 199203 1 006



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana semua kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahunan.

Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber

daya manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 11 Juli 2025

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar dan Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus	20
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	47
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	53
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinarpus	54
3.3. Program dan Kegiatan	56
BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
BAB V. PENUTUP	67
Lampiran – lampiran.	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 2.1.1. Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2024
2. Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2024 Provinsi / Kabupaten / Kota : Purbalingga
3. Tabel. 2. 2.1. Pencapaian Kinerja Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah
4. Tabel. 2.3.1. Telaah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
5. Tabel 2.3.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
6. Tabel. 2. 3.3. Pemetaan Permasalahan/Isu-Isu Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
7. Tabel . 2. 4.1. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga

8. Tabel. 2. 5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kabupaten Purbalingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
9. Tabel 3. 1.1. Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
10. Tabel. 3.2.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
11. Tabel. 3.2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
12. Tabel. 4.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah
13. Tabel. 5.1. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada tahun Anggaran 2025

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan sesuai amanat pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan materi penyelarasan Renja Tahun Anggaran 2025 yang mengakomodasikan materi hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya

Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, yang mengemban misinya meliputi :

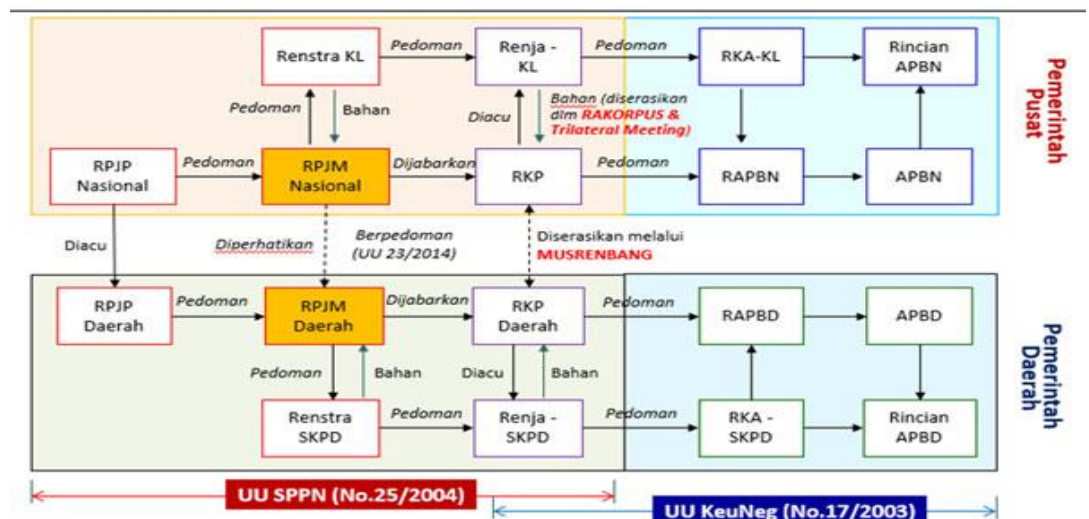
1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun lalu dan evaluasi hasil kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun berjalan.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan, Rancangan Akhir Renja Perubahan, hingga penetapan Renja Perubahan. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini :

GAMBAR 1.1.

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1. 3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan perubahan untuk merumuskan permasalahan dan memberikan solusi, serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan perubahan tahun 2025.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN
LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Dinarpus.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus
- 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinarpus
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB V.PENUTUP.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Untuk memantapkan perencanaan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 32 (tigapuluh dua) Sub Kegiatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **3.746.609.000,-**

Dari Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. **3.460.131.199,-**. Realisasi tersebut merupakan serapan anggaran termasuk belanja gaji, selain itu anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan dan efisiensi. Tingkat realisasi keuangan Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1.1.
REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA ANGGARAN
	BIDANG PERPUSTAKAAN (2 Program, 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan)	208.000.000	207.951.003	99,98%	48.997
A	Program Pembinaan Perpustakaan	183.000.000	182.966.739	99,98%	33.261
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.000.000	117.967.739	99,97%	32.261

a	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.999.942	100,00%	58
b	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00%	0
c	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.969.000	99,79%	31.000
d	Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000	19.999.999	100,00%	1
e	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	8.000.000	7.998.798	99,98%	1.202
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.999.000	100,00%	1.000
a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	30.000.000	100,00%	0
b	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10.000.000	10.000.000	100,00%	0
c	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25.000.000	24.999.000	100,00%	1.000
B	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000	24.984.264	99,94%	15.736
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.984.264	99,94%	15.736
a	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	25.000.000	24.984.264	99,94%	15.736
BIDANG KEARSIPAN (2 Program, 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan)		82.436.000	82.092.576	99,58%	343.424
C	Program Pengelolaan Arsip	48.436.000	48.168.920	99,45%	267.080

1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	30.836.000	30.662.920	99,44%	173.080
a	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	30.836.000	30.662.920	99,44%	173.080
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	9.600.000	9.507.000	99,03%	93.000
a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	9.600.000	9.507.000	99,03%	93.000
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	8.000.000	7.999.000	99,99%	1.000
a	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	7.999.000	99,99%	1.000
D	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	34.000.000	33.923.656	99,78%	76.344
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	13.600.000	13.598.850	99,99%	1.150
a	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	6.800.000	6.798.850	99,98%	1.150
b	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	6.800.000	6.800.000	100,00%	0
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20.400.000	20.324.806	99,63%	75.194
a	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000	20.324.806	99,63%	75.194

F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.456.173.000	3.170.087.540	91,72%	286.085.460
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.800.000	8.758.376	99,53%	41.624
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.800.000	4.799.850	100,00%	150
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.958.526	98,96%	41.474
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.247.000	2.275.443.774	91,23%	218.803.226
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.406.836.000	2.188.487.120	90,93%	218.348.880
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.000.000	61.996.054	99,99%	3.946
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.411.000	24.960.600	98,23%	450.400
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.880.000	2.850.000	98,96%	30.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.880.000	2.850.000	98,96%	30.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.384.000	39.308.800	99,81%	75.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.584.000	26.583.800	100,00%	200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	100,00%	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	7.925.000	99,06%	75.000

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.880.000	2.880.000	100,00%	0
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.132.000	757.002.290	91,85%	67.129.710
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	432.000	33.500	7,75%	398.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.895.000	172.735.544	82,30%	37.159.456
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	613.805.000	584.233.246	95,18%	29.571.754
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.730.000	82.724.300	99,99%	5.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.650.000	77.644.300	99,99%	5.700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.080.000	1.080.000	100,00%	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
JUMLAH SELURUH		3.746.609.000	3.460.131.119	92,35%	286.477.881

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja output yang dihasilkan semua kegiatan hampir 100%, dengan didukung anggaran belanja perubahan (DPPA) sebesar Rp. 3.746.609.000,- Realisasi Rp. **3.460.131.119,-** (92,35%) dengan sisa anggaran Rp. 286.477.881,-. Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2024 yang tidak tercapai sesuai target yaitu hanya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu pada Sub Kegiatan *Penyediaan Gaji dan*

Tunjangan ASN, anggaran Rp. 2.406.836.000, realisasi sebesar Rp. 2.188.487.120 (90,93%). Sehingga terdapat penghematan Rp. 218.348.880,- karena adanya ASN yang pensiun dan mutasi.

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu pada Sub Kegiatan *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*, tahun 2024 bahwa :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan telah dihitung sesuai kebutuhan, untuk penambahan ASN yang telah diajukan tidak ada penambahan.
2. Bahwa dalam tahun 2024 banyak ASN yang pensiun dan mutasi /promosi

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun lalu (2024), secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2. dibawah ini :

Tabel. 2.1.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota : PURBALINGGA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024Tahun N-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (TAHUN N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Perangk t Daerah Tahun 2024 (TAHUN N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11=10/4
						Bidang Kearsipan									
2	25	02				Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	25	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	25	02	2	01	01	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	3000 berkas	100%
2	25	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

2	25	02	2	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	3000 berkas	100%
2	25	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	02	2	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	25	03				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	03	2	02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	100%	5000 arsip	5000 arsip	100%
2	25	03	2	02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 arsip	5 arsip	5 arsip	5 arsip	100%	10 arsip	20 arsip	100%
2	25	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	03	2	03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30000 daftar	30000 daftar	30000 daftar	30000 daftar	100%	30000 daftar	30000 daftar	100%
						Bidang Perpustakaan									

2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan Aktif	2.75 angka	2.75 angka	2.75 angka	2.75 angka		2.75 angka	2.75 angka	100%
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01	02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya</i>	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	05	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	250 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	100%	250 unit perpustakaan	250 unit perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	06	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100%	250 orang	250 orang	100%
2	23	03	2	01	08	<i>Pengembangan Bahan Pustaka</i>	<i>Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan</i>	700 eksemplar	700 eksemplar	700 eksplar	700 eksemplar	100%	700 eksemplar	700 eksemplar	100%
2	23	03	2	01	09	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>	700 eksemplar	700 eksplar	700 eksplar	700 eksplar	100%	700 eksemplar	700 eksemplar	100%
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%

2	23	02	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 lokus	450 lokus	450 lokus	450 lokus	100%	250 lokus	250 lokus	100%
2	23	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	3 orang	19 orang	100%
2	23	02	2	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%	5 perpustakaan	15 perpustakaan	100%
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01	01	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100%	250 eksemplar	450 eksemplar	100%
2	25	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	25	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
2	25	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

2	25	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang	16 orang	14 orang	87,5%	19 orang	14 orang	87,5%
2	25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	20	20	20	100%	20	60	100%
2	25	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	100%
2	25	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	25	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	6 paket	16 paket	100%
2	25	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
2	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
2	25	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
2	25	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%

2	25	01	2	08	01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	25	01	2	08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	25	01	2	08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
2	25	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	
2	25	01	2	09	02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	20 unit	18 unit	12 unit	12 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
2	25	01	2	09	06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 unit	10 unit	15 unit	15 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2	25	01	2	09	09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Hasil evaluasi Renja Perubahan tahun 2024 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Anggaran murni maupun anggaran perubahan tahun anggaran 2025, agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain meliputi :

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2024 telah mencapai target faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten, Pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas SDM;
2. Memiliki layanan berbasis digital
3. Mampu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kelembagaan dan tata kelola perpustakaan dan kearsipan
4. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;
5. Komunikasi yang inten antar instansi baik vertikal maupun daerah.
6. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip melalui sosialisasi.
7. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum
8. Mengadakan Pendampingan Pendirian Perpustakaan Desa/Kelurahan
9. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai Rencana Kerja;

10. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
11. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum.
12. Meningkatkan pelayanan berbasis Elektronik atau Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sesuai Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan

Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;

4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan tugas Pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah:

1. BIDANG KEARSIPAN

- a. Indeks Kearsipan
- b. Prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

2. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Indek Peningkatan Literasi Masyarakat
- b. Rasio perpustakaan aktif

Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Program, beserta indikator sasaran, tujuan dan indikator kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tabel 2.2.1. :

Tabel. 2.2.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kearsipan & Perpustakaan Tahun :			Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi		Catatan
				2023 (N-2)	2024 (Tahun N-1)	2026 (N + 1)		2024 (N-1)	2025 (Tahun N)	2026 (N + 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan I : Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan									
1	Indek Kearsipan	NA	NA	76	78	78	85,23	85,25	85.30	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat / IPLM	NA	NA	12	13	13	14.77	70,40	71	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Sasaran I.1 Meningkatnya kwalitas pengelolaan arsip									
1	Kenaikan Prosentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	NA	64	70	65	70,67	70.80	70.90	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Nilai SAKIP DINARSPUS			72,50	73,2	73,20	73,11	73.15	73.20	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Sasaran 2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan									
1	Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	NA	NA	4,08	4,60	4,59	5.00	5,10	5.20	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan terkait dengan pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, telaah terhadap Renstra Kementerian/lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah Telaah terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Lembaga Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut adalah uraian terhadap Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Perpusnas, dan ANRI sebagai berikut :

- 1 Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable, akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban serta menyediakan bahan

perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka mencapai kemandirian dan kesejahteraan menuju Indonesia pintar.

2. Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
 - c. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi
 - d. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan
3. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Keasipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, serta Layanan dan Pemanfaatan arsip
 - b. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan bidang erpustakaan, layanan dan Pemanfaatan Perpustakaan, Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka serta Pengembangan Perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemetaan telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.3.1.**Telaah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi**

No	Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah	Tupoksi Dinarspus	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	Menjalankan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di Unit Kearsipan, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenaga fungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo Arsip dan ruang pengolahan
2	Menjalankan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Rendahnya Minat Baca Masyarakat dan Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan, Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan

2 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Visi Perpusnas adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"
2. Misi Perpusnas adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
 - 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
 - 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional
 - 5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
 - 6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

3 LEMBAGA ARSIP NASIONAL

1. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah "Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa"
2. Misi ANRI adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
 - 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
 - 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
 - 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
 - 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;

- 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Tabel 2.3.2.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinarspus	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Masih banyaknya lembaga pemerintahan maupun swasta yang belum menerapkan arsip secara baku	Rendahnya komitmen para stakeholder terkait dengan peran arsip	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip
	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya pengelolaan arsip dengan metode baku dan masih banyaknya bekas arsip yang terkelola secara baku	Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Adanya Undang Undang No. 43 tahun 2009 dan Animo masyarakat yang tinggi terhadap kearsipan
	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Rendahnya minat baca masyarakat dengan indikasi rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Wilayah kerja yang luas, keterbatasan Sarana dan prasarana serta munculnya	Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga swasta melalui program perpuseru dan

			media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain dari buku	dukungan masyarakat
	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa, dan perpustakaan digital	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, wilayah kerja yang luas serta adanya keterbatasan tenaga fungsional	Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pegiat Literasi

4. Isu- isu /Permasalahan dan Hambatan

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan, yang salah satunya adalah fungsi tugas pelayanan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe B, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta

tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural yang minimal hanya dua level yaitu level eselon II dan level eselon III. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional (Sub Koordinator) terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif. Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan per Undang-undang yang berlaku. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3.3.
Pemetaan Permasalahan/Isu-Isu Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Purbalingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca	Kurangnya daya tarik perpustakaan bagi masyarakat, serta munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain buku	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan dan belum adanya database koleksi naskah kuno daerah dan budaya etnis daerah.
2	Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital	Adanya keterbatasan saarpras pendukung, wilayah yang luas serta keterbatasan tenaga fungsional	Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, dan Luasnya cakupan wilayah pelayanan
3	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Rendahnya komitmen stakeholder terkait dengan kearsipan, rendahnya pengetahuan dinas/lembaga/ tentang tata kelola kearsipan dan terbatasnya SDM	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenaga fungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo

		dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Arsip dan ruang pengolahan
4	Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Belum maksimalnya pemberdayaan pegawai	Kurangnya kompetensi pegawai
5	Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip	Kurangnya saran dan prasarana kearsipan	Tidak mempunyai ruang pengolahan arsip dan depo Arsip yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

Berdasarkan tabell tersebut diatas, maka secara umum dapat dijelaskan permasalahan/isu-isu sebagai berikut :

- (1) Masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke perpustakaan yang ada di kabupaten Purbalingga, terutama sekali untuk daerah – daerah yang masih tergolong desa tertinggal,
- (2) Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital, sehingga perlu pendampingan/pembinaan peepustakaan dan peningkatan pengelolaan perpustakaan digital, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kegemaran membaca
- (3) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya, dalam hal kearsipan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip masih rendah, sehingga kepedulian akan arti pentingnya arsip masih

sangat rendah. Bahkan tidak sedikit banyak arsip penting baik milik perorangan maupun organisasi/lembaga yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik

- (4) Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, banyak aparatur yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diembannya sehingga berakibat pada tidak optimalnya unit kerja bersangkutan.
- (5) Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip;
- (6) Belum tersedianya gedung / depo yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, bahwa Visi-nya adalah “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata,

industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut. Dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dalam rangka pemberian layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan lebih dititik beratkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu "Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat" dan misi ke empat yakni "Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, dan program RPJMD 2021 - 2026 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

4. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Tantangan dan Peluang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

1. Peluang

- a. Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan, karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
- b. Peluang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila

didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

2. Tantangan

1. Bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan dan Kearsipan.
2. Pengembangan pengelolaan layanan perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi yang berkembang dengan pesat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di samping itu, dokumen rancancangan awal Rencana Kerja Perubahan juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen rancangan awal kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kesesuaian Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program, kegiatan, dan sub kegiatan, besar anggaran Rencana Kerja murni/awal sebesar Rp 4.456.526.000,- namun setelah ada analisis kebutuhan, dan evaluasi besaran anggaran pada Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 mengalami 2 (dua)kali perubahan yang pertama perubahan efesiensi berkurang Rp. 133.283.000,- dari anggaran murni, perubahan kedua berkurang Rp. 296.776.000,- dari anggaran efesiensi Rp. 4.026.4.64.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

Tabel . 2.4.1.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/Kota Purbalingga

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan RKPD					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Efisiensi	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Perubahan	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pengelolaan Arsip	Purbalingga	Persentase SKPD/Ormas/BUM D/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 persen	32.124.000	Program Pengelolaan Arsip	Purbalingga	Persentase SKPD/Ormas/BUM D/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 persen	32.124.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	23.324.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	23.324.000	
a	<i>Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	3000 berkas	23.324.000	<i>Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	1000 berkas	23.324.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	4.800.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	4.800.000	
a	<i>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	3000 berkas	4.800.000	<i>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	1000 arsip	4.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	4.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	4.000.000	
a	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1 laporan	4.000.000	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	10 laporan	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
B	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Purbalingga	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	21.050.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Purbalingga	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	21.050.000	
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	10.850.000	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	10.850.000	
a	<i>Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	5000 arsip	5.425.000	<i>Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	30 arsip	5.425.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	<i>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	10 arsip	5.425.000	<i>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	30 arsip	5.425.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	10.200.000	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	10.200.000	

a	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	30000 daftar	10.200.000	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	10 daftar	10.200.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
C	Program Pembinaan Perpustakaan	Purbalingga	Rasio Perpustakaan Aktif	2.75 angka	848.915.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Purbalingga	Rasio Perpustakaan Aktif	2.75 angka	855.920.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	100 persen	364.418.000	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	100 persen	363.111.000	
a	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya</i>	1 perpustakaan	98.470.000	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya</i>	1 perpustakaan	97.163.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	250 unit perpustakaan	230.173.000	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	250 unit perpustakaan	230.173.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	333 orang	10.275.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	175 orang	10.275.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Purbalingga	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	700 eksemplar	20.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	270 eksemplar	20.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
e	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 eksemplar	5.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	275 eksemplar	5.500.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	100 persen	484.497.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	100 persen	492.809.000	
a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 lokus	31.260.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 lokus	55.110.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	139.860.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	139.860.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	313.377.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	297.839.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
D	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Purbalingga	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	100 persen	43.414.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Purbalingga	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmedia kan)	100 persen	27.876.000	
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	43.414.000	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	27.876.000	
a	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingga	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	43.414.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingga	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	27.876.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
E	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga			3.377.740.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga			3.089.494.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	4.100.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	4.100.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.100.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

b	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 dokumen	2.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 dokumen	2.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.462.513.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.219.267.000	
a	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 orang	2.411.253.000	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 orang	2.168.007.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	20	26.000.000	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	20	26.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	6 dokumen	25.260.000	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	6 dokumen	25.260.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	<i>Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan</i>	100 persen	2.190.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	<i>Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan</i>	100 persen	2.190.000	
a	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 laporan	2.190.000	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 laporan	2.190.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
4	<i>Administrasi Kepegawaian PD</i>	Purbalingga			1.925.000	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD</i>	Purbalingga	<i>Terlaksannya Diklat, dan pelatihan</i>	10 orang	1.925.000	
a	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya</i>	<i>Terlaksannya a Diklat, dan pelatihan</i>			1.925.000	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya</i>	Purbalingga	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	10 orang	1.925.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	25.650.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	25.650.000	
a	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Purbalingga	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	6 paket	15.930.000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Purbalingga	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	6 paket	15.930.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	2 dokumen	1.920.000	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	2 dokumen	1.920.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 dokumen	2.800.000	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 dokumen	2.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	798.632.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	755.632.000	
a	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Purbalingga	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	1 laporan	432.000	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Purbalingga	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	1 laporan	432.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	184.395.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	164.395.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	613.805.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	590.805.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	82.730.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	80.730.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	77.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	77.650.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.080.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.080.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
JUMLAH					4.323.243.000,-					4.026.464.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan/Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2025. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*), berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang yang langsung ditujukan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas, usulan program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025.

Untuk tahun 2025 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5.1.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kabupaten Purbalingga
Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Purbalingga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/Rekomendasi OPD
1	PENGELOLAAN ARSIP	Toyareja	Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Pempdes	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
2	PENGELOLAAN ARSIP	Panunggalan	Kerasipan di Desa masih berantakan dan Agar bisa lebih tertib dalam administrasi desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
3	PENGELOLAAN ARSIP	Larangan	penyuluhan dan pelatihan kearsipan Desa yang belum memadai dan akurat	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
4	PENGELOLAAN ARSIP	Pengadegan	Minimnya SDM dan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan Desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
5	PENGELOLAAN ARSIP	Tegalpingen	masih kurangnya wawasan tentang kearsipan desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien :

					1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
6	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Banjaran	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
7	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kembaran Wetan	Perpustakaan Desa belum berjalan dengan baik	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
8	PENGELOLAAN ARSIP	Galuh	Kurangnya Tatakelola Kearsipan Desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
9	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Serang	kurangnya koleksi buku dan literasi di Perpustakaan Desa Serang	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
10	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Palumbungan Wetan	Buku-buku untuk perpustakaan masih kurang, perlu menambah jumlah buku yang sudah ada	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
11	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bungkanel	Tidak tersedianya gedung perpustakaan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa

					Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
12	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rajawana	SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN MASIH KURANG MEMADAI	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
13	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tlahab Kidul	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
14	PENGELOLAAN ARSIP	Karangreja	kurangnya pengetahuan tentang pengarsipan desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
15	PENGELOLAAN ARSIP	Karanggedang	Masih kurang tertibnya dokumen administrasi desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
16	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Gembong	antusias membaca warga yang cukup tinggi tetapi fasilitas penunjang berupa buku bacaan di perpus desa yang masih terbatas	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
17	PENGELOLAAN ARSIP	Cilapar	Arsip desa masih memprihatinkan dan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan

			kurang tertata dengan baik		kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
18	PENGELOLAAN ARSIP	Jambudesa	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
19	PENGELOLAAN ARSIP	Tidu	Kearsipan Desa yang masih berantakkan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
20	PENGELOLAAN ARSIP	Cipawon	Kurangnya prasarana Kearsipan Desa	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
21	PENGELOLAAN ARSIP	Bajong	penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan arsip yang lebih transparan, tertib, informatif dan maksimal dalam pelayanan permintaan kebutuhan data dan arsip, serta maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan arsip,	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000

22	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sanguwatang	Kuranagnya pemahaman perpustakaan dan Kurangnya minat baca masyarakat	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
23	PENGELOLAAN ARSIP	Pasunggingan	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
25	PENGELOLAAN ARSIP	Pandansari	Belum Tetatnya Administrasi pemdes dengan Baik	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
25	PENGELOLAAN ARSIP	Karangaren	kearsipan desa masih belum rapi dan berantakan, sehingga sangat diperlukan pelatihan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
26	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bancar	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Kurang referensi buku	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
27	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kalapacung	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan, Kurang referensi buku dan alat penunjang lainnya	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2025 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020- 2025 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan

pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Perangkat Daerah
Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk tertib arsip	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional		
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Dalam Mendukung misi Bupati Kabupaten Purbalingga, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan

urusan Kearsipan masuk pada misi ke-1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Perpustakaan berdasarkan Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.1.

Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

MISI	TUJUAN	SASARAN
Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan

Tabel. 3.2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan		Indeks Kearsipan	84,10
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku	70
	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi	13
			Nilai SAKIP	73,05
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk (idealnya ada 1 perpustakaan setiap 10ribu penduduk)	4,08

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang juga merupakan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program operasional 16 (enambelas) kegiatan dan 31 (tigapuluh satu) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota

- a.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b.** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c.** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi ASN
- d.** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e.** Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f.** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- g.** Kegiatan Pengadaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- h.** Kegiatan Pemeliharaanaan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Pengelolaan Arsip

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
 - Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaring Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan'

- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pengabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.
 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

4. Program Pembinaan Perpustakaan

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Bahan Pustaka
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Budaya Baca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

5. Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang di Miliki oleh Masyarakat untuk di Lestarkan dan di Dayagunakan.

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Renja Perubahan disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2025. Renja Perubahan ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Pendanaan Indikatif program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 dan perkiraan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.026.464.000,- dan Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, dengan rincian pada table dibawah ini :

Tabel. 4.1

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah**

				Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran Murni Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	25	02				Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Dinarspus	100 persen	48.436.000	DAU		100 persen	32.124.000
2	25	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	Dinarspus	71,25 persen	30.836.000	DAU		71,25 persen	23.324.000
2	25	02	2	01	01	<i>Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	Dinarspus	2000 berkas	30.836.000	DAU		2000 berkas	23.324.000
2	25	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	Dinarspus	71,25 persen	9.600.000	DAU		71,25 persen	4.800.000
2	25	02	2	02	02	<i>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis</i>	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	Dinarspus	2000 arsip	9.600.000	DAU		2000 arsip	4.800.000
2	25	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	Dinarspus	71,25 persen	8.000.000	DAU		71,25 persen	4.000.000
2	25	02	2	03	02	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinarspus	1 laporan	8.000.000	DAU		1 laporan	4.000.000

2	25	03				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	Dinarspus	100 persen	34.000.000	DAU		100 persen	21.050.000
2	25	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	Dinarspus	100 persen	13.600.000	DAU		100 persen	10.850.000
2	25	03	2	02	01	<i>Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	Dinarspus	2000 arsip	6.800.000	DAU		2000 arsip	5.425.000
2	25	03	2	02	02	<i>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	Dinarspus	2000 arsip	6.800.000	DAU		2000 arsip	5.425.000
2	25	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	Dinarspus	71,25 persen	20.400.000	DAU		71,25 persen	10.200.000
2	25	03	2	03	01	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinarspus	25 daftar arsip/ Dpa	20.400.000	DAU		25 daftar arsip/ Dpa	10.200.000
						BIDANG PERPUSTAKAAN		Dinarspus	100 persen	953.000.000	DAU		100 persen	883.796.000
2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan Aktif	Dinarspus	5,21 persen	900.124.000	DAU		5,21 persen	855.920.000
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan	Dinarspus	15 layanan	390.217.000	DAU		100 persen	363.111.000
2	23	02	2	01	02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>	Dinarspus	1 perpustakaan	112.044.000	DAU		1 Perpustakaan	97.163.000
2	23	02	2	01	05	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	Dinarspus	170 perpustakaan	235.173.000	DAU		170 Perpustakaan	230.173.000

2	23	02	2	01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinarspus	100 orang	15.000.000	DAU		100 Orang	10.275.000
2	23	02	2	01	08	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	Dinarspus	500 eksemplar	20.000.000	DAU		500 Eksemplar	20.000.000
2	23	02	2	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinarspus	500 eksemplar	8.000.000	DAU		500 Eksemplar	5.500.000
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Dinarspus	100 persen	509.907.000	DAU		100 persen	492.809.000
2	23	02	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinarspus	250 lokus	45.000.000	DAU		250 Lokus	55.110.000
2	23	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Dinarspus	6 orang	143.375.000	DAU		6 Orang	139.860.000
2	23	02	2	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Dinarspus	5 perpustakaan	321.532.000	DAU		5 Perpustakaan	297.839.000
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	Dinarspus	100 persen	52.876.000	DAU		100 persen	27.876.000
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Dinarspus	100 persen	52.876.000	DAU		100 persen	27.876.000

2	23	03	2	01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Dinarspus	1 eksemplar	52.876.000	DAU		1 Eksemplar	27.876.000
2	25	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinarspus	100 persen	3.421.090.000	DAU		100 persen	3.089.494.000
2	25	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	8.800.000	DAU		100 persen	4.100.000
2	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinarspus	4 laporan	4.800.000	DAU		4 laporan	2.100.000
2	25	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinarspus	6 laporan	4.000.000	DAU		6 laporan	2.000.000
2	25	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	2.488.664.000	DAU		100 persen	2.219.267.000
2	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinarspus	16 orang	2.411.253.000	DAU		16 orang	2.168.007.000
2	25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinarspus	2 dokumen	52.000.000	DAU		2 dokumen	26.000.000
2	25	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinarspus	1 dokumen	25.411.000	DAU		1 dokumen	25.260.000
2	25	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	2.880.000	DAU		100 persen	2.190.000
2	25	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinarspus	1 laporan	2.880.000	DAU		1 laporan	2.190.000
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinarspus	100 persen	4.000.000	DAU		100 persen	1.925.000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinarspus	16 orang	4.000.000	DAU		16 orang	1.925.000
2	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase hasil laporan administrasi umum yang dihasilkan	Dinarspus	100 persen	35.384.000	DAU		100 persen	25.650.000

2	25	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinarspus	5 paket	24.584.000	DAU		5 paket	15.930.000
2	25	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinarspus	12 dokumen	1.920.000	DAU		12 dokumen	1.920.000
2	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinarspus	12 Laporan	6.000.000	DAU		12 Laporan	5.000.000
2	25	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinarspus	2 dokumen	2.880.000	DAU		2 Dokumen	2.800.000
2	25	01	2	08		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinarspus	0	0	DAU		0	0
2	25	01	2	08	01	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Dinarspus	0	0	DAU		0	0
2	25	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	Dinarspus	100 persen	798.632.000	DAU		100 persen	755.632.000
2	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinarspus	12 laporan	432.000	DAU		12 laporan	432.000
2	25	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinarspus	4 laporan	184.395.000	DAU		4 laporan	164.395.000
2	25	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinarspus	1 laporan	613.805.000	DAU		1 laporan	590.805.000
2	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinarspus	100 persen	82.730.000	DAU		100 persen	80.730.000
2	25	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinarspus	19 unit	77.650.000	DAU		19 unit	77.650.000
2	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinarspus	2 unit	1.080.000	DAU		2 unit	1.080.000

2	25	01	2	09	09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Dinarspus	3 unit	4.000.000	DAU		3 unit	2.000.000
										4.456.526.000	DAU			4.026.464.000

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, merupakan dokumen perubahan perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025. Substansi Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 2021–2026
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja Perubahan yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja Perubahan yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui Rencana Kerja Perubahan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, beserta pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Purbalingga, Juli 2025
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator tidak tercapai antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yang dipengaruhi oleh minat baca, ketersediaan referensi, dan perkembangan teknologi
2. Belum optimalnya pengelolaan perputakaan di Purbalingga
3. Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan yang bersertifikat kompetensi
4. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap arsip
5. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan arsip, dan belum memiliki Depo Arsip

Tabel. 5.1.

Rencana Kerja Perubahan **Program dan Kegiatan** dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada tahun Anggaran 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
Program	Keluaran Sub Kegiatan												
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								Rp 3.768.962.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp 3.768.962.000
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								Rp 203.000.000
j 2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								Rp 178.000.000
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp 113.000.000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp 60.000.000
						-	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	Kab. Purbalingga	-	1 Perpustakaan	-	Rp 60.000.000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota								Rp 10.000.000

					-	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	Kab. Purbalingga	-	160 Perpustakaan	-	Rp 10.000.000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp 15.000.000
					-	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Purbalingga	-	125 Orang	-	Rp 15.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka							Rp 20.000.000
					-	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	-	Kab. Purbalingga	-	400 Eksemplar	-	Rp 20.000.000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka							Rp 8.000.000
					-	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	Kab. Purbalingga	-	500 Eksemplar	-	Rp 8.000.000

2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp	65.000.000
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat								Rp	30.000.000
						-	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	-	Kab. Purbalingga	-	250 Lokus	-	Rp	30.000.000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca								Rp	10.000.000
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	Kab. Purbalingga	-	5 Orang	-	Rp	10.000.000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								25.000.000,00	
						-	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	Kab. Purbalingga	-	5 Perpustakaan	-	25.000.000,00	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								25.000.000,00	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								25.000.000,00	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan								25.000.000,00	

					-	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	Kab. Purbalingga	-	2 Eksemplar	-	25.000.000,00
2	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							Rp 82.436.000
2	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							Rp 48.436.000
2	25	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							Rp 30.836.000
2	25	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							Rp 30.836.000
					-	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-	Kab. Purbalingga	-	1000 Berkas	-	Rp 30.836.000
2	25	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							Rp 9.600.000
2	25	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							Rp 9.600.000
					-	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-	Kab. Purbalingga	-	1000 Arsip	-	Rp 9.600.000
2	25	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							Rp 8.000.000
2	25	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							Rp 8.000.000
					-	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	-	Kab. Purbalingga	-	10 Laporan	-	Rp 8.000.000

							Daerah Kabupaten/Kota							
2	25	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								Rp	34.000.000
2	25	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								Rp	13.600.000
2	25	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana								Rp	6.800.000
						-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	Kab. Purbalingga	-	0 Arsip	-	Rp	6.800.000
2	25	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana								Rp	6.800.000
						-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	Kab. Purbalingga	-	30 Arsip	-	Rp	6.800.000
2	25	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								Rp	20.400.000
2	25	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp	20.400.000
						-	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip	-	Kab. Purbalingga	-	10 Daftar	-	Rp	20.400.000

						bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp 3.483.526.000
2	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp 8.800.000
2	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Rp 4.800.000
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Purbalingga	-	2 Dokumen	-	Rp 4.800.000
2	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp 4.000.000
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Purbalingga	-	6 Laporan	-	Rp 4.000.000
2	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp 2.592.500.000
2	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Rp 2.515.089.000
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Purbalingga	-	20 Orang/bulan	-	Rp 2.515.089.000
2	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Rp 52.000.000
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Purbalingga	-	10 Dokumen	-	Rp 52.000.000
2	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								Rp 25.411.000

					-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kab. Purbalingga	-	10 Dokumen	-	Rp 25.411.000
2	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Rp 2.880.000
2	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							Rp 2.880.000
					-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Purbalingga	-	2 Laporan	-	Rp 2.880.000
2	25	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Rp 4.000.000
2	25	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							Rp 4.000.000
					-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Purbalingga	-	10 orang	-	Rp 4.000.000
2	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							Rp 35.384.000
2	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Rp 25.584.000
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga	-	6 Paket	-	Rp 25.584.000
2	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Rp 1.920.000
					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga	-	2 Dokumen	-	Rp 1.920.000
2	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Rp 6.000.000

					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Purbalingga	-	20 Laporan	-	Rp 6.000.000
2	25	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Rp 2.880.000
					-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kab. Purbalingga	-	2 Dokumen	-	Rp 2.880.000
2	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp 757.232.000
2	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Rp 432.000
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Purbalingga	-	1 Laporan	-	Rp 432.000
2	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Rp 184.395.000
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga	-	10 Laporan	-	Rp 184.395.000
2	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Rp 572.405.000
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga	-	25 Laporan	-	Rp 572.405.000
2	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp 82.730.000
2	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Rp 77.650.000

					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Purbalingga	-	20 Unit	-	Rp 77.650.000
2	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Rp 1.080.000
					-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Purbalingga	-	5 Unit	-	Rp 1.080.000
2	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Rp 4.000.000
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Purbalingga	-	2 Unit	-	Rp 4.000.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN TA 2025												Rp 3.768.962.000



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Bab I	Pendahuluan
1.1.	Latar belakang 1
1.2.	Landasan hukum 2
1.3.	Maksud dan tujuan 5
1.4.	Sistematika penulisannya 6
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD 28
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 39
2.4	Review terhadap RKPD 42
2.5	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat. 56
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 58
3.2	Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 58
3.3	Program dan Kegiatan. 61
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan
	Memuat Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif 82
BAB V	Penutup 92

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	9
Tabel T-C 2-2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	30
Tabel T-C 2.4	Review terhadap RKPD	43
Tabel T-C 2.5	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat.	56
Tabel T-C 3.2	Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	59
Tabel T-C3.3	Program dan Kegiatan	61
Tabel 4.1	Program Kerja & Indikator Kerja.....	84
Tabel 4.2	Kegiatan & Indikator Kegiatan	85
Tabel 4.3	Sub Kegiatan & Indikator Sub Kegiatan	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional bidang pendidikan.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Disamping itu, Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya OPD menyusun Rencana Kerja-OPD dengan mengacu pada RKPD, rencana strategis - OPD , hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar rencana strategis Kementrian Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki rencana kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah , RPJMD dan bahkan RPJPD.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

- b. PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- g. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- s. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2009;
- v. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
- x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Daerah;
- dd. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- ff. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan;
- gg. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Rencana Kerja) 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan untuk menyusun program serta kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Purbalingga 2025 untuk menyusun yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

- a. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
- b. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021-2026.
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
- e. Menyusun program strategis berdasarkan perencanaan berbasis data pada capaian indikator SPM melalui pemanfaatan data dan pemetaan rapor pendidikan
- f. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
disusun dalam empat Bab:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Berisikan latar belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisannya.

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD ;
- 2.4 Review terhadap RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh
Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian kinerja Renja tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan, dengan memetakan program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Tahun 2022	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	persen	100	100	100	100		
						Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	persen	100	100	100	100		
						Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	persen	100	100	100	100		
						Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	100	persen	100	100	100	100		
						Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	persen	100	100	100	100		
						Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	persen	100	100	100	100		

1	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	dokumen	3	3	100	3		
1	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	dokumen	4	4	100	2		
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	12	12	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3217	5659	orang/bulan	4286	5490	128	5658		
1	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	dokumen	19	19	100	30		
							0	0							
1	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	dokumen	12	12	100	4		
1	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	laporan	12	12	100	2		
1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	6	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	orang				3		
1	01	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	orang	250	832	333	100		

1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	12	12	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	paket	1	1	100	2		
1	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	paket	3	3	100	6		
1	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	dokumen	2	2	100	12		
1	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	laporan				5		
1	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4016	2113	laporan	12	12	100	6		
1	01	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	dokumen	12	12	100	2		
1	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	100	100	persen	100	100	100	0		
1	1	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	9	unit	8	8	100	0		
1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	persen	100	100	100	100		
1	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	laporan	1	0	0	1		
1	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	laporan	12	12	100	4		

						Disediakan										
1	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	laporan	2	0	0	1			
1	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	19	laporan	12	12	100	12			
1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	persen	100	100	100	100			
1	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	8	unit	60	60	100	45			
1	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	unit	21	32	152	30			
1	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	unit	1	2	200	1			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,7	103,24	persen	99,75	94.02	4	99.80			
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,27	81,63	persen	95,77	93.56	4	96.27			
						APM PAUD	73	56,57	persen	76	56,90	75	80			
						Presentase PKBM yang terakreditasi	55,56	50	persen	66,67	50	75	77.78			
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	60		persen	62		0	63.00			

1	01	02	2,01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	2	Ruang	18	18	100	6		
1	01	02	2,01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	7	Ruang	25	25	100	8		
1	01	02	2,01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	13	13	Ruang	12	12	100	3		
1	01	02	2,01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	55	45	Unit	39	39	100	27		
1	1	2	2	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	23	21		76	76	100			
1	01	02	2,01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	Ruang	1	1	100	1		
1	01	02	2,01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	Ruang				1		
1	01	02	2,01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	ruang	1	1	100	1		
1	1	2	2	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0	unit	13	13	100	-		
1	01	02	2,01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1743	1603	peserta didik	1568	1714	109	1799		
1	01	02	2,01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5618	5618	paket	32	32	100	4		
1	1	2	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	469	469	satuan pendidikan	469	469	100	-		
1	01	02	2,01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	9	9	peserta didik	790	1020	129	216		

1	01	02	2,01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1120	1109	orang	1256	1143	91	1131		
1	01	02	2,01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66	66	orang	114	114	100	66		
1	01	02	2,01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	18	18	satuan pendidikan	459	459	100	461		
1	01	02	2,01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	602	602	satuan pendidikan	469	469	100	471		
1	01	02	2,01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2	2	orang	469	469	100	461		
1	01	02	2,01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	22	22	ruang	32	32	100	9		
1	01	02	2,01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			ruang				1		
1	01	02	2,01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			Konten Digital				18		
1	01	02	2,01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			Dokumen				2		
1	01	02	2,01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Kegiatan				2		

1	01	02	2,01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Ruang				1		
1	01	02	2,01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Unit				7		
1	01	02	2,01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			orang				100		
1	01	02	2,01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Ruang				23		
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	62	-	persen	62		0	63.00		
1	1	2	2	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	-	Ruang	6	6	100	-		
1	01	02	2,02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	1	1	Ruang				1		
1	01	02	2,02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	5	ruang	2	2	100	1		
1	1	2	2	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang terbangun	3	3							
1	01	02	2,02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	1	ruang	3	3	100	2		
1	01	02	2,02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22	22	unit	7	7	100	3		
1	01	02	2,02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	23	ruang	20	20	100	17		
1	1	2	2	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	6	ruang	1	1	100	-		

1	01	02	2,02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	ruang	5	5	100	-		
1	01	02	2,02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	ruang	2	2	100	1		
1	01	02	2,02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	21	ruang	5	5	100	5		
1	01	02	2,02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	14	unit	25	25	100	4		
1	01	02	2,02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77	77	peserta didik	70	70	100	70		
1	01	02	2,02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	184	184	paket	7	7	100	5		
1	1	2	2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah	11.027	10.858	peserta didik	10.744	10.744	100			
1	1	2	2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk penyusunan kurikulum sekolah model	77	77	satuan pendidikan	77	77	100			
1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	77	77	peserta didik	1500	1500	100	77		
1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.043	1.043	orang	611	519	85	518		
1	1	2	2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	150	182							
1	1	2	2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kelembagaan dan manajemen sekolah yang	77	77							

						dibina										
1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	5	5	satuan pendidikan	23	23	100	23			
1	01	02	2,02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5	5	orang	77	77	100	77			
1	01	02	2,02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	100	ruang	4	4	100	4			
1	01	02	2,02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	100	ruang	1	1	100	1			
1	01	02	2,02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			Konten Digital				10			
1	01	02	2,02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Kegiatan				1			
1	01	02	2,02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			Satuan Pendidikan				77			
1	01	02	2,02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Ruang				3			
1	01	02	2,02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			orang				90			
1	01	02	2,02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			orang				1			
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	70		persen	50.5		0	51			

1	1	2	2	1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	2	unit	1	1	100	-		
1	01	02	2,03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13	15	unit	26	26	100	27		
1	01	02	2,03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit				5		
1	01	02	2,03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22	22	unit	8	8	100	7		
1	01	02	2,03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	8	4	paket	5	5	100	2		
1	01	02	2,03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	1	peserta didik	30	46	153	30		
1	01	02	2,03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1542	1488	orang	1547	1469	95	1489		
1	01	02	2,03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2803	2756	orang	2700	2700	100	250		
1	01	02	2,03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5	5	satuan pendidikan	3	3	100	3		
1	01	02	2,03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	644	651	satuan pendidikan	653	653	100	651		
1	01	02	2,03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			Ruang				3		
1	01	02	2,03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Ruang				4		

1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	50	38,89	persen	50,5		0			
1	1	2	2	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300	300	peserta didik	300	300	100			
1	01	02	2,04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	38	38	satuan pendidikan	38	34	89	18		
1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2756	2756	satuan pendidikan	18	17	94	18		
1	01	02	2,04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Peserta Didik				300		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	16,7	46,32	persen	14,62	16,26	111	12.50		
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	5	5	persen	81		0	81.10		
1	01	04	2,01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	2	laporan	2	2	100	2		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	6	6	objek	7	8	114	7		
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	2	2	objek	7		0	7		

2	22	02	2,01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5	5	orang	10	10	100	20		
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2	2	obyek	2		0	2		
2	22	02	2,02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	35	35	objek	7	7	100	2		
2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	2		persen	100	100	100	100		
2	22	02	2,03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8	8	objek	1	1	100	1		
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	70	100	persen	70	70	100	80		
2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	3	kegiatan	3	3	100	3		
2	22	04	2,01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	3	3	orang	2	2	100	1		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan	15	20	persen	20.80	19,14	92.18	15		
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	7	7	obyek	7	7	100	7		
2	22	05	2,01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	2	objek	2	2	100	2		
2	22	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	45	45	cagar	1	1	100	1		
2	22	05	2,02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3	3	objek	45	45	100	45		

2	22	05	2,02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	45	45	objek	3	3	100	1		
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100	100	persen	100	100	100	100		
2	22	06	2,01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan pengunjung museum	220	220	orang	220		0	220		
2	22	06	2,01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100	100	unit	100	100	100	100		
2	22	06	2,01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6	6	unit	1	1	100	1		
2	22	06	2,01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4	4	unit	4	4	100	4		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah sesuai target yang ditetapkan di Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada rencana kerja untuk pengiriman jasa kurir tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya pengiriman surat melalui jasa kurir sehingga ditahun 2023.
 - ❖ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada rencana kerja untuk penyewaan perlengkapan pawai Hari Ulang Tahun Purbalingga dikarenakan tidak adanya penyelenggaraan Pawai HUT Purbalingga sehingga tidak ada realisasi dari target yang di rencanakan
 - b. Program Pengelolaan Pendidikan
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada rencana kerja untuk pembayaran Honor GTT / PTT tingkat Sekolah Dasar dan PTT Korwilcam, dengan target kinerja 1256 orang dengan realisasi sebesar 1143 orang sehingga tidak sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena berkurang 113 orang dikarenakan sejumlah 70 orang diterima PPPK, 40 orang keluar / tidak aktif, 3 orang meninggal dunia
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama pada rencana kerja untuk pembayaran Honor GTT / PTT tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan target kinerja 611 orang dengan realisasi sebesar 519 orang sehingga tidak sesuai target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena adanya sejumlah guru tidak tetap yang diterima PPPK, mengundurkan diri (keluar), serta ada yang meninggal

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah PAUD pada rencana kerja untuk pembayaran Honor GTT / GTY tingkat PAUD dengan target kinerja 1547 orang dengan realisasi sebesar 1469 orang sehingga tidak sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena adanya sejumlah guru tidak tetap/ Guru Tetap Yayasan, mengundurkan diri (keluar), serta ada yang meninggal

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada sub kegiatan:

a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada rencana kerja untuk :

- ❖ Bimtek Verval Dapodik LKP
- ❖ Bimtek IKM PKBM

tidak sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena adanya lembaga dan PKBM yang tidak aktif, dari target 38 satuan pendidikan menjadi 34 satuan pendidikan terdiri dari PKM yang aktif sejumlah 17 lembaga , dan 17 untuk LKP yang aktif

b. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada rencana kerja untuk :

- ❖ Pembayaran BOP Kesetaraan Paket A
- ❖ Pembayaran BOP Kesetaraan Paket B
- ❖ Pembayaran BOP Kesetaraan Paket C

tidak sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena adanya 1 lembaga PKBM yang tidak aktif, dari target 18 PKBM terealisasi 17 PKBM yang aktif

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya mengalami

penurunan Pada tahun 2023 capaian Persentase Pelestarian Cagar Budaya sebesar 19,14%, capaiannya turun dari tahun 2023 karena Cagar Budaya yang ditetapkan SK Bupati sejumlah 58 Cagar Budaya, ada penambahan 1 Cagar Budaya dari seluruh Cagar Budaya sejumlah 303. Jumlah yang ditetapkan dengan SK Bupati sebagai berikut :

1. Situs Tipar Ponjen di Desa Ponjen Kec.Karanganyar
2. Situs Limbasari di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
3. Situs Karangjoho 2 di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
4. Situs Trondol Kidul di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
5. Situs Tipar Palumbungan di Desa. Palumbungan Kec.Bobotsari
6. Situs Limbangan di Desa. Limbasari Kec.Bobotsari
7. Masjid R. Sayyid Kuning di Desa Onje, Mrebet
8. Rumah Dinas Bupati Jl. Alun-alun Utara 1A Purbalingga
9. Kantor Bakeuda Jl. Onje 4 Purbalingga
10. Rumah "Gan Thian Koeij Jl. Serma Jumiran 14 Purbalingga
11. SD Kristen Bina Harapan Jl. Jendral Sudirman 119 Purbalingga
12. Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Jendral Sudirman 131 Purbalingga
13. Markas KODIM 0702 Purbalingga Jl. S. Parman 1 Purbalingga
14. SMP Santo Borromeus Jl. S. Parman 3 Purbalingga
15. Susteran Notre Dame Jl. S. Parman 3 Purbalingga
16. Gedung Pengadilan Negeri Jl. Letnan Akhmadi D80 Purbalingga
17. Tugu Lancip (Sepasang) Jl. Andong Sinawi Km. 9,7 Bobotsari
18. Gardu Belanda Desa Tlahab Lor Jl. Andong Sinawi Km. 15,7 Bobotsari
19. Gardu Belanda Desa Siwarak Jl. Gua Lawa Desa Siwarak, Karangreja
20. Batu Lumpang Desa Buara di Desa Buara Karanganyar
21. Masjid Jami Wali Perkasa di Desa Pekiringan, Karangmoncol
22. Situs Kerkop Jl. S. Parman Bancar Purbalingga
23. SMP N 1 Purbalingga Jl. Alun-alun Selatan Purbalingga
24. Pendapa KH Ahmad Dahlan SMA Muhammadiyah Purbalingga
25. Rumah Joglo Arsawikrama Karangklesem 4/2 Kutasari

26. Arca Ganesha 1 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Cipaku
27. Batu Lumpang 1 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Cipaku
28. Batu Tulis Desa Cipaku / Prasasti Cipaku Pangubonan Cipaku
29. Batu Lingga 2 Cipaku/Lingga Yoni (sebutan Lokal) Dusun Bata Putih Cipaku
30. Batu Lumpang Dusun Bata Putih Cipaku
31. Batu Lingga 1 Cipaku / Lingga Yoni (sebutan Lokal) Dusun Bata Putih Cipaku
32. Petilasan Ki Kantharaga / (Arca Onje / Arca Bungut) Desa Onje, Mrebet
33. Batu Dakon Desa Onje Desa Onje, Mrebet
34. Padestal Arca (nama lokal : Altar) Panusupan Rembang
35. Yoni Penusupan Rembang,
36. Fragmen Yoni (Fragmen Batu Lumpang Pekinangan) Penusupan Rembang,
37. Dolmen Dusun Glempang Rt 5 Rw 9, Dagan Bobot sari
38. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobotsari
39. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobotsari
40. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobot Sari
41. Fragmen Candi Desa Selakambang, Kaligondang
42. Lingga Desa Pandansari Kejobong
43. Lingga 1 Kedungbenda Desa Kedungbenda Kemangkon
44. Yoni Desa Kedungbenda Kemangkon
45. Lingga 2 Kedungbenda Desa Kedungbenda Kemangkon
46. Batu Lumpang Desa Serayukaranganyar, Mrebet
47. Arca Ganesha 2 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Pangubonan
Cipaku
48. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.
49. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.
50. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.
51. Phalus Batu Desa Kedungbenda Desa Kedungbenda, Kemangkon
52. Batu Lumpang Desa Kedungbenda Desa Kedungbenda, Kemangkon
53. Pendapa Kecamatan Bukateja Jl. Argandaru Bukateja
54. SMA Santo Agustinus Kalimanah Purbalingga

55. Jembatan Krudung Pegandekan Sumilir (milik PT KAI)
56. Watu Pengilon / Batu Lumpang Desa Pengalusan 4/2 Mrebet
57. Jembatan Kereta Api Kalimanah Kalimanah
58. Monumen Tempat Lahir Jendral Sudirman Rembang

Persentase Pelestarian Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2023 masih terkendala anggaran yang terbatas sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak dapat melakukan penelusuran atau penelitian tentang benda-benda yang diduga sebagai Cagar Budaya.

2. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar target kinerja program/ kegiatan dapat dicapai diakhir periode renstra adalah :

✚ Kegiatan yang mengalami penurunan dalam pencapaian dikarenakan adanya pengurangan/efisiensi anggaran agar dianggarkan kembali agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga target indikator tercapai.

✚ Jika ada keterbatasan anggaran yang memungkinkan kegiatan mengalami keterhambatan pelaksanaan kegiatan agar teranggarkan kembali maka penganggaran diprioritaskan pada kegiatan yang lebih urgent dan mendesak.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada rencana kerja pembayaran Gaji dan Tunjangan pada PNS dan PPPK
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada rencana kerja untuk :
 - ❖ Festival Ebeg
 - ❖ Festival Kentongan
 - ❖ Pentas Musik
 - ❖ Pentas Kesenian Rakyat
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan :

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada rencana kerja untuk :
 - ❖ Pemeliharaan AC
 - ❖ Pemeliharaan Laptop
 - ❖ Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada rencana kerja untuk :
 - ❖ Pemeliharaan Gedung Kantor Dindikbud
 - ❖ Pemeliharaan gedung Mahesa Jenar

b. Program Pengelolaan Pendidikan

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada sub kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan rencana kerja untuk pemberian Beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah Pada Tahun 2023 Penerima Beasiswa AUSTS sejumlah 1.714 dengan rincian : penerima baru sejumlah 154 orang terdiri dari Paket B : 58 peserta didik, Paket C : 96 orang peserta didik, Penerima Lanjutan sejumlah 1560 orang terdiri dari SD: 978 peserta didik, SMP 555 peserta didik, Paket B 27 orang
 - ❖ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan rencana kerja untuk pelaksanaan lomba/minat bakat kreatifitas siswa Anak pada tingkat Sekolah Dasar pada cabang lomba:
 - Lomba OSN (Olimpiade Sains Nasional)
 - Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)
 - Lomba MAPSI (Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami)
 - Lomba FTBI (Festival Tunas Bahasa Indonesia)
 - Lomba FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional)

Dengan prestasi yang diraih pada tahun 2023 adalah masing masing tingkat provinsi Jawa Tengah : O2SN - SD Juara III Cabang Karate Putra, MAPSI -SD Juara I LKTI Putri, MAPSI -SD Juara II LKTI Putra
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD pada rencana kerja untuk

Operasional untuk TK Negeri Pembina Padamara

c. Program Pengembangan Kebudayaan

Pada program pengembangan kebudayaan dengan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dikarenakan bertambahannya salah satu objek yang dilestarikan dan dimanfaatkan yaitu Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di desa Bantarbarang Kecamatan Rembang

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu:

- (1) Berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan;
- (2) Berdasarkan indikator kinerja kunci sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomer 8 Tahun 2008

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan data pada tabel dibawah membawa implikasi terhadap kebutuhan pengembangan program/kegiatan Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK, Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan, Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.

- 2) Pada Program Pengelolaan Pendidikan perlu upaya: (1) Perbaiki ruang kelas sarana penunjang kegiatan belajar beserta perabotnya bagi sekolah Negeri; (2) Penugasaan guru sesuai kualifikasi yang disyaratkan; (3) Perlu adanya sosialisasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; (4) Pendampingan terhadap satuan PAUD agar memahami cara menyelenggarakan layanan berkualitas bagi anak usia dini sehingga saat diakreditasi lebih siap; (5) Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas yang berkualitas dan berkelanjutan dapat memberikan peningkatan layanan pendidikan secara inklusif, terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa; (6) Perluasan sasaran rehabilitasi ruang kelas; (7) Kecukupan formasi guru dan indeks distribusi guru; (8) Meningkatkan kualitas pembelajaran; (9) Perluasan daya tampung melalui penambahan RKB , USB, pendirian sekolah-sekolah alternatif;

Gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

Tabel T-C 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Harapan Lama Sekolah		11,99	12,01	12,1	12.25	12.38	12,01	12,02	12.25	12.38	
2	Nilai SAKIP DINDIKBUD		69,01	70,01	70,51	71.01	71.51	73,31	73,91	71.01	71.51	
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD)		99,62	99,7	99,75	99.80	99.85	103,24	94.02	99.80	99.85	
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP)		94,27	95,27	95,7	96.27	96.77	81,63	93,56	96.27	96.77	
5	Angka Partisipasi Kasar PAUD		83	86	89	92.00	95.00	86,88	85.19	92.00	95.00	
6	Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari		63,64	64	72,7	72.70	72.70	72,73	72,73	72.70	72.70	
7	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan		60	60	70	70.00	70.00	63.64	70	70.00	70.00	
8	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		15	15	15	15.00	15.00	20.80	19.14	15.00	15.00	
9	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100		100	100	100	100	86.68	57.83	100	100	
10	jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100		100	100	100	100	103,24	85.66	100	100	
11	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100		100	100	100	100	81.63	72.10	100	100	

12	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100		100	100	100	100	100	100	100	
	Pendidikan Anak Usia Dini										
13	Angka Partisipasi Sekolah	84.95						84.95			dasar Rapor Pendidikan
14	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	82.7						82.7			dasar Rapor Pendidikan
15	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV	74.73						74.73			dasar Rapor Pendidikan
	Pendidikan Dasar (SD)										
16	Angka Partisipasi Sekolah	99.37						99.37			dasar Rapor Pendidikan
17	Kemampuan Literasi	71.02						71.02			dasar Rapor Pendidikan
18	Kemampuan Numerasi	50,53						50,53			dasar Rapor Pendidikan
19	Indeks Iklim Keamanan	68.43						68.43			dasar Rapor Pendidikan
20	Indeks Iklim Kebinekaan	70.03						70.03			dasar Rapor Pendidikan
21	Indeks Iklim inklusivitas	55.24						55.24			dasar Rapor Pendidikan
	Pendidikan Dasar (SMP)										
22	Angka Partisipasi Sekolah	96.55						96.55			dasar Rapor Pendidikan
23	Kemampuan Literasi	80.08						80.08			dasar Rapor Pendidikan
24	Kemampuan Numerasi	57.65						57.65			dasar Rapor Pendidikan
25	Indeks Iklim Keamanan	70.96						70.96			dasar Rapor Pendidikan
26	Indeks Iklim Kebinekaan	69.56						69.56			dasar Rapor Pendidikan
27	Indeks Iklim inklusivitas	57.31						57.31			dasar Rapor Pendidikan

	Pendidikan Kesetaraan (SD KESETARAAN)											
28	Angka Partisipasi Sekolah	10,76							10,76			dasar Rapor Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan (SMP KESETARAAN)											
29	Angka Partisipasi Sekolah	10,76							10,76			dasar Rapor Pendidikan
30	Kemampuan Literasi	58,87							58,87			dasar Rapor Pendidikan
31	Kemampuan Numerasi	45,53							45,53			dasar Rapor Pendidikan
32	Indeks Iklim Keamanan	71,19							71,19			dasar Rapor Pendidikan
33	Indeks Iklim Kebinekaan	64,63							64,63			dasar Rapor Pendidikan
34	Indeks Iklim inklusivitas	55,37							55,37			dasar Rapor Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan (SMA KESETARAAN)											
35	Angka Partisipasi Sekolah	10,76							10,76			dasar Rapor Pendidikan
36	Kemampuan Literasi	43							43			dasar Rapor Pendidikan
37	Kemampuan Numerasi	34,29							34,29			dasar Rapor Pendidikan
38	Indeks Iklim Keamanan	68,8							68,8			dasar Rapor Pendidikan
39	Indeks Iklim Kebinekaan	66,08							66,08			dasar Rapor Pendidikan
40	Indeks Iklim inklusivitas	55,07							55,07			dasar Rapor Pendidikan

Adapun penjelasan untuk Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang belum memenuhi target adalah :

1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) Usia 7-12 Tahun

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar
- Adanya anak yang tinggal di daerah perbatasan yang bersekolah di Kabupaten lain
- Faktor ekonomi keluarga sehingga anak ikut bekerja membantu orang tua
- Fasilitas pembelajaran dari satuan Pendidikan
- Minat anak untuk bersekolah

2. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Usia 13-15 Tahun

Permasalahan :

- Masih adanya anak yang bersekolah di luar Kabupaten Purbalingga
- Tren orang tua memasukan anaknya ke pesantren Modern (Boarding School)
- Anak ikut bekerja membantu orang tua karena lemahnya ekonomi keluarga
- Faktor lokasi sekolah
- Fasilitas pembelajaran dari Satuan Pendidikan
- Minat anak untuk bersekolah

3. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD
- Anak usia 3-4 tahun di desa belum disekolahkan.
- Ada anak usia PAUD yang sekolah di lembaga Non Perijinan Dinas/Kemenag

4. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

karena adanya Cagar Budaya yang ditetapkan SK Bupati sejumlah 58 Cagar Budaya, ada penambahan 1 Cagar Budaya dari seluruh Cagar Budaya sejumlah 303.

5. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

✚ **Faktor pendorong:** diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan dimana penduduk usia 5-6 tahun harus memperoleh layanan pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun sebelum masuk ke jenjang SD Sederajat; dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; dan tersedianya satuan

pendidikan anak usia dini yang tersebar di hampir semua desa/kelurahan dengan daya tampung yang cukup.

✚ **Faktor penghambat:** sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting; sebagian satuan pendidikan anak usia dini berbiaya lebih mahal dibandingkan dengan jenjang lainnya; dan sebagian besar satuan pendidikan anak usia dini dikelola oleh masyarakat yang kemampuan finansial, serta kurang lengkapnya sarana prasarana dan manajerialnya sangat terbatas.

✚ **Rekomendasi tindak lanjut:** menambah jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah daerah; menyediakan sarana prasarana yang memadai serta meningkatkan kemampuan manajerial dan finansial satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola masyarakat.

6. Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

✚ **Faktor pendorong:** pelaksanaan Program Penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dengan memberikan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan siswa rentan putus sekolah pada SD/MI.

Selain itu juga adanya Program Anak Tidak Sekolah (ATS), Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan UNICEF dan Institut Teknologi dan Bisnis Semarang sehingga beban biaya yang ditanggung orang tua siswa berkurang; dan dukungan anggaran dan kebijakan Pemerintah Daerah.

✚ **Faktor penghambat:** adanya anak putus sekolah dan siswa rentan putus sekolah; kurangnya motivasi diri dan kurangnya motivasi orangtua; serta adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya; Faktor Fasilitas sarana dan prasarana di beberapa sekolah ada yang belum memenuhi standar kebutuhan sehingga peserta didik mengalami penurunan/kurang minat untuk bersekolah di sekolah tersebut ; Penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) hanya melibatkan sekolah dalam penjangkarnya.

✚ **Rekomendasi tindak lanjut:** Pengadaan sarana dan prasarana sekolah seperti tanah, gedung, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan; Adanya gerakan untuk penanganan Anak Tidak Sekolah dengan membentuk gerakan kembali bersekolah dengan melibatkan berbagai OPD yang ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah; Pembinaan dan konsultasi

7. Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

✚ *Faktor pendorong:* tersedia Beasiswa Kurang Mampu bagi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan siswa rentan putus sekolah pada SMP/MTs serta adanya Bantuan Operasional Sekolah, sehingga mengurangi beban orang tua siswa; pemberian kesempatan yang sama bagi penduduk usia sekolah laki-laki dan perempuan; tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs di setiap kecamatan dengan daya tampung yang cukup; dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

✚ *Faktor penghambat:* adanya anak putus sekolah dan siswa rentan putus sekolah; kurangnya motivasi diri dan kurangnya motivasi orangtua; serta adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya; dan kurangnya motivasi dari orang tua; adanya siswa yang usianya melebihi atau kurang dari kelompok usia jenjang pendidikan; kualitas SMP/MTs belum merata, belum memenuhi keinginan oleh calon siswa lulusan SD/MI, sekalipun dekat dengan tempat tinggalnya; dan menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

✚ *Rekomendasi tindak lanjut:* mengurangi jumlah siswa SMP yang putus sekolah; meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa dan lingkungan; mengurangi jumlah siswa SMP sederajat yang berusia kurang dari 13 tahun dan yang berusia lebih dari 15 tahun; mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah baik status maupun lokasi; dan merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan

Dapat diketahui dari table diatas bahwa target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga diperkirakan 5 indikator dapat dicapai kinerja , 28 indikator menggunakan dasar dari hasil rapor Pendidikan dan 6 indikator perlu Upaya keras diakhir periode Renstra.

3. Capaian indikator SPM tahun 2023 berdasarkan hasil dari Rapor Pendidikan terdiri dari:

- Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator prioritas :

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	84.95
2	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	untuk Skor capaian Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B pada tahun ini adalah	82.7
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV	Jumlah guru PAUD formal yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 dibagi dengan total guru di seluruh satuan pendidikan PAUD formal.	untuk Skor capaian Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV pada tahun ini adalah	74.73

➤ Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) dengan indikator prioritas :

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	99.37
2	Kemampuan Literasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	untuk Skor capaian Kemampuan Literasi pada tahun ini adalah	71.02
3	Kemampuan Numerasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	untuk Skor capaian Kemampuan Numerasi pada tahun ini adalah	50,53
4	Indeks Iklim Keamanan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik	untuk Skor capaian Indeks Iklim Keamanan pada tahun ini adalah	68.43
5	Indeks Iklim Kebinekaan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	untuk Skor capaian Indeks Iklim Kebinekaan pada tahun ini adalah	70.03
6	Indeks Iklim inklusivitas	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	untuk Skor capaian Indeks Iklim inklusivitas pada tahun ini adalah	55.24

➤ Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama) dengan indikator prioritas :

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	96.55
2	Kemampuan Literasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	untuk Skor capaian Kemampuan Literasi pada tahun ini adalah	80.08
3	Kemampuan Numerasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	untuk Skor capaian Kemampuan Numerasi pada tahun ini adalah	57.65
4	Indeks Iklim Keamanan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik	untuk Skor capaian Indeks Iklim Keamanan pada tahun ini adalah	70.96
5	Indeks Iklim Kebinekaan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	untuk Skor capaian Indeks Iklim Kebinekaan pada tahun ini adalah	69.56
6	Indeks Iklim inklusivitas	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	untuk Skor capaian Indeks Iklim inklusivitas pada tahun ini adalah	57.31

➤ Pendidikan Kesetaraan (SD Kesetaraan) dengan indikator prioritas:

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	10.76
---	---------------------------	---	--	-------

➤ Pendidikan Kesetaraan (SMP Kesetaraan) dengan indikator prioritas:

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	10,76
2	Kemampuan Literasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	untuk Skor capaian Kemampuan Literasi pada tahun ini adalah	58,87
3	Kemampuan Numerasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	untuk Skor capaian Kemampuan Numerasi pada tahun ini adalah	45,53

4	Indeks Iklim Keamanan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik	untuk Skor capaian Indeks Iklim Keamanan pada tahun ini adalah	71,19
5	Indeks Iklim Kebinekaan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	untuk Skor capaian Indeks Iklim Kebinekaan pada tahun ini adalah	64,63
6	Indeks Iklim inklusivitas	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	untuk Skor capaian Indeks Iklim inklusivitas pada tahun ini adalah	55,37

➤ Pendidikan Kesetaraan (SMA Kesetaraan) dengan indikator prioritas :

1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan.	untuk Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun ini adalah	10,76
2	Kemampuan Literasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	untuk Skor capaian Kemampuan Literasi pada tahun ini adalah	43
3	Kemampuan Numerasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	untuk Skor capaian Kemampuan Numerasi pada tahun ini adalah	34,29
4	Indeks Iklim Keamanan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik	untuk Skor capaian Indeks Iklim Keamanan pada tahun ini adalah	68,8
5	Indeks Iklim Kebinekaan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	untuk Skor capaian Indeks Iklim kebinekaan pada tahun ini adalah	66,08
6	Indeks Iklim inklusivitas	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	untuk Skor capaian Indeks Iklim inklusivitas pada tahun ini adalah	55,07

2.3. Isu isue Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi kesiswaan, pembinaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi kesiswaan, pembinaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi kesiswaan, pembinaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan
- 4) Pelaksanaan Evaluasi bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi kesiswaan, pembinaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
- 5) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINDIKBUD;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan UPTD;
- 7) Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari permasalahan yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun Masyarakat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
- b) APM PAUD masih cukup rendah , pada tahun 2023 capaian APM PAUD sebesar 57,83%

- c) APM SD/MI belum mencapai 100%, sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, Capaian APM SD/MI sebesar 85,66%
- d) APM SMP/MTs belum mencapai 100%, sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, Capaian APM SMP/MTs sebesar 72,10%
- e) Belum optimalnya pengelolaan sekolah hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya kualifikasi guru mengajar di semua jenjang dan masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan
- f) Masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah
- g) Kondisi PAUD Formal, SD,SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar masih rendah.
- h) Belum semua lulusan SD melanjutkan sekolah ke SMP di Purbalingga
- i) Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PAUD,SD,dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- j) Sampai dengan tahun 2023 pemenuhan Standar Pelayanan Minimal belum mencapai 100%
- k) Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan sebesar 72,73%
- l) Belum optimalnya kesenian tradisional yang dibina.

Dampak kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga terhadap pencapaian visi , misi kepala daerah terhadap NSPK, SPM, dan SDGs akan menjadi baik.

Program Unggulan (Pemerintah) misi 4. di tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kesejahteraan untuk GTT dan PTT
2. Penanganan AUSTS
3. Pembangunan Gedung Kesenian

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Purbalingga yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Purbalingga melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran,
2. Luasnya dampak yang ditimbulkan,

3. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan,
4. Kemudahan untuk dikelola.

Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk lebih meningkatkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD tahun 2023 yang sudah mencapai 85.19% akan terus tetap baik atau meningkat lagi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)
Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK SD 85,19% dan APK SMP sebesar 93.10%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2023 ruang kelas yang baik baru mencapai 10% bahkan yang rusak berat 6% dan ringan mencapai 84%, disamping itu penerapan kurikulum merdeka belajar harus segera dilaksanakan.
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non Formal.
Program Pendidikan Non Formal dititikberatkan pada layanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, sudah meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini kualifikasi pendidik masih rendah khususnya guru SD baru mencapai 59,24% dan Guru TK baru mencapai 21,80%.
5. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter.
Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontonkan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik di tingkat SD dan SMP di Jawa Tengah.

6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Diksus). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus (Diksus) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
7. Masih terbatasnya kualitas/tenaga *skill* dibidang kebudayaan, tidak adanya pamong budaya disetiap kecamatan, kurang akurat dan sedikitnya data, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait baik dalam maupun luar daerah.
8. Masih terbatasnya Literasi Bangga Menulis, Bangga Membaca, Bangga Berkomunitas.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan rencana awal menggunakan dari masing-masing bidang ditambah dengan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Dalam proses perencanaan kita mengevaluasi hasil musrenbang dari kecamatan dengan melihat prioritas usulan dan besarnya anggaran, sepanjang masih memungkinkan untuk masuk plafon anggaran maka kita akan memasukkan hasil musrenbang tersebut ke dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, maka banyak rencana yang berasal dari musrenbang tingkat kecamatan tidak dapat diakomodir dalam Ranwal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Tabel review dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					837.849.326.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					879.741.830.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.80	persen	195.111.744.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.80	persen	204.867.360.000	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96.27	persen				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96.27	persen		
			APM PAUD	80	persen				APM PAUD	80	persen		
			Presentase PKBM yang terakreditasi	77.78	persen				Presentase PKBM yang terakreditasi	77.78	persen		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	63.00	persen	125.487.276.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	63.00	persen	131.761.652.000	
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	Ruang	1.886.416.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	Ruang	1.980.737.000	
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8	Ruang	1.018.736.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8	Ruang	1.069.673.000	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	Ruang	995.458.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	Ruang	1.045.231.000	

4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27	Unit	5.401.148.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27	Unit	5.671.206.000	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	142.663.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	149.797.000	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	99.204.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	104.165.000	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	142.663.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	149.797.000	
8	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	paket	22.302.500.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	paket	23.417.625.000	
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1799	peserta didik	2.032.942.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1799	peserta didik	2.134.590.000	
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4	paket	440.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4	paket	462.000.000	
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	216	peserta didik	267.417.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	216	peserta didik	280.788.000	
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1131	orang	10.499.716.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1131	orang	11.024.702.000	
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66	orang	110.828.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66	orang	116.370.000	

14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	461	satuan pendidikan	722.700.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	461	satuan pendidikan	758.835.000	
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	471	satuan pendidikan	69.147.760.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	471	satuan pendidikan	72.605.148.000	
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	461	orang	1.916.306.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	461	orang	2.012.122.000	
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	9	ruang	3.255.971.000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	9	ruang	3.418.770.000	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	153.663.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	161.347.000	
19	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18	Konten Digital	19.943.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18	Konten Digital	20.941.000	
20	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen	32.901.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen	34.547.000	
21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	7.590.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	7.970.000	
22	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang	366.652.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang	384.985.000	
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7	Unit	552.511.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7	Unit	580.137.000	

			Sedang/Berat						Sedang/Berat				
24	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	orang	90.381.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	orang	94.901.000	
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	Ruang	3.881.207.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	Ruang	4.075.268.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	63.00	persen	36.250.308.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	63.00	persen	38.062.834.000	
26	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	1	Ruang	315.786.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	1	Ruang	331.576.000	
27	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	166.254.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	174.567.000	
28	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	ruang	943.344.000	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	ruang	990.512.000	
29	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	613.913.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	644.609.000	
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	ruang	2.540.386.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	ruang	2.667.406.000	
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang	-	
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	262.240.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	275.352.000	
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	1.042.312.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	1.094.428.000	

34	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	unit	332.899.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	unit	349.544.000	
35	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	paket	15.603.500.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	paket	16.383.675.000	
36	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70	peserta didik	45.392.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70	peserta didik	47.662.000	
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket	5.414.750.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket	5.685.488.000	
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	77	peserta didik	234.236.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	77	peserta didik	245.948.000	
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	518	orang	3.415.698.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	518	orang	3.586.483.000	
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	23	satuan pendidikan	3.695.340.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	23	satuan pendidikan	3.880.107.000	
41	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77	orang	34.087.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77	orang	35.792.000	
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	132.605.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	139.236.000	
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	55.055.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	57.808.000	

44	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10	Konten Digital	13.684.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10	Konten Digital	14.369.000	
45	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	8.382.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	8.802.000	
46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	77	Satuan Pendidikan	183.523.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	77	Satuan Pendidikan	192.700.000	
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang	949.461.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang	996.935.000	
48	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90	orang	85.431.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90	orang	89.703.000	
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	orang	162.030.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	orang	170.132.000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51	persen	27.472.067.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51	persen	28.845.675.000	
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	27	unit	2.101.759.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	27	unit	2.206.847.000	
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	722.596.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	758.726.000	
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	unit	621.500.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	unit	652.575.000	
53	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang	2	paket	146.524.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang	2	paket	153.851.000	

			Tersedia						Tersedia				
54	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	30	peserta didik	31.311.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	30	peserta didik	32.877.000	
55	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1489	orang	9.715.121.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1489	orang	10.200.878.000	
56	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250	orang	70.135.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250	orang	73.642.000	
57	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3	satuan pendidikan	81.343.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3	satuan pendidikan	85.411.000	
58	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	651	satuan pendidikan	12.118.260.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	651	satuan pendidikan	12.724.173.000	
59	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	Ruang	826.323.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	Ruang	867.640.000	
60	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	Ruang	1.037.195.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	Ruang	1.089.055.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi		persen	5.902.093.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi		persen	6.197.199.000	
61	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18	satuan pendidikan	58.607.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18	satuan pendidikan	61.538.000	
62	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana	18	satuan pendidikan	5.741.890.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana	18	satuan pendidikan	6.028.985.000	

			BOP						BOP				
63	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300	Peserta Didik	101.596.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300	Peserta Didik	106.676.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	12.50	persen	121.706.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	12.50	persen	127.792.000	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Cakupan PTK bersertifikat	81.10	persen	121.706.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Cakupan PTK bersertifikat	81.10	persen	127.792.000	
64	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	121.706.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	127.792.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	642.615.876.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	674.746.678.000	
			Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen	-	
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	-	
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen	-	

			Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen				Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	-	
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	2.192.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	2.302.000	
65	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	1.096.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokum en	1.151.000	
66	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dokumen	1.096.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dokum en	1.151.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	100	persen	640.872.508.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	100	persen	672.916.135.000	
67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5658	orang/bulan	640.652.908.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5658	orang/bulan	672.685.554.000	
68	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	dokumen	74.131.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	dokum en	77.838.000	
69	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokumen	145.469.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokum en	152.743.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	165.534.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	173.811.000	
70	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	165.534.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	173.811.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	605.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	635.250.000	

71	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	4.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	4.620.000	
72	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	orang	600.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	orang	630.630.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	persen	58.602.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	persen	61.534.000	
73	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	2.007.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	2.108.000	
74	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	28.278.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	29.692.000	
75	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	877.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	921.000	
76	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	laporan	4.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	laporan	4.620.000	
77	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan	14.592.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan	15.322.000	
78	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	8.448.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	8.871.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	651.005.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	683.558.000	
79	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	704.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	740.000	

80	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	192.945.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	202.593.000	
81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	6.364.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	6.683.000	
82	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	450.992.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	473.542.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	261.035.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	274.088.000	
83	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	184.837.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	194.079.000	
84	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	15.614.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	16.395.000	
85	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	60.584.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	63.614.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.615.993.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.659.983.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	7	objek	1.736.244.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	7	objek	1.736.244.000	

	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	7	objek	1.231.052.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	7	objek	1.292.605.000	
86	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20	orang	1.231.052.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20	orang	1.292.605.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2	obyek	496.062.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2	obyek	520.866.000	
87	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	objek	496.062.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	objek	520.866.000	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	persen	9.130.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	persen	9.587.000	
88	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	objek	9.130.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	objek	9.587.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80	persen	32.511.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80	persen	34.137.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	kegiatan	32.511.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	kegiatan	34.137.000	
89	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	orang	32.511.000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	orang	34.137.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan	15	persen	33.747.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan	15	persen	35.435.000	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	7	obyek	33.747.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	7	obyek	35.435.000	

90	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	objek	33.747.000	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	objek	35.435.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		jumlah cagar budaya yang dikelola	1	cagar	134.057.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		jumlah cagar budaya yang dikelola	1	cagar	140.761.000	
91	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	45	objek	97.931.000	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	45	objek	102.828.000	
92	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	objek	36.126.000	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	objek	37.933.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100	persen	813.491.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100	persen	854.167.000	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		cakupan pengunjung museum	220	orang	813.491.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		cakupan pengunjung museum	220	orang	854.167.000	
93	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100	unit	231.550.000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100	unit	243.128.000	
94	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	unit	513.049.000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	unit	538.702.000	
95	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4	unit	68.892.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4	unit	72.337.000	
	JUMLAH					840.465.319.000	JUMLAH					882.401.813.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk rencana tahun 2025, tidak terdapat kegiatan yang diusulkan lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi yang lain, hanya terdapat usulan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan yang sudah digabung dengan Ranwal Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Berikut tabel usulan dimaksud.

Tabel T-C 2.5

Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Kertanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
2	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Mrebet	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
3	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Mrebet	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
4	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Mrebet	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
5	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Bobotsari	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
6	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Mrebet	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
7	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Sub Kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Bobotsari	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
8	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kaligondang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025

9	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Karangreja	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
10	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kemangkon	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
11	Program Pengembangan Kebudayaan / Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota/ Sub KegiatanPembinaan sumber daya manusia , lembaga dan pranata kebudayaan	Kaligondang	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
12	Program Pengembangan Kebudayaan / Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota/ Sub KegiatanPembinaan sumber daya manusia , lembaga dan pranata kebudayaan	Kutasari	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
13	Program Pengembangan Kebudayaan / Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota/ Sub KegiatanPembinaan sumber daya manusia , lembaga dan pranata kebudayaan	Kemangkon	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025
14	Program Pengembangan Kebudayaan / Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota/ Sub KegiatanPembinaan sumber daya manusia , lembaga dan pranata kebudayaan	Bobotsari	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 paket	Bisa direkomendasikan di Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Target yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari target - target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan kebijakan Nasional. Target tersebut telah tersaring dari kebijakan nasional ke kebijakan pemerintah daerah, lalu nilai nilai tersebut diadopsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk menjalankan rencana kerja yang akan ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2025 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status social ekonomi. Selain itu fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan Pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ikut berperan untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu Misi yang ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Pada misi ke 4 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pencapaian terwujudnya derajat Pendidikan. Visi dan Misi tersebut menjadi target dasar pemeliharaan dan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang dianalisis dari indikator dan target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yaitu terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas ditunjukkan pada indikator angka harapan lama sekolah dari sebesar 12,02 di Tahun 2023 akan ditargetkan menjadi sebesar 12,25 di Tahun 2025. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ditunjukkan pada indikator nilai SAKIP Dindikbud dari sebesar 70,51 di Tahun 2023 akan ditargetkan menjadi sebesar 71,01 di Tahun 2025.
 - b. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat ditunjukkan pada indikator angka partisipasi sekolah dasar (SD) usia 7-12 tahun dari sebesar 99,75 di Tahun 2023 akan ditingkatkan menjadi sebesar 99,8 di Tahun 2025, angka partisipasi sekolah dasar (SMP) usia 13-15 tahun dari sebesar 95,7 di Tahun 2023 akan ditingkatkan menjadi sebesar 96,27 di Tahun 2025 dan angka partisipasi kasar PAUD dari sebesar 89 di Tahun 2023 akan ditingkatkan menjadi sebesar 92 di Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024	Target 2025
Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas		Angka harapan lama sekolah	12,25	12,38
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP Dindikbud	71,01	71,51
	Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat	Angka partisipasi sekolah (SD) usia 7-12 tahun	99,8	99,85
		Angka partisipasi sekolah (SMP) usia 13-15 tahun	96,27	96,77

		Angka partisipasi kasar PAUD	92.00	95.00
Mewujudkan Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Sejarah		Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari	72.70	72.70
	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan	70.00	70.00
	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	15.00	15.00

- b. Berdasarkan Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yaitu terwujudnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah ditunjukkan pada indikator persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari dari sebesar 72,70 di Tahun 2024 akan ditargetkan sama di Tahun 2025. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :
- Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan ditunjukkan pada indikator persentase obyek pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai perbup 430/400 tahun 2018 yang dilestarikan/dikembangkan dari sebesar 70.00 di Tahun 2024 akan ditargetkan sama di Tahun 2025.
 - Meningkatnya pelestarian cagar budaya ditunjukkan pada indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan pada angka 15 di Tahun 2024 dan akan dipertahankan di Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C 3.3)

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBURUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBURUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4				7	8	9		10
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					708.242.183.000					715.431.333.000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					706.363.480.000					713.718.428.000
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					706.363.480.000					713.718.428.000
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100	persen	592.425.271.000			100	persen	591.792.573.000
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	persen	8.124.000			100	persen	8.492.000
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	Dokumen	7.128.000	DAU		3	Dokumen	7.496.000
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	Laporan	996.000	DAU		2	Laporan	996.000
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	persen	591.251.293.000			100	persen	590.191.007.000

1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5265	Orang/bulan	591.060.929.000	DAU DAU PPPK DAU Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		5265	Orang/bulan	589.991.372.000
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30	Dokumen	47.809.000	DAU		30	Dokumen	67.391.000
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4	Dokumen	142.555.000	DAU		4	Dokumen	132.244.000
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	persen	224.080.000			100	persen	150.485.000
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	Laporan	224.080.000	DAU		2	Laporan	150.485.000
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	persen	51.932.000			100	persen	550.000.000
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3	Orang	-	DAU		3	Orang	4.000.000

1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100	Orang	51.932.000	DBH CHT		100	Orang	546.000.000
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas		100	persen	47.279.000			100	persen	53.465.000
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	Paket	1.824.000	DAU		2	Paket	1.824.000
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	Paket	23.389.000	DAU		6	Paket	25.707.000
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	Dokumen	1.620.000	DAU		12	Dokumen	989.000
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		5	Laporan	3.237.000	DAU		5	Laporan	4.000.000
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	Laporan	10.009.000	DAU		10	Laporan	13.265.000
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2	Dokumen	7.200.000	DAU		2	Dokumen	7.680.000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan		100	persen	14.238.000			100	persen	10.000.000

1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	Unit	14.238.000	DAU		1	Unit	10.000.000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	persen	589.360.000			100	persen	591.821.000
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Laporan	340.000	DAU		1	Laporan	640.000
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	Laporan	173.004.000	DAU		4	Laporan	175.404.000
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	-	DAU		1	Laporan	5.785.000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	416.016.000	DAU		12	Laporan	409.992.000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	persen	238.965.000			100	persen	237.303.000
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45	Unit	173.933.000	DAU		45	Unit	168.033.000
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	Unit	14.194.000	DAU		30	Unit	14.194.000

1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.838.000	DAU	2	Unit	55.076.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,85	persen	113.847.921.000		99,85	persen	121.815.214.000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	64.00.00	persen	78.552.799.000		### ###	persen	83.913.461.000
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	Unit	725.000.000	DAU	9	Unit	4.910.134.000
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-

1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1	Paket	-	Bantkeu		1	Paket	-
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1020	Peserta Didik	965.184.000	DAU		1020	Peserta Didik	243.106.000
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1143	Orang	9.598.764.000	DAU Pendidikan		1143	Orang	9.545.196.000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		95	Orang	24.531.000	DAU		95	Orang	240.752.000
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		461	Satuan Pendidikan	593.665.000	DAU		461	Satuan Pendidikan	657.000.000
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		471	Satuan Pendidikan	60.633.114.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP		471	Satuan Pendidikan	62.861.600.000
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		461	Orang	1.705.791.000	DAU		461	Orang	1.742.096.000

1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18	Konten Digital	718.130.000	DAU	18	Konten Digital	518.130.000
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	Dokumen	25.882.000	DAU	3	Dokumen	29.910.000
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	6.900.000	DAU	2	Kegiatan	6.900.000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit	215.000.000	DAU	3	Unit	214.444.000
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	430	Orang	82.164.000	DAU Pendidikan	430	Orang	82.164.000

1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	1.055.002.000	DAU	1	Ruang	659.451.000
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1746	Peserta Didik	1.857.964.000	DAU	1746	Peserta Didik	1.848.129.000
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4	Paket	345.708.000	DAU DAK Fisik	4	Paket	354.449.000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	64.00.00	persen	7.801.943.000		### ###	persen	8.639.887.000
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	Unit	445.502.000	DAU	2	Unit	558.102.000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	420.000.000	DAU	1	Ruang	656.224.000
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-

1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	DAK Fisik	1	Unit	150.000.000
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0	Paket	-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	Paket	-
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18329	Peserta Didik	40.265.000	DAU	18329	Peserta Didik	41.265.000
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000	Peserta Didik	188.881.000	DAU	3000	Peserta Didik	212.941.000
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	540	Orang	2.495.232.000	DAU Pendidikan	540	Orang	3.105.180.000

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	23	Satuan Pendidikan	3.678.168.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP	23	Satuan Pendidikan	3.359.400.000
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	234	Orang	30.988.000	DAU	234	Orang	30.988.000
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15	Konten Digital	10.540.000	DAU	15	Konten Digital	12.440.000
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	5.000.000	DAU	1	Dokumen	5.000.000
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	7.620.000	DAU	2	Kegiatan	7.620.000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	60	Satuan Pendidikan	165.859.000	DAU	60	Satuan Pendidikan	166.839.000
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	390	Orang	77.664.000	DAU Pendidikan	390	Orang	77.664.000

1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	DAK Fisik	0	Ruang	-
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2	Paket	236.224.000	DAU DAK Fisik	2	Paket	256.224.000
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51.50.00	persen	21.746.163.000		### ###	persen	23.886.227.000
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12	Unit	345.700.000	DAU	12	Unit	1.910.690.000
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1543	Orang	8.631.928.000	DAU Pendidikan	154 3	Orang	8.831.928.000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang	120.139.000	DAU	100	Orang	63.759.000
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	Satuan Pendidikan	29.170.000	DAU	50	Satuan Pendidikan	73.948.000
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	643	Satuan Pendidikan	10.591.200.000	DAU DAK Non Fisik-Dana BOSP	643	Satuan Pendidikan	11.016.600.000

1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Dokumen	6.000.000	DAU		1	Dokumen	9.400.000
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		2	Ruang	-	DAK Fisik		2	Ruang	251.202.000
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		3	Ruang	-	DAK Fisik		3	Ruang	364.128.000
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7	Unit	550.000.000	DAU		7	Unit	565.000.000
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		2	Paket	1.465.438.000	DAU DAK Fisik		2	Paket	133.203.000
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		1	Satuan Pendidikan	6.588.000	DAU		1	Satuan Pendidikan	9.464.000
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5	Ruang	-	DAK Fisik		5	Ruang	656.905.000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi		51.50.00	persen	5.747.016.000			### ###	persen	5.375.639.000
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		25	Peserta Didik	95.500.000	DAU		25	Peserta Didik	500.000

1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17	Satuan Pendidikan	19.204.000	DAU	17	Satuan Pendidikan	53.279.000
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	17	Satuan Pendidikan	5.607.900.000	DAK Non Fisik-BOP	17	Satuan Pendidikan	5.219.900.000
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20	Dokumen	3.606.000	DAU	20	Dokumen	9.600.000
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17	Peserta Didik	20.806.000	DAU	17	Peserta Didik	92.360.000
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	10,38	persen	90.288.000		10,38	persen	110.641.000
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	81.20.00	persen	90.288.000		### ###	persen	110.641.000
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Laporan	90.288.000	DAU	2	Laporan	110.641.000

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.878.703.000					1.712.905.000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.878.703.000					1.712.905.000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	8	objek	1.113.213.000			8	objek	791.265.000
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	7	obyek	169.518.000			7	obyek	332.000.000
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20	Orang	169.518.000	DAU		20	Orang	332.000.000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2	obyek	935.395.000			2	obyek	450.965.000
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	Objek	935.395.000	DAU		2	Objek	450.965.000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	persen	8.300.000			100	persen	8.300.000
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	Objek	8.300.000	DAU		1	Objek	8.300.000

2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan		100	persen	12.326.000			100	persen	29.555.000
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan		2	kegiatan	12.326.000			2	kegiatan	29.555.000
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		100	Orang	12.326.000	DAU		100	Orang	29.555.000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		19.14	persen	124.241.000			19.14	persen	152.548.000
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan		1	obyek	30.129.000			1	obyek	30.679.000
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		1	Objek	30.129.000	DAU		1	Objek	30.679.000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola		45	cagar	94.112.000			45	cagar	121.869.000
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		45	Objek	88.191.000	DAU		45	Objek	89.028.000
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		2	Objek	5.921.000	DAU		2	Objek	32.841.000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda koleksi museum yang dikelola		100	persen	628.923.000			100	persen	739.537.000
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan pengunjung museum		6000	orang	628.923.000			6000	orang	739.537.000
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		1182	Unit	178.324.000	DAK Non Fisik		1182	Unit	210.500.000

2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		1	Unit	388.358.000	DAU DAK Non Fisik		1	Unit	466.408.000
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		7	Unit	62.241.000	DAU DAK Non Fisik		7	Unit	62.629.000
J U M L A H										708.242.183.000					715.431.333.000

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Memberantas kemiskinan merupakan tujuan pertama diciptakannya program Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun program yang direncanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberantas kemiskinan meliputi pengelolaan dana pada Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan pada sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik;
2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
4. Pengelolaan Dana BOS;
5. Pengelolaan Dana BOP PAUD;
6. Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan;
7. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan.

Diharapkan dengan adanya ketujuh sub kegiatan tersebut, peserta didik dapat terus lanjut bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah karena kemiskinan. Karena dengan mengenyam pendidikan yang baik, sumber daya manusia dapat mempunyai harapan untuk masa depannya meskipun pendapatan keluarga mereka terbilang kurang.

Point SDGs pada point 1 dan 4 yaitu 1. Menghapus Kemiskinan dan 4. Pendidikan yang berkualitas sudah termasuk dalam program kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Provinsi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga sudah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai sumber daya yang unggul.

Pencapaian NSPK dan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga terus ditingkatkan. Norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) disusun untuk memperjelas urusan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperjelas standar pelayanan minimal (SPM) sebagai upaya pemberian pelayanan yang tepat kepada masyarakat. NSPK yang telah ditetapkan Kemendikbud berupa hasil belajar siswa secara holistic melalui enam Profil Pelajar Pancasila . Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru sampai kepala sekolah. Program Sekolah Penggerak bukan membedakan antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Namun tetap memantau

pelaksanaan di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi. Adapun komitmen yang diberikan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah adalah mulai dari SDM Sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Sekolah Penggerak adalah mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM. Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendampingan konsultatif dan asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencari solusi jika terjadi kendala di lapangan.
- 2) Melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.
- 3) Melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Adapun perencanaan berbasis data

- 4) Menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan.
- 5) Digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan

Jika rumusan program tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya maka akan ditindaklanjuti kembali untuk perevisian dana dan kegiatan, dikarenakan diharuskan ada beberapa kesesuaian yang akan berubah berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan yang tidak mungkin berubah secara cepat. Jika ada yang diubah diharuskan adanya kembali sosialisasi baik melalui surat edaran, atau melalui zoom meeting, dan juga akan dipertimbangkan beberapa saran dari

pihak sekolah-sekolah dan pihak yang berwenang dan berkaitan.

Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program utama yang tetap dipertahankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah 7 (tujuh) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

Program pengelolaan pendidikan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan terselenggarakannya proses belajar yang lancar dan efektif. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang program ini adalah;

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 8 Pengadaan Mebel Sekolah
- 9 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 13 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 14 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
- 19 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

- 20 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 21 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- 22 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 24 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3 Pembangunan Laboratorium
- 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 10 Pengadaan Mebel Sekolah
- 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
- 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
- 19 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 20 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- 21 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 22 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 23 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

3. Pengelolaan Pendidikan PAUD

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
5. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
9. Pengelolaan Dana BOP PAUD
10. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Terdapat tujuh fokus utama yaitu kepada peserta didik (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, Pengelolaan Dana BOS, Pengelolaan Dana BOP PAUD, Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan, Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan SDGs untuk memberantas kemiskinan agar siapapun dapat sekolah dan mengurangi bahkan menghilangkan angka putus sekolah dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

Fokus terhadap tenaga pendidik juga dipertimbangkan melalui Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Program Pengembangan Kebudayaan memiliki 3 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

dengan sub kegiatan Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan;

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Ada

Selain itu bidang kebudayaan Kabupaten Purbalingga juga tidak luput perhatiannya terhadap museum, ataupun cagar budaya dan sejarah yang sudah ada. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Sejarah dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota.

Adapun Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan yaitu:

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya;
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Perlindungan Cagar Budaya dan sub kegiatan Pemanfaatan cagar Budaya.

Sedangkan untuk permuseuman akan dilaksanakan Program Pengelolaan Museum dengan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Perlindungan, Pengembangan dan Oemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan sub

kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut untuk menunjang kelancaran urusan administrasi bidang perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Selain memiliki kegiatan perencanaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga memiliki kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk mengatur kelancaran proses keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Rincian sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Untuk menunjang pengelolaan barang milik daerah yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sub unitnya terdapat kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah menyediakan peralatan rumah tangga dan logistic kantor yang dirinci dalam sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Adapun Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Untuk menyediakan jasa surat menyurat, jasa listrik, internet dan lain-lain untuk kebutuhan kantor terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dirinci dalam sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pemeliharaan gedung/bangunan, kendaraan dan peralatan kantor lainnya direncanakan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Yang direncanakan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga akan dibagi menjadi tujuh point besar untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan. Adapun program untuk Urusan Pendidikan diprioritaskan menjadi dua program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Untuk Urusan Kebudayaan akan di bagi menjadi beberapa program, yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman. Disamping program-program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pendanaan Urusan Pendidikan akan lebih difokuskan kepada Program Pengelolaan Pendidikan yang memiliki prioritas lebih tinggi yaitu total pagu sejumlah Rp. 177.374.295.000,00. dibanding Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki total dana sejumlah Rp.110.641.000,00. Hal tersebut demi tercapainya target nasional, target provinsi, dan target Kabupaten Purbalingga untuk ‘Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.’

Program Pengelolaan Pendidikan untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dikhususkan untuk membangun/memperbaiki sarana prasarana sekolah dan pengelolaan dana BOS dan PAUD. Sedangkan pendanaan pendukung untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidik Dasar, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik, Penyelenggaraan Proses PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Program untuk Urusan Kebudayaan dibagi menjadi 4 (empat) program prioritas yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar

Budaya, Program Pembinaan Sejarah dan Program Pengelolaan Permuseuman. Adapun pendanaan lebih berfokus kepada program pengembangan kebudayaan yang memiliki dana sebesar Rp. 1.578.403.000,00. dengan Rencana Kerja berupa ‘Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota’. Sedangkan untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mendapat dana kelola sebesar Rp.450.965.000,00. dan untuk program Pembinaan Sejarah mendapat dana sebesar Rp.29.555.000,00 serta untuk Program Pengelolaan Permuseuman mendapat dana sebesar Rp.739.537.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah juga mendapatkan perhatian. Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.1.992.000,00. Bidang Administrasi Keuangan Perangkat daerah mendapatkan dana sebesar Rp.582.611.369.000,00. Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.53.273.000,00. Bidang Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp150.485.000,00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.550.000.000,00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan dana kelola sebesar Rp.591.821.000,00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan dana sebesar Rp. 217.303.000,00.

Indikator yang akan dicapai melalui pelaksanaan program-program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 1. Indikator yang akan dicapai yaitu : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar,
 2. Indikator yang akan dicapai yaitu : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama,
 3. Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 tahun
 4. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase PKBM yang terakreditasi.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan PTK bersertifikat.
3. Program Pengembangan Kebudayaan.

Indikator yang akan dicapai yaitu : Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Indikator yang dicapai yaitu : jumlah juru pelihara cagar budaya, jumlah cagar budaya, dan cakupan cagar budaya yang dikonservasi.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Indikator yang dicapai yaitu : kunjungan museum dan monumen.

6. Program Pembinaan Sejarah

Indikator yang dicapai yaitu : Persentase sejarah lokal yang dilestarikan

Tabel 4.1
Program Kerja dan Indikator Kinerja

No	Program Kerja	Indikator Kinerja	Target
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.80 persen
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96.27 persen
		APM PAUD	80 persen
		Persentase PKBM yang terakreditasi	77.78 persen
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	12.50 persen
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	7 objek
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80 persen
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan	15 persen
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100 persen

Tabel 4.2

Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sumber Dana
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	63.00 persen	DAU, DAK
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	63.00 persen	DAU, DAK
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51 persen	DAU, DAK
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	persen	DAU, DAK
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	81.10 persen	DAU
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	100 persen	DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100 persen	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	DAU
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	7 objek	DAU
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2 obyek	DAU
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100 persen	DAU
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			

	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3 kegiatan	DAU
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	7 obyek	DAU
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	1 cagar	DAU
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan pengunjung museum	220 orang	DAU, DAK

Tabel 4.3
Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27 Unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 paket
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	216 peserta didik
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1131 orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	461 satuan pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	471 satuan pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	461 orang

	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	9	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18	Konten Digital
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	Unit
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	orang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	Ruang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1799	peserta didik
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4	paket
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	unit
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	paket

	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70	peserta didik
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	77	peserta didik
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	518	orang
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	23	satuan pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77	orang
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10	Konten Digital
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Kegiatan
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	77	Satuan Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90	orang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	orang
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	27	unit
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1489	orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250	orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3	satuan pendidikan

	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	651	satuan pendidikan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	Ruang
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	unit
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2	paket
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	30	peserta didik
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18	peserta didik
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18	satuan pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18	satuan pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300	Peserta Didik
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5658	orang/bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	dokumen

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20	orang
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	objek
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	objek
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	orang
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	objek
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	45	objek
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	objek
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100	unit
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	unit
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4	unit

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2025, sekaligus sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Beberapa tugas penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat terkait dengan isu-isu strategis nasional seperti :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Pendidikan
2. Pencapaian SPM Pendidikan
3. Pencapaian Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)
4. Pencapaian Salah Satu Upaya Tidak Langsung dalam Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir isu-isu strategis di atas dan dimaksimalkan untuk pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat yang akan diambil untuk Pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 kepada Bappelitbangda melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Purbalingga, 30 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA KERJA (RENJA)
(Ranhir Perubahan)
TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat diselesaikan dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2025.

Dengan telah tersusunya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, semoga Renja Perubahan DPMPTSP ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai target, Amien.

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	lii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	2
3.1 Maksud dan Tujuan	3
4.1 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	17
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP	24
(Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	
BAB IV. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II
Tabel 2.2.1	Rekapitulasi Realisasi Investasi Baru/Pengembangan di Kabupaten Purbalingga
Tabel 2.2.2	Rekapitulasi Kinerja Layanan Perizinan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 (sampai dengan Triwulan II)
Tabel 3.1.1	Rekapitulasi Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi OPD, mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah :

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (sampai dengan triwulan II) yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perencanaan.
- b. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.
- c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan pergeseranprioritas daerah.
- d. Adanya penggeseran baik penambahan ataupun pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan belanjanya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
 17. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Purbalingga, sehingga terwujud

sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Sebagai dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut:

- Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
- Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab II ini berisi tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

(Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPSTSP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.

REKAPITULASI RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan /Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Program dan Kegiatan			Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Lenih/Kurang	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
2 18	PENANAMAN MODAL		-	-	-	-	4.073.332.000	1.841.507.488	2.231.824.512)	45,21
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	persen	100	100	100	3.663.471.000	1.765.849.988	(1.897.621.012)	48,20
2 18 01 2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	persen	100	100	100	488.000	210.000	(278.000)	43,03
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka)	dokumen	2	2	100	200.000	-	(200.000)	-
2 18 01 2.01 0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (lkpj, lppd, lkjip, rtp)	laporan	5	5	100	288.000	210.000	(78.000)	72,92
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	2.788.249.000	1.385.779.824	(1.402.469.176)	49,70
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20	20	100	2.730.850.000	1.371.013.748	(1.359.836.252)	50,20
2 18 01 2.02 0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	100	25.669.000	14.766.076	(10.902.924)	57,52
2 18 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	12	6	50	31.730.000	-	(31.730.000)	-

2	18	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	50	50	3.700.000	-	(3.700.000)	-
2	18	01	2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	laporan	12	6	50	3.700.000	-	(3.700.000)	-
2	18	01											
2	18	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	persen	100	100	100,00	4.000.000	-	(4.000.000)	-
2	18	01	2.05 0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	4	4	100,00	4.000.000	-	(4.000.000)	-
2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum	persen	100	50	50,00	34.273.000	11.991.946	(22.281.054)	34,99
2	18	01	2.06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	6	50,00	2.022.000	2.017.000	(5.000)	99,75
2	18	01	2.06 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	6	50,00	17.926.000	.964.946	(10.961.054)	38,85
2	18	01	2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	12	6	50,00	1.100.000	600.000	(500.000)	54,55
2	18	01	2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	6	50,00	3.505.000	-	(3.505.000)	-
2	18	01	2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan	12	6	50,00	6.720.000	2.410.000	(4.310.000)	35,86
2	18	01	2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	12	6	50,00	3.000.000	-	(3.000.000)	-

2	18	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	0	0,00	26.192.000	360.000	(25.832.000)	1,37
2	18	01	2.07 0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	6	0	0,00	26.192.000	360.000	(25.832.000)	1,37
2	18	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	50	50,00	651.795.000	277.777.868	(374.017.132)	42,62
2	18	01	2.08 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	6	50,00	360.000	200.000	(160.000)	55,56
2	18	01	2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	6	50,00	181.435.000	77.103.457	(104.331.543)	42,50
2	18	01	2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	6	50,00	3.600.000	-	(3.600.000)	-
2	18	01	2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	6	50,00	466.400.000	200.474.411	(265.925.589)	42,98
2	18	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100,00	154.774.000	89.730.350	(65.043.650)	57,98
2	18	01	2.09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	17	17	100,00	93.952.000	50.702.920	(43.249.080)	53,97
2	18	01	2.09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	12	12	100,00	6.822.000	3.485.930	(3.336.070)	51,10

2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehab gedung kantor	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	100,00	54.000.000	35.541.500	(18.458.500)	65,82
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	persen	100		0,00	114.220.000	1.639.500	(112.580.500)	1,44
2	18	02	2.01		<u>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	jumlah	1		0,00	8.550.000	-	(8.550.000)	-
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	dokumen	1		0,00	6.300.000	-	(6.300.000)	-
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	2		0,00	2.250.000	-	(2.250.000)	-
2	18	02	2.02		<u>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</u>	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	sektor usaha	2		0,00	105.670.000	1.639.500	(104.030.500)	1,55
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM daerah kabupaten/kota	dokumen	1		0,00	3.650.000	1.639.500	(2.010.500)	44,92
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	dokumen	1		0,00	102.020.000	-	(102.020.000)	-
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi	persen	100		0,00	133.320.000	180.500	131.139.500	1,64
2	18	03	2.01		<u>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	pelaku usaha	10		0,00	133.320.000	2.180.500	(131.139.500)	1,64

2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	3	2	66,67	31.770.000	2.180.500	(29.589.500)	6,86
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	1		0,00	101.550.000	-	(101.550.000)	-
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	99,00	100,00	101,01	61.376.000	29.374.000	(32.002.000)	47,86
2	18	04	2.01		<u>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMPTSP	jenis	114	114	100,00	61.376.000	29.374.000	(32.002.000)	47,86
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	pelaku usaha	12000	5324	44,37	55.353.000	28.074.000	(27.279.000)	50,72
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	kegiatan usaha	13	8	61,54	6.023.000	1.300.000	(4.723.000)	21,58
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	100		0,00	94.130.000	40.000.000	(54.130.000)	42,49

2	18	05	2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	pelaku usaha	200		0,00	94.130.000	40.000.000	(54.130.000)	42,49
2	18	05	2.01 0004	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	8		0,00	5.280.000	-	(5.280.000)	-
2	18	05	2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	pelaku usaha	200		0,00	64.550.000	16.250.000	(48.300.000)	25,17
2	18	05	2.01 0006	Pengawasan Penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	kegiatan usaha	44	45	102,27	24.300.000	23.750.000	(550.000)	97,74
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	38,24	38,24	6.815.000	2.463.500	(4.351.500)	36,15
2	18	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	dokumen	18000	6884	38,24	6.815.000	2.463.500	(4.351.500)	36,15

2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data yang terintegrasi	dokumen	12000	5324	44,37	6.815.000	2.463.500	(4.351.500)	36,15

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian baik indikator, target kinerja maupun penambahan atau pengurangan pagu anggaran pada tiap tiap kegiatan maupun sub kegiatan serta pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatannya.

Dan dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada tabel 2.1.1 diatas jumlahnya ada 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dan terdapat 21 sub kegiatan yang realisasi anggarannya belum mencapai target 50 % (lima puluh persen) pada triwulan II yaitu:

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
target anggaran sebesar Rp. 200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 100 %.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
target anggaran sebesar Rp. 31.730.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
3. Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada skpd
target anggaran sebesar Rp. 3.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %
4. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi
target anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 100 %.
5. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
target anggaran sebesar Rp. 17.926.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.964.946,- atau (38,85 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
6. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
target anggaran sebesar Rp. 3.505.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
7. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
target anggaran sebesar Rp. 6.720.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.410.000,- atau (35,86 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
8. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada skpd
target anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
9. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin kantor lainnya

- Target anggaran sebesar Rp. 26.192.000,- dan realisasi sebesar Rp. 360.000,- atau (1,37 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
10. Sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
target anggaran sebesar Rp. 181.435.000,- dan realisasi sebesar Rp. 77.103.457,- atau (42,50 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
 11. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Target anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
 12. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Target anggaran sebesar Rp. 466.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.200.474.411,- atau (42,98 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 50 %.
 13. Sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal
target anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
 14. Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota
target anggaran sebesar Rp. 3.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.639.500,- atau (44,92 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
 15. Sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi di kabupaten/kota
target anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
 16. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota
target anggaran sebesar Rp. 31.770.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.180.500,- atau (6,86 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
 17. Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota
target anggaran sebesar Rp. 101.550.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
 18. Sub kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko
target anggaran sebesar Rp. 6.023.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.300.000,- atau (21,58 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 61,54 %.
 19. Sub kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

target anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.

20. Sub Kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha

target anggaran sebesar Rp. 64.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.250.000,- atau (25,17 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 0 %.

21. Sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

target anggaran sebesar Rp. 6.815.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.463.500,- atau (36,15 %) dan realisasi capaian fisik sebesar 44,37 %.

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan II

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya daya Tarik investasi di daerah	Nilai Realisasi investasi	rupiah	1093.000.000.000	616.831.994.771	56,43
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	nilai	75	-	-
	Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan perizinan	Indek kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	indek	96,70	98,24	101,59

A. Evaluasi Kinerja Sasaran:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah :

- Meningkatkan daya tarik investasi di daerah, yang diukur dengan indikator sasaran “Nilai Realisasi Investasi” dengan target Rp.1.093.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 616.831.994.771,- dengan tingkat capaian sebesar 56,43 %;
- Meningkatkan implementasi SAKIP DPMPTSP, yang diukur dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP DPMPTSP” dengan target 75,00 terealisasi sebesar 0 sehingga tingkat capaiannya adalah 0 %;
- Meningkatkan kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan perizinan, yang diukur dengan indikator sasaran “ Indek kepuasan masyarakat terhadap

layanan perizinan” dengan target 96,70 dan terelisir sebesar 98,24 dengan tingkat capaian sebesar 101,59

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa upaya/kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan promosi dilaksanakan dengan kegiatan yaitu melalui CJiBF di Jakarta dan FGD bertempat di MPP Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan kegiatan promosi ini adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya kegiatan promosi ini juga membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Purbalingga untuk dipasarkan lebih luas ke luar Purbalingga.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga secara bertahap.
3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan dan non perizinan maka dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Dan juga guna meningkatkan tertib administrasi perizinan khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta meningkatkan realisasi investasi. Sosialisasi tentang penyusunan laporan kinerja penanaman modal (LKPM).
4. Melaksanakan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha atau pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah, khususnya aparat pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan tugas ini karena adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II, dapat kami uraikan analisis kinerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

A. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 triwulan II, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Rekapitulasi Realisasi Investasi Baru/Pengembangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 – 2025 Triwulan II

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2021	1.462.142.613.812
2.	2022	1.499.620.359.229
3.	2023	1.535.015.624.405
4.	2024	1.001.180.131.135
5.	2025	616.831.994.771

B. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.2

Tabel kinerja layanan perizinan tahun 2021

No	Jenis Izin	Jumlah ijin Terbit Tahun 2021
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	-
2.	Izin Gangguan (HO)	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	322
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	444
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB	2.302
6.	IUI/TDI	45
7.	Izin Reklame	1.026
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	196
9.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	-
10.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	-
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	10
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	8
13.	Izin Bidang Kesehatan	1.333
JUMLAH		5.686

Tabel kinerja layanan perizinan tahun 2022 s/d 2025

No	Jenis Perizinan	Nama Perizinan	Jml Izin yg terbit Tahun 2022	Jml Izin yg terbit Tahun 2023	Jml Izin yg terbit Tahun 2024	Jml Izin yg terbit Tahun 2025
1	Perizinan Berusaha					
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)		7141	13517	12244	5324
	b. Sertifikat Standar					
		1. Sektor Perikanan	37	360	135	53
		2. Sektor Pertanian	80	87	78	51
		3. Sektor Perdagangan	26	0	0	0
		4. Sektor Industri	283	505	366	280
		5. Sektor Komunikasi dan Informatika	4	0	0	0
		6. Sektor Angkutan	10	0	0	0
		7. Sektor Perhubungan	0	0	0	0

		8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan	66	77	68	35
		9. Sektor Pariwisata	47	61	51	16
		10. Sektor Koperasi	0	0	0	0
	c. Izin					
		1. Sektor Perikanan	0	0	0	0
		2. Sektor Pertanian	0	0	0	0
		3. Sektor Perdagangan	0	0	0	0
		4. Sektor Industri	1	0	0	0
		5. Sektor Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0
		6. Sektor Angkutan	0	0	0	0
		7. Sektor Perhubungan	0	0	0	0
		8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan	26	12	32	4
		9. Sektor Pariwisata	0	0	0	0
		10. Sektor Koperasi	2	0	0	0
2	Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (UMKU)					
	a. Sektor Perikanan					
		Surat Izin Usaha Perikanan	0	0	0	0
	b. Sektor Pertanian					
		1) Pelayanan Jasa Laboratorium	0	0	0	0
		2) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	0	0	0	0
		3) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	0	0	0	0
		4) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	0	0	0	0
		5) Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	0	0	0	0
		6) Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	0	0	0	0
		7) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).	21	13	15	0
	c. Sektor Perdagangan					
		1) Tanda Daftar Gudang	11	6	1	3
		2) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);	0	0	0	0
		3) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0	0	0	3
		4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0	0	0	0
	d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
		1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	0	3	2	1

		2) Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota);	0	0	1	0
	e. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan					
		1) Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	0	0	0	1
		2) Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);	0	0	0	0
		3) Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	2	2	0	9
		4) Sertifikat laik sehat - di wilayah	0	0	0	0
		5) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	453	468	145	34
3	Persyaratan Dasar					
	1. KKPR	PKKPR	1	55	16	12
		KKKPR	0	4	2	6
	2. PBG		118	119	248	103
4	Perizinan Berusaha Lainnya / Perizinan Non Berusaha					
	1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non -Berusaha	5	62	53	42
	2	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	2	3	3	1
	3	Izin Penggunaan Aset Daerah untuk Fasilitas Olahraga	0	0	0	0
	4	Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah	0	0	0	0
	5	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator)	0	0	0	0
	6	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb)	0	0	0	0
	7	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR)	0	0	0	0
	8	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	0	0	0	0
	9	Izin Usaha Pemotongan Hewan dan / atau Penanganan Daging	0	0	0	0
	10	Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama	0	0	0	0
	11	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal	0	2	3	2
	12	Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan	0	0	0	0
	13	Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan	0	0	0	0
	14	Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0	0
	15	Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0	0
	16	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	14	3	3
	17	Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	0	0	0	0
	18	Izin Pemanfaatan Rumah Susun	0	0	0	0
	19	Izin Penebangan Turus Jalan	0	0	0	0

	20	Izin Pelandaian Trotoar	0	0	0	0
	21	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya	0	37	0	0
	22	Izin Menggunakan Tanah Pengairan	0	8	44	17
	23	Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU	2	0	0	0
	24	Izin Laboratorium Milik Pemerintah	-	-	2	0
	25	Izin Reklame	-	-	1636	491
5	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan					
	1	Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis	67	255	284	78
	2	Surat Izin Praktik Apoteker	70	80	71	32
	3	Surat Izin Praktik Perawat	661	522	426	134
	4	Surat Izin Praktik Bidan	516	210	119	71
	5	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	82	65	47	16
	6	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	58	28	56	20
	7	Surat Izin Praktik Fisioterapi	5	4	9	1
	8	Surat Izin Praktik Radiografer	18	9	15	10
	9	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	37	15	11	4
	10	Surat Izin Praktik Perekam Medik	53	31	22	10
	11	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	26	8	7	3
	12	Surat Izin Praktik Refraksionis atau Optisien	6	2	1	0
	13	Surat Izin Praktik Sanitarian	13	23	10	3
	14	Surat Izin Praktik Psikolo Klinis	2	0	9	2
	15	Surat Izin Praktik Elektromedik	5	2	1	0
	16	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	10	3	3	1
	17	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	2	0	2	1
	18	Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah	7	2	4	1
	19	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	2	7	2	4
	20	Surat Izin Praktik Terapi Wicara	-	1	1	1
	21	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	-	63	20	0
	22	Surat Izin Praktik Perawat Mandiri	-	8	12	0
	23	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	-	1	0	1
Jumlah Total Izin Diterbitkan			9978	18530	16264	6884

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Daerah mencakup:
 1. Terhambatnya investasi karena lahan diperuntukan industri dan infrastruktur pendukung kurang menarik bagi calon penanam modal;
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanaman modal.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal
 1. Belum adanya dokumen strategi promosi Penanaman Modal;
 2. Belum optimalnya promosi dikarenakan keterbatasan anggaran dan cakupan media promosi.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penanaman Modal :
 1. Belum maksimalnya pencatatan realisasi investasi berbasis LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) karena kesadaran dan keterbatasan SDM pelaku usaha;
 2. Belum optimalnya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.
- d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 1. Masih belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 2. Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal;
 3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.
- e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 1. Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;

2. Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Memuat Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan)

Mendasari surat Nomor : 000.7.2.4/3069 tanggal 18 Februari 2025 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Jumlah anggarannya sebelum perubahan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.217.761.000,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.255.182.000 mengalami penambahan sebesar Rp. 37.421.000,- atau 0,89 %

Adapun rincian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.711.209.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.733.071.000 hal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.862.000 atau 0,59 %,

Terdiri atas 8 kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 400.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 200.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.200.000,- atau 50 %.

b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 576.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 288.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.288.000,- atau 50 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

dengan 3 sub kegiatan :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.730.850.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.800.450.000,- hal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.69.600.000,- atau 2,55 %.

b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 51.339.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 25.669.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.25.670.000,- atau 50 %.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 32.680.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 31.730.000,- hal tersebut mengalami penurunann sebesar Rp.950.000,- atau (2,91%).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

dengan 1 sub kegiatan

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.800.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.700.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.100.000,- atau 22,92%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

dengan 1 sub kegiatan

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 4.000.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

dengan 5 sub kegiatan :

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.022.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.022.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.

b. Penyediaan bahan logistik kantor

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 32.387.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 17.926.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.14.461.000,- atau 44,65 %.

- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.152.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.100.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.52.000 atau 4,51 %.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.505.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.495.000,- atau 29,90 %.
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 9.600.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.720.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.2.880.000,- atau 30 %.
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.600.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.600.000 atau 16,67 %
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 sub kegiatan :
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 26.192.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 26.192.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 466.400.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 466.400.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.
 - b. Penyediaan jasa surat menyurat
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 360.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 360.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 181.435.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 181.435.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.
 - d. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.600.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.600.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 93.952.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 93.952.000,- hal tersebut tidak mengalami kenaikan.

- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 6.864.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.822.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.42.000,- atau 0,61 %..

- c. Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 54.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 54.000.000,- hal tersebut tidak mengalami perubahan.

II) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 130.480.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 114.220.000 hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.16.260.000. atau 12.46 %

dengan 2 kegiatan sebagai berikut;

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. .

dengan 2 sub kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 7.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.300.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.700.000,- atau 10 %..

- b. Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.250.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.750.000,- atau 43,75 %.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

dengan 2 sub kegiatan :

- a. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 7.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.650.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 3.350.000,- atau 47,86%.

a. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 112.480.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 102.020.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.10.460.000,- atau 9,30%.

III) Program Promosi Penanaman Modal

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 139.596.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 268.320.000 hal tersebut mengalami penambahan sebesar Rp. 128.724.000,- atau 92,21%.

Dengan 1 (satu) kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

dengan 2 sub kegiatan :

a. Menyusun strategi promosi penanaman modal

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 107.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 101.550.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.5.450.000,- atau 5,09 %.

b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 32.596.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 166.770.000,- hal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.134.174.000,- atau 411,63%.

IV) Program Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 83.264.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 61.376.000 hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 21.888.000,- atau 26,29 %

Dengan 1 (satu) kegiatan:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

dengan 2 sub kegiatan :

a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 72.392.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 55.353.000,- hal tersebut mengalami openurunan sebesar Rp. 17.039.000,- atau 23,54 %

- b. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 10.872.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.023.000,- hal tersebut mengalami 4.849.000,- atau 44,60%.

V) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 140.292.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 71.380.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 68.912.000,- atau 49,12%

dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 30.292.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 5.280.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.25.012.000 atau 82,57%

- b. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 80.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 41.800.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.38.200.000,- atau 47,75 %

- b. Pengawasan penanaman modal .

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.30.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 24.300.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.5.700.000,- atau 19,00 %.

VI) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 12.920.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.815.000 hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.6.105.000,- atau 47,25%.

dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

dengan 1 sub kegiatan :

- a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 12.920.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.815.000,- hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.6.105.000,- atau 47,25%.

Tabel 3.1.1

REKAPITULASI RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan /Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Pagu			Ket.
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>PENANAMAN MODAL</u>					4.217.761.000	4.255.182.000	37.421.000	0,89
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	persen	100%	100%	3.711.209.000	3.733.071.000	21.862.000	0,59
a	<u>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	persen	100%	100%	976.000	488.000	(488.000)	(50,00)
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka)	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	400.000	200.000	(200.000)	(50,00)
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (lkpj, lppd, lkjip, rtp)	laporan	5 laporan	5 laporan	576.000	288.000	(288.000)	(50,00)
b	<u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100%	100%	2.814.869.000	2.857.849.000	42.980.000	1,53
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20 orang	20 orang	2.730.850.000	2.800.450.000	69.600.000	2,55
4	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	51.339.000	25.669.000	(25.670.000)	(50,00)
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	32.680.000	31.730.000	(950.000)	(2,91)

c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100%	100%	3.700.000	(1.100.000)	(22,92)
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	laporan	12 laporan	12 laporan	4.800.000	3.700.000	(22,92)
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	persen	100%	100%	4.000.000	-	-
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	4 orang	4 orang	4.000.000	-	-
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum	persen	100%	100%	53.761.000	(19.488.000)	(36,25)
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12 paket	12 paket	2.022.000	-	-
9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12 paket	12 paket	32.387.000	(14.461.000)	(44,65)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.100.000	(52.000)	(4,51)
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	12 laporan	12 laporan	5.000.000	(1.495.000)	(29,90)
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan	12 laporan	12 laporan	9.600.000	(2.880.000)	(30,00)
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000	(600.000)	(16,67)

F	<u>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	100%	26.192.000	26.192.000	-	-
14	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	6 unit	6 unit	26.192.000	26.192.000	-	-
G	<u>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	100%	651.795.000	651.795.000	-	-
15	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12 laporan	12 laporan	360.000	360.000	-	-
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	181.435.000	181.435.000	-	-
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	3.600.000	3.600.000	-	-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	466.400.000	466.400.000	-	-
H	<u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah	persen	100%	100%	154.816.000	154.774.000	(42.000)	(0,03)
19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	17 unit	17 unit	93.952.000	93.952.000	-	-

20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	12 unit	12 unit	6.864.000	6.822.000	(42.000)	(0,61)
21	Pemeliharaan / Rehab gedung kantor	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2 unit	2 unit	54.000.000	54.000.000	-	-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	persen	82 point	100%	130.480.000	114.220.000	(16.260.000)	(12,46)
A	<u>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	jumlah	1 dokumen	2 dokumen	11.000.000	8.550.000	(2.450.000)	(22,27)
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	6.300.000	(700.000)	(10,00)
23	Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	4.000.000	2.250.000	(1.750.000)	(43,75)
B	<u>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</u>	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	sektor usaha	1 sektor	2 sektor	119.480.000	105.670.000	(13.810.000)	(11,56)
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perda RUPM daerah kabupaten/kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	3.650.000	(3.350.000)	(47,86)
25	Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	112.480.000	102.020.000	(10.460.000)	(9,30)
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi	persen	3 investor	100%	139.596.000	268.320.000	128.724.000	92,21

A	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	pelaku usaha	10 investor	10 investor	139.596.000	268.320.000	128.724.000	92,21
26	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	32.596.000	166.770.000	134.174.000	411,63
27	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	107.000.000	101.550.000	(5.450.000)	(5,09)
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	4,20 point	99%	83.264.000	61.376.000	(21.888.000)	(26,29)
A	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMPTSP	jenis	124 jenis	114 jenis	83.264.000	61.376.000	(21.888.000)	(26,29)
28	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	pelaku usaha	17000 pelaku usaha	12000 pelaku usaha	72.392.000	55.353.000	(17.039.000)	(23,54)
29	Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	kegiatan usaha	17 kegiatan usaha	13 kegiatan usaha	10.872.000	6.023.000	(4.849.000)	(44,60)
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	100%	100%	140.292.000	71.380.000	(68.912.000)	(49,12)

A	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	pelaku usaha	216 penanam modal	200 pelaku usaha	140.292.000	71.380.000	(68.912.000)	(49,12)
30	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	8 kegiatan usaha	30.292.000	5.280.000	(25.012.000)	(82,57)
31	Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan tehnik/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	pelaku usaha	200 pelaku usaha	200 pelaku usaha	80.000.000	41.800.000	(38.200.000)	(47,75)
32	Pengawasan Penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	kegiatan usaha	44 kegiatan usaha	44 kegiatan usaha	30.000.000	24.300.000	(5.700.000)	(19,00)
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100%	100%	12.920.000	6.815.000	(6.105.000)	(47,25)
A	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	dokumen	18000 dokumen	18000 dokumen	12.920.000	6.815.000	(6.105.000)	(47,25)
33	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data yang terintegrasi	dokumen	12000 dokumen	12000 dokumen	12.920.000	6.815.000	(6.105.000)	(47,25)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Purbalingga serta target dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyajian dokumen ini diharapkan dapat mencerminkan nuansa pemerataan pembangunan sesuai skala prioritas untuk mencapai hasil yang optimal sesuai anggaran yang ada.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan dari semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya. Selain itu konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah di rumuskan dalam renja maupun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Diharapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan dalam kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai diharapkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya daya tarik investasi di daerah, meningkatnya implementasi sakip dan meningkatnya kualitas layanan perizinan

sesuai standar pelayanan publik dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes
Pemangku Muda
NIP. 19681022 199402 1 001

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NO:69 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHTAHUN 2025 KAB.PURBALINGGA**

RENCANA KERJA AKHIR DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja

yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional bidang Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat sejahtera berakhlak mulia”**. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang

memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan**

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga;

Maksud : dari penyusunan renja yang sesuai dengan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 1 tahunan
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi,UKM di Kabupaten Purbalingga

3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun kedepan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tujuan : penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (SAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 didasarkan pada Pasal 143 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Rencana, Program, dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga urusan pemerintahan mengenai Bidang Koperasi dan UMKM diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada tahun 2023 terdapat 7 Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Visi ***"Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia"***.

Dari 7 Program yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan ke IV hampir semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan Kegiatan sampai dengan Tri wulan IV Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga mencapai 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98,10 %.

Hasil Evaluasi rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2023 Tri wulan IV khususnya di Bidang Koperasi dan UMKM adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawa

Tabel 2.1
Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga
Periode Pelaksanaan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif									
2.17.03.2.01.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam,/unit simpan pinjam koperasi yg wilayah keanggotaannya dlm daerah Kab/kota	jumlah Penambahan unit koperasi Aktif	190 koperasi	100 koperasi	120 koperasi	184 koperasi	160 koperasi	86,95%	186 koperasi	160 koperasi	84,21 %
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN	Persentase koperasi yang sudah									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	menerapkan Standar SAK									
2.17.04.2.01.01	1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah Kabupaten/kota	Jumlah Penambahan Unit Koperasi Yang menerapkan Standar SAK	195 koperasi	160 koperasi	100 koperasi	185 koperasi	163 koperasi	88,10%	187 koperasi	0 koperasi	83,58%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.0 5.2.01.01	Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kelulusan diklat kompetensi perkoperasian	75 %	62,5 %	60.60%	67,5 %	57,76 %	85.57%	70%	0	77,01%
2.17.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi									
2.17.0 6.2.01.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kualitasnya	7 Koperasi	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	100	5 koperasi	0 koperasi	7 koperasi

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin									
2.17.07.2.01.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Penambahan jumlah unit Usaha mikro yang bersertifikat/berijin	100	100 pelaku	75 pelaku	100 pelaku	115 pelaku	115%	100	0	115 %
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi melalui internet									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.0 8.2.01.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertambahan Jumlah Usaha Mikro Naik kelas	5 Pelaku	5 pelaku	5 Pelaku	5 pelaku	5 pelaku	100%	50 pelaku	0	10%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Triwulan II

No		PROGRAM	FORMULASI	Satuan	Target RPJMD	Target 2023	Target 2024	Realisasi				Target 2025	Target 2026	OPD	RUMPUN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			AKHIR (2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
1.01.01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		persen	100	100	100	70	20			100	100		
2		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		persen	100	100	100	40	20			100	100		
3		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		persen	100	100	100	25	10			100	100		

4		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		persen	100	100	100	30,74	30			100	100		
5		Persentase pengadaan barang milik daerah		persen	100	100	100	0	0			100	100		
6		Persentase pemeliharaan barang milik daerah		persen	100	100	100	20	16			100	100		
2.17.03	2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah total koperasi * 100%	persen	77,6	75,1	75,9	19,1	29,24			76,7	77,6		
2.17.04	3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	Jumlah koperasi yang sudah menerapkan standar SAK/ Jumlah total koperasi * 100%	persen	68	58	60	15,10	27,08			65	68		
2.17.05	4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	Jumlah SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian/ Jumlah SDM koperasi (pengu-rus dan pengelola aktif) * 100%	persen	65	55	60	15,1	0,00			62	65		

17.06	5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Pertumbuhan volume usaha koperasi	Jumlah koperasi yang asetnya bertambah/ Jumlah koperasi aktif * 100%	persen	14	10	12	3,00	4,00			14	14		
2.17.07	6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/berijin / Jumlah UMKM masuk ODS (Online Data System) * 100%	persen	2,5	2,5	2,5	0,60	0,70			2,5	2,5		
2.17.08	7	Program Pengembangan UMKM												DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase UMKM yang difasilitasi internet	Jumlah UMKM yang difasilitasi internet/ Jumlah UMKM * 100%	persen	4,42	4,42	4,42	1,11	1,20			4,42	4,42		

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Triwulan II

No.	Perangkat Daerah	Pernyataan Tujuan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Formulasi	Satuan	Kondisi 2021	Kondisi 2022	Target		Realisasi 2024				Target		Sumber Indikator
									2023	2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	2025	2026	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha kecil		Persentase koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas	Jumlah koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas/ Jumlah koperasi aktif * 100%	Persen	4,49	4,88	6,87	6,9	1,82	3,64			7,32	8,13	Tujuan RENSTRA
				Kontribusi UMKM terhadap PDRB	(PDRB ADHB- Sektor Pertanian-Sektor Jasa (Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Jasa lainnya))/PDRB ADHB * 100%	Persen	64,45	64,02	64,55	64,60	0	65,69	0	0	64,71	64,94	Tujuan RENSTRA
				Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Release BPS	Angka	NA	NA	39	40	0	39	0	0	41,00	41,5	

			Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOP UKM	Nilai SAKIP DINKOP UKM	Release In-spektorat	Indeks	69,13	69,43	73,2	73,25	73,11	0	0	0	73,33	73,45	Sasaran RENSTRA
			Meningkatnya koperasi sehat	Persentase koperasi sehat	(Jumlah koperasi sehat/ Jumlah koperasi aktif)*100%	Persen	75,84	56,56	65,62	65,75	18,18	39,39			59,26	60,08	Sasaran RENSTRA
			Meningkatnya Pelaku Wirausaha	jumlah wirausaha baru	Jumlah Wirausaha Baru yang terdata oleh Dinkop UKM	UKM	24	26	35	37	10	11			38	39	Sasaran RENSTRA

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis

2.3.1. isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

Peringkat angka pengangguran tetap menjadi salah satu isu terhangat dan terkini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini memperhitungkan bahwa tingkat angka pengangguran merupakan komponen terbesar dari pendapatan suatu negara, sehingga tingkat pengangguran merupakan indikator yang dapat mencerminkan kekayaan atau kesejahteraan dari suatu negara. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah perlunya mengkaji secara kritis kehidupan rakyat yang selama ini terus menjadi permasalahan salah satunya adalah Pengangguran.

Hasil data statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia yang cukup bertambah setiap tahunnya, dengan semakin banyaknya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa Negara kita Indonesia belum mampu mengatasi permasalahan pengangguran, karena seharusnya persoalan tingkat pengangguran ini menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak seperti kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, penciptaan lapangan kerja oleh pengusaha, dan pemerintah sebagai regulator.

Tidak hanya kemiskinan yang menjadi isu strategis kesejahteraan masyarakat, pembangunan manusia juga menjadi hak dasar yang dijamin konstitusi. Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan isu strategis bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, keterbatasan modal, kemampuan pemasaran yang terbatas, akses informasi usaha rendah dan kelembagaan yang belum tertata menjadi faktor utama pula dalam peningkatan produktifitas dan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah. secara literatur upaya yang dilakukan guna mengurangi pengangguran salah satunya adalah melalui ekonomi

kreatif dan pengembangan pariwisata berdasarkan kajian baik kualitatif maupun kuantitatif yang sudah ada.

2.3.2. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Penguatan modal Koperasi pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan potensi lokal dan daya saing daerah.
3. Pertumbuhan Koperasi berperan dalam kontribusi PDRB untuk pembangunan daerah.
4. Perkembangan Usaha mikro yang massif akan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Daerah maupun Nasional
5. Pengembangan Usaha Mikro diarahkan pada dukungan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha mikro kearah digitalisasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 “ **MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIP-TAAN LAPANGAN KERJA ”**

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah

pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 5 adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran utama sesuai bidang pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

Meningkatnya Kemandirian, Kualitas dan daya Saing koperasi dan usaha kecil mikro dengan indikator kinerja tujuan sbb :

- **Persentase koperasi yang berkualitas dan sangat berkualitas**
- **Kontribusi UMKM terhadap PDRB**
- **Nilai Kematangan Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM

Tabel.T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Lembar : 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan (<i>sub output</i>)	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL PAGU 2025			9.514.701.000	-	-	9.766.090.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Ketersediaan laporan capaian Kinerja	100	persen	3.065.862.000	-	3.137.350.000
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen			
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen			
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen			
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen			
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen			
	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersusun	100	persen	5.929.000		7.500.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen Renstra,Renja,LKPD,LPPD,LKD,RKPD,SPIP,	8	dokumen	2.500.000		3.500.000,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesainya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LK,LKJIP,Rekon Aset,LKPJ,SPJ	5	dokumen	3.429.000		4.000.000,00

					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	150	ok	2.438.809.000			2.447.000.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	15	Bulan	2.325.510.000			2.350.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terlaksananya Perjalanan Dalam dan Luar daerah	64	dokumen	86.000.000			78.000.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Jamuan Makan minum, ATK dan Honor Pengelola Keuangan	71	dokumen	27.299.000			19.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan BMD/Aset	12	lap	1.200.000			1.500.000
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Honor Pengurus Barang Pada SKPD	12	lap	1.200.000			1.500.000,00
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	lap	51.400.000			61.600.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	tersedianya Jumlah kebutuhan komponen listrik,dan penerangan bangunan	75	buah	1.600.000			2.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan tabung gas,perabot kantor	12	bulan	24.000.000			28.000.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan surat kabar,peraturan perundangan	1	paket	1.000.000			2.000.000,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu	12	lap	9.000.000			13.000.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan jamuan makan minum	12	lap	13.000.000			13.000.000,00
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Honor Operator SIMDA,SIPD,SIMBADA	4	bulan	2.800.000			3.600.000,00

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3		1.000.000			10.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	3	Unit	1.000.000			10.000.000
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12	lap	437.989.000			418.750.000
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan jasa surat menyurat	12	lap	500.000			1.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan ,listrik yang disediakan	36	lap	49.075.000			52.000.000,00
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah lap penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	lap	1.664.000			1.800.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	lap	386.750.000			363.950.000,00
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	12	Unit	124.535.000			185.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaa Mebel	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	unit	112.535.000			120.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	7.000.000			5.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	5.000.000			60.000.000,00
					Kegiatan Administrasi kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	12	Orang	5.000.000			6.000.000,00
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	12	orang	5.000.000			6.000.000,00

					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	75,9	Persen	100.000.000			100.000.000,00
					Kegiatan Pemerik- saan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wila- yah Keanggotaannya dalam Daerah Kabu- paten/kota	Jumlah Penamba- han unit Koperasi aktif	186	Koperasi	100.000.000			100.000.000,00
					Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dae- rah kab/kota	jumlah kop yg te- lah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	73,5	persen	100.000.000			100.000.000,00
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang su- dah menerapkan standar SAK	60	Persen	11.580.000			21.580.000,00
					Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Penamba- han unit kopersi yang menerapkan Standar SAK	187	Persen	11.580.000			21.580.000,00

					koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kab/kota							
					Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	135	Koperasi	11.580.000			21.580.000,00
					Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian	60	persen	183.800.000			183.800.000,00
					Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Persentase tingkat kelulusandiklat kompetensi perkoperasian	70	persen	183.800.000			183.800.000,00
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	4/145	koperasi	183.800.000			183.800.000,00

					Program Pem-berdayaan dan Per-lindungan Koperasi	Pertumbuhan vol-ume usaha koperasi	12	Persen	88.265.000			110.000.000,00
					Kegiatan Pem-berdayaan dan per-lindungan koperasi yang keanggotaannya da-lam daerah kab/kota	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kuali-tasnya	5	Koperasi	88.265.000			110.000.000,00
					Pemberdayaan Pen-ingkatan Produktivi-tas, Nilai tam-bah, akses pasar, akses pem-biayaan, penguatan kelembagaan, pena-taan mnj, standar-isasi, dan re-strukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tam-bah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, pen-guatan kelem-bagaan, penataan mnj, standar-isasi, dan re-strukturisasi usaha	40	Koperasi	88.265.000			110.000.000,00

					Program Pem- berdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pen- ingkatan usaha mikro yang ber- sertifikat/berijin	2,5	persen	1.773.545.000	-	-	1.913.360.000
					Kegiatan Pem- berdayaan Usaha Mikro yang dil- akukan melalui pendataan, kemitraan,kemu- dahan perijinan, penguatan kelem- bagaan dan koordi- nasi dengan para	Penambahan jumlah unit Usaha mikro yang bersertif- ikat/berijin	100	umkm	1.773.545.000	-	-	1.913.360.000

					pemangku kepentingan							
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang telah mendapat perizinan	25	umkm	13.360.000			13.360.000,00
					Pembedayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	26	Pelaku	993.673.000			1.100.000.000,00
					Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	160	Pelaku	766.512.000			800.000.000,00
					Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat Omsetnya	4,42	Persen	4.291.649.000	-	-	4.300.000.000,00

					Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertambahan Jumlah Usaha Mikro Naik kelas	5	Persen	4.291.649.000			4.300.000.000,00
					Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	50	pelaku	4.291.649.000			4.300.000.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, yang mengakomodasi usulan kegiatan prioritas dari musrenbang tingkat kecamatan. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati Purbalingga dan hasil usulan Pra Musrenbang dari masyarakat, dari usulan yang diajukan melalui Musrenbang terdapat 59 usulan yang terakomodir sebanyak 2 Usulan, usulan Musrenbang diakomodir melalui program kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan
- b. Program Promosi dan Kemitraan Usaha

Adapun rencana aksi pelaksanaan musrenbang dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2026, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “**Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“Naik Kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.**” dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
2. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
3. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
4. Tumbuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
5. Program OVOP berhasil.
6. Tumbu dan kembangnya Koperasi berskala besar.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk pengembangan dari Visi

dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementerian / lembaga maupun renstra provinsi. Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian :

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
2. Rencana Program / kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka dalam kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha – usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada Pemerintah kabupaten Purbalingga. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait.
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim.
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.
Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.
- b. Mengembangkan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Purbalingga yang berdaya saing.
Tujuan :
 1. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga.
 2. Meningkatkan daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.
Sasaran :
 1. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga
 2. Meningkatnya daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.
- c. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
Tujuan :
 1. Meningkatkan jumlah wirausaha di Kabupaten Purbalingga.
 2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
 3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
Sasaran :
 1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Kabupaten Purbalingga.
 2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten
4. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dalam table di bawah ini :

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025																			
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N										
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				Rp. 7.834.880.000				Rp. 7.834.880.000	Rp. 6.337.632.000	Rp. 17.250.000		Rp. 6.354.882.000	Rp. 9.831.355.000,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				Rp. 7.834.880.000				Rp. 7.834.880.000	Rp. 6.337.632.000	Rp. 17.250.000		Rp. 6.354.882.000	Rp. 9.831.355.000,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.151.853.000				Rp. 3.151.853.000	Rp. 2.948.159.000	Rp. 17.250.000		Rp. 2.965.409.000	Rp. 3.214.350.000,00	
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				Rp. 5.929.000				Rp. 5.929.000	Rp. 5.929.000			Rp. 5.929.000	Rp. 7.500.000,00	
2	17	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000			Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000,00	
2	17	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.429.000				Rp. 3.429.000	Rp. 3.429.000			Rp. 3.429.000	Rp. 4.000.000,00	
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.524.800.000				Rp. 2.524.800.000	Rp. 2.285.389.000			Rp. 2.285.389.000	Rp. 2.447.000.000,00	
2	17	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.411.501.000				Rp. 2.411.501.000	Rp. 2.215.090.000			Rp. 2.215.090.000	Rp. 2.350.000.000,00	
2	17	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 86.000.000				Rp. 86.000.000	Rp. 43.000.000			Rp. 43.000.000	Rp. 78.000.000,00	
2	17	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.299.000				Rp. 27.299.000	Rp. 27.299.000			Rp. 27.299.000	Rp. 19.000.000,00	

01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat				Rp. 1.200.000				Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000				Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000,00
01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.200.000				Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000				Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000,00
01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 4.075.000				Rp. 4.075.000	Rp. 6.000.000,00
01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 4.075.000				Rp. 4.075.000	Rp. 6.000.000,00
01	2,06		Administrasi Umum Perangkat				Rp. 51.400.000				Rp. 51.400.000	Rp. 34.057.000				Rp. 34.057.000	Rp. 48.600.000,00
01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.600.000				Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000				Rp. 1.600.000	Rp. 2.000.000,00
01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 13.257.000				Rp. 13.257.000	Rp. 28.000.000,00
01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000,00
01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.000.000				Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000				Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000,00
01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 6.400.000				Rp. 6.400.000	Rp. 8.500.000,00
01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.800.000				Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000				Rp. 2.800.000	Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N											
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 910.000	Rp. 17.250.000			Rp. 18.160.000	Rp. 100.000.000,00		
2	17	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 910.000	Rp. 17.250.000			Rp. 18.160.000	Rp. 100.000.000,00
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp. 437.989.000				Rp. 437.989.000	Rp. 449.989.000				Rp. 449.989.000	Rp. 418.750.000,00
2	17	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 1.000.000,00
2	17	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 49.075.000				Rp. 49.075.000	Rp. 61.075.000				Rp. 61.075.000	Rp. 52.000.000,00
2	17	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.664.000				Rp. 1.664.000	Rp. 1.664.000				Rp. 1.664.000	Rp. 1.800.000,00
2	17	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa			Rp. 386.750.000				Rp. 386.750.000	Rp. 386.750.000				Rp. 386.750.000	Rp. 363.950.000,00
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp. 124.535.000				Rp. 124.535.000	Rp. 166.610.000				Rp. 166.610.000	Rp. 185.000.000,00
2	17	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Revisi/Kendaraan Dinas	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 112.535.000				Rp. 112.535.000	Rp. 149.610.000				Rp. 149.610.000	Rp. 120.000.000,00
2	17	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000,00

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 77.400.000				Rp. 77.400.000	Rp. 100.000.000,00
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah				Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 77.400.000				Rp. 77.400.000	Rp. 100.000.000,00
2	17	03	2,01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 77.400.000				Rp. 77.400.000	Rp. 100.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP				Rp. 11.580.000				Rp. 11.580.000	Rp. 10.230.000				Rp. 10.230.000	Rp. 21.580.000,00
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 11.580.000				Rp. 11.580.000	Rp. 10.230.000				Rp. 10.230.000	Rp. 21.580.000,00
2	17	04	2,01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.580.000				Rp. 11.580.000	Rp. 10.230.000				Rp. 10.230.000	Rp. 21.580.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 183.800.000,00
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 183.800.000,00
2	17	05	2,01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 183.800.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp. 488.265.000				Rp. 488.265.000	Rp. 521.842.000				Rp. 521.842.000	Rp. 98.265.000,00
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 488.265.000				Rp. 488.265.000	Rp. 521.842.000				Rp. 521.842.000	Rp. 98.265.000,00
2	17	06	2,01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 64.200.000				Rp. 64.200.000	
2	17	06	2,01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 488.265.000				Rp. 488.265.000	Rp. 457.642.000				Rp. 457.642.000	Rp. 98.265.000,00

2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 1.507.033.000				Rp. 1.507.033.000	Rp. 1.220.444.000				Rp. 1.220.444.000	Rp. 1.913.360.000,00
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 1.507.033.000				Rp. 1.507.033.000	Rp. 1.220.444.000				Rp. 1.220.444.000	Rp. 1.913.360.000,00
2	17	07	2,01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.360.000				Rp. 13.360.000	Rp. 13.360.000				Rp. 13.360.000	Rp. 13.360.000,00
2	17	07	2,01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 993.673.000				Rp. 993.673.000	Rp. 707.084.000				Rp. 707.084.000	Rp. 1.100.000.000,00
2	17	07	2,01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 800.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 2.571.149.000				Rp. 2.571.149.000	Rp. 1.559.557.000				Rp. 1.559.557.000	Rp. 4.300.000.000,00
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp. 2.571.149.000				Rp. 2.571.149.000	Rp. 1.559.557.000				Rp. 1.559.557.000	Rp. 4.300.000.000,00
2	17	08	2,01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.571.149.000				Rp. 2.571.149.000	Rp. 1.559.557.000				Rp. 1.559.557.000	Rp. 4.300.000.000,00
Jumlah									Rp. 7.834.880.000				Rp. 7.834.880.000	Rp. 6.337.632.000	Rp. 17.250.000			Rp. 6.354.882.000	Rp. 9.831.355.000,00

Kab. Purbalingga,

Kepala DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ENDI ASTONO, S.Sos. NIP. 196709191990031010

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Purbalingga

ENDI ASTONO,S.Sos
NIP. 19670919 199003 1 010



BerAKHLAK
Berakhlak Berkualitas Berkeadilan Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINPENDUKCAPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. S. Parman no. 19 Purbalingga, Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, mempunyai arti strategis dalam mencapai sasaran, capaian Kinerja, karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta bagian dari dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun setiap tahun dengan mendasarkan pada Rencana Strategis, Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 atau tribulan II. Rencana Kerja Perubahan 2025 disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan 2025 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran, masukan untuk perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun semoga bermanfaat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga 1 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpendukcapil sampai dengan Tribulan II Tahun 2025	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun Berjalan (Tribulan II 2025)	 8
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPENDUKCAPIL	 19
3.1. Rencana Perubahan Renja Dinpendukcapil	19
 BAB IV PENUTUP	 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Tujuan – Sasaran	7
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Tujuan “ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
Tabel 2.3	Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	10
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Sasaran “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	12
Tabel 3.1	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025	19

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun Renja Perubahan 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan 2025 merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, dan program prioritas. Dokumen ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, termasuk capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Perubahan Renja dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan perkembangan keadaan, seperti perubahan kebijakan atau kondisi di lapangan. Renja Perubahan juga harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 didasarkan pada peraturan yang mengikat yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Akhir Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah :(5-69/2019));
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016

Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah untuk :

- a. Menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di tahun 2025.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA.
- c. Menjadi instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Memastikan sinkronisasi antara Renja, Renstra, dan RKPD.
- e. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang mencakup

1. Latar Belakang

Memuat alasan yang mendasari dilakukan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

Berisi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sampai dengan Tribulan II Tahun Berjalan.

BAB III RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran output kegiatan, penambahan anggaran kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana table perubahan rencana kerja perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TRIBULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan renja ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/sub kegiatannya, mengevaluasi indicator kinerja utama/IKU, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

a. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tujuan - Sasaran sd Tribulan II Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1.	Tujuan (1): Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	93,43	88,73	94,96
	Sasaran (1) : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari:	Persen	86,92	88,38	101,68
		a. Kepemilikan KK	Persen	99,32	99,57	100,25
		b. Kepemilikan KTP	Persen	99,45	99,99	100,54
		c. Kepemilikan KIA	Persen	62	62,25	105,79

		Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terdiri dari :	Persen	99,93	89,07	92,48
		a. Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	99,5	98,38	98,38
		b. Buku Pokok Pemakaman	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	100
		b. Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	Persen	100	100	100
2.	Tujuan (2) : Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai kematangan perangkat daerah	Nilai	47	43	91,49
	Sasaran (2.1) : Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	74		
	Sasaran (2.2) : Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	90	91,76	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun Berjalan (sd Tribulan II 2025)

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sd Tribulan II tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil" dari target 93,43 realisasinya 88,73 dengan

capaian 94,96 % dengan kategori Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi sd Tw II 2025	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	93,43	88,73	94,96	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan merupakan hasil dari persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk ditambah persentase jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil dibagi dua. Dari target 2025 sebesar 93,43 persen realisasinya sebesar 88,73 persen dengan capaian kinerja 94,96 persen (tinggi). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian kepemilikan dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil signifikan.

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Hasil evaluasi pada sasaran strategis ” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” dengan 2 indikator kinerja yaitu Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

mendapatkan nilai 88,38 dengan capaian 101,68 dengan kategori Sangat Tinggi Kemudian pada indikator Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil mendapatkan nilai 89,07 dengan capaian 92,48 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya sebagaimana Tabel 2.3. sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil					
Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari:					
a. Kepemilikan KK	Persen	99,32	99,57	100,25	Sangat Tinggi
b. Kepemilikan KTP	Persen	99,45	99,99	100,54	Sangat Tinggi
c. Kepemilikan KIA	Persen	62	65,59	105,79	Sangat Tinggi
Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terdiri dari :					
a. Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	99,5	98,38	98,87	Tinggi
b. Buku Pokok Pemakaman	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
c. Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
b. Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
c. Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
c. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
c. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi capaian sasaran (1) “Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” ” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
 - 1) Kepemilikan KK, dari target sebesar 99,32 % realisasi sebesar 99,57% atau 100,25% (kategori Sangat Tinggi).
 - 2) Kepemilikan KTP, dari target sebesar 99,45 % realisasinya sebesar 99,99 % atau 100,54 % (kategori Sangat Tinggi).
 - 3) Kepemilikan KIA, dari target sebesar 62% realisasi sebesar 65,59% atau 105,79 % (kategori Sangat Tinggi).
2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
 - 1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dari target sebesar 99,5 % realisasinya sebesar 98,38 % atau 98,87 %.
 - 2) Buku Pokok Pemakaman, dari target sebesar 100% realisasi sebesar 100 %
 - 3) Kepemilikan akta Kematian, dari target sebesar 100% realisasi sebesar 100 %
 - 4) Kepemilikan akta perkawinan, dari target sebesar 100% realisasi sebesar 100 %
 - 5) Kepemilikan akta perceraian, dari target sebesar 100 % realisasi sebesar 100 %
 - 6) Kepemilikan akta pengesahan anak, dari target sebesar 100 % realisasi sebesar 100 %
 - 7) Kepemilikan akta pengakuan anak, dari target sebesar 100 % realisasi sebesar 100 %

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DINPENDUKCAPIL

Hasil evaluasi pada tujuan strategis ” Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil” pada tahun 2024 mendapatkan nilai 43 dengan capaian 91,49% dengan kategori Tinggi. Namun untuk tahun 2025 sd Tribulan II masih dalam proses evaluasi dari Tim evaluator Bagian Organisasi Setda Purbalingga.

SASARAN 2.1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DINPENDUKCAPIL

Hasil evaluasi pada tahun 2024 untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Implementasi Sakip Dinpendukcapil ” mendapatkan nilai 73,36 dengan kategori “BB” (Sangat Baik). Sedang untuk tahun 2025 masih dalam proses evaluasi dari Inspektorat.

SASARAN 2.2

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

Hasil evaluasi capaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 103,31 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi sd Tw II 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	90	92.98	103,31	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai indeks kepuasan yang dicapai oleh perangkat daerah melalui survey kepada para pemohon yang telah dilayani dokumen administrasi kependudukannya. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari aplikasi Alpukat sampai dengan tribulan II

Tahun 2025. Dari target IKM 2025 sebesar 90 realisasi nilai nya 92,98 dengan persentase capaian IKM sd tribulan II Tahun 2025 sebesar 103,31 %. Mengalami sedikit kenaikan 0,96 % dibanding tahun lalu yang sebesar 103,41%. Nilai IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga setelah dikonversikan adalah 92,98 berada pada interval 88,31 – 100,00. Ini dapat disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah Sangat Baik.

- b. Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran. Secara umum capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sd Tribulan II terdiri dari 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen Renja dan Renstra. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- realisasi sebesar Rp.616.000,- (41,07%).

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen LKD, LKjIP, IKM, LPPD dan LKPJ. Alokasi anggaran sebesar Rp.500.000,- realisasi sebesar Rp.450.000,- (90%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.542.951.000,- realisasi sebesar Rp. 1.805.251.742,- (50,95%).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, Alokasi anggaran sebesar Rp.11.653.000,- realisasi sebesar Rp.11.350.000,- (97,40%).

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu Terealisasinya honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.29.883.000,- realisasi sebesar Rp.0,- (0 %).

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya honorarium pengadaan barang / jasa, honor jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.460.000,- (26,55 %).

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat-alat listrik/penerangan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.265.000,- (45,30 %).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan bakar pelumas, bahan isi tabung gas, alat tulis kantor, perabot kantor, perlengkapan kantor, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.175.000,- realisasi sebesar Rp.9.434.100,- (46,76%).
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya langganan surat kabar dan majalah. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.460.000,- (46%).
 4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor dan makanan minuman jamuan tamu. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.655.200,- (55,17%).
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya makanan dan minuman . Alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.641.100,- (66,03%).
 6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor, bahan computer dan honorarium tim pelaksana kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.600.000,- realisasi sebesar Rp.1.736.000,- (31%).
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya materai. Alokasi anggaran sebesar Rp.520.000,- realisasi sebesar Rp.31.400,- (6,04%).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya biaya langganan PDAM, listrik dan internet untuk 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp.125.300.000,- realisasi sebesar Rp.53.005.521,- (42,30%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, jasa tata rias dan perjalanan dinas dalam kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.280.500,- (25,61%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.098.922.000,- realisasi sebesar Rp.439.008.896,- (39,95%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak STNK, dan perizinan kendaraan dinas operasional untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Alokasi anggaran sebesar Rp.157.375.000,- realisasi sebesar Rp.73.599.100,- (46,77%).

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya pemeliharaan komputer, printer, AC, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 8.035.000- (53,57%).

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan; dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya gedung kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp.9.053.000,- (60,35%).

1) Program Pendaftaran Penduduk

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1. Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi KTP-EL, KK, KIA. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.073.580.000,- realisasi sebesar Rp.920.278.352,- (85,72%).

2) Program Pencatatan Sipil

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu meningkatnya pelayanan pencatatan sipil pada Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.65.430.000,- realisasi sebesar Rp.16.960.500,- (25,92%).

- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan administrasi Kependudukan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, langganan internet, pemeliharaan jaringan computer perjalanan dinas , dan belanja modal computer. Alokasi anggaran sebesar Rp.274.199.000,- realisasi sebesar Rp.100.959.196,- (36,82%).

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Secara umum kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sudah sesuai. Realisasi capaian program dan kegiatan sd Tribulan II Tahun 2025 sebesar 53,37%, sehingga kategori tingkat kesesuaian cukup tinggi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Anggaran
2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU MURNI TA. 2025	PAGU PERUBAHAN TA. 2025	BERTAMBAH /BERKURANG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.631.174.000	6.460.437.000	(170.737.000)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	5.117.063.000	5.047.228.000	(69.835.000)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	3.500.000	2.000.000	(1.500.000)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	1.500.000	1.500.000	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	2.000.000	500.000	(1.500.000)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3.595.264.000	3.392.588.000	(202.676.000)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	25	3.542.951.000	3.351.052.000	(191.899.000)
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	22.430.000	11.653.000	(10.777.000)
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	29.883.000	29.883.000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	5.500.000	5.500.000	-
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.500.000	5.500.000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	5.000.000	-	(5.000.000)
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5.000.000	-	(5.000.000)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	42.300.000	38.775.000	(3.525.000)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	5.000.000	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.700.000	20.175.000	(525.000)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.000.000	1.000.000	-
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)

	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PAGU MURNI TA. 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH /BERKURANG
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.000.000	4.000.000	(2.000.000)
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	5.600.000	5.600.000	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	Persen	100	18.500.000	206.548.000	188.048.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	18.500.000	206.548.000	188.048.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.259.624.000	1.215.742.000	(43.882.000)
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	520.000	520.000	-
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.300.000	117.300.000	(8.000.000)
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	6.000.000	1.000.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.128.804.000	1.091.922.000	(36.882.000)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	187.375.000	186.075.000	(1.300.000)
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	24	157.375.000	157.375.000	-
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	15.000.000	15.700.000	700.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	100	1.129.385.000	1.073.580.000	(55.805.000)
9	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang	Persen	100	1.129.385.000	1.073.580.000	(55.805.000)
22	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen		1.129.385.000	1.073.580.000	(55.805.000)
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100	89.112.000	65.430.000	(23.682.000)
10	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Persen	100	89.112.000	65.430.000	(23.682.000)
23	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan		89.112.000	65.430.000	(23.682.000)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen		295.614.000	274.199.000	(21.415.000)
11	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persen		295.614.000	274.199.000	(21.415.000)
24	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		295.614.000	274.199.000	(21.415.000)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tribulan II Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 mencakup program, kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan ada pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 170.737.000,- atau 3 % dari anggaran semula murni Rp. 6.631.174.000,- menjadi anggaran perubahan Rp. 6.460.437.000,-

Demikian dokumen Rencana Kerja Perubahan disusun dan Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

*Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga*



-  <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/>
-  dinkominfo@purbalinggakab.go.id
-  Jalan Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga 53313



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl Letkol Isdiman No. 17A Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091
PURBALINGGA – 53313 e-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 050.1.2/00045/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 125 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2025) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2025) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 14 Agustus 2025

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SADONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid Informatika	
3.	Kabid ITSP	
4.	Kabid IKP	

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050.1.2/00045/2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SADONO, S.Sos., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I
3.	Marlin Dwi Sulandari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris II
4.	Baryati, S.Kom.	Kepala Bidang Informatika	Anggota
5.	Sapto Suhardiyo, S.STP, ST.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
7.	Mely Rahmawati, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Sub Koordinator/Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10.	Dra. Jeni Preandini, M.Si.	Sub Koordinator/Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Hanifah Khairunnisa Shofiati, ST	Sub Koordinator/Fungsional Sandiman Ahli Pertama	Anggota
12.	Edy Sumartono, S.H.	Sub Koordinator/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Lejar Hatininggar, S.Sos	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
14.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
15.	Khoizah Daika, S.M	Staf Perencana & Keuangan	Anggota
16.	Tris Dianasari, S.Si.	Fungsional Ahli Pertama- Statistisi	Anggota

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SADONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Renja disusun berpedoman kepada 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen pedoman yang dimaksud diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD. Proses ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunannya juga berpedoman pada Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja Dinkominfo Provinsi terkait.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinkominfo sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan. Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu juga sebagai implementasi pelaksanaan Rencana strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

- 1 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang telah diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmabahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga tahun 2005;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No, 12 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021-2026;
- 9 Surat Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Purbalingga;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Menentukan arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2025;
- 2 Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas Pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2025 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2 Menjabarkan renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 3 Pedoman/acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025;
- 4 Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 5 Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengacu sistematika sebagaimana pedoman Permendagri No 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Dearah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Dearah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan 2025 secara umum berisi capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sampai dengan bulan juni 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga 2021–2026. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dilaksanakan dan mendekati bahkan ada yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD yang disahkan melalui Perda No. 12 Tahun 2016 sebagai pelaksana urusan wajib.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah dan sedang melaksanakan 5 Program dan 14 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2024 memiliki 5 Program, 13 kegiatan yang terbagi menjadi 33 Sub Kegiatan dengan Anggaran secara keseluruhan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.280.539.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran Tahun 2024 pada Dinkominfo Kab. Purbalingga mengalami penambahan sebesar Rp.1.547.503.000,- (Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.733.036.000,-) atau sebesar 22,98% dari Anggaran Perubahan 2023.

Anggaran Perubahan pada Tahun 2025 memiliki 5 Program, 13 kegiatan yang terbagi menjadi 33 Sub Kegiatan dengan Anggaran secara keseluruhan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp8.102.226.000,-** (Delapan Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sebesar Rp.443.540.000,- dari Anggran Murni 2025, dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 903/3008 tanggal 17 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun format matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir Juli tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinkominfo s/d Bulan Juli Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Bln. juni Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan bulan Juli tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d bulan Juni tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-Persentase OPD yang memiliki website aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,17%	56,17%
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	60%	100%	100%	100%	100%	56,17%	56,17%
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	12 Media	153 Dokumen	153 Dokumen	100%	153 Dokumen	63.12%	63.12%

2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	19 Permohonan	5 Permohonan	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	46.75%	46.75%
2	16	02	201	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	11 Orang	0 Orang	29 PPID Pembantu	29 PPID Pembantu	100%	29 PPID Pembantu	20.69%	20.69%
2	16	02	201	12	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	14 Komunitas	14 Komunitas	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	89.69%	89.69%
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61,24%	61,24%
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Instansi	55 Instansi	100%	55 Instansi	25,65%	25,65%
2	16	03	2.01	02	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	100%	121 Dokumen	25.65%	25.65%
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,93 Poin	100%	3,20 Poin	3,83 Poin	100%	3,50 Poin	61,85%	61,85%
2	16	03	2.02	07	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah	12 Aplikasi	12 aplikasi	42 aplikasi	42 aplikasi	100%	42 aplikasi	3.49%	3.49%
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	68.33%	68.33%
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	69,00%	100%	100%	100%	100%	69,04%	69,04%
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	69,00%	100%	100%	100%	100%	69,04%	69,04%

2	20	02	201	03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	27 dokumen	20 dokumen	280 dokumen	280 dokumen	100%	280 dokumen	62.15%	62.15%
2	20	02	201	06	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	27 dokumen	25 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100%	29 dokumen	83.42%	83.42%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	376	376	100%	100%	100%	100%	62,28%	62,28%
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	68,00%	100%	100%	100%	100%	67,42%	67.42%
2	21	02	201	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	49.73%	49.73%
2	21	02	201	02	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	85.23%	85.23%
2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	53,00%	100%	100%	100%	100%	52,31%	52,31%
2	21	02	202	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 PD	1 PD	1 PD	1 PD	100%	1 PD	35.58%	35.58%
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan. Sasaran 2: Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja: Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah, dengan indikator kinerja: Persentase penatausahaan, pemeliharaan, dan pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan Sasaran 4:	100%	57,50%	100%	100%	100%	100%	57,57%	57,57%

						Terpenuhinya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah									
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	99,97%	99,97%	
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	21 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	99,99%	99,31%	
X	XX	01	201	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	39,76%	39,76%	
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	96,11%	100%	100%	100%	100%	57,57%	57,57%	
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bln	40 Orang/Bln	42 Orang/Bln	42 Orang/Bln	100%	42 Orang/Bln	58,40%	58,40%	
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70 Dokumen	21 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	12,92%	12,92%	
X	XX	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	5,68%	5,68%	
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	94,65%	100%	100%	100%	100%	18,57%	18,57%	
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%	9 Orang	0%	0%	
X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	18,98%	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	18,98%	18,98%	
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	4,94%	100%	100%	100%	100%	4,94%	4,94%	
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0,00%	0%	
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	1 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	3,26%	3,26%	
X	XX	01	206	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	31,23%	31,23%	

X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	31.23%	31,23%
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0.00%	0%
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%
X	XX	01	203	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	0.00%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00%	0.00%
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0 Unit	100%	100%	100%	0%	0%	0%
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	100%	100%	100%	0%	0%	0%
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	27,42%	100%	100%	100%	100%	27,42%	27,42%
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0%	0%
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,72%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	19,72%	19,72%
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0%	0%
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,35%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	28,35%	28,35%
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	42,76%	100%	100%	100%	100%	42,76%	42,76%
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	45,26%	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	45,26%	45,26%
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	0%	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	0%	0%
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5%	5%

Dari tabel capaian indikator kinerja program yang mendukung sasaran Dinkominfo dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara keseluruhan dapat tercapai di atas 56%. Secara umum pelaksanaan kegiatan sampai bulan Juli tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran.
2. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program pengelolaan aplikasi Informatika secara keseluruhan dapat tercapai hingga 61,24% pada akhir bulan Juli 2025. Pada kegiatan Pengelolaan nama domain dan Pengelolaan e-governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 25,65%. Sedangkan pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai realisasi sebesar 61,85% Untuk pencapaian penerapan SID desa dan Desa.id di Kabupaten Purbalingga SID Desa sebanyak 89 Sistem Informasi Desa.go.id.

Selain capaian kinerja yang efisien juga diperoleh penghargaan di bidang Informatika terkait pelaksanaan kegiatannya diantaranya:

- a. Penggunaan PSE;
 - b. Pemanfaatan PDN;
 - c. Pemanfaatan mail.go.id beserta surat sekda disertai petunjuk penggunaan ke OPD untuk penggunaan mail.go.id bagi ASN & Perangkat Desa;
 - d. Pemanfaatan multi domain (apabila memungkinkan);
 - e. Penggunaan SI Cantik;
 - f. Penggunaan SRIKANDI;
 - g. 6 aplikasi telah dibuat di tahun 2024, dan 10 aplikasi dalam pengembangan di tahun 2024.
-
3. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program penyelenggaraan statistik sektoral secara keseluruhan sampai dengan bulan Juli 2025 dapat tercapai sebesar 69,04%. Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia tercapai realisasi 62,15%. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar tercapai realisasi 83,42%.
- Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program Pengelolaan Keamanan Informasi sektoral secara keseluruhan sampai dengan bulan Juli 2025 dapat tercapai sebesar 62,28%, Pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi mencapai 67,42%. Sedangkan Pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan

Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi mencapai 52,31%.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tupoksinya hingga bulan Juli 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan.

Capaian Prestasi Kinerja Dinkominfo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan *e-Government* Bidang Informatika;
- a. Capaian Indeks-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purbalingga 4 Tahun terakhir:

No.	Tahun	Capaian Indeks SPBE	Keterangan
1.	2021	2,23	-
2.	2022	3,20	Naik: 0,97
3.	2023	3,83	Naik: 0,63
4.	2024	3,93	Naik: 0,10

- b. Telah melaksanakan Bimbingan Teknis *Smart City* Tahap I, II, III dan IV pada Tahun 2024. Kegiatan ini akan berlanjut dengan Evaluasi *Smart City* dari Kemenkominfo di Tahun 2025.

2. **Urusan Statistik Bidang ITSP:**

- a. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1.	2023	2,06	Cukup	
2.	2024	2,81	Baik	Naik 0,75

Ket.: Rata-rata IPS Provinsi Jateng: 2,75

- b. Telah mempublikasikan:
- Analisa Big Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- Buku Metadata Kegiatan Statistik Sektoral

- Buku Metadata Variabel Statistik Sektoral

- Buku Purbalingga melalui Lensa Data yang berisi visualisasi data *time series* statistik sektoral tahun 2018 sampai dengan 2024.

- c. Kegiatan **Geospasial**, dalam pengisian data base spasial pada laman Sistem Monitoring Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Simojang) sudah **“Berwarna Hijau”** yang menandakan keterisian data **“Optimal”**. Akun Simojang Kabupaten Purbalingga dapat diakses melalui <https://simojang.big.go.id/> Kabupaten Purbalingga, Simpul Jaringan berbasis *open source* di laman <https://geoportal.purbalinggakab.go.id/> dan terdapat 120 data spasial terpublikasi serta terintegrasi dengan <https://tanahair.indonesia.go.id/>
- d. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah menginisiasi kerjasama dengan:
 - Badan Informasi Geospasial (BIG) berlaku untuk 5 tahun ke depan
 - Pusat Pengembangan Infrastruktur data Spasial (PPIDS) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
- e. Dinkominfo Kab. Purbalingga mengikuti ajang **Bhumadala Award** yang diselenggarakan oleh BIG (Ajang penilaian Simpul Jaringan dengan kinerja yang baik) dan mendapatkan Penghargaan **“Bhumandala Ariti”** dalam kategori Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Daerah.
- f. Dinkominfo telah melakukan desk keterisian data statistik sektoral dengan produsen data untuk menunjang keterisian data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga.
Geospasial di Kabupaten Purbalingga pada 15 Mei 2024 dan berlaku untuk 5 tahun ke depan.

3. **Urusan Persandian Bidang ITSP:**

- a. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih peringkat 20 besar secara Nasional pada *Indonesia Sross-Sectoral Cyber Exercise : Ransomware Scenario 2024* pada 29–30 April 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- b. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih **“PLATINUM”** sebagai peserta terbaik *online* dalam *National Cyber Exercise #3* Semarang pada 1-4 Juli 2024 dengan nilai 98,50% yang diselenggarakan oleh BSSN.
- c. Terlaksananya Audit Internal TIK SPBE bersama Inspektorat Kab. Purbalingga pada 3 Obyek Audit yaitu Aplikasi ALPUKAT (Ortala), Aplikasi SIPAKISBANGGA (Bappelitbangda) dan Infrastruktur Layanan Pemerintah (SPLP/Dinkominfo) dengan tingkat Kematangan 2 dan 3 pada 3 Juni s.d. 31 Juli 2024 memanfaatkan *Audit Tools* dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

- d. Perwakilan SDM Persandian memperoleh Sertifikat Kompetensi Bidang *Junior Penetration Testing* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada 5–15 Agustus 2024 di Badan Siber dan Sandi Negara.
- e. Kabupaten Purbalingga melaksanakan *Kick Off* Penanganan Judi *Online* bersama Satgas Perlindungan Data dan Pemberantasan Perjudian Daring yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- f. Hasil Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Badan Siber dan Sandi Negara pada 1 s.d. 2 Oktober 2024 memperoleh hasil 376 dengan hasil evaluasi akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.
- g. Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam *Launching CSIRT (Computer Security Incident Response Team)* Sektor Pemerintah dan Pendidikan bersama 31 K/L/D Seluruh Indonesia di Aula Roebiono Kertopati Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 10 Oktober 2024.
- h. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) per Oktober 2024 telah terbit sebanyak 321 Sertifikat Elektronik.
- i. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih **peringkat pertama (online) di tingkat Nasional** pada acara National Cyber Exercise (Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise # 3: Regional Jateng-DIY) yang diadakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN pada Bulan Juli 2024.

4. **Urusan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang IKP:**

Dinkominfo Kab. Purbalingga telah mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan hasil penilaian:

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1	2023	92,95	Informatif	Peringkat 18 Provinsi Jateng
2	2024	96,19	Informatif	Peringkat 8 Provinsi Jateng Naik: 3,25

2.2 **ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun 2025 capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan target yang sudah diakomodir pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengampu enam indikator, dimana semuanya berstatus tercapai bahkan ada lima indikator yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Kelima indikator yang dimaksud diantaranya Indeks SPBE, Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah, Tingkat keamanan Informasi Daerah, Nilai Kematangan Perangkat Daerah, Nilai Sakip Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Dinkominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya dalam pengintegrasian, sehingga masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
2. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan, baik fasilitas publik, kecamatan, dan kelurahan yang belum terhubung. Peralatan infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
3. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
2. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.

3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas SDM.

Kinerja pelayanan Dinkominfo selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo		39	39	39	40	40	39	39	39	40	
2	Jumlah OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinkominfo		39	39	39	39	39	39	39	39	39	
3	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinntegrasi		45	45	45	46	47	45	45	45	46	
4	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		75	75	76	77	78	75	30	76	77	
5	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015		75	75	76	77	78	75	30	76	77	
6	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		195	195	195	196	196	195	195	195	196	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan		45	45	45	45	45	45	45	45	45	
8	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		13	13	14	15	16	13	13	14	15	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Jumlah Layanan SPBE secara elektronik		268	268	269	270	271	268	268	269	270	
10	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		16	16	16	16	16	16	16	16	16	
11	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan		268	268	269	270	271	268	268	269	270	
12	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		42	42	43	44	45	40	44	43	44	
14	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>		22	22	23	24	25	19	23	23	24	
15	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinkominfo		17	17	17	18	19	17	17	17	18	
16	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		14	14	14	14	14	14	14	14	14	
17	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi		76	76	77	78	79	76	50	77	78	
18	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi SOP		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
19	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik PPID		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
20	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
21	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar Tahun 2023		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
22	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan		47	47	48	49	50	47	48	47	48	

[illegible]

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan tiap-tiap kegiatan di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terbukti dengan jumlah layanan publik yang ada dan lokasinya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1 Lokasi Website & Aplikasi

List Website & Aplikasi Lain		
NO	LOKASI	Nama Aplikasi
	PDN	1. SIMANTAP 2. Purbalingga Memikat 3. E-Sakip 4. E-Kepegawaian 5. E-Kinerja 6. Geoportal 7. CBT BKPSDM 8. Dilan 9. Infowisata 10. MUI 11. Korpri 12. e-SPPD 13. Agendadinkopukm 14. PPID
	Lokal	1. Mail Purbalingga 2. Aduan CSIRT 3. CSIRT Purbalingga 4. BanggaMacapat 5. Simpel 6. Bakeuda Retribusi

Tabel 2.2.2

DAFTAR LAYANAN PUBLIK ONLINE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

No	Aplikasi	OPD	Site
1	Syantika (Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian)	DINKOMINFO	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.santika
2	Satu Data Purbalingga (Portal Satu Data Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	https://data.purbalinggakab.go.id/
3	DILAN-APP (Digital Layanan Pengajuan Aplikasi)	DINKOMINFO	https://dilan.purbalinggakab.go.id/
4	MATURBUP Versi Android (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://apkpure.com/id/matur-bupati-purbalingga/id.go.purbalinggakab.maturbup
5	MATURBUP PURBALINGGA (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
6	SangJuara (Aplikasi Administrasi Kejuaraan Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	ikps://sangjuara.purbalinggakab.go.id/
7	SIMPSPBE (Sistem Informasi SPBE Purbalingga)	DINKOMINFO	https://simpspe.purbalinggakab.go.id/
8	Portal Kecamatan (Portal website kecamatan)	DINKOMINFO	https://portalkecamatan.purbalinggakab.go.id/
9	Sijoli (Sistem informasi Jaringan Online)	DINKOMINFO	https://sijoli.purbalinggakab.go.id/
10	Monitoring Website (Monitoring Websile Milik Dinkominfo)	DINKOMINFO	https://monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id/dashboard
11	Simita (Sistem manajemen Aset Jaringan)	DINKOMINFO	https://simita.purbalinggakab.go.id/auth
12	Pendaftaran Online RSUD Purbalingga (Aplikasi Android Pendaftaran Online RSUD Purbalingga)	RSUD GOETENG	https://apkpure.com/id/pendaftaran-online-rsud-purbalingga/rstudio.pendaftaronline
13	Aplikasi Android SiLapar Buku(Aplikasi Pesan Antar Buku)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/silapar-buku-purbalingga/app.finasmart.kpadpurbalingga
14	Aplikasi Android E-Bangga (Aplikasi Elektronik Buku Purbalingga)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/e-bangga-elektronik-buku-purbalingga/id.kubuku.kbk10905b0
15	Aplikasi TKA (Aplikasi Pengajuan Tenaga Xerja Asing)	DINAKER	https://tka-online.kemnaker.go.id/
16	Cegah Stunting (Website Aplikasi Cegah Stunting)	DALDUK	https://cegahstunting.purbalinggakab.go.id/
17	Dapodik (Data Pokok Kependidikan)	KEMDIKBUD	https://dapo.kemdikbud.go.id/

18	DigiT (sistem Perbendaharaan Anggaran Negara)	BAKEUDA	https://spanint.kemenkeu.go.id/spaninMa test/app/
19	E- Kepegawaian (Aplikasi data Kepegawaian Pemkab Purbalingga)	BKPPD	http://e-kepegawaian.purbalinggakab.go. dl
20	e-Kine/ja (Sistem informasi Kinerja Pegawai)	BKPPD	https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id/
21	E-Makaryo (Aplikasi bursa Kerja Jawa Tengah)	SNAKER PROV	https://bursakerja.jatengprov.go.id/
22	E-Monev Simbangda Kab. Purbalingga (Aplikasi e-monev Pembangunan)	SETDA PEMBANGUNAN	https://simbangda.purbalinggakab.go.id/
23	E-PRESENSI (aplikasi pengelolaan Presensi penghitung TPP)	BKPPD	https://e-presensi.purbalinggakab.go.id/
24	E-SPPT-SIMPBB (Sistem Informasi Pajak Bumi Bangunan)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.idJogin
25	E-SPTPD (Aplikasi Penerimaan Pajak)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.idJogin
26	INFO COVID-19 (Aplikasi Informasi covid-19 Purbalingga)	DINKES	https://corona.purbalinggakab.go.id/
27	Info Wisata Purbalingga (Aplikasi Info Wisata Purbalingga)	DINPORAPAR	http://infowisata.purbalinggakab.go.id/
28	Layanan Manajemen Keuangan (Aplikasi Keuangan Daerah0	BAKEUDA	https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id /#/client/CSIMKEU
29	Layanan Manajemen Penganggaran (Aplikasi Keuangan Daerah)	BAKEUDA	http://simdoud.id/purbalinggakab/
30	Layanan Manajemen Perencanaan (SIM Perencanaan Penganggaran Pelaporan)	BAPELITBANGDA	http://202.46.1.88/simral/
31	Monitoring PSC119 (Aplikasi Kegawatdaruratan Medik)	DINKES	https://admin.psc119purbalingga.comJog n
32	NERACA (Aplikasi Neraca Pangan Daerah)	DKPP	https://neraca.aksespangan.comJogin
33	Pelatihan Kemnaker (Aplikasi pengajuan Pelatihan Tenaga Keija)	DINAHER	https://pelatihan.kemnaker.go.id/
34	Pelayanan E-KTP Kab. Purbalingga (Website Pelayanan E-KTP Dukcapil)	DUKCAPIL	http://dinpendukcapil.purbalinggakab.go. dl
35	Sistem Perizinan Online (Aplikasi Perizinan Online Single	DPMPSTP	https://ss.go.id/

- Selain capaian kinerja pelayanan, Dinkominfo juga memiliki beberapa inovasi. Inovasi yang telah dilakukan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga antara lain:
1. **Koresponden Liputan Produk UMKM Purbalingga** (KrupuG)
 2. **GEO-PURBA** (Geospasial Purbalingga)
 3. **ELASTIK** (E-Learning Sertifikat Elektronik
 4. **e-Metadata** (ebook Metadata Indikator Statistik Sektoral)
 5. **TATAKOMINFO** (Optimalisasi Publikasi Melalui Standarisasi Konten Digital Di Dinas

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga)

6. **E-Majalah Derap Perwira**
7. **Dinkominfo Menyapa**
8. **Ekovis** (Optimalisasi Publikasi Media Visual Menggunakan Ekosistem Digital di Dinkominfo Purbalingga)
9. **WADUK SEMFOR** (Wadah Edukasi Sadar Keamanan Informasi)
10. **PAMER INFO** (Podcast dan Media Center Dinkominfo)
11. **BAJU SEJASNI** (Berkah Jum'at, Sehat Jasmani Rohani)
12. **Website Bangga macapat**
13. **OMMEGA** (Optimalisasi Monitoring Media Massa Online Menggunakan Google Alerts)
14. **Sistem Informasi Digitalisasi Desa**
15. **JUBAH BARU** (Jumat Barokah Bahagia Berbagi Ilmu)
16. **Optimus Prime** (Optimalisasi Penerapan SSO Melalui Aplikasi Manajemen e-Akun Berbasis Website)
17. **SIMPANDATA** (Sistem Penyimpanan Data Terpusat)

Analisis Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan bulan Juli 2025 diperoleh rata-rata realisasi 58,01%, dengan nilai realisasi tertinggi sebesar 100%. Realisasi yang sudah diatas 50% diperoleh pada kegiatan berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu

5. Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
8. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
 - b. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
10. Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah
 - a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan-kegiatan lain di Dinkominfo juga penyerapannya baik yaitu dari 37% s.d. di bawah 58,01% sehingga anggaran bisa terserap dan digunakan secara optimal pada kegiatan yang dilaksanakan.

Hanya pada sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah yang hanya mencapai 3,43% dikarenakan merupakan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp.100.000.000,- yang tidak dapat dilaksanakan di Bidang Informatika karena kajian tentang SPBE sudah tidak relevan dengan indikator kinerja Dinkominfo.

Sejak tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sudah tidak menggunakan indikator kinerja SPBE lagi, namun menggunakan Indeks Pemerintahan Digital dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2026, namun Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tidak menjadi lokus penilaian diantara 5 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang menjadi lokus penilaian.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Serta Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Diperbaharui dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan peraturan di atas yang menjadi dasar bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk terus berupaya bekerja optimal sehingga dapat meraih target kinerja yang membanggakan. Hasil kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang membanggakan karena didukung kekuatan yang dimiliki di intern Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Pimpinan yang baik dan senantiasa memberi contoh serta motivasi kepada bawahan untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terhitung cukup memadai dari segi kualitas walaupun masih terbatasnya sarana pengembangan SDM yang ada, sedangkan dari segi kuantitas masih jauh dari cukup untuk menjalankan tupoksi yang ada.
3. Semangat yang tinggi untuk bekerja optimal baik dari pimpinan hingga seluruh staf Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sehingga mampu meraih beberapa prestasi membanggakan baik di tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa isu penting diantaranya :

1. PENDAMPINGAN BRIN.

Nota kesepakatan bersama BRIN terkait kegiatan peningkatan SDM (*transfer knowledge*) untuk urusan statistik dan persandian (keamanan siber) kesepakatan ini dimulai Tahun 2024- 2029.

Kesepakatan menggunakan *sharing cost*, BRIN menyediakan para mentor dan Dinkominfo terkait tata tempat, makan-minum, dan penyediaan internet saat pelatihan.

2. PENDAMPINGAN SMART CITY.

Program pendampingan penyusunan dokumen *master plan smart city* dari Kemenkominfo.

3. KERJASAMA DENGAN BALAI PENINGKATAN SDM YOGJAKARTA (wilayah BPSDMD wilayah DIY, Jateng, dan Bali)

- a. *Digital Entrepreneurship Academy* untuk 300 peserta dengan sasaran pelaku UMKM;
- b. *Thematic Academy* untuk pelaku wisata 120 peserta;
- c. *Vocational School Graduate Academy*, pelatihan digital untuk lulusan SLTA/ sederajat dengan peserta 70 orang

4. Nota kesepakatan dengan BIG.

Pelatihan Geospasial dan pembuatan *Road Map* dan SOP pelaksanaan Geospasial di Purbalingga.

(Nota kesepakatan menggunakan *sharing cost* dengan BIG, seperti yg dilakukan bersama BRIN.

5. Pemerintah Kabupaten dan Badan Publik sudah mencapai tahap Informatif dengan nilai dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 sebesar 96,19. Optimalisasi fungsi pelayanan informasi publik sesuai tuntutan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih perlu terus ditingkatkan. Pada penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID masih perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

6. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Purbalingga Tahun 2025, sesuai surat edaran bupati purbalingga tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain:

Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - 1) Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi.

- 2) Penguatan Desa, dengan:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui;
 - 1) digitalisasi desa
 - 2) pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
7. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE sudah mencapai nilai indeks sangat baik, namun tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE merupakan indikator terendah. Hal ini menggambarkan kinerja yang masih perlu dipacu untuk lebih meningkatkan perannya dalam manajemen SPBE terutama dalam audit infrastrukturnya. Di sisi lain kinerja optimal Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sangat signifikan dalam pelayanan publik.
8. Gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja. Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM. Pada Aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM, dapat dimulai dengan melakukan kegiatan yang terencana serta membentuk tim yang mendokumentasikan seluruh pengetahuan dan perubahan yang dilakukan di lingkup penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan juga dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target. Proses unggah bukti dukung perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan indikator yang diminta agar tidak terlalu banyak bukti dukung dan kurang relevan dengan indikator yang ditanyakan.
9. Indek Keamanan Informasi masih rendah/kurangnya dukungan infrastruktur keamanan informasi baik *hardware* maupun *soft ware*;
10. Pengelolaan data statistik sektoral yang belum maksimal dikarenakan OPD tidak menyajikan data secara update dan juga

belum adanya revisi Peraturan Bupati tentang Satu Data Purbalingga yang berisi satuan data.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga ditemui beberapa permasalahan dan hambatan dalam menjalankannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
7. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan *single data* dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar yang ditentukan;
9. Perlunya peralatan pendukung utama dan wajib persandian sesuai rekomendasi standar keamanan informasi;
10. Sarana dan Prasarana pendukung sesuai spesifikasi yang dibutuhkan masih kurang memadai;

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada dokumen RPJMD belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi yang maksimal antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum maksimal menjadi prioritas pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Dinominfo Kabupaten Purbalingga.

1. Tantangan:

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat Kabupaten Purbalingga;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum memadai;
- d. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Purbalingga terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala yang berpengaruh terhadap beberapa hal di kegiatan bidang IKP antara lain:

- a) Kurangnya peralatan ‘tempur’ yang memadai terutama peralatan liputan-liputan;
- b) Keterbatasan pelaksanaan rapat dan koordinasi baik intern kabupaten maupun koordinasi ke Provinsi dan ke Pemerintah Pusat (makan/minum, narasumber, dan sppd);
- c) Keterbatasan anggaran lembur dan uang saku perjalanan dalam daerah (banyaknya kegiatan peliputan di wilayah, baik hari kerja maupun hari libur).

Selain capaian-capaian di atas ditemui kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Informatika, diantaranya:

1. Pembuatan aplikasi dilakukan secara individu dikarenakan banyaknya permintaan dari OPD sedangkan tenaga teknis di Informatika masih terbatas;
2. Diharapkan kepada semua staf paham aplikasi dan dapat menjelaskan jika ada yang OPD/masyarakat yang berkonsultasi;
3. Email bermasalah (terdeteksi spam) sedang diselesaikan menggunakan zimbra mail server;

Kendala di bidang Infrastruktur teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian/ITSP diantaranya:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana pengolahan data yang mengakibatkan lambatnya Distribusi serta Kinerja Pengamanan Informasi
2. Perawatan Jaringan Telepon PABX di Lingkungan Setda masih menjadi tanggung jawab Dinkominfo sehingga mengurangi alokasi anggaran kegiatan persandian
3. Masih kurangnya kesadaran terkait keamanan informasi,
4. Sarpras penunjang kegiatan pengamanan informasi belum memadai,
5. Kurangnya kompetensi pengelola keamanan informasi,
6. Belum Operasionalnya (Launching) Computer Security Incident Response Team (CSIRT),
7. Belum optimalnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi), Evaluasi Persandian dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)
8. Banyaknya akuisisi atau pemindahan kepemilikan menara antar provider sebenarnya termasuk untuk kendala target Realisasi PAD tahun 2022 yg tidak tercapai 100%
9. Belum adanya penataan kabel optik dan tiangnya sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu estetika kota.
10. Belum ada pelaporan ke dinas yang menangani telekomunikasi dalam hal ini Dinkominfo sehingga kesulitan dalam pendataan, sejauh ini belum ada data banyaknya provider ISP yang ada di purbalingga, Luas area cakupan dan berapa KM kabel yang digelar serta berapa buah yang terpasang.
11. Dalam pemasangan kabel atau tiang kadangkala meninggalkan kaidah standar SNI, contoh, terkait kedalaman tiang yang aman sehingga tidak roboh, kemudian batas maksimal dalam satu titik bisa dipasang tiang.
12. Masih adanya para penyelenggara ISP yang belum berijin khususnya bagi yang menjual kembali jasa telekomunikasinya.
15. Kurangnya Dukungan Finansial, Kurangnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan statistik menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana, seperti Cetak Buku Statistik Metadata Variabel dan Indikator, Desk Satu Data yang

seharusnya dilaksanakan oleh walidata tetapi realitanya masih dilaksanakan oleh Bappelitbangda, serta data yg diperoleh belum sampai level kecamatan dan instansi vertikal

16. Updating Data, belum melakukan updating data secara periodik sesuai dengan waktu rilis data
17. Kualitas Pengelolaan Data, Perlunya peningkatan kemampuan/ keterampilan Pengelolaan Data Statistik
18. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Perangkat yang digunakan untuk menghimpun, mengolah dan mendiseminasikan Data, hal ini menyebabkan hasil kinerja kurang maksimal.

Khusus di kegiatan Keamanan Informasi terdapat kendala antara lain:

1. SDM Persandian kurang memiliki kompetensi keamanan siber yang memadai
2. Belum masifnya implementasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi
3. Belum adanya *blue print* tata kelola persandian dan keamanan informasi jangka panjang
4. Berita berklasifikasi belum terdokumentasi dengan baik
5. Belum diterapkannya Sertifikat Elektronik di lingkungan Desa/Kelurahan
6. Belum efektifnya Purbalinggakab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)
7. Belum diterapkan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
8. Belum adanya data center yang memadai
9. Rendahnya Information Security Awareness di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
10. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
11. Rendahnya indeks KAMI di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga
12. Belum optimalnya Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga

2. Peluang:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Purbalingga berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government* sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Purbalingga;
- c. Kesadaran masyarakat Kabupaten Purbalingga akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Purbalingga berbasis elektronik

- e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

2.3.5 Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan PPID yaitu:

- a) Review website PPID
- b) Persiapan materi 2024 (Perda, DIP, DIK)
- c) Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi OPD

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan Pemeliharaan dan Pindah Lokasi Rangka Baliho yaitu:

- a) Pemindahan rangka di Karangreja
- b) Pemasangan (pindah lokasi) rangka bekas dari Taman Usman Janatin
- c) Pemeliharaan rangka di pintu masuk Pendopo Dipokusumo

Rekomendasi dan tindak lanjut lainnya bidang IKP yaitu:

- a) Pembuatan Baliho/Banner, menyesuaikan tema kegiatan dan rangka yang tersedia
- b) Pembuatan kalender rutin tahunan yang akan dibagi pada saat Hari Jadi dan Expo
- c) Mengganti nama medsos dinkominfo bg dan membuat akun baru untuk dinas sebagai pemenuhan kelengkapan dokumen penilaian PPID.

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi bidang Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Kesanggupan admin OPD untuk pengelolaan aplikasi
2. Digitalisasi layanan publik
3. Medsos Dinkominfo sbg PPID Pelaksana dengan admin masing-masing Bidang
4. Pengembangan Website PPID
5. Melanjutkan kegiatan “Jubah Baru” setiap hari Jum'at barokah berbagi ilmu di aula Dinkominfo dalam melayani pengaduan masyarakat.
6. Kelanjutan pelaksanaan dari Bimbingan Teknis *Smart City* yang dilaksanakan pada tahun 2024

Adapun rekomendasi rencana tindak lanjut bidang ITSP yaitu:

1. Sosialisasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi.
2. Penyusunan blue print/rencana tata kelola persandian dan keamanan informasi yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)*
3. Manajemen berita berklasifikasi dari email sanapati
4. Koordinasi dengan Desa/Kelurahan serta Dinarpus dalam implementasi TTE

pada aplikasi Srikandi

5. Kesiapan infrastruktur dan SDM yang memenuhi pelaksanaan CSIRT
6. Sosialisasi kebijakan terkait SMKI dan inisiasi penerapan ISO 27001:2022 melalui pihak ke 3 pengelola data center
7. Penyusunan KAK dan pengadaan data center dan co-location
8. Bekerjama dengan Kementrian Kominfo melalui Program Digitalent.
9. Koordinasi dengan Diskominfo Provinsi dan BSSN terkait evaluasi pelaksanaan persandian.
10. Koordinasi Bersama Stakeholder untuk merumuskan tujuan dari Persandian daerah
11. Pengajuan asistensi Indeks KAMI dengan BSSN
12. Pengajuan sistensi TMPI dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Purbalinggakab-CSIRT.
13. Launching Purbalinggakab-CSIRT
14. Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
15. Inisiasi Audit Internal TIK SPBE (Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan)
16. Sharing Knowledge dengan BRIN
17. Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi (Sanapati dan Srikandi)
18. Optimalisasi Penanganan Insiden Siber melalui Web: <https://csirt.purbalinggakab.go.id/>
19. Sosialisasi *Cyber Security Awareness* kepada pelajar di Purbalingga
20. Implementasi Sertifikat Elektronik di Lingkup Desa
21. Peningkatan SDM Kamsider Purbalingga (Pelatihan JPT, SOC, CSIRT)
22. Melakukan Permohonan Permintaan Titik Koordinat Ke Tiap Tiap Pemilik BTS Menara Telekomunikasi
23. Melakukan Permohonan Permintaan Nomor IMB pada setiap Bangunan Menara Yang Telah Berdiri dan Masih Beroperasi
24. Kualitas Data, Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi atribut kelengkapan metadata.
25. Belum Optimalnya Pemanfaatan Geoportal, Belum adanya web GIS yang dibangun berdasarkan pengembangan dari Geoportal
26. Portal Satu Data Daerah yang Bervariasi, Beberapa Kab/Kota hanya menggunakan CKAN sebagai Portal Satu Data, ada Juga yang melakukan Pemutakhiran dengan membangun Aplikasi Baru. Tentunya seharusnya ada kiat dari pemprov/pusat untuk menstandarkan Portal Satu Data, seperti standarisasi Geoportal
27. Survei Kebutuhan Data, Pengisian Rekomendasi Statistik, Proses Validasi dan Penerbitan Rekomendasi, Validasi Data Geospasial, Proses Pemutakhiran Portal

Rekomendasi dan tindak lanjut urusan LPPL RGS antara lain:

- a. Perlu adanya perbaikan tiang pancang dan peremajaan tower yang memadai atau pengecatan tower, dikarenakan kondisi saat ini tower sudah melintir dan belum pernah ada pengecatan ulang dari awal pembangunan.
- b. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booter berupa power supply untuk booster karena pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 01:30 WIB terjadi kerusakan pada *Power Supply Booster* Pemancar dan sampai sekarang belum adanya pengadaan sparepart tersebut untuk mengganti dan untuk cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan kembali, dengan spesifikasi tegangan 48V/50V 50A.
- c. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booster berupa pallet fm blf188xr/mrf1k25 untuk mengganti pallet booster jika sewaktu-waktu mati karena ada masa pakainya.
- d. Perlu adanya pengadaan UPS untuk membackup computer agar tidak langsung mati ketika listrik padam agar computer terutama hardisk tidak mudah rusak.
- e. Perlu adanya pengadaan alat audio management.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala disamping adanya beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap beberapa hal di atas.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD sudah melalui proses dengan keterlibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses musrenbang.

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD. Adapun hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11)	(12)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	593,724,000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	825.277.000	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	593,724,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	825.277.000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	278	254,650,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12	471.528.000	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	16	296,984,000	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi public	16	307.985.000	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	29	22,000,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	41	20.000.000	
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Purbalingga	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14	20,090,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Purbalingga	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14	25.764.000	

7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	845,884,600	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	1.076.986.000	
8	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3.5	23,658,800	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3,55	21.508.000	
9	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	42	23,658,800	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	42	3.508.000	
10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Purbalingga	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	0	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Purbalingga	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	1	20,000,000	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat TA. 2025
11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Purbalingga	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	-	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Purbalingga	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1	20,000,000	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat TA. 2025
12	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	55	882,225,800	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	55	1.0255.478.000	
13	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	121	22,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	121	20.000.000	
14	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8	800,225,800	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8	1.035.478.000	Anggaran pada tahun 2024 bertambah 408.000.000,- untuk pembelian 2 unit server. Pada tahun 2025 berkurang Rp.200.000..000.

15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	43,525,000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	39.568.000	
16	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	43,525,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	39.568.000	
17	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	280		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	1	23.119.000	Penggabungan dari Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
18	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Purbalingga	Jumlah metadata Statistik sektoral	1	7,040,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Purbalingga	Jumlah metadata Statistik sektoral	0	0	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
19	Pengembangan Infrastruktur	Purbalingga	Jumlah infrastruktur statistik	29	18,391,000	Pengembangan Infrastruktur	Purbalingga	Jumlah infrastruktur statistik	0	0	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
20	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Purbalingga	Jumlah Data Statistik Sektoral		18,094,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Purbalingga	Jumlah Data Statistik Sektoral	29	16.449.000	
21	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Purbalingga	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	54,061,000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Purbalingga	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	49.148.000	
22	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	36,528,000	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	33.208.000	
23	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	18,264,000	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	16.604.000	

24	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	18,264,000	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	16.604.000	
25	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	17,533,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	15.940.000	
26	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1	17,533,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1	15.940.000	
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - Persentase pengelolaan administrasi asset milik Daerah sesuai ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	6.340.390.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - Persentase pengelolaan administrasi asset milik Daerah sesuai ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	6.089.560.000	
28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	4,017,200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.652.000	
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	2,191,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	1.992.000	

30	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,826,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	1.660.000	
31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5,330,892,760	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5.299.833.000	
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	42	5,230,737,600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	42	5.208.782.000	
33	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	24	62,596,160	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	24	56.906.000	
34	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4	37,559,000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4	34.145.000	
35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	257,818,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	93.380.000	
36	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10	-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10	5.000.000	
37	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	133	257,818,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	133	88.380.000	Bergeser ke Pengelolaan Media Komunikasi Publik
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	44,918,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	30.835.000	
39	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2,200,000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.000.000	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	27,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	15.000.000	Dikurangi Rp 10 juta digeser ke Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

41	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	8,800,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	8.000.000	
42	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	4,227,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	3.843.000	
43	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	2,191,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	1.992.000	
44	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	2,191,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	1.992.000	
45	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	4	2,191,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	4	1.992.000	
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	590,014,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	554.377.000	
47	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	355,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	323	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	60,911,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	55.374.000	
49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1,100,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1.000.000	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	527,648,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	497.680.000	

51	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000	
52	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	-	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	10.000.000	mendapat geseran dari Sub Kegiatan Logistik senilai Rp 10 juta untuk membeli Alat Scanner
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	110,539,440	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	95.491.000	
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	104,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	90.000.000	
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	3,839,440	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	3.491.000	
56	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1	2,200,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1	2.000.000	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan pada hasil analisis kebutuhan diantaranya:

1. Anggaran pada 21 sub kegiatan secara umum mengalami efisiensi, hanya pada sub kegiatan Earnmark yang tidak dilakukan Efisiensi, sedangkan anggaran yang bersumber dari CHT diefisiensi pada perjalanan dinas sebesar Rp.5.150.000,- hanya dialihkan ke kegiatan inti DBHCHT.
2. Anggaran Earnmark Gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar Rp.257.977.000 atau sekitar 4,77% dikarenakan ada 2 orang ASN Dinkominfo yang menjalani masa purna tugas.
3. Anggaran pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik mengalami kenaikan sebesar Rp9.000.000,- atau sekitar 2,51%, hal ini karena anggaran yang ada tidak cukup untuk membayar tagihan Listrik dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kematian 10 orang THL LPPL RGS hingga bulan Desember 2025.
4. Pagu Anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,- atau sekitar 100% atau menjadi nol yang merupakan pagu dari Bappelitbangda.
5. Anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan sebesar Rp945.000,- atau sekitar 0,09% karena adanya pembanguna jaringan FO di lingkungan Sekda Kabupaten Purbalingga.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dimana atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam satu rumpun Infrastruktur Pembangunan Wilayah/IPW disampaikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah/Forum OPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten. Pembahasan program dan kegiatan antar OPD bersama masyarakat ini dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan oleh masyarakat di Forum OPD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD yang berkompeten di bidangnya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk keselarasan usulan masyarakat dalam pelaksanaan oleh OPD terkait serta sebagai

langkah optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas antar OPD dalam pelaksanaannya, khususnya di rumpun IPW.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Purbalingga terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Namun dalam hal ini terdapat sepuluh usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bersedia sebagai narasumber dalam kegiatan yang menjadi usulan/aspirasi masyarakat dari desa/kelurahan terkait tupoksi Dinkominfo dengan anggaran kegiatan dari desa/kelurahan yang mengusulkan aspirasi kegiatan tersebut.

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN 2024

Usulan masyarakat disalurkan dan ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/musrenbang desa berlanjut dengan musrenbang kecamatan. Usulan selanjutnya disampaikan dalam musrenbang kabupaten. Usulan masyarakat tersebut ditujukan kepada OPD sesuai pengelompokan tupoksi masing-masing OPD. Usulan yang berkaitan dengan tupoksi Dinkominfo sebagian besar merupakan permintaan pelatihan bidang komunikasi informatika. Ada sembilan usulan masyarakat yang ditampung Dinkominfo dari hasil musrenbang. Berikut daftar usulan masyarakat hasil musrenbang:

Tabel 3.1 **Daftar Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang 2024**

Nama Pengusul	No Urut Usulan	ID USULAN
Drs. BAMBANG TEGUH WAHYONO	1345	1281719
KAMSIR, S.Sos	2037	1311346
KUWATNO, S.Pd.I	1232	1274949
RETNO HENDARWATI	285	1228587
ROMIDI	387	1233152
SOBIR HERMAWAN	184	1222192
SUNARNO, S.Hi	835	1256678
SUNYOTO	855	1257204
SUWARTO	411	1234027

REKOMENDASI DINKOMINFO:

Usulan dianggarkan pada ADD masing-masing lokus usulan, Dinkominfo Kabuputen Purbalingga bersedia menjadi narasumber pelatihan. Usulan program dan kegiatan masyarakat selengkapnya dalam tabel berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kertanegara	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	-	
2		Bukateja			
3		Karangjambu			

4		Bobotsari			1232	1274949
					285	1228587
				RETNO HENDARWATI		
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	285	1228587
				melek teknologi	285	1228587
				Bobotsari	285	1228587
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	285	1228587
				Verifikasi Perangkat Daerah	285	1228587
				-	285	1228587
				-	285	1228587
5		Karanganyar		ROMIDI	387	1233152
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	387	1233152
				Pelatihan Digital Marketing dan Keterampilan Berbasis Teknologi Informasi dibutuhkan oleh warga Desa untuk memperluas jaringan pemasaran produk warga Desa dan peningkatan keterampilan dibidang teknologi digital	387	1233152
				Karanganyar	387	1233152
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	387	1233152
				Verifikasi Perangkat Daerah	387	1233152
				-	387	1233152
				-	387	1233152
6		Pasunggingan, Pengadegan		SOBIR HERMAWAN	184	1222192
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	184	1222192
				Masih kurangnya wawasan dibidang komunikasi informatika	184	1222192
				Pengadegan	184	1222192
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	184	1222192
				Verifikasi Perangkat Daerah	184	1222192
				-	184	1222192
				-	184	1222192
7		Pengadegan		SUNARNO, S.Hi	835	1256678
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	835	1256678
				Masih kurangnya pengetahuan IPTEK	835	1256678
				Pengadegan	835	1256678
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	835	1256678
				Verifikasi Perangkat Daerah	835	1256678
				-	835	1256678
				-	835	1256678

8		Mrebet			SUNYOTO	855	1257204
					Pelatihan bidang komunikasi informatika	855	1257204
					Gadget kebanyakan hanya untuk bermain game, lebih baik memanfaatkan gadget untuk kegiatan produktif	855	1257204
					Mrebet	855	1257204
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	855	1257204
					Verifikasi Perangkat Daerah	855	1257204
					-	855	1257204
					-	855	1257204
9		Karang Jambu			SUWARTO	411	1234027
					Pelatihan bidang komunikasi informatika	411	1234027
					Minimnya pengetahuan tentang bidang komunikasi dan informatika	411	1234027
					Karangjambu	411	1234027
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	411	1234027
					Verifikasi Kecamatan	411	1234027
					-	411	1234027
					-	411	1234027
					Grand Total	7571	11299854

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah mendukung transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sasaran strategisnya meliputi peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif.

3.1.1. Tujuan:

- **Mendukung transformasi digital nasional:**
Kominfo berupaya mendorong perkembangan teknologi digital di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bangsa.
- **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan:**
Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Kominfo bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
- **Mewujudkan Indonesia Informatif:**
Kominfo berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- **Membangun SDM Unggul:**
Kominfo juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung transformasi digital.

3.1.2. Sasaran Strategis:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital:**
Kominfo fokus pada pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti perizinan, informasi kependudukan, dan lainnya.
- **Peningkatan Literasi Digital Masyarakat:**
Program-program literasi digital bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab.
- **Pengembangan Infrastruktur Digital yang Merata:**
Kominfo berupaya memperluas jangkauan dan kualitas infrastruktur digital, termasuk jaringan internet, ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.
- **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif:**

Kominfo berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, relevan, dan tepat waktu, serta mengelola komunikasi publik secara efektif.

- **Perlindungan Data Pribadi:**

Kominfo berperan dalam penyusunan regulasi dan implementasi sistem perlindungan data pribadi untuk menjaga privasi masyarakat dalam era digital.

- **Pengawasan Ruang Digital:**

Kominfo bertugas untuk mengawasi dan menanggulangi konten negatif yang beredar di ruang digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan perjudian online.

- **Pengembangan Industri Kreatif Digital:**

Kominfo mendukung pertumbuhan industri kreatif digital, termasuk pengembangan konten digital, animasi, dan permainan, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kominfo ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dalam Rencana Strategis Kominfo, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPD Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis ditetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis.

Tujuan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

DINKOMINFO merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui misi ke-1, yaitu: Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik, indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai sakiP.

Adapun urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan sasaran:

1. Meningkatnya integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator sasaran indeks keterbukaan informasi publik dan meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.
2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator sasaran persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dengan indikator sasaran tingkat keamanan informasi Pemerintah.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo adalah mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN DINKOMINFO KAB. PURBALINGGA

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	Poin	3,50	3,93
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Poin	94	96,20
		Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	100	100
		Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	315	376
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKOMINFO		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	45
		Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOMINFO	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,76	72,75

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2029. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi. Selain untuk menjawab permasalahan daerah, perumusan tujuan dan saran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

3.3.1.a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud adalah **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada Pembangunan ekonomi diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. Purbalingga Kolaboratif adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta, dimana Pembangunan melibatkan berbagai untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 V – 2 untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut adalah:

B-Bangkitkan Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan ekonomi local melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian

A-Akselerasi Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi

R-Reformasi Pelayanan Publik: Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi

U-Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 meliputi 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, namun hanya Misi ketiga yang berkaitan dengan kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang diuraikan sebagai berikut:

Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile, dengan sasaran:

1. Meningkatnya birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan;
2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
3. Meningkatnya desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten

Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi dan misi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo yaitu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

3.3.2 *Sustainable Development Goals /SDGs*

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tujuan pembangunan yang disepakati negara Anggota PBB. Terdapat 169 capaian yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dalam SGD's adalah pendidikan, namun di masa pandemi Covid-19, pendidikan sebagaimana sektor lainnya mengalami turbulensi. Untuk mewujudkan SDGs, saat ini Pemerintah tengah membangun tiga layer infrastruktur, aplikasi, dan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

*** INFRASTRUKTUR**

Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh infrastruktur telekomunikasi bisa menjangkau pelosok tanah air di daerah-daerah pedesaan, rural, dsb. Presiden menyampaikan Lima Percepatan Transformasi Digital dan salah satunya adalah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Infrastruktur yang dikelola Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- ▶ **Dinkominfo Data Center** yang terletak di SETDA Purbalingga. Server 2U/1U total 8 unit dengan kapasitas hingga 100 vcpu.
- ▶ **Pusat Data Nasional** yang merupakan Fasilitas Cloud Pemerintah milik Kementrian Kominfo untuk Tenant Pemkab-Purbalingga dimana memiliki kapasitas hingga **57 VM/Server (virtual machine), CPU: 127 GHz, RAM: 208 GB dan Storage: 10,1 TB.**
- ▶ **Pusat Data Provinsi** merupakan Fasilitas cloud milik Pemprov Jateng untuk Pemkab Purbalingga dimana memiliki kapasitas **8 VM/Server, CPU: 54 Core, RAM: 80GB dan Storage: 1,8 TB**
- ▶ Jaringan : a. Jaringan Metro ke beberapa OPD.
 - b. IP Publik hingga /23 (510 IP Public)
 - c. Perangkat Jaringan Highend:
 - 1) RouterCore
 - 2) Switch
 - 3) Access Point
 - 4) Repeater
 - 5) Zabbix monitoring
 - 6) OLT Fiber optik

Dalam infrastruktur yang dikelola, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

juga mengembangkan SID Desa & desa.id di desa-desa se-Kabupaten Purbalingga. Presentase Capaian Penerapan SID Desa dan desa.id Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. SID Desa,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan SID adalah **78** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 34,82%.
2. Presentase Update SID,
Jumlah SID yang aktif mengupdate datanya adalah **46** dari total 78 SID di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 58,97%.
3. desa.id,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan desa.id adalah **126** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 56,25%.
4. Presentase Update desa.id,
Jumlah desa.id yang aktif mengupdate datanya adalah **51** dari total 126 desa.id di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 40,47%.

• **APLIKASI**

Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 dijelaskan berikut ini:

Tabel 3.2
Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023

NO	APLIKASI	Tahapan	Keterangan
1	Pamuraja/Gaspol Uapike	Selesai	
2	Silakonbima	Selesai	
3	Satset	Selesai	
4	Alpukat	Selesai	
5	Siregol	Selesai	
6	JDIH Mobile	Selesai	
7	Si Pakis Bangga	Selesai	
8	Purbalingga Juara	Selesai	
9	Monata	Selesai	
10	Sang Pentolan	Selesai	
11	Siska Pedes	Selesai	
12	Sim pandata	Selesai	
13	E-akun	Selesai	
14	Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan	Proses	• mou dg kemendikbud pusdatin pengembangan aplikasi 2024 instal server di Dindikbud
15	Pengembangan JDIH	Proses	• Link anggota-anggota JDIH di website JDIH • Penambahan link JDIH di Sub domain website OPD (Fikri)

			Selasa 9 januari 2024 koordinasi dengan bagian hukum
16	Sipetarung	Proses	- reviu terakhir tgl 4 dan 7 desember 2023 dan sudah ditindaklanjuti, kurang fitur import koordinat - Selesai analisis tahap 3 oleh kepala bidang - pengesahan dengan TTE, menunggu penyesuaian sesuai kriteria di aplikasi terlebih dahulu
17	E-cuti	Proses	awal tahun 2024 sudah diujicobakan untuk cuti tahunan
18	Pesona	Proses	- backend sudah selesai - frontend kurang modul cetak (luthfi) - Domain belum dibuat - minio sudah jadi
19	E-Sakip	Proses	Koordinasi dengan bappelitbangda
20	TJSLP	Proses	- Halaman depan sudah dibuat - User perusahaan belum dibuat
21	Simply-KS	Antrian	
22	Sinta Lan Rama	Antrian	
23	Sistem Informasi Pengajuan Penyaluran DD	Antrian	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut di atas, maka dilaksanakan 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan E-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, situasi, dan kondisi serta adanya isu strategis yang harus dijalankan, maka di tahun anggaran 2025 dimunculkan beberapa sub kegiatan baru yang tadinya belum muncul. Diantara Sub Kegiatan yang baru muncul tersebut adalah:

1. Sub kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dimunculkan karena adanya kebutuhan mendesak peralatan scan untuk menunjang kegiatan keuangan dan lainnya.
2. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dan sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan

Ekosistem SPBE. Sub kegiatan ini dimunculkan karena sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan yang berkaitan dengan *Smart City*.

- 3. Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar. Sub kegiatan ini dimunculkan untuk mengantisipasi dua sub kegiatan yang belum terakomodir di SIPD RI yaitu Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur.

Gambaran lengkap dari program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut di atas dalam tabel di bawah ini:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Rencana Tahun)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Perubahan Tahun 2025	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Murni Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Perubahan Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase OPD yang memiliki website aktif	Purbalingga	100%	875.277.000	DAU		100%	868.497.000
2.16.02.2.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	100%	875.277.000	DAU		100%	868.497.000
2.16.02.2.201.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Purbalingga	12	471.528.000	DAU	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12	467.244.000
2.16.02.2.201.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Purbalingga	19	357.985.000	DAU		16	366.985.000
2.16.02.2.201.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Purbalingga	11	20.000.000	DAU		41	12.155.000
2.16.02.2.201.00120	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Purbalingga	14	25.764.000	DAU		14	22.113.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Purbalingga	100%	1.176.986.000	DAU		100%	1.167.225.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Purbalingga	3.93	1.156.986.000	DAU		55	1.148.125.000
2.16.03.2.02.0007	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah	Purbalingga	12	121.508.000	DAU		12	111.702.000

2.16.03.2.02.0009	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Purbalingga	30	1.035.478.000	DAU		1	1.036.423.000
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Purbalingga	1	.20.000.000	DAU		55	19.100.000
2.16.03.2.01.0002	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Purbalingga	1	20.000.000	DAU		121	19.100.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	76.068.000	DAU		100%	47.223.000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	76.068.000	DAU		100%	47.223.000
2.20.02.2.01.0001	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	Purbalingga	27	52.949.000	DAU	Penggabungan dari Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	1	31.934.000
2.20.02.2.01.0003	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Purbalingga	27	23.119.000	DAU	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	0	15.289.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	49.148.000	DAU		100%	31.459.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	33.208.000	DAU		100%	20.739.000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	1	16.604.000	DAU		1	10.402.000
2.21.02.2.01.0002	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	1	16.604.000	DAU		2	10.337.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	15.940.000	DAU		100%	10.720.000
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Purbalingga	1	15.940.000	DAU		1	10.720.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan. Sasaran 2: Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan	Purbalingga	100%	6.229.560.000	DAU		100%	6.089.560.000

		indikator kinerja: Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti							
		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah, dengan indikator kinerja: Persentase penatausahaan, pemeliharaan, dan pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan							
		Sasaran 4: Terpenuhinya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah							
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Purbalingga	100%	3.652.000	DAU		100%	2.599.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	21	1.992.000	DAU		21	1.355.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	15	1.660.000	DAU		15	1.244.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	Purbalingga	100%	5.495.748.000	DAU		100%	5.209.294.000
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	40	5.404.697.000	DAU		42	5.146.720.000
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	70	56.906.000	DAU		24	28.452.000
2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	2	34.145.000	DAU		4	34.122.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	Purbalingga	100%	233.380.000	DAU		100%	93.380.000
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purbalingga	5	5.000.000	DAU	Pagu Diklat di nol kan dari Bappelitbangda	0	0
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	50	90.000.000	DBHCHT	Bergeser ke Pengelolaan Media Komunikasi Publik	133	90.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Purbalingga	100%	30.835.000	DAU		100%	23.599.000
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12	2.000.000	DAU		1	2.000.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Purbalingga	12	15.000.000	DAU	Dikurangi Rp 10 juta digeser ke Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	10.654.000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	12	8.000.000	DAU		12	6.380.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	12	3.843.000	DAU		12	2.680.000
2.16.01.2.06									

2.16.01.2.06	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	6	1.992.000	DAU		1	1.885.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Purbalingga	100%	1.992.000	DAU		100%	1.970.000
2.16.01.2.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	12	1.992.000	DAU		4	1.970.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Purbalingga	100%	554.377.000	DAU		100%	473.677.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	1	323.000	DAU		2	323.000
2.16.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Purbalingga	12	55.374.000	DAU		12	55.374.000
2.16.01.2.0808	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	12	497.680.000	DAU		12	416.980.000
2.16.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	55.000.000	DAU		100%	55.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Purbalingga	1	55.000.000	DAU	mendapat geseran dari Sub Kegiatan Logistik senilai Rp 10 juta untuk membeli Alat Scanner	1	55.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Purbalingga	100%	131.683.000	DAU		100%	131.683.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	13	126.192.000	DAU		13	126.192.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	6	3.491.000	DAU		6	3.491.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Purbalingga	1	2.000.000	DAU		1	2.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) didukung pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Rumusan program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024		CAPAIAN Jan-April 2024	TARGET 2025		CAPAIAN TW IV	KET.
				Nilai/ Indeks/ Persen	(Rp.)	%	Nilai/ Indeks/ Persen	(Rp.)	2025	
I	TUJUAN: Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE	Indeks	3.5	8.280.539.000	38,82	3,93	8.102.226.000	3.93	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya (TUJUAN)
I.A.	SASARAN: Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	94	1.962.263.000	28,64	96.2	2.035.722.000	96.2	Penilaian dari Komisi Informasi Publik pada akhir tahun berjalan
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memiliki website aktif serta cakupan kegiatan dan pembangunan yang terpublikasi	Persen	100%	685.277.000	18,25	100%	868.497.000	100%	PROGRAM
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	685.277.000	18,25	100%	825.277.000	100%	KEGIATAN
1.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan medi aberbayar sesuai kriteria/juknis	Media	153	331.528.000	32,43	12	467.244.000	12	SUB KEGIATAN
1.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	16	307.985.000	35,06	19	366.985.000	19	SUB KEGIATAN
1.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	29	20.000.000	5,05	11	12.155.000	11	SUB KEGIATAN

1.1.4	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	14	25.764.0000	0	14	22.113.000	14	SUB KEGIATAN
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	100%	1.276.986.000	39,02	100%	1.167.225.000	100%	PROGRAM
2.1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Indeks	3.5	21.508.000	49,25	3,93	1.148.125.000	3.93	KEGIATAN
2.1.1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Aplikasi	42	21.508.000	49,25	12	111.702.000	12	SUB KEGIATAN
2.1.2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemeirntah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	42	0	0	30	1.036.423.000	28	SUB KEGIATAN
2.2.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Dokumen	55	1.255.478.000	28,79	1	19.100.000	1	KEGIATAN
2.2.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	121	20.000.000	2	1	19.100.000	1	SUB KEGIATAN
I.B.	SASARAN: Meningkatnya ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah yang dapat diakses Masyarakat	Persentase Ketersediaan Data Pada Portal Satu Data Daerah	Persen	40%	39.568.000	16,72	100%	47.223.000	100%	KEGIATAN
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Persen	100%	39.568.000	16,72	100%	47.223.000	100%	PROGRAM
3.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Persen	100%	39.568.000	16,72	100%	39.568.000	100%	KEGIATAN
3.1.1.	Pelaksanaan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	Dokumen	100	52.949.000	100	27	31.934.000	27	SUB KEGIATAN
3.1.2.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	280	6.400.000	16,41	27	15.289.000	27	SUB KEGIATAN
I.C.	SASARAN: Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Indeks	315	49.148.000	13,76	376	31.459.000	376	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Indeks	100%	49.148.000	13,76	376	31.459.000	376	PROGRAM

4.1.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Persen	100%	33.208.000	17,48	100%	20.739.000	100%	KEGIATAN
4.1.1.	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	16.604.000	8,10	1	10.402.000	1	SUB KEGIATAN
4.1.2.	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	16.604.000	26,86	1	10.337.000	1	SUB KEGIATAN
4.2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah	Persen	100%	15.940.000	10,04%	100%	10.720.000	100%	KEGIATAN
4.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Perangkat Daerah	1	15.940.000	10,04	1	10.720.000	1	SUB KEGIATAN
II.	TUJUAN: Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai Kematangan Dinkominfo	Nilai	43	6.229.560.000	0	45	5.987.822.000	45	Variabel Kematangan Organisasi Dinkominfo
I.A.	SASARAN: Meningkatkan Implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Nilai	72,76	6.229.560.000	72,76	72,75	5.987.822.000	72,75	Penilaian dari Inspektora t
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indicator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan - terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan indicator kinerja: Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Terpenuhinya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - meningkatnya kualitas pentasahaan barang milik daerah, dengan indicator kinerja: Persentase penatausahaan, pemeliharaan dan pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	6.229.560.000	10,67%	100%	5.987.822.000	100%	PROGRAM
5.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen	100%	3.652.000	39,76	100%	2.599.000	100%	KEGIATAN
5.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.992.000	0	21	1.355.000	21	SUB KEGIATAN
5.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.660.000	39,76	15	1.244.000	15	SUB KEGIATAN
5.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	Persen	100%	5.299.833.000	18,79	100%	5.209.294.000	100%	KEGIATAN

5.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	42	5.208.782.000	40,79	40	5.146.720.000	40	SUB KEGIATAN
5.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	56.906.000	9,91	70	28.452.000	70	SUB KEGIATAN
5.2.3.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	4	34.145.000	5,68	2	34.122.000	2	SUB KEGIATAN
5.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100%	233.380.000	6,5	100%	90.000.000	100%	KEGIATAN
5.3.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	10	5.000.000	0	5	0	5	SUB KEGIATAN
5.3.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	228.380.000	6,5	50	90.000.000	50	SUB KEGIATAN
5.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Persen	100%	40.835.000	6,90	100%	23.599.000	100%	KEGIATAN
5.4.1.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	0	12	2.000.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	3,26	12	10.654.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.3.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.000.000	0	12	6.380.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	3.843.000	31,23	12	2.680.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.5.	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.992.000	0	6	1.885.000	6	SUB KEGIATAN
5.5.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Persen	100%	1.992.000	0	100%	1.970.000	100%	KEGIATAN
5.5.1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	4	1.992.000	0	12	1.970.000	12	SUB KEGIATAN
5.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	554.377.000	8,51	100%	473.677.000	100%	KEGIATAN
5.6.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	323.000	1	1	323.000	1	SUB KEGIATAN
5.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	55.374.000	16,81	12	55.374.000	12	SUB KEGIATAN
5.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1.000.000	1	1	1.000.000	1	SUB KEGIATAN
5.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	497.680.000	22,80	12	416.980.000	12	SUB KEGIATAN
5.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	0	0	0	100%	55.000.000	100%	KEGIATAN

5.7.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	1	55.000.000	1	SUB KEGIATAN
5.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persen	100%	95.491.000	4,91	100%	131.683.000	100%	KEGIATAN
5.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	90.000.000	14,73	13	126.192.000	13	SUB KEGIATAN
5.8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	6	3.491.000	6	6	3.491.000	6	SUB KEGIATAN
5.8.3.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Unit	1	2.000.000	1	1	2.000.000	1	SUB KEGIATAN

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran Perubahan 2025 terdapat pergeseran anggaran/perubahan rekening Sub Kegiatan pada Anggaran Perubahan tahun 2025. Perubahan tersebut diantaranya yaitu:

1. Anggaran pada 21 sub kegiatan secara umum mengalami efisiensi, hanya pada sub kegiatan Earnmark yang tidak dilakukan Efisiensi, sedangkan anggaran yang bersumber dari CHT diefisiensi pada perjalanan dinas sebesar Rp.5.150.000,- hanya dialihkan ke kegiatan inti DBHCHT.
2. Anggaran Earnmark Gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar Rp.257.977.000 atau sekitar 4,77% anggaran murni 2025 dikarenakan ada 2 orang ASN Dinkominfo yang menjalani masa purna tugas.
3. Dari Anggaran pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik mengalami kenaikan/penambahan anggaran sebesar Rp9.000.000,- atau sekitar 2,51% dari anggaran murni 2025, hal ini karena anggaran yang ada tidak cukup untuk membayar tagihan Listrik dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kematian 10 orang THL LPPL RGS hingga bulan Desember 2025.
4. Pagu Anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,- atau sekitar 100% atau menjadi nol yang merupakan pagu dari Bappelitbangda.
5. Anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan sebesar Rp945.000,- atau sekitar 0,09% karena adanya penambahan anggaran untuk pembangunan jaringan FO di lingkungan Sekda Kabupaten Purbalingga.

BAB V PENUTUP

Kebijakan dan program yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai sasaran, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak, terutama seluruh pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, didasarkan pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan berbagai kebijakan umum pembangunan Kominfo, Persandian serta Statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 Dinkominfo tahun 2025 fokus pada penguatan integrasi TIK karena didorong oleh perkembangan TIK global yang mendorong kebutuhan teknologi digital sangat penting, dimana salah satunya melalui pembangunan pusat data (*Data Center*). Hal ini menjadi bagian penting yang terpadu dan tersinkronisasi dalam arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Forum gabungan OPD serta Musrenbang Kabupaten.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Dinkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat di lingkungan Dinkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025.
3. Masyarakat Luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Pada akhir tahun anggaran 2025. Setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu, serta adanya dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran, sehingga kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dapat semakin fokus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual dan mencapai *outcome* yang diharapkan.

Purbalingga, 14 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SADONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamiin atas Pertolongan dan limpahan rahmat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga selama periode Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025. Dalam Penyusunannya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen Renja Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Aamiin.

Purbalingga, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,



BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700702 199203 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) mengakomodir hasil Musrenbangcam, hasil Diskusi Kelompok Terbatas, Hasil Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purbalingga, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Rencana Strategi (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM RI, RPJM Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Lingkungann Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup.

Pembangunan Nasional dibidang Lingkungan Hidup pada dasarnya bertujuan untuk mendayagunakan Sumber Daya Alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 merupakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, serta disesuaikan dengan *issue* lingkungan hidup yang sedang berkembang pada saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan stakeholder lainnya.
2. Pengendali dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH);
2. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH;
3. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II ini berisi tentang indikator dan data capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja DLH, Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimantan;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor yang mempengaruhi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 - a. Mampu menggerakkan keterbatasan SDM yang dimiliki.
 - b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang terbatas dan kurang memadai utamanya sarana prasarana persampahan.
 - c. Memaksimalkan anggaran yang sangat terbatas agar dapat mencapai target kegiatan dengan melaksanakan skala prioritas kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Meningkatkan pengawasan usaha/kegiatan penghasil air limbah
 - b. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - c. Mengoptimalkan kinerja TPS 3R dan TPST.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target:
 - a. Tercukupinya SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
 - b. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

- c. Tercukupinya anggaran untuk mendukung kegiatan.
- d. Adanya regulasi yang mendukung percepatan capaian target.
- 4. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi masalah :
 - a. Menyusun perencanaan penganggaran yang sesuai dengan RKPD dan Renstra DLH
 - b. Peningkatan sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana utamanya sarana prasarana persampahan.
 - d. Mencukupi kekurangan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
 - e. Pemeliharaan sarana prasarana agar dapat dimanfaatkan lebih optimal.
 - f. Menyusun Regulasi yang mengatur tentang percepatan pencapaian target.

Adapun Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP s/d TAHUN 2024
KABUPATEN PURBALINGGA

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2															
2	11					BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	NA	NA
2	11	1	2	1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA

							penunjang urusan pemerintah daerah								
2	11	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	7		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	2	2	1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	ada	ada	100%	1 dokumen	NA	NA

2	11	2	2	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tervalidasinya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	NA	NA
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	3	2	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya pemantauan kualitas air dan udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase peningkatan luasan RTH	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	100%	0,005%	NA	NA
2	11	4	2	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Penngelolaan RTH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)	Cakupan pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	5	2	1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Industri yang memiliki TPS LB3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan & izin PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	6	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase bank sampah yang beroperasi	61,11%	62,86%	59,72%	59,72%	100%	59,72%	NA	NA

2	11	8	2	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BANK Sampah yang terbentuk	72	72	72	72	100%	72	NA	NA
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase sekolah Adiwiyata	7,18%	5,38%	6,1%	7,18%	117%	7,18%	NA	NA
2	11	9	2	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah Adiwiyata	60	60	60	60	100%	60	NA	NA
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA
2	11	10	2	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota yang di tindak lanjuti	4	4	4	4	4	100%	NA	NA
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Cakupan area pelayanan sampah	72,22%	55,56%	61,11%	66,67%	109%	66,67%	NA	NA
2	11	11	2	1	Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah	36,58%	35,69%	36,18%	36,18%	100%	36,38%	NA	NA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 7 (2) disebutkan bahwa bidang urusan lingkungan hidup berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan wajib.

A. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup.

a). Penegakan Hukum Lingkungan (Jumlah Kasus dan penegakan Hukum Lingkungan)

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Peraturan Daerah mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari Provinsi ataupun Undang-undang dan Peraturan dari pusat mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum / instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat. Penegakan hukum juga bisa dilakukan berdasarkan pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung (Dokumen Lingkungan Hidup).

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan, membuat masyarakat mengadukan masalah yang terjadi terkait dengan ketidaknyamanan akan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka akibat adanya berbagai kegiatan usaha. Pada tahun 2023 diperkirakan target masalah lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten, Cq. Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang diadukan ada 4 kasus dengan asumsi pengaduan permasalahan lingkungan yang ditindaklanjuti. Persentase perhitungannya adalah $(4/4) \times 100\%$.

No	IKK	Rumus	Jumlah Aduan	Capaian Kinerja	Ket
1.	Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah aduan / Realisasi X 100%	4	4/4 (100%)	-

b) Penanganan Sampah.

- Tentang Volume sampah yang ditangani.

Volume timbulan sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup baru dapat menangani di 10 wilayah Kecamatan.

Selain di Kecamatan Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup sudah melayani angkutan di beberapa tempat seperti sekolah, pasar, pabrik, perkantoran dan perumahan.

- Tentang volume produksi sampah.

Volume produksi sampah setiap penduduk diestimasi $\pm 0,5$ kg perhari x jumlah penduduk Purbalingga.

Keberhasilan *meningkatnya Capaian Penanganan Persampahan* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
- Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperan aktif dalam pengelolaan persampahan.
- Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkutan sampah dan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional (eksavator).
- Kolaborasi dengan badan usaha ataupun OPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Pemukiman

c). Pengurangan sampah

Salah satu upaya dalam pengurangan sampah yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui beberapa fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola TPS3R, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah Mandiri di Desa/Kelurahan,

dan Pengepul Rongsok.

Dalam rangka pengurangan persampahan ini maka tiap wilayah di himbau untuk membangun/membuat Bank Sampah dan TPS 3 R. Sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga jumlah Bank Sampah sebanyak 72 unit dan tersebar di 14 Kecamatan, namun yang aktif hanya ada 43 unit .

TPS 3 R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 10 unit yang tersebar di beberapa Desa, yaitu Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Bancar, Desa Jatisaba, Desa Karangpule, Desa Sempor Lor, Desa Selaganggeng, Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Bandingan dan Desa Babakan. Sempor dan Desa Selaganggeng. Keberhasilan Capaian Pengurangan Timbulan Sampah dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan pengelolaan sampah mandiri lainnya.

d). Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB.

Ruang Terbuka Hijau milik Pemda.

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Adapun lingkup wilayah perkotaan Purbalingga yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari seluas 2.794,48 Ha dengan luas RTH Perkotaan Purbalingga 154,38 Ha atau sebesar 5,52% dari luas perkotaan Purbalingga ditambah dengan luasan RTH Perkotaan Bobotsari sebesar 101,52 Ha berbanding dengan 3.168,84 Ha luasan perkotaan Bobotsari atau sebesar 3,20 % , maka prosentase luasan RTH Perkotaan Purbalingga dan RTH Perkotaan Bobotsari adalah sebesar 4,29%. Luasan tersebut masih kurang dari target yang dipersyaratkan

oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 20% RTH Publik sehingga dianggap perlu untuk dikembangkan luasannya. Hal ini dikarenakan belum adanya anggaran penambahan RTH sedangkan luasan wilayah perkotaan meningkat.

TABEL 2.2. DATA RTH PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA BERDASARKAN RDTR

NO	RTH PUBLIK	TAHUN/ LUAS (Ha)				Bobotsari	Jumlah
		2021 Purbalingga	2022 Purbalingga	2023 Purbalingga	2024 Purbalingga		
1.	Pemakaman	25,45	25,45	25,45	29,59	32,93	62,52
2.	Rimba/ Hutan Kota	37,59	37,59	37,59	31,04	0,69	31,73
3.	Sempadan Sungai	45,36	45,36	45,36	45,39	49,97	95,36
4.	Taman Kelurahan	30,31	30,31	30,31	27,83	16,60	44,43
5.	Taman Kota	20,29	20,29	20,29	20,53	1,33	21,86
Jumlah		158,99	158,99	158,99	154,38	101,52	255,90
Luas Perkotaan Purbalingga		2.794,48	2.794,48	2.794,48	2.794,48	0	5.963,32
Luas Perkotaan Bobotsari		0	0	0	0	3.168,84	
Prosentase RTH Publik		5,69 %	5,69 %	5,69 %	5,52 %	3,20 %	4,29 %

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman dan Hutan/ Rimba Kota) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi kegiatan pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan yang kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada, dengan harapan dari 12 Taman Kota dan 8 Rimba/ Hutan Kota yang ada dapat terkelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan.

Tabel 2.3 RTH PUBLIK YANG DIKELOLA DLH KAB. PURBALINGGA

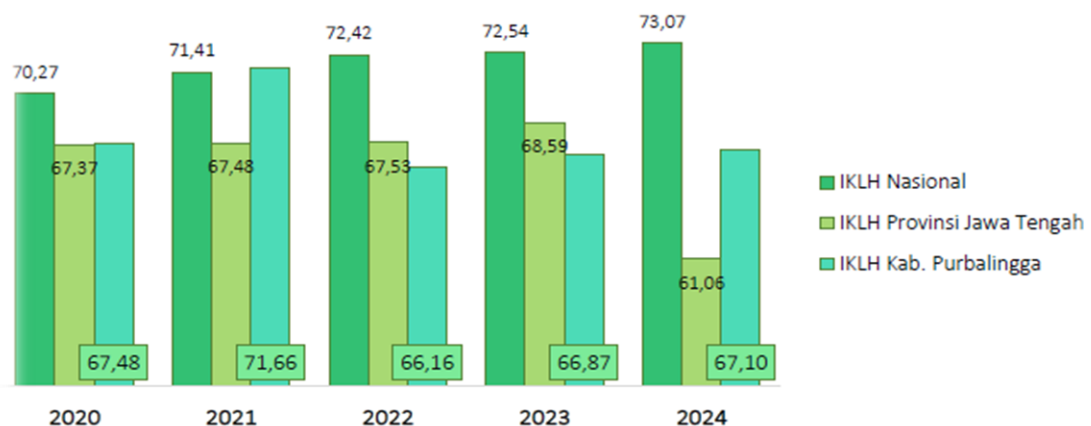
NO	RTH PUBLIK	LUAS (Ha)	LOKASI
Taman Kota			
1.	Taman Jompo	0,06	Desa Jompo Kec. Kalimanah
2.	Taman Maerakaca	0,12	Kel. Bancar Kec. Purbalingga
3.	Bundaran depan KODIM	0,01	Kel. Bancar Kec. Purbalingga
4.	Taman Dagang Bobotsari	0,05	Desa Gandasuli Kec. Bobotsari
5.	RTH Hijau SMPN 2 Purbalingga	0,054	Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga
6.	RTH Bojong	0,94	Desa Bojong Kec. Purbalingga
7.	Taman Bermain Anak Perumahan	0,02	Kel. Bojong Kec. Purbalingga
8.	Taman Curug Gringsing	0,37	Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga
9.	Taman Sentul Garden	0,60	Kel. Karangsantul Kec. Purbalingga
10.	Taman Alun-alun	1,37	Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga
11.	Taman Depan Makam Pahlawan	0,81	Kel. Kandanggampang Kec. Purbalingga
12.	RTH Kec. Bobotsari	0,30	Desa Gandasuli Kec. Perumahan
TOTAL LUAS TAMAN KOTA		5,19	
Hutan Kota			
1.	Hutan Kota Depan SMKN 3	0,33	Desa Gemuruh Kec. Padamara
2.	Hutan Kota Kerkop	0,32	Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga

3.	Hutan Kota Kandanggampang	0,38	Kel. Kandanggampang Kec. Purbalingga
4.	Hutan Kota Wasesa	0,87	Kel. Kalikabong Kec. Kalimanah
5.	Hutan Kota KPUD	1,36	Desa Kalikajar Kec. Kaligondang
6.	Hutan Kota GOR Goentoer Darjono	2,67	Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga
7.	Hutan Kota Segamas	0,29	Kel. Kalikabong Kec. Kalimanah
8.	Hutan Kota Bojong	2,19	Kel. Bojong Kec. Purbalingga
	TOTAL LUAS HUTAN KOTA	8,41	

RTH Publik terdiri dari Taman dan Hutan Kota, luasannya masih tetap. Untuk Taman Kota seluas 5,19 Ha dari jumlah 12 Taman Kota yang ada. Adapun Hutan Kota seluas 8,41 Ha dari 8 Hutan Kota yang ada di Kabupaten Purbalingga.

e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan Indek Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Untuk menilai daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga, salah satunya dapat dilihat pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan indikator meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Proporsi pembobotannya terdiri dari 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL. Dalam kurun waktu 5 tahun, IKLH Kabupaten Purbalingga termasuk fluktuatif. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IKLH Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional namun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2.41 IKLH Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 telah memenuhi target capaian kinerja dengan memperoleh nilai 67,1 point. Nilai IKLH dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 55 poin, IKU sebesar 91,04 point dan nilai IKTL sebesar 43,63 poin. Nilai IKA tahun 2024 sebesar 55, kondisi ini mengalami penurunan dibanding nilai IKA tahun 2023 dan 2022 yaitu tahun 2023 sebesar 56,67 dan tahun 2022 sebesar 55,83. Nilai IKTL tahun 2024 sebesar 43,63 kondisi ini mengalami penurunan dibanding nilai IKTL tahun 2023 yaitu sebesar 44,04. Berdasarkan Hasil Perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 mengalami penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan nilai konversi, komposit IKLH Kabupaten Purbalingga pada kualitas air berada pada kategori mutu air baik (70-90) namun masih terdapat pencemaran air yang terjadi khususnya pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter pencemaran yang melebihi baku mutu pada sungai walaupun dengan status cemar ringan. Sedangkan pada kualitas udara berada pada kategori baik (70-90). Tingkat kualitas udara tersebut tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sementara itu kualitas tutupan lahan yang merupakan tutupan vegetasi luasan hutan, semak belukar dan perkebunan berada pada kategori sedang (50-70).

n	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024
		(Lama)	(Konversi)	(Lama)	(Konversi)	(Lama)	(Konversi)	(Lama)	(Konversi)	(Lama)
	angka	43,33	58.18	54,40	73.04	55,83	74.96	56,67	76,09	55
	angka	90,49	87.79	86,44	83.86	89,29	86.62	88,70	86,05	91,04
	angka	68,34	93.82	73,94	101.51	41,13	56.47	44,04	60,46	43,62
	angka	67,48	75.14	71,66	79.80	66,16	73.67	66,88	76,7	67,1

Kab. Purbalingga dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021-2025

Tabel Indeks Komponen IKLH Tahun 2021 sd 2024

Terdapat 6 titik sungai yang memiliki status sungai cemar ringan yaitu Sungai Gringsing Hulu, Sungai Gringsing Tengah, Sungai Klawing Hulu, Sungai Klawing Tengah, Sungai Gintung Hulu, dan Sungai

Gintung Tengah. Sedangkan untuk 3 sungai lainnya yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir, dan Sungai Gintung Hilir memiliki status cemar sedang dengan parameter yang melebihi baku mutu adalah parameter BOD, COD, DO dan Total Phosphate.

Prosentase peningkatan kualitas air dan udara pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 prosentase peningkatan kualitas air dan udara sebesar 1,75% sementara pada tahun 2021 sudah mencapai 4,76%. Hal ini dikarenakan perubahan cara pengukuran dari cara konvensional ke penggunaan citra satelit.

Pada tahun 2023 prosentase peningkatan kualitas air dan udara sebesar 0,07% sementara pada tahun 2022 sudah mencapai 1,75%. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya fenomena elnino secara nasional yang ditandai dengan kemarau panjang dan minimnya turun hujan sehingga berdampak terhadap jumlah polutan yang tersebar di udara ambien.

Penurunan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan oleh kondisi eksisting sungai berupa daya tampung sungai yang sudah banyak menerima beban pencemar dari berbagai sumber, seperti pemukiman, industri, dan pertanian. Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) disebabkan adanya penurunan nilai IKL yang merupakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui citra satelit.

Pada tahun 2023 nilai IKTL Kabupaten Purbalingga sebesar 44,04 dan pada tahun 2024 sebesar 43,62. Adapun penurunan paling signifikan ada pada sektor Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pada tahun 2023 rehabilitasi hutan dan lahan seluas 7.348,90 Ha, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 6.503,50 Ha, sehingga tingkat penurunannya sebesar 845,4%.

Terkait capaian Prosentase Luasan Ruang Terbuka Hijau mengalami penurunan ditahun 2023 dikarenakan perbedaan cara perhitungan dengan tahun sebelumnya. Ditahun sebelumnya memakai data hasil kajian sedangkan mulai 2023 sampai sekarang menggunakan data Rencana Detail tata Ruang (RDTR).

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kualitas Air dan Udara	-	-	57,16	57,22	58,46	63,93	57,22	NA	63,77	63,93	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara	-	-	1,76	0,07	0,14	0,24	0,07	NA	0,14	0,24	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	9,01	9,64	13,27	13,29	9,64	NA	13,27	13,29	
4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	-	-	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	NA	4,29	4,29	
5	Cakupan Pengelolaan Sampah	-	-	36,18	36,38	36,58	36,78	36,18	NA	36,58	36,78	
6	Cakupan Pengurangan Sampah	-	-	14,33	14,43	14,53	14,63	14,33	NA	14,53	14,63	
7	Cakupan Penanganan Sampah	-	-	21,85	21,95	22,05	22,15	21,85	NA	22,05	22,15	
8	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	40	N/A	43	44	
9	Nilai SAKIP DLH	-	-	70,35	73,02	71,35	73,04	73,01	NA	73,03	73,04	

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam menganalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tentunya memiliki indikator-indikator yang terukur. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Upaya Pencegahan Pencemaran Air

Perkembangan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya sektor industri menyebabkan terjadinya peningkatan polusi pada badan air yang banyak dijadikan areal pembuangan limbah, baik industri kecil maupun industri berskala menengah ke atas. Hal inilah yang menjadikan perlunya dilakukan tindakan pemantauan secara rutin.

Pemantauan bisa dilaksanakan oleh instansi terkait yang dibantu oleh semua lapisan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran pada badan air yang nantinya dapat berdampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Jika terjadi pencemaran sebagaimana dimaksud maka pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan yang holistik berdasarkan partisipatori yang melibatkan pengguna, perencana dan penentu kebijakan, mengingat air dalam keadaan tertentu sudah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan holistik sumberdaya air dengan titik tolak pemikiran bahwa air sebagai sumberdaya alam yang rentan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, benda sosial yang sekaligus mempunyai nilai ekonomi. Penetapan alokasi air hendaknya menerapkan pengelolaan permintaan, mekanisme harga dan pelaksanaan pengaturan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor.

Perkembangan investasi dan industri yang begitu menyolok berdampak pada perubahan lingkungan, terutama lingkungan perairan yang banyak digunakan sebagai areal pembuangan limbah. Sektor industri memiliki kecenderungan terus berkembang, sehingga pada masa mendatang dimungkinkan akan dapat menjadi sektor basis. Perkembangan ini sangat luar biasa dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Dibalik dampak positif pada perekonomian yang besar ini, dampak negatif juga mengancam wilayah Purbalingga. Ada kegiatan usaha, bahkan yang berskala besar sekalipun yang belum memiliki IPAL yang standar. Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak limbah cair yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha/industri dengan menggunakan beberapa parameter fisika, kimia dan Biologi.

Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan.

b. Upaya Pencegahan Pencemaran Udara

Keberadaan Industri di Kabupaten Purbalingga berpengaruh besar terhadap kondisi kualitas udara. Udara merupakan komponen lingkungan penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan penggunaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang ataupun pembatas tertentu, karena sebarannya tidak bisa dibatasi dan penggunaannya adalah penting terkait dengan unsur kehidupan semua makhluk hidup. Untuk itu, menjaga kualitas udara menjadi suatu kebutuhan agar masyarakat dan makhluk hidup lainnya tidak terganggu kesehatannya akibat udara yang tercemar. Pentingnya udara yang sehat tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan kualitas udara, baik uji udara ambient maupun emisi.

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak pencemaran udara yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku industri, kegiatan transportasi, kegiatan komersil/pasar serta

pemukiman dengan pengukuran beberapa parameter. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

c. Upaya Pencegahan Pencemaran Tanah

Pengujian terhadap tanah untuk produksi biomassa belum bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disebabkan sarana dan prasarana ,SDM dan anggaran yang terbatas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga serta belum memiliki kapasitas untuk melakukan penyusunan peta status kerusakan tanah secara mandiri. Sementara, apabila diserahkan kepada konsultan untuk melakukan pekerjaan ini, biaya yang harus dialokasikan cukup besar.

d. Penanganan Kasus Dan Penegakan Pelanggaran Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Perda mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu Perda provinsi ataupun undang-undang dan peraturan perundangan mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum/ instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat, pemerintah kurang informasi mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusatpemerintahan.Akan tetapi ada beberapa informasi pengawasan melalui kegiatan usaha.

Beberapa masalah lingkungan yang ditangani oleh pemerintah daerah sampai saat ini lebih banyak yang bersifat rutinitas, seperti gerakan penghijauan dan reboisasi terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan di sekitar kawasan lindung, sedangkan permasalahan mengenai

pelanggaran hukum lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak begitu banyak ditangani karena keterbatasan SDM yang dimiliki sehingga kegiatan yang dilakukan belum optimal.

Target untuk jenis pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah 100%.

e. Meningkatkan Kelompok Peduli Lingkungan

Baik tidaknya kondisi lingkungan/persoalan lingkungan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama dari mulai masyarakat swasta/dunia usaha dan akademisi hingga sampai ke pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan sebenarnya sangat besar, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya akan langsung merasakan akibat dari adanya perubahan-perubahan lingkungan. Beberapa kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan sudah mulai tumbuh di Kabupaten Purbalingga, sehingga nantinya dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi sebelum diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Selain itu, keberadaan kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan nantinya diharapkan dapat berperan aktif sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai kebijakan dan program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga sudah ada 72 Bank Sampah, KSM TPS3R, LSM WCD (World Cleanup Day), Forum Purbalingga Bersih, Komunitas Hijau, LAPEL (Pencinta Alam dan Pencinta Lingkungan), MTMA Purbalingga (My Trip My Adventure), dan kelompok siswa pecinta alam.

Kurangnya penghargaan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang diterima oleh masyarakat Purbalingga merupakan salah satu indikator dari rendahnya peranan masyarakat dalam mengelola dan merawat lingkungan. Untuk itulah, pemerintah daerah mencoba untuk menyelenggarakan penyuluhan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan nantinya peningkatan timbulan sampah yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat dapat ditanggulangi sejak dini.

Hambatan/Kendala yang dihadapi :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.
2. Kerjasama multi pihak masih terhambat adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan sebagai tanggungjawab instansi Lingkungan Hidup.
3. Masih Rendahnya sanksi administrasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan.

Solusi/Upaya yang dilakukan :

1. Meningkatkan kesadaran dan sosialisasi pentingnya kesadaran dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan lingkungan.
3. Perlunya penegakan hukum yang tegas mulai dari pelanggar hukum lingkungan.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat daerah maka didukung oleh program penguatan kelembagaan perangkat daerah.

Program penguatan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sbb : ,

1. Administrasi Umum Perangkat daerah.
2. Administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

7. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2024 diprioritaskan pada isu-isu penting dan program strategis. Adapun isu-isu penting dimaksud, antara lain :

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan.
- c. Tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan tingkat kesadaran dan pola hidup masyarakat yang masih rendah.
- d. Pengelolaan sampah yang belum optimal.
- e. Banyaknya penurunan/degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan.

Dengan isu-isu penting tersebut di atas maka disusun program-program untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan, antara lain :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- d. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil evaluasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, maka Rencana Kerja Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2025 telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DLH	Prosentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	10.044.255.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DLH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	9.330.672.000	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	9.376.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	5.887.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	7.340.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	5.120.000	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	1.536.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	767.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100	9.530.177.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100	8.891.958.000	

a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang	9.435.646.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang	8.830.930.000	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 Dok	59.065.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 Dok	29.533.000	
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dok	35.456.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dok	31.495.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DLH	Tersusunnya barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	1.992.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DLH	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	2.746.000	
a	Penatausahaan barang milik daerah		Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah	12 Lap	1.992.000	Penatausahaan barang milik daerah		Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Lap	2.746.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Jumlah ASN yang membuat SKP tepat waktu	100%	4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Prosentase pemenuhan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.500.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	4.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	2.500.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Prosentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	33.095.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Prosentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30.120.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	351.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	351.000	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	21.853.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	17.784.000	
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan disediakan	12 Dok	797.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan disediakan	12 Dok	797.000	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	2.391.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	1.673.000	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	3.320.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	6.324.000	
f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	12 Dok	4.383.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	12 Dok	3.191.000	



6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	DLH	Prosentase pengadaan barang milik daerah	100%	3.420.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	DLH	Prosentase pengadaan barang milik daerah	100%	2.875.000	
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	3.420.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	2.875.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	272.429.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	235.620.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	353.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	353.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	140.136.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	140.136.000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	1,618.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	809.000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	130.392.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	130.392.000	



8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	193.186.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	158.966.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	180.851.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	146.641.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesian lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.325.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesian lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.325.000	
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup Yang Tersusun	100%	86,562,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup Yang Tersusun	100%	86.562.000	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	100%	38,281,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	100%	12.182.000	

a	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kab/Kota	1 Dok	1,000,000	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kab/Kota	1 Dok	694.000	
b	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kab/Kota mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok	38.281.000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kab/Kota mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok	11.488.000	
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DLH	Tervalidasinya Dokumen KLHS	1 Dok	47.281.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DLH	Tervalidasinya Dokumen KLHS	1 Dok	11.905.000	
a	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah dokumen KLHS rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	5 Dok	47.281.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah dokumen KLHS rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	5 Dok	11.905.000	
II I	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100%	237.515.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100%	222.135.000	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100%	237.515.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100%	222.135.000	

a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	227.140.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	211.760.000	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok	10.375.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok	10.375.000	
I V	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Presentase Peningkatan Luas RTH	0,006%	877.743.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Presentase Peningkatan Luas RTH	0,006%	1.250.781.000	
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DLH	Presentase RTH Publik	4,29%	877.743.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DLH	Presentase Peningkatan Luas RTH	0,006%	1.250.781.000	
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	13,3 ha	850.557.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	13,6 ha	1.246.542.000	
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	7.146.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	4.239.000	

c	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	605 unit	20.040.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 unit	0	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)	DLH	Persentase jumlah rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	100%	19.931.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)	DLH	Persentase jumlah rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	100%	19.931,000	
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH	Cakupan Industri yang memiliki TPS LB3	100%	19.931.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH	Cakupan Industri yang memiliki TPS LB3	100%	11.115.000	
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dok	10.014.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dok	5.737.000	
b	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Lap.kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	15 laporan	9.917.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Lap.kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	15 laporan	5.358.000	

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Presentase usaha/kegiatan yang dibina & diawasi izin lingkungan & izin PPLH	100%	78.919.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Presentase usaha/kegiatan yang dibina & diawasi izin lingkungan & izin PPLH	100%	78,919,000	
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	100%	78.919.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	100%	12.917.,000	
a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dok	65.140.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dok	5.458.000	
b	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan kegiatan yang diawasi	50 Perusahaan	13.779.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Badan usaha dan kegiatan yang diawasi	50 Perusahaan	7.459.000	

V II	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase BANK Sampah yang beroperasi	61,11%	20.541.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase BANK Sampah yang beroperasi	61,11%	20.541.000	
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Lembaga / kelompok yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan PPLH	4 Lembaga	20.541.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Lembaga / kelompok yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan PPLH	4 Lembaga	7.124.000	
a	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga / kelompok Masyarakat / Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 Lembaga	20.541.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunit as/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga	7.124.000	
V II I	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Presentase sekolah Adiwiyata	7,18%	20.541.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Presentase sekolah Adiwiyata	7,18%	19.919.000	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah sekolah Adiwiyata	6 sekolah	20.541.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	DLH	Presentase sekolah Adiwiyata	7,18%	19.919.000	

a	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 entitas	20.541.000	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 entitas	19.919.000	
I X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.419.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	10,419,000	
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.419.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.579.000	
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 Kasus	10.419.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 Kasus	5.579.000	

X	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	DLH	Cakupan area pelayanan sampah	55,55%	6.074.444.000	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	DLH	Cakupan area pelayanan sampah	55,55%	6.688.555.000	
1	Pengelolaan Sampah	DLH	Presentase Penanganan Sampah	55,55%	6.074.444.000	Pengelolaan Sampah	DLH	Cakupan area pelayanan sampah	55,55%	6.688.555.000	
a	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL,PUTSa,RDF, pusat pengomposan biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Jumlah sampah yang tertangani melalui pengelolaan sampah di instansi Pengelolaan sampah TPS3R,PDU,TPST,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat pengomposan,Biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan pesanan perundang-undangan	39.000 Ton	5.829.543.000	melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL,PUTSa,RDF, pusat pengomposan biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Jumlah sampah yang tertangani melalui pengelolaan sampah di instansi Pengelolaan sampah TPS3R,PDU,TPST,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat pengomposan,Biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan pesanan perundang-undangan	39.000 Ton	6.468.555.000	
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	244,901,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	220.000,000	
JUMLAH Rp.17.470.870.000,-						JUMLAH Rp.17.572.864.000,-					

=====

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan hasil dari Musrenbangcam Tahun 2024, akan tetapi hasil Musrenbangcam tidak semua dimasukkan dalam program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hal tersebut terbentur dengan pagu anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk mengcover semua hasil Musrenbangcam.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan masyarakat dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan Prioritas dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

PERMASALAHAN	USULAN	ALAMAT	SUB KEGIATAN	URAIAN REKOMENDASI	VOLUME	REKOMENDASI ANGGARAN	KET
Membutuhkan pengembangan ilmu untuk pengelolaan sampah basah menjadi manggot.	Pelatihan pengelolaan persampahan	Bojong RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga, Bojong, Kab. Purbalingga, Bojong	11.2.01.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi pengelolaan sampah mandiri di desa dengan pemberian bantuan mesin pemilah gibrak, incenerator, rumah maggot dan motor roda tiga, sesuai kebutuhan dan prioritas.	1 paket / desa	Rp 400.000.000,00	PRIORITAS
Sampah yang ada di penampungan Desa Gembong sudah menggunung karena tidak ada penanganan pengolahan sampah di Desa Gembong	Penanganan persampahan	Dusun 4 Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Bojongsari, Gembong	11.2.01.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi pengelolaan sampah mandiri di desa dengan pemberian bantuan mesin pemilah gibrak, incenerator, rumah maggot dan motor roda tiga, sesuai kebutuhan dan prioritas.	1 paket / desa	Rp 400.000.000,00	PRIORITAS

Belum tersedianya TPA dan sarana prasarana pendukung lainnya sehingga masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya	Penanganan persampahan	Dusun I dan Dusun II Desa Wanogara Kulon, Kab. Purbalingga, Rembang, Wanogara Kulon	11.2.01.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi pengelolaan sampah mandiri di desa dengan pemberian bantuan mesin pemilah gibrak, incenerator, rumah maggot dan motor roda tiga, sesuai kebutuhan dan prioritas.	1 paket / desa	Rp 400.000.000,00	PRIORITAS
Kurangnya Fasilitas Olahan Persampahan dan SDM yang mau mengolah sampah	Penanganan persampahan	Desa Krangreja Rt 001 Rw 004, Kab. Purbalingga, Karangreja, Karangreja	11.2.01.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi pengelolaan sampah mandiri di desa dengan pemberian bantuan mesin pemilah gibrak, incenerator, rumah maggot dan motor roda tiga, sesuai kebutuhan dan prioritas.	1 paket / desa	Rp 400.000.000,00	PRIORITAS
Tidak Adanya Tempat Pengolahan Sampah	Penanganan persampahan	Dusun I, Dusun II dan Dusun III, Kab. Purbalingga, Bojongsari, Beji	11.2.01.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi pengelolaan sampah mandiri di desa dengan pemberian bantuan mesin pemilah gibrak, incenerator, rumah maggot dan motor roda tiga, sesuai kebutuhan dan prioritas.	1 paket / desa	Rp 400.000.000,00	PRIORITAS
Pencemaran Lingkungan akibat sampah	Penanganan persampahan	Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja, Kab. Purbalingga,	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD,	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN

		Purbalingga, Toyareja	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.			
permasalahan sampah belum dikelola dengan baik	Pelatihan pengelolaan persampahan	Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja					
Sampah yang banyak membuat lingkungan desa pekalongan menjadi kumuh dan tidak terkendali. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di desa pekalongan menjadi hal yang penting, karena setiap harinya rumah tangga menghasilkan sampah yang banyak.	Pelatihan pengelolaan persampahan	desa pekalongan, Kab. Purbalingga, Bojongsari, Pekalongan	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN
Sampah di Desa Panican belum tertangani dengan baik dan di perluhan mesin untuk pengelolaan sampah agar Desa Panican bisa lebih	Penanganan persampahan	Desa Panican, Kab. Purbalingga, Kemangkong, Panican	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN

bersih			Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat				
mengelola sampah dengan baik karna saat ini sampah menjadi permasalahan bersama di masyarakat	Pelatihan pengelolaan persampahan	Desa Senon, Kab. Purbalingga, Kemangkon, Senon	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN
Pembuangan sampah masih sembarangan	Pelatihan pengelolaan persampahan	Bantarbarang , Kab. Purbalingga, Rembang, Bantarbarang	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN



Sebagian Masyarakat belum mengolah sampah dan membuang di sembarang Tempat	Penanganan persampahan	Desa Wanogara Wetan , Kab. Purbalingga, Rembang, Wanogara Wetan	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN
Diperlukan pelatihan dan dukungan sarpras pengolahan sampah agar dapat menekan biaya operasional dan menunjang hasil yang profit	Pelatihan pengelolaan persampahan	SUMAMPIR RT 12 RW 02 REMBANG PURBALINGGA JAWA TENGAH, Kab. Purbalingga, Rembang, Sumampir	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN

Kurang ilmu tentang penanganan sampah	Pelatihan pengelolaan persampahan	Tlahab Lor, Kab. Purbalingga, Karangreja, Tlahab Lor	8.2.01.5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur Perangkat Desa, PKRT, LKMD, PKK, FKD dan Pegiat Lingkungan.	1 paket / desa	Rp 5.000.000,00	DIPERTIMBANGKAN
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	----------------	-----------------	-----------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kabupaten Purbalingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan. Baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata mencerminkan permasalahan yang masih harus dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pembangunan sumberdaya manusia yang masih timpang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan, dimana kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan masih rendah.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyentuh bidang lingkungan hidup terdapat pada poin (2) adalah: meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan

hidup, yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan arahan kebijakan dan strategi pembangunan terdapat pada poin (3) yaitu, meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (iv) meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025), Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun mendatang yang harus dihadapi yaitu:

- 1) Produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun;
- 2) Sistem irigasi pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan;
- 3) Ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi;
- 4) Pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal;
- 5) Sumber daya air belum terkelola dengan baik;
- 6) Kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal;
- 7) Pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal;
- 8) Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan;

- 9) Frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap lingkungan hidup adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2009, setiap rencana pembangunan harus menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan setiap Rencana, Kebijakan, dan Program yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Agar amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut

dapat terlaksana dengan baik, maka diciptakan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan yang antara lain :

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- l. Audit Lingkungan Hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup, dimana target-target pada regulasi diatas diakomodasi dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan mensinkronkan terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini, maka

disusunlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun sebagai pedoman perencanaan penyusunan kegiatan pada tahun berjalan, dengan tujuan Renja DLH antara lain :

- 1) Tersedianya aparatur yang handal;
- 2) Terpeliharanya lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan;
- 3) Tersedianya data/informasi bidang lingkungan hidup;
- 4) Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Terlaksananya penataan lingkungan hidup sesuai dengan aturan dan konservasi sumber daya alam.

Sasaran Renja adalah mengacu untuk pencapaian sasaran RENSTRA yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara.
2. Meningkatnya persentase luasan RTH.
3. Meningkatnya pengurangan sampah.
4. Meningkatnya penanganan sampah.
5. Meningkatkan Implementasi SAKIP DLH

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Lingkungan Hidup merasa perlu untuk menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Pada Tahun 2025 anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp 17.572.864.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.830.930.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.741.934.000,00.

Rincian Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PURBALINGGA
 NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Catatan Penting				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Purbalingga	100%	9.330.672.000	DAU		100%	10.546.467.750
2	11	1	02.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Purbalingga	100	5.887.000	DAU	-	100	9.844.800
2	11	1	02.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	2 Dok	5.120.000	DAU	-	1 Dok	8.232.000
1	2	1	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Purbalingga	5 Lap	767.000	DAU	-	5 Dok	1.612.800

2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	Purbalingga	100	8.891.958.000	DAU		100	10.006.685.850
2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	88 Orang	8.830.930.000	DAU	-	88 Orang	9.907.428.300
2	11	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	33 Dok	29.533.000	DAU	-	33 Dok	62.018.250
2	11	1	02.02	4	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan SKPD	Purbalingga	2 Dok	31.495.000	DAU	-	2 Dok	37.239.300
2	11	1	02.03		Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah	Purbalingga	100%	2.746.000	DAU		100%	2.091.600
2	11	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	12 Lap	2.746.000	DAU	-	12 Lap	2.091.600
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kepegawaian, Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	100%	2.500.000	DAU		100%	4.200.000
1	2	1	02.05	9	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purbalingga	1 Orang	2.500.000	DAU	-	2 Orang	4.200.000
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	100%	30.120.000	DAU		100%	34.749.750

2	11	1	02.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Purbalingga	12 Paket	351.000	DAU	-	12 Paket	368.550
2	11	1	02.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	12 Paket	17.784.000	DAU	-	12 Paket	22.945.650
2	11	1	02.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Purbalingga	12 Paket	797.000	DAU	-	12 Paket	836.850
2	11	1	02.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	12 Lap	1.673.000	DAU	-	12 Lap	2.510.550
2	11	1	02.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	12 Lap	6.324.000	DAU	-	12 Lap	3.486.000
2	11	1	02.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	12 dok	3.191.000	DAU	-	12 dok	4.602.150
2	11	1	02.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Purbalingga	100%	235.620.000	DAU		100%	286.050.450

2	11	1	02.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	12 lap	283.000	DAU	-	12 lap	297.150
2	11	1	02.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya,air,listrik yang disediakan	Purbalingga	12 lap	104.136.000	DAU	-	12 lap	147.142.800
2	11	1	02.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Purbalingga	12 Lap	809.000	DAU	-	12 Lap	1.698.900
2	11	1	02.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Purbalingga	12Lap	130.392.000	DAU	-	12Lap	136.911.600
2	11	1	02.07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Prosentase pengadaan barang milik daerah	Purbalingga	100%	2.875.000	DAU		100%	3.591.000
2	11	1	02.07	6		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin yang disediakan	Purbalingga	1 unit	2.875.000	DAU		1 unit	3.591.000
2	11	1	02.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Purbalingga	100%	189.766.000	DAU		100%	199.254.300
2	11	1	02.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Purbalingga	12 Unit	146.641.000	DAU	-	12 Unit	186.313.050

2	11	1	02.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	12 Unit	7.325.000	DAU	-	12 Unit	7.691.250
1	2	9	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Purbalingga	1 Unit	5.000.000	DAU	-	1 Unit	5.250.000
2	11	2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup Yang Tersusun	Purbalingga	100%	86.562.000	DAU		100%	90.890.100
2	11	2	02.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	Purbalingga	100%	12.182.000	DAU		100%	41.245.050
2	11	2	02.01	1		Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kab/Kota	Purbalingga	1 Dok	694.000	DAU	-	1 Dok	1.050.000
2	11	2	02.01	1		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kab/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Purbalingga	1 Dok	11.488.000	DAU	-	1 Dok	40.195.050
2	11	2	02.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KLHS Tata Ruang	Purbalingga	1 Dok	11.905.000	DAU		1 Dok	49.645.050
2	11	2	02.02	2		Penyelenggaraan KLHS rencana tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana Tata Ruang yang disusun	Purbalingga	5 Dok	11.905.000	DAU	-	5 Dok	49.645.050

2	11	3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Purbalingga	100%	222.135.000	DAU		100%	249.390.750
2	11	3	02.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Purbalingga	100%	222.135.000	DAU		100%	249.390.750
2	11	3	02.01	1		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Purbalingga	1 Dok	211.760.000	DAU	-	1 Dok	238.497.000
2	11	3	02.01	2		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purbalingga	1 Dok	10.375.000	DAU	-	1 Dok	10.893.750
2	11	4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Peningkatan Luas RTH	Purbalingga	0,006%	1.250.781.000	DAU		0,006%	921.630.150
2	11	4	02.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Luas RTH	Purbalingga	0,006%	1.250.781.000	DAU		0,006%	921.630.150
2	11	4	02.01	4		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Purbalingga	13,6 ha	1.246.542.000	DAU	-	13,6 ha	893.084.850
2	11	4	02.01	6		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Purbalingga	80 Orang	4.239.000	DAU	-	2 Orang	7.503.300

2	11	4	02.01	7		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Purbalingga	0 unit	0	DAU	-	605 unit	21.042.000
2	11	5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dibina	Purbalingga	100%	11.115.000	DAU		100%	20.927.550
2	11	5	02.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan Industri yang memiliki TPS LB3	Purbalingga	100%	11.115.000	DAU		100%	20.927.550
2	11	5	02.01	1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	10 Perusahaan	5.737.000	DAU	-	10 Perusahaan	10.514.700
						Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Lap.kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	Purbalingga	15laporan	5.358.000	DAU		15 laporan	10.412.850
2	11	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase usaha/kegiatan yang dibina & diawasi izin lingkungan & izin PPLH	Purbalingga	100%	12.917.000	DAU		100%	82.864.950

					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Purbalingga	100%	12.917.000	DAU		100%	82.864.950
2	11	6	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Purbalingga	12 Dok	5.458.000	DAU	-	12 Dok	68.397.000
2	11	6	02.01	5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan kegiatan yang diawasi	Purbalingga	50 Perusahaan	7.459.000	DAU	-	50 Perusahaan	14.467.950
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase BANK Sampah yang beroperasi	Purbalingga	61,11%	7.124.000	DAU		61,11%	21.568.050
2	11	8	02.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase BANK Sampah yang beroperasi	Purbalingga	61,11%	7.124.000	DAU		62,50%	21.568.050

2	11	8	02.01	1		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga / kelompok Masyarakat / Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Purbalingga	4 Lembaga	7.124.000	DAU	-	5 Lembaga	21.568.050
2	11	9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase sekolah Adiwiyata	Purbalingga	7,18%	19.919.000	DAU		7,18%	21.568.050
2	11	9	02.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Presentase sekolah Adiwiyata	Purbalingga	7,18%	19.919.000	DAU		7,18%	21.568.050
2	11	9	02.01	1		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Purbalingga	20 entitas	19.919.000	DAU	-	20 entitas	21.568.050
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	100%	5.579.000	DAU		100%	10.939.950
2	11	10	02.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	100%	5.579.000	DAU		100%	10.939.950

2	11	10	02.01	1		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Purbalingga	4 Kasus	5.579.000	DAU	-	4 Kasus	10.939.950
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan Sampah	Purbalingga	55,55%	6.688.555.000	DAU		55,55%	6.378.166.200
2	11	11	02.01			Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan Sampah	Purbalingga	55,55%	6.688.555.000	DAU		55,55%	6.378.166.200
2	11	11	02.01	17		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R PDU TPST TPS SPA PSEL/PLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pengelolaan sampah di instansi Pengelolaan sampah TPS3RPDUTPSTSPAPSE L/PLTSaRDFPusat pengomposanBiodigester Bank sampah dan fassilitas lainnya sesuai dengan pesanan perundang-undangan	Purbalingga	39.000 Ton	6.468.555.000	DAU	-	39.000 Ton	6.121.020.150
2	11	11	02.01	4		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purbalingga	1 Kelompok	220.000.000	DAU	-	1 Kelompok	257.146.050
Jumlah										17.572.864.000				18.344.413.500

3.3.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Daerah merupakan sumber pemasukan daerah selain pajak dan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan iuran pengguna jasa yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penetapan tarif retribusi jika dilihat dari perspektif keuangan pemerintah maka akan dihadapkan pada kinerja dalam bentuk target pencapaian retribusi. Hal yang sama juga dituangkan dalam regulasi terkait tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Orientasi dalam penetapan tarif retribusi di pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah adalah untuk tujuan menutup biaya penanganan sampah yang dikeluarkan pemerintah daerah dari sumber APBD.

Mengingat pentingnya hal tersebut maka optimalisasi terkait potensi retribusi layanan persampahan di Kabupaten Purbalingga sangat penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mengetahui kondisi potensi maksimal yang ada di Kabupaten Purbalingga, khususnya di wilayah pelayanan yang saat ini dijangkau. Dari dasar potensi tersebut maka secara kebijakan dapat menetapkan rencana strategis dalam jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek guna mencapai target berdasarkan potensi yang tersedia. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi terkait kinerja saat ini dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat serta faktor pendorong pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dilakukan melalui upaya meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

A.1. Optimalisasi melalui Strategi Intensifikasi

Guna memaksimalkan potensi tarif retribusi pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Purbalingga, perlu melakukan optimalisasi dalam bentuk perumusan strategi yang tepat. Terkait potensi yang sifatnya jangka pendek maka dapat dilakukan dengan strategi intensifikasi tarif retribusi.

Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat bahwa kondisi layanan persampahan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini belum berada pada kondisi ideal. Kondisi yang saat ini perlu untuk segera ditindaklanjuti adalah terkait dengan ketentuan struktur tarif yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi pengguna layanan persampahan saat ini, jika dilakukan penyesuaian tarif merujuk pada hasil perhitungan tarif dalam kajian ini maka dapat diperoleh nilai target retribusi yang lebih optimal.

Optimalisasi Potensi Retribusi Layanan Persampahan melalui Strategi Intensifikasi Hasil Kajian Retribusi Persampahan/Kebersihan

Kategori	Jumlah Pengguna	Potensi Retribusi per Tahun
1. Rumah Tangga	3.537	Rp491.639.872
2. Bisnis	776	Rp630.354.768
3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	161	Rp34.199.654
4. Industri	21	Rp19.360.034
5. Umum	65	Rp23.344.963
TOTAL	4.560	Rp1.198.899.290

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai potensi retribusi layanan persampahan di Kabupaten Purbalingga yang dapat menjadi target pencapaian kinerja melalui strategi intensifikasi. Penyesuaian ketentuan tarif retribusi yang saat ini berlaku sehingga diubah struktur tarifnya sesuai dengan hasil perhitungan tarif dalam kajian ini menghasilkan nilai potensi sebesar Rp1.198.899.290. Pada implementasinya, nominal tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, misalnya menetapkan target pencapaian yang harus diperoleh dalam jangka waktu maksimal 1 tahun

hingga maksimal 3 tahun mendatang. Pertimbangan waktu pencapaian bisa disesuaikan dengan kondisi pencapaian retribusi yang saat ini sudah mampu dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Target Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pada DPA Tahun 2025 DLH masih menggunakan target tarif lama (Perbub No 21 Tahun 2021) dikarenakan pada saat OPD diminta data target pendapatan Tahun 2024 belum ditetapkan Perda Pendapatan yang baru / Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 23 Desember 2023 akan tetapi untuk Tahun 2024 DLH sudah menerapkan retribusi Persampahan / Kebersihan berdasarkan Perda yang baru / Perda PDRD No 15 Tahun 2023. Target perubahan pendapatan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.306.000.000,-.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tidak menggunakan Proyeksi Hasil Kajian karena hasil kajian belum memasukkan semua objek retribusi dan belum mempertimbangkan pengelolaan sampah secara mandiri sehingga DLH melakukan perhitungan ulang dengan menambahkan objek retribusi yang belum dimasukkan dan memperhitungkan adanya pengelolaan sampah mandiri .Poyeksi Pendapatan 5 Tahun Kedepan sebagai berikut :

No	TAHUN ANGGARAN	PROYEKSI PENDAPATAN (Rp)	KAJIAN POTENSI PENDAPATAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2024	990.000.000	1.198.899.290	208.899.290
2	2025	1.000.000.000	1.306.000.000	306.000.000
3	2026	1.010.000.000	1.501.900.000	491.900.000
4	2027	1.020.000.000	1.727.185.000	707.185.000
5	2028	1.030.000.000	1.986.262.750	956.262.750

Perbedaan proyeksi pendapatan dengan hasil kajian disebabkan karena adanya pengelolaan sampah secara mandiri oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada TPS3R yang ada sehingga berdampak pada pengurangan pelanggan layanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. (Daftar terlampir)

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan retribusi pelayanan persampahan melalui intensifikasi dengan:

1. Monitoring dan Sosialisasi Tarif Retribusi Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku ke Wajib Retribusi yang belum membayar sesuai tarif secara Door to Door.
2. Rapat monitoring dan evaluasi Bulanan untuk memantau peningkatan kegiatan intensifikasi.

Intensifikasi dilakukan untuk Wajib Retribusi yang selama ini masih membayar retribusi tidak sesuai dengan tarif resmi yang ada. Dengan berbagai alasan, saat ini masih banyak Wajib Retribusi yang membayar retribusi tidak sesuai dengan tarif resmi. Apabila pembayaran Wajib Retribusi dapat ditingkatkan sesuai dengan tarif resmi, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

B.1. Optimalisasi melalui Strategi Ekstensifikasi

Rekomendasi upaya optimalisasi selanjutnya dalam upaya meningkatkan target retribusi pelayanan persampahan di adalah dengan menerapkan strategi Ekstensifikasi. Strategi ini diperlukan guna menjawab adanya potensi target retribusi jangka menengah, yaitu perlunya melakukan peningkatan kinerja dari pengelolaan persampahan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa kondisi saat ini pengguna layanan persampahan hanya mencapai angka 7,43% dari total jumlah seluruh rumah tangga (KK) yang ada di wilayah layanan persampahan pada 10 wilayah kecamatan. Artinya, kinerja manajemen layanan persampahan masih bisa ditingkatkan guna mencapai jumlah riil rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai potensi retribusi layanan persampahan di Kabupaten Purbalingga yang dapat menjadi target pencapaian kinerja melalui strategi ekstensifikasi. Total pengguna pada jangkauan pelayanan persampahan di desa/ kelurahan yang saat ini masuk dalam wilayah pelayanan adalah mencapai 47.590. Asumsi tersebut merupakan melihat kondisi riil jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan jangkauan pelayanan melalui strategi ekstensifikasi menghasilkan nilai potensi sebesar Rp12.512.196.761. Pada implementasinya, nominal tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, misalnya menetapkan target pencapaian yang harus diperoleh dalam jangka waktu maksimal 5 tahun hingga maksimal 10 tahun mendatang. Pertimbangan waktu pencapaian bisa disesuaikan dengan kondisi pencapaian retribusi yang saat ini sudah mampu dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga serta kondisi sumber daya yang dimiliki.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekstensifikasi antara lain:

1. Memecah Wajib Retribusi yang tadinya berupa Kelompok Warga menjadi Wajib Retribusi setiap KK.
2. Rapat monitoring dan evaluasi Bulanan dengan calon wajib retribusi
3. Sosialisasi Tarif Retribusi Persampahan kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan (Renja) 2025 Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam rangka mengukur keberhasilan dalam organisasi didalam upaya pencapaian visi.

4.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024, merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah diperlukan penguatan kelembagaan daerah berupa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2. INDIKATOR SASARAN

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

4.3. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, maka pendanaan program

dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2025 disajikan pada table terlampir.

TABEL RENJA 2025

TUJUAN SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Purbalingga	100	9.330.672.000	DAU		100	10.546.467.750
1. Perencanaan Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persen	Purbalingga	5.887.000	5.887.000	DAU		100	9.844.800
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.120.000	2	5.120.000	DAU		1	8.232.000
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	767.000	5	767.000	DAU		5	1.612.800
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	Purbalingga	100	8.891.958.000	DAU		100	10.006.685.850

		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	Purbalingga	88	8.830.930.000	DAU		82	9.907.428.300
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Purbalingga	33	29.533.000	DAU		33	62.018.250
		c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SPKD	Dokumen	Purbalingga	2	31.495.000	DAU		2	37.239.300
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	2.746.000	DAU		100	4.200.000
		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Purbalingga	2	2.746.000	DAU		2	4.200.000
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Purbalingga	100	30.120.000	DAU		100	34.749.750
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	Purbalingga	12	351.000	DAU		12	368.650
		b. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	Purbalingga	12	17.784.000	DAU		100	22.945.650

		c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	Purbalingga	12	3.191.000	DAU		12	4.602.150
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	Purbalingga	12	797.000	DAU		12	836.850
		e. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Purbalingga	12	1.673.000	DAU		12	2.510.550
		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Purbalingga	12	6.324.000	DAU		12	3.486.000
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Purbalingga	100	2.875.000	DAU		100	3.591.000
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	Purbalingga	1	2.875.000	DAU		12	3.591.000
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Purbalingga	100	235.620.000	DAU		100	286.050.450
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	Purbalingga	12	283.000	DAU		10	297.150
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Purbalingga	12	104.136.000	DAU		12	147.142.800

		c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	Purbalingga	12	809.000	DAU		12	1.698.900
		d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Purbalingga	12	130.392.000	DAU		12	136.911.600
		6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	Purbalingga	100	158.966.000	DAU		100	199.254.300
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinanya	Unit	Purbalingga	12	146.641.000	DAU		12	186.313.050
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainya yang dipelihara	unit	Purbalingga	12	7.325.000	DAU		12	7.691.250
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Purbalingga	1	5.000.000	DAU		2	5.250.000
		7. Administrasi Barang Milik Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase penatausahaan barang Milik Daerah	Persen	Purbalingga	100	2.746.000	DAU		100	7.691.250
		a. Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Purbalingga	4	2.746.000	DAU		12	2.091.600

B. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan	Persen	Purbalingga	100	86.562.000	DAU	100	90.890.100
	1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	Persen	Purbalingga	100	12.182.000	DAU	100	41.245.050
		Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir PPLH Kab/Kota	Dokumen	Purbalingga	1	694.000	DAU	1	1.050.000
		b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten kota mengakomodir RPPLH provinsi	Dokumen	Purbalingga	1	11.488.000	DAU	1	40.195.050
	2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS tata ruang	Dokumen	Purbalingga	5	11.905.000	DAU	5	49.645.050
		a.Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang yang disusun	Dokumen	Purbalingga	5	11.905.000	DAU	1	49.645.050
C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Persen	Purbalingga	100	222.135.000	DAU	100	249.390.750

		1. Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya pemantauan kualitas Air dan Udara	Persen	Purbalingga	100	222.135.000	DAU	100	249.390.750
		a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Purbalingga	1	211.760.000	DAU	1	238.497.000
		b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Purbalingga	1	10.375.000	DAU	1	10.893.750
		D. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	Prosen	Purbalingga	0,006%	1.250.781.000	DAU	0,006%	921.630.150
		1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan luas RTH	Prosen	Purbalingga	0,006%	1.250.781.000	DAU	0,006%	921.630.150
		a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Purbalingga	13,6	1.246.542.000	DAU	13,6	893.084.850

		b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	Purbalingga	2	4.239.000	DAU		2	7.503.300
		c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	Purbalingga	605	0	DAU		605	21.042.000
E. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Cakupan pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dibina	Persen	Purbalingga	100	11.115.000	DAU		100	20.927.550
		1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Industri yang memiliki TPS LB3	Persen	Purbalingga	100	11.115.000	DAU		100	20.927.550
		a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perusahaan	Purbalingga	10	5.737.000	DAU		80	10.514.700

		b. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Lap.kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	Laporan	Purbalingga	15	5.358.000	DAU		50	10.412.850
F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Presentase usaha/kegiatan yang dibina & diawasi izin lingkungan & izin PPLH	Persen	Purbalingga	100	12.917.000	DAU		100	82.864.950
	1. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH		Persen	Purbalingga	100	12.917.000	DAU		100	82.864.950
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		Dokumen	Purbalingga	10	5.458.000	DAU		12	68.397.000

		b. Pengawasan Perijinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Purbalingga	50	7.459.000	DAU		100	14.467.950
G. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase BANK Sampah yang beroperasi	persen	Purbalingga	61,11%	7.124.000	DAU		62,50%	21.568.050
		1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase BANK Sampah yang beroperasi	persen	Purbalingga	61,11%	7.124.000	DAU		62,50%	21.568.050
		a. Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga / kelompok Masyarakat / Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	Purbalingga	3	7.124.000	DAU		3	21.568.050

H. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Presentase sekolah Adiwiyata	Persen	Purbalingga	7,18%	19.919.000	DAU		7,18%	21.568.050
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase sekolah Adiwiyata	Persen	Purbalingga	7,18%	19.919.000	DAU		7,18%	21.568.050
		a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Purbalingga	20	19.919.000	DAU		20	21.568.050
I. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Purbalingga	100	5.579.000	DAU		100	10.939.950
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/ kota yang ditindak lanjuti	Persen	Purbalingga	100	5.579.000	DAU		100	10.939.950
		a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	Purbalingga	4	5.579.000	DAU		4	10.939.950

J. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Cakupan penanganan sampah	Persen	Purbalingga	22,67%	6.688.555.000	DAU	22,87%	6.378.166.200
	1. Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan Sampah	Persen	Purbalingga	55,55%	6.688.555.000	DAU	55,55%	6.378.166.200
		a. Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3 R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas lainnya sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pengelolaan sampah di instansi Pengelolaan sampah TPS3R,PDU,TPST,SPA,PS EL/PLTSa,RDF,Pusat pengomposan,Biodigester, Bank sampah dan fassilitas lainnya sesuai dengan pesanan perundang-undangan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Ton	Purbalingga	39000	6.468.555.000	DAU	39000	6.121.020.150
		b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	Purbalingga	1	220.000.000	DAU	1	257.146.050
JUMLAH							17.572.864.000			18.344.413.500

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

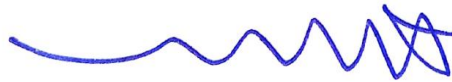
Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini

merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik..

Purbalingga, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,



BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700702 199203 1 006



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA**

**JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17, TELP. (0281) 891187, FAX
(0281) 894861**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17, TELP. (0281) 891187, FAX (0281) 894861
PURBALINGGA - 53316**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun, dan mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, serta capaian perkiraan tahun berjalan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat memberikan manfaat baik bagi institusi pemerintah maupun masyarakat.

Purbalingga, 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Purbalingga



YANI SUTRISNO UDHINUGROHO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 198603 1 028

DAFTAR ISI

Cover	i
Dasar Hukum	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA PADA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga kerja.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	28
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja.....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Program dan Kebijakan.....	50
BAB V. PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga	20
Tabel 2.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 Semester I	24
Tabel 3.	Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	28
Tabel 4.	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	29
Tabel 5.	Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	29
Tabel 6.	Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	30
Tabel 7.	Jumlah Tenaga Yang Ditempatkan Tahun 2024	31
Tabel 8.	Data Pencari Kerja yang sudah Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	32
Tabel 9.	Capaian Persentase Angka Perselisihan yang terselesaikan	33
Tabel 10.	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2020-2025	33
Tabel 11.	Perselisihan Perusahaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	33
Tabel 12.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	37
Tabel 13.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	41
Tabel 14.	Usulan Program dari Masyarakat tahun 2026	45
Tabel 15.	Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga tahun 2026	51



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - b. bahwa agar penjabaran dari program kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah selaras dengan yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Pasal I

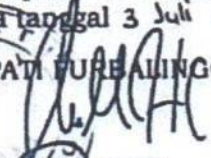
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025


BUPATI PURBALINGGA,

BUFFAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025.**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai penyalarsan atas Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.


FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD), Renja Kemenenterian/ Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Purbalingga. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Purbalingga serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga di tahun mendatang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, telah memuat anggaran perubahan yang diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan. Selain itu memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam bidang ekonomi yang mengatur hal ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2030 yaitu "AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA" .

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran negara republik indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Purbalingga Nomor 30) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten

- Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
 15. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Perubahan Tahun 2025 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu untuk menentukan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan menurut Renstra Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasioanal bagi Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan.

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah rencana tahun keempat yang sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 yang tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Sebagai pedoman para pelaksana pembangunan ataupun lembaga dan *stakeholder* yang lain;
4. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja kabupaten Purbalingga Tahun 2026 didasarkan pada Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pada Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pubalingga dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga yaitu “AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Sedangkan misi yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja yaitu Misi ke – 1 dan ke-2 yaitu :

Misi Ke 1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian;

Misi Ke 4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga turut berpartisipasi dalam rangka untuk bangkitkan ekonomi dengan memfasilitasi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan cara memberi informasi lowongan pekerjaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar.

Untuk mendukung misi unggul kualitas sumber daya manusia, Dinas Tenaga Kerja melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) melaksanakan kegiatan operasional di bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja atau calon usaha mandiri.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah memperlihatkan pencapaian kinerja pada 3 (tiga) sasaran strategisnya pada tahun 2024 lalu sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	95,00	95,04	100,04
	Meningkatkan penempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	6.885	6.984	101,47
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Orang	340	460	135,29
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis		Persentase angka perselisihan yang terselesaikan	Persen	100,00	100	100
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase pekerja yang mendapat program BPJS Ketenagakerjaan	Persen	85,30	88,37	103,59
Meningkatnya kualitas kelembagaan DINNAKER		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	46	45	97,82
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinnaker	Nilai SAKIP DINNAKER	Nilai	73,70	73,61	99,87
Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2024						105,44

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja di tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 104,39 persen atau kategori sangat tinggi, yang menunjukkan kinerja yang baik.

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Sehingga dapat dijabarkan untuk Pos Anggaran Belanja Langsung Pagu Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.6.524.691.000,00, dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.6.300.809.341,00 atau 96,57 % dari pagu. Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,43 %, yang dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp.4.945.486.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.771.431.501,00 atau 96,48 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.174.054.499,00 (3,52 %). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.479.800,00 atau 99,55 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.20.200,00 (0,45 %). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah

melaksanakan kegiatan berupa penyusunan dokumen Renstra dan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP sebanyak 6 dokumen. Dari target indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun sebanyak 6 dokumen maka terealisasi sebanyak 6 dokumen atau realisasi fisik 100% sehingga capaian kinerja 100%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.495.500,00 (99,86%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.3.500,00(0,14 %).

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

melaksanakan kegiatan berupa penyusunan laporan LKJiP, LKPJ, LKD, SIPD, Laporan Perkembangan Keuangan setiap triwulan dan Laporan Pendapatan. Dari target indikator kinerja jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun sebanyak 6 laporan maka terealisasi sebanyak 6 laporan atau realisasi fisik 100%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.983.300,00 (99,17%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.16.700,00 (0,83 %).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp.3.741.493.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.670.780.000,00 atau 98,11 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.70.712.568,00 (1,89 %). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

melaksanakan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dari target indikator kinerja Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan sebanyak 26 orang maka terealisasi sebanyak 26 orang sehingga realisasi fisik 100%. Namun demikian pada tahun ini ada 1 orang yang pensiun. Dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.618.944.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.552.415.166,00 (98,16%). Efisiensi sebesar Rp.66.528.834,00 (1,84 %).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

melaksanakan kegiatan berupa perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah. Dari target indikator kinerja jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 12 dokumen, realisasi sebanyak 12 dokumen, atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.75.369.000,00 dengan realisasi Rp.73.866.666,00 (98,01%). Efisiensi sebesar Rp.1.502.334,00 (1,99 %).

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

melaksanakan kegiatan berupa pembayaran honor pengelola keuangan selama 6 (enam) bulan, pembelian ATK, kertas, dan bahan komputer. Dari target indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dengan target sejumlah 12 dokumen maka realisasi sebanyak 12 dokumen atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.47.180.000,00 dengan realisasi Rp.44.498.600,00 (94,32%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.2.681.400,00 (5,63 %).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.500.000,00 atau 100 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.0,00 (0 %). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD,
melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah berupa honor pejabat pengadaan barang jasa, PPKom, dan Pengurus Barang selama 6 (enam) bulan. Dari target indikator jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 12 laporan maka terealisasi 12 laporan atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran awal sebesar Rp.7.500.000,00 dengan realisasi Rp.7.500.000 (100 %). Efisiensi anggaran Rp.0,00.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp.5.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.0,00 (0 %). Realisasi fisik 0 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
melaksanakan kegiatan berupa diklat atau bimtek pegawai. Dari target 5 orang pegawai maka realisasi fisik 0%. Dari anggaran awal sebesar Rp.5.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 (0 %). Efisiensi anggaran Rp.5.000.000,00 (100 %).
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp.46.840.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.45.962.475,00 atau 98,13 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.877.525,00 (1,87 %). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
melaksanakan kegiatan pembelian alat-alat listrik. Dari target indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan

- bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket maka terealisasi sebanyak 1 paket sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebanyak Rp.5.000.000,00 maka realisasi Rp4.988.175,00 (99,76%). Efisiensi anggaran Rp.11.825,00 (0,24%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
melaksanakan kegiatan pembelian isi tabung gas, ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan kantor, bahan komputer, perabot kantor, suvenir/cendera mata, dan pembayaran retribusi sampah. Dari target indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket maka terealisasi 1 paket sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggara sebesar Rp.25.000.000,00 dengan realisasi Rp.24.471.300,00 (97,89%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.528.700,00 (2,11%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
melaksanakan kegiatan berupa pembelian surat kabar berlangganan setiap bulan dalam satu tahun, sehingga realisasi fisik 100 %. Dari anggaran awal Rp.1.000.000,00 dengan realisasi Rp1.000.000,00 (100%). Efisiensi anggaran Rp.0,00 (0%).
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
melaksanakan kegiatan berupa belanja makanan dan minuman tamu. Dari target indikator kinerja jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 5 laporan maka terealisasi sebanyak 5 laporan sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.2.400.000,- dengan realisasi Rp2.400.000,00 (100%). Efisiensi anggaran Rp.0,00 (0%).
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
melaksanakan kegiatan berupa belanja makanan dan minuman rapat. Dari target indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 6 laporan maka terealisasi sebanyak 6 laporan sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran

sebesar Rp.6.680.000,00 dengan realisasi Rp6.430.000,00 (99,90%). Efisiensi anggaran Rp.7.000,00 (0,10%).

e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

melaksanakan kegiatan berupa belanja ATK, kertas/cover, honor pengelola SIM Aset, SIMDA dan SIPD. Dari target indikator kinerja jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD sejumlah 6 dokumen maka terealisasi sebanyak 6 dokumen sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.6.760.000,00 maka dengan realisasi Rp6.430.000,00 (95,12%). Sisa anggaran Rp.330.000,00 (4,88%).

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp.881.176.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.791.638.294,00 atau 89,84 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.7.906.500 (10,16%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

melaksanakan kegiatan berupa belanja benda pos seperti, materai dan perangko. Dari target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target sejumlah 12 dokumen maka terealisasi 12 dokumen sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.600.000,00 dengan realisasi Rp.118.800,00 (19,90%). Efisiensi anggaran Rp.481.000,00 (80,20%).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

melaksanakan kegiatan berupa pembayaran langganan listrik, air, internet dan telepon selama satu tahun. Dari target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan, maka terealisasi 12 laporan sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.195.548.000,00 dengan realisasi Rp.171.648.143,00 (88,21%). Efisiensi anggaran Rp.66.120.649,00 (11,79%).

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan pembuatan dekorasi pameran hari jadi Kabupaten Purbalingga dan sewa pakaian penggiring. Dari target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sejumlah 12 laporan maka terealisasi 12 laporan sehingga realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi Rp 1.000.000,- (100%). efisiensi anggaran Rp.0,00 (0%).
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor melaksanakan kegiatan berupa pembayaran honor untuk tenaga operator, kebersihan dan tenaga keamanan selama satu tahun dan uang jaminan kesehatan, kecelakaan serta kematian untuk tenaga operator, kebersihan dan tenaga keamanan. Dari target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan maka terealisasi sebanyak 12 laporan sehingga realisasi fisik 100%. Dari Alokasi dana Rp.684.992.000,00 dengan realisasi Rp618.871.351,00 (90,35). Efisiensi anggaran Rp.66.120.649,00 (9,65%).
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pagu anggaran sebesar Rp.258.977.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.251.070.500,00 atau 96,95 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.7.905.500,00 (3,05%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan melaksanakan kegiatan berupa pengadaab BBM, servis mobil, oli mesin, dan pembayaran pajak mobil/motor. Dari target indikator kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya sebanyak 1 paket maka terealisasi 1 paket atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.147.777.000,00 dengan realisasi Rp.140.045.500 (94,77%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.7.731.500,00 (5,23%).

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya melaksanakan kegiatan berupa pemeliharaan laptop, printer, mebelair, dan AC. Dari target indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 1 paket maka realisasi sebanyak 1 paket atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi Rp.10.000.000,00 (100 %). Efisiensi anggaran Rp.0,00 (0%).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya melaksanakan kegiatan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan sebanyak 1 unit. Dari target indikator kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit maka terealisasi 1 unit atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran awal sebesar Rp.101.200.000,00 dengan realisasi Rp.101,025.000,00 (99,83%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.175.000,00. (0,17%)

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pagu anggaran sebesar Rp.8.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.959.500,00 atau 99,49 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.40.500,00,00 (0,51%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Pagu anggaran sebesar Rp.8.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.959.500,00 atau 99,49 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.40.500,00,00 (0,51%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

melaksanakan penyusunan buku rencana tenaga kerja mikro untuk Perusahaan. Realisasi Perusahaan yang dapat menyusun rencana kerja tenaga mikro 2 orang, realisasi 2 orang, maka realisasi fisik 100%. Alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.959.500,00 (94,49%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.40.500,00 (0,51%).

III. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pagu anggaran sebesar Rp.1.289.139.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.238.736.740,00 atau 96,39 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.46.412.260,00 (3,61%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Pagu anggaran sebesar Rp.1.289.139.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.238.736.740,00 atau 96,39 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.46.412.260,00 (3,61%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi melaksanakan pelatihan untuk masyarakat baik pelatihan berdasar unit kompetensi maupun pelatihan prakerja dengan target jumlah peserta 320 orang dan terealisasi 460 orang. Realisasi fisik 100%. Alokasi dana sebesar Rp.1.283.939.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.736.740,00 (96,48%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.45.202.260,00 (3,52%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja melaksanakan kegiatan koordinasi untuk instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas.. Alokasi dana sebesar Rp1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.1.200.000 (100%).

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pagu anggaran sebesar Rp.4.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.990.000,00 atau 99,75 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.10.000,00 (0,25%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

24). Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Prasarana Lembaga pembinaan kepada LPKS dengan target 5 LPTKS dengan realisasi fisik 100 %.. Alokasi dana sebesar Rp.4.000.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp.3.990.000,00 (99,75%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.10.000,00 (0,25%).

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran sebesar Rp.120.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.118.990.000,00 atau 99,16 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.1.010.000,00 (0,84%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp.120.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.118.990.000,00 atau 99,16 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.1.010.000,00 (0,84%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

melaksanakan kegiatan pelayanan dan fasilitasi untuk pencari kerja seperti Job Canvasing ke perusahaan-perusahaan untuk mencari lowongan kerja, fasilitasi penempatan untuk tenaga kerja antar daerah dan juga antar negara. Kegiatan lainnya sosialisasi ke kecamatan untuk lowongan kerja antar pulau maupun antar negara, Fasilitasi perekrutan atau seleksi untuk perusahaan, pemberian rekomendasi pembuatan pasport bagi TKI maupun TKW yang akan bekerja ke luar negeri dan melakukan wawancara untuk memvalidasi data serta menyediakan aplikasi TKI Online. Dari target Indikator kinerja jumlah sosialisasi dan job canvasing sebanyak 30 kali maka realisasi sebanyak 30 kali atau realisasi fisik 100%. Dari anggaran diperubahan menjadi sebesar Rp.120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.118.990.000,00 (99,16%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.1.110.000,00 (0,84%).

V. Program Hubungan Industrial

Pagu anggaran sebesar Rp.157.066.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.155.256.600,00 atau 98,85 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.1.809.400,00 (1,15%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp.157.066.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.155.256.600,00 atau 98,85 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.1.809.400,00 (1,15%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

kegiatan berupa pembinaan di perusahaan meliputi Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, Pemantauan THR di perusahaan, Bimbingan Teknis/Bimtek peraturan ketenagakerjaan. Realisasi fisik sebesar 100%. Adapun alokasi dana sebesar Rp.18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.600.000,00 (97,78%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.400.000,00 (2,22%).

- b. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

kegiatan dilaksanakan melalui bimtek, Rakor, Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara unsur TRIPARTIT (Pemerintah, Apindo dan Pekerja/Perusahaan). Dari target indikator kinerja persentase jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani maka dari sejumlah 5 kasus yang ditangani terselesaikan 5 kasus, maka realisasi sebanyak 100% atau realisasi fisik 100%. Adapun alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.18.638.500,00 (93,19%). Sisa anggaran sebesar Rp.1.361.500,00 (6,81%).

- c. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

melaksanakan program iuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non formal yaitu petani tembakau, buruh tembakau, petani cengkeh dan penderes untuk 3 bulan. Realisasi fisik 100%. Adapun alokasi dana sebesar Rp.119.066.000,00 dengan realisasi anggaran

Rp.119.018.000,00 (99,96%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.47.900,00 (0,04%).

VI. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.445.000,00 atau 88,90 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.555.000,00 (11,10%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penataan Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.445.000,00 atau 88,90 % dari pagu anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.555.000,00 (11,10%). Realisasi fisik 100 %. Program ini dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

melaksanakan kegiatan di bidang transmigrasi atau memindahkan penduduk ke daerah lain yang masih jarang penduduknya tetapi mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik. Pada tahun 2024 target 3 orang peserta, tetapi dari provinsi untuk Kabupaten Purbalingga tidak mempunyai kuota jadi tahun ini tidak memberangkatkan orang untuk bertansmigrasi, sehingga realisasi fisik 0%. Adapun alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi Rp4.445.000,00 (88,90%). Efisiensi anggaran sebesar Rp.555.000,00 (11,10%).

Tabel 1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA

DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

KABUPATEN PUBALINGGA

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan lembaga Pengawas Yang ditindaklanjuti	Angka	100	100	100	100	100	100	100	100
1)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	9	6	6	6	100	9	6	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Laporan	9	6	6	6	100	9	6	100
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	26	28	26	26	100	26	26	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	12	12	12	100	12	12	100
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
4)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	persen	100	0	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	5	0	5	0	0	5	5	0

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	dok	6	6	6	6	100	6	6	100
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	dok	12	12	12	12	100	12	12	100
6)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	12	12	12	4	33	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	12	12	12	12	100	12	12	100
7)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29	29	29	29	100	29	29	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
8)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku	1	1	1	0	0	1	1	100
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,86	3,86	3,86	3,86	100	3,86	3,86	100
9)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan	paket	20	20	20	20	100	20	20	100
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	360	380	340	420	124	360	340	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	lembaga	5	5	5	5	100	5	5	100
10)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Persentase LPKS yang Terakreditasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	8	8	8	8	100	8	8	100
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	50,23	50,23	50,23	50,23	100	50,23	50,23	100
11)	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	orang	200	200	200	200	100	200	200	100

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
	5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	persen	87	85	85	88	100	87	85	100
12)	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Derah Kabupaten/kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	perkara	5	4	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	5	4	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2164		2164	2164	100	2164	2164	100
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	3	3	3	3	100	3	3	100
13)	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100	100	0	0	100	100	100
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK	3	3	3	0	0	3	3	100

Tabel 2

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 SEMESTER I

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Semester I			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 Semester I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	Satuan	4	5	6	7	$8=(7/6)\times 100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)\times 100\%$
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Angka	100	100	100	34,72	34,72	100	100	100
1)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100	100	51,33	51,33	100	100	100
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	6	9	5	55,56	9	6	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	6	9	4	44,44	9	6	100
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	26	26	26	26	100,00	26	26	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	12	12	12	3	25,00	12	12	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dok	12	12	12	3	25,00	12	12	100
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	100	100	100	40	40,00	100	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	12	12	12	2	16,67	12	12	100
4)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	0	100	0	0,00	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	5	5	5	0	0,00	5	5	0

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Semester I			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 Semester I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	Satuan	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	56	56	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	1	0,4	40	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dok	6	6	6	6	100	6	6	100
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Lap	12	12	12	5	41,67	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	12	1	8,33	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok	12	12	12	2	16,67	12	12	100
6)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	50	50	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	12	1	8,33	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Lap	12	12	12	6	50	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap	12	12	12	0	0	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	12	12	6	50	12	12	100
7)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	80	80	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	29	29	29	16	55,17	29	29	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	1	1	1	0,5	50	1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Semester I			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 Semester I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	Satuan	4	5	6	7	$8=(7/6)\times 100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)\times 100\%$
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
8)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Buku	1	1	1	0	0	1	1	100
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persen	3,86	3,86	3,86	1,8	46,63	3,86	3,86	100
9)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	paket	20	20	20	12	60	20	20	100
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	360	380	340	220	64,71	360	340	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	lembaga	5	5	5	0	0	5	5	100
10)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	persen	100	100	100	50	50	100	100	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS	8	8	8	4	50	8	8	100
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persen	50,23	50,23	50,23	50,23	100	50,23	50,23	100
11)	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	orang	200	200	200	100	50	200	200	100

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Semester I			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 Semester I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	Satuan	4	5	6	7	$8=(7/6)\times 100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)\times 100\%$
	5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persen	87	85	85	88	100	87	85	100
12)	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Derah Kabupaten/kota	perkara	5	5	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	perkara	5	5	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	orang	2164	2164	2164	2164	100	2164	2164	100
6	PROGRAM PEM BANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	KK	3	3	3	3	100	3	3	100
13)	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	0	0	100	100	100
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KK	3	3	3	0	0	3	3	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Tahun

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan tugas ini karena adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, dapat kami uraikan analisis kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2026. Adapun capaian indikator pada Tahun 2024 berdasarkan target Rebstra dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Dinas Tenaga Kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah meningkatnya kesempatan kerja dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah Tingkat Kesempatan Kerja.

Kesempatan Kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Untuk mengetahui Tingkat Kesempatan kerja dengan membandingkan penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikalikan 100% (BPS).

Tabel 3. Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	93,90	93,95	94,77	94,39	95,00	95,04	100,04%	96,00

Pada tahun 2024 target Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 95,00%, dengan realisasi kinerja sebesar 95,04%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,4%(sangat tinggi) serta meningkat sebesar 0,65% dibandingkan tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berhasil meningkatkan angka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk menghitung Tingkat Kesempatan Kerja, maka harus ada data angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja. Perhitungan tersebut berasal dari jumlah orang yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Berikut ini adalah data ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Tabel 4. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	350.451	248.215	598.666
- Bekerja	328.427	240.526	568.953
- Pengangguran Terbuka	22.024	7.689	29.713
Bukan Angkatan Kerja	54.775	150.502	205.277
Total	405.226	398.717	803.943
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,28%	3,10%	4,96%
Tingkat Kesempatan Kerja	93,72%	96,90%	95,04%

Dalam usaha meningkatkan penempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja menetapkan sasaran meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi melalui pembuatan kartu Ak1, pelayanan penempatan (AKL, AKA, AKAD), pelatihan bagi pencari kerja dan sosialisasi tentang ketenagakerjaan pada masyarakat.

Tabel 5. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Penempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	2.799	6.633	6.134	4.023	6.885	6.984	101,47%	8.320

Pada tahun 2024 target Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan sebesar 6.885 orang dengan realisasi kinerja sebesar 6.984 orang,

sehingga capaian kinerja sebesar 101,47%(sangat tinggi) serta meningkat sebesar 2.961 orang dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan permintaan tenaga kerja meningkat dengan dibukanya beberapa perusahaan baru yang membutuhkan karyawan. Untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

BULAN	PENCAKER		
	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L + P</i>
JANUARI	184	278	462
FEBRUARI	129	176	305
MARET	129	166	295
APRIL	275	611	886
MEI	739	1,102	1,841
JUNI	477	595	1,072
JULI	456	492	948
AGUSTUS	279	273	552
SEPTEMBER	218	309	527
OKTOBER	180	324	504
NOPEMBER	176	300	476
DESEMBER	123	224	347
JUMLAH	3,365	4,850	8,215

Sesuai tabel di atas pada bulan Mei dan Juni tercatat paling banyak tenaga kerja yang terdaftar, hal ini dikarenakan banyak pelajar yang lulus sekolah dan mencari pekerjaan.

Tabel 7. Jumlah Tenaga Yang Ditempatkan Tahun 2024

NO.	BULAN	PENEMPATAN TERDAFTAR BULAN INI		
		L	P	JML
1	JANUARI	8	101	109
2	FEBRUARI	60	119	179
3	MARET	43	142	185
4	APRIL	172	251	423
5	MEI	162	698	860
6	JUNI	512	2,633	3,145
7	JULI	127	726	853
8	AGUSTUS	13	99	112
9	SEPTEMBER	8	33	41
10	OKTOBER	13	24	37
11	NOPEMBER	97	132	229
12	DESEMBER	153	658	811
	J U M L A H	1,368	5,616	6,984

Sesuai tabel di atas pada bulan Juni tercatat paling banyak tenaga kerja ditempatkan, hal ini dikarenakan adanya perusahaan baru yang membuka lowongan pekerjaan. Selain itu, tenaga kerja perempuan lebih banyak yang ditempatkan dari pada laki-laki.

Tabel 8. Data Pencari Kerja yang sudah Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Kode	I . Tingkat Pendidikan Pencari Kerja yg ditempatkan	Jenis Antar Kerja						Jumlah	
		AKL		AKAD		AKAN			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TIDAK TAMAT SD	-	-	-	-	3	4	3	4
2	SD	34	171	3	-	14	51	51	222
3	SLTP	247	1,304	7	1	40	110	294	1,415
4	SLTA	929	3,684	2	2	27	80	958	3,766
5	D I / D II	15	43	-	-	-	2	15	45
6	Sarjana Muda / D III	20	72	-	-	-	-	20	72
7	Sarjana Lengkap	26	92	-	-	1	-	27	92
	TOTAL	1,271	5,366	12	3	85	247	1,368	5,616

Pencari kerja yang sudah bekerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2024 terbanyak adalah lulusan SLTA mencapai 4.766 orang yang terdiri dari 958 orang laki-laki dan 3.766 orang perempuan. Sedangkan yang berpendidikan tinggi Diploma I keatas masih kecil sebanyak 271 orang atau 3,88%. Penempatan kerja terbanyak melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal) sebanyak 6.637 orang atau 95,03% dari semua mekanisme penempatan.

B. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk melihat jalannya hubungan industrial yang harmonis dapat dihitung dengan prsentase perselisihan yang terselesaikan. Pada tahun 2024 persentase angka perselisihan yang terselesaikan mencapai 100 persen. Hal ini dapat dihitung dengan membagi jumlah perselisihan yang dapat terselesaikan dibagi jumlah perselisihan dikalikan seratus persen. Jumlah

perselisihan yang dapat diselesaikan sebanyak 8 (delapan) perselisihan dan jumlah perselisihan sebanyak 8 (delapan) penyelesaian, sehingga persentase perselisihan yang terselesaikan sebanyak 100 persen.

Tabel 9 . Capaian Persentase Angka Perselisihan yang Terselesaikan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase angka perselisihan yang terselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NA

Tabel 10. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Perselisihan	Jumlah Perselisihan yang Terselesaikan
1	2020	10	10
2	2021	5	5
3	2022	6	6
4	2023	4	4
5	2024	8	8

Pada tahun 2024 target persentase angka perselisihan yang terselesaikan sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%(sangat tinggi). Nilai ini sama dengan persentase angka perselisihan yang terselesaikan pada tahun 2023, bahkan dari tahun 2020. Hal ini menandakan Dinas Tenaga Kerja berhasil menyelesaikan perselisihan di tingkat kabupaten, sehingga tidak perlu naik ke provinsi.

Tabel 11. Perselisihan Perusahaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Pihak Perusahaan/ Pengusaha	Pihak Pekerja	Jenis PHI	Keterangan
1	PT. Sung Chang Indonesia	Sadin Kismo Wardoy	PHK	PB
2	PT. Sung Shin International	SP PT SSI (kuasa 50 pekerja)	PHK	PB
3	PT. Royal Korindah	Okto Maryanto	PHK	PB

		Satria Wahyu Ramadhan		
4	PT. Hyung Sung Indonesia	Rizki Abdillah Anisa zahroh William Arif Wahyu Diono	PHK	PB
5	PT. Sung Shin International	Aan Sunanto	PHK	PB
6	PT. Tressindo Abadi Cemerlang	Karyawan PT. Tressindo Abdi Cemerlang (126 orang)	Perselisihan Hak Upah	Ajuran
7	PT. FIF	Alfin Dendrianto	PHK	PB
8	PT. Tiga Putra Abadi Perkasa	4 pekerja	PHK	PB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga maka dirumuskan dalam rencana program dan kegiatan yang mengacu pada permasalahan yang ada. Permasalahan atau isu strategis Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga adalah menyangkut pengangguran di Kabupaten Purbalingga.

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu pengangur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 berdasarkan data

BPS angka TPT masih tinggi yaitu 4,96 %.

Secara umum banyaknya pengangur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Sehingga kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan UPTD Balai latihan Kerja (BLK) yang berorientasi pada pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

Permasalahan terkait ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja belum optimal,

Masalah pokok yaitu :

- a. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran
- b. Terbatasnya lapangan kerja yang menampung tenaga kerja laki-laki, sedangkan permintaan tenaga kerja lebih banyak yang perempuan;
- c. Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- d. Dampak ekonomi global yang berakibat pada pengangguran produksi sehingga berdampak pada pengurangan pekerja;

2. Masih ditemukannya kasus perselisihan hubungan industrial,

Masalah pokok yaitu perselisihan hak pekerja dengan pengusaha.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana daerah, pendanaan dan dan prakiraan maju. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber

dari APBN, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja kabupaten Purbalingga.

Tabel 12.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Tenaga kerja Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TENAGA KERJA					6.704.875.000	TENAGA KERJA					6.704.875.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Purbalingga	Persentase Temuan lembaga Pengawas Yang ditindaklanjuti	Angka	100	5.260.558.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Purbalingga	Persentase Temuan lembaga Pengawas Yang ditindaklanjuti	Angka	100	5.260.558.000
1)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100	2.568.000	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100	2.568.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	9	1.430.000	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	9	1.430.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Laporan	9	1.138.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Laporan	9	1.138.000
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	3.968.690.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	3.968.690.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	26	3.911.346.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	26	3.911.346.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	16.624.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	16.624.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	40.680.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	40.680.000
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	6.940.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	6.940.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap	12	6.940.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap	12	6.940.000
4)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	persen	100	5.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	persen	100	5.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	5	5.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	5	5.000.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	persen	100	38.747.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	persen	100	38.747.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	19.139.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	19.139.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	dok	6	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	dok	6	1.000.000
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	2.400.000	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	2.400.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	6.680.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	6.680.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	dok	12	4.528.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	dok	12	4.528.000
6)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	1.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	1.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purbalingga	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Buah	1	1.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purbalingga	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Buah	12	1.000.000
6)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	persen	100	899.876.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	persen	100	899.876.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	12	600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	12	600.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	194.584.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	194.584.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	12	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	12	1.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	12	703.692.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	12	703.692.000
7)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	337.777.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	337.777.000
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29	147.777.000	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29	147.777.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	5.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	185.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	185.000.000

Rancangan Awal RKP							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	5.094.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	5.094.000
8)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Purbalingga	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	dokumen	1	5.094.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Purbalingga	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	dokumen	1	5.094.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Purbalingga	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku	1	5.094.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Purbalingga	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku	1	5.094.000
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,86	901.930.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,86	901.930.000
9)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Purbalingga	Jumlah paket pelatihan	paket	20	900.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Purbalingga	Jumlah paket pelatihan	paket	20	900.500.000
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	360	900.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	360	900.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Purbalingga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	lembaga	5	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Purbalingga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	lembaga	5	500.000
10)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Purbalingga	Persentase LPKS yang Terakreditasi	persen	100	1.430.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Purbalingga	Persentase LPKS yang Terakreditasi	persen	100	1.430.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Purbalingga	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	8	1.430.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Purbalingga	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	8	1.430.000
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	50,23	58.024.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	50,23	58.024.000
11)	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKA	persen	100	58.024.000	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKA	persen	100	58.024.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKA	orang	200	58.024.000	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan	orang	200	58.024.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Purbalingga	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	persen	87	474.638.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Purbalingga	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	persen	87	474.638.000
12)	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Purbalingga	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	persen	100	474.638.000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Purbalingga	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	persen	100	474.638.000
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perselisihan yang dicegah	perkara	5	12.765.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perselisihan yang dicegah	perkara	5	12.765.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	5	10.610.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	5	10.610.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Purbalingga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2164	451.263.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Purbalingga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2164	451.263.000
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Purbalingga	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	3	4.631.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Purbalingga	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	3	4.631.000
13)	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen	100	4.631.000	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen	100	4.631.000
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Purbalingga	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK	3	4.631.000	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Purbalingga	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK	3	4.631.000

Tabel 13.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan Anggaran Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD							Anggaran Tahun 2025 2025					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TENAGA KERJA					6.704.875.000	TENAGA KERJA					6.698.347.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Purbalingga	Persentase Temuan lembaga Pengawas Yang ditindaklanjuti	Angka	100	5.260.558.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Purbalingga	Persentase Temuan lembaga Pengawas Yang ditindaklanjuti	Angka	100	4.918.177.000
1)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100	2.568.000	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100	2.568.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	9	1.430.000	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	9	1.430.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Laporan	9	1.138.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Laporan	9	1.138.000
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	3.968.650.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	3.641.469.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	26	3.911.346.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	26	3.584.165.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	16.624.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	16.624.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	40.680.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	40.680.000
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	6.940.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	6.940.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap	12	6.940.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lap	12	6.940.000
4)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	persen	100	5.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	persen	100	660.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	5	5.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	5	660.000

	Rancangan Awal RKPD						Anggaran Tahun 2025					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	persen	100	38.747.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	persen	100	38.747.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	19.139.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	19.139.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	dok	6	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	dok	6	1.000.000
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	2.400.000	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	2.400.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	6.680.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	12	6.680.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	dok	12	4.528.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	dok	12	4.528.000
6)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	1.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	1.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purbalingga	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Buah	1	1.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purbalingga	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Buah	12	1.000.000
7)	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Jasa Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	persen	100	899.876.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Jasa Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	persen	100	884.676.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	12	600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	12	600.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	194.584.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	194.584.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	12	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	12	1.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	12	703.692.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	12	688.492.000
8)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	337.777.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen	100	342.117.000
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29	147.777.000	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29	147.777.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	9.340.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	185.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	185.000.000

Rancangan Awal RKPD							Anggaran Tahun 2025					
No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	5.094.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	2.169.000
9)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Purbalingga	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	dokumen	1	5.094.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Purbalingga	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	dokumen	1	2.169.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Purbalingga	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku	1	5.094.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Purbalingga	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku	1	2.169.000
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,86	901.930.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,86	945.339.000
10)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Purbalingga	Jumlah paket pelatihan	paket	20	900.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Purbalingga	Jumlah paket pelatihan	paket	20	943.909.000
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	360	900.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	360	943.409.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Purbalingga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	lembaga	5	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Purbalingga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	lembaga	5	500.000
11)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Purbalingga	Persentase LPKS yang Terakreditasi	persen	100	1.430.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Purbalingga	Persentase LPKS yang Terakreditasi	persen	100	1.430.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Purbalingga	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	8	1.430.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Purbalingga	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	8	1.430.000
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	50,23	58.024.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Purbalingga	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	50,23	358.024.000
12)	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	persen	100	58.024.000	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	persen	100	58.024.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	orang	200	58.024.000	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	orang	200	58.024.000
13)							Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Purbalingga	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job	orang	500	300.000.000
							Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Purbalingga	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job	orang	500	300.000.000

Rancangan Awal RKPD							Anggaran Tahun 2025					
No	Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Purbalingga	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	persen	87	474.638.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Purbalingga	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	persen	87	474.638.000
14)	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Purbalingga	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	persen	100	474.638.000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Purbalingga	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	persen	100	474.638.000
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perselisihan yang dicegah	perkara	5	12.765.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perselisihan yang dicegah	perkara	5	12.765.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	5	10.610.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Purbalingga	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	5	10.610.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Purbalingga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2164	451.263.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Purbalingga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2164	451.263.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Purbalingga	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	3	4.631.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Purbalingga	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK		-
	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen	100	4.631.000	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen		-
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Purbalingga	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK	3	4.631.000	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Purbalingga	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK		-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap tahun Dinas Tenaga Kerja mendapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbangcam. Pada tahun 2025 terdapat 16 (enam belas) usulan dari masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja, usulan tersebut menginginkan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Tabel 14. Usulan Program dari Masyarakat Tahun 2026

No.	Desa	Kecamatan	Usulan	Masalah
1	Majapura	Bobotsari	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	Masih kurangnya SDM
2	Langkap	Kertanegara	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	masih banyak anak muda yang belum mempunyai ketrampilan berwirausaha
3	Pekalongan	Bojongsari	Pelatihan ketrampilan di BLK	Pelatihan sistem informasi desa (SID) perlu dilaksanakan karena banyak yang belum paham tentang hal ini.
4	Karangnangka	Bukateja	Pelatihan ketrampilan di BLK	pemuda pemudi butuh ketrampilan perbengkelan dan lain-lain
5	Pekalongan	Bojongsari	Pelatihan ketrampilan di BLK	Teknologi yang maju di haruskan selaras dengan kondisi SDM di Desa Pekalongan, sehingga pelatihan komputer perlu di adakan khususnya untuk menunjang keterampilan dunia kerja masyarakat desa pekalongan.
6	Pekalongan	Bojongsari	Pelatihan ketrampilan di BLK	Usaha yang baik, perlu ditunjang dengan keterampilan dalam hal advertising/periklanan di media sosial, dalam bentuk pembuatan website atau toko daring tentang produk yang di perjual belikan.
7	Kasih	Kertanegara	Pelatihan ketrampilan di BLK	Masih kurang nya ketrampilan para pemuda di bidang perbengkelan dan pertukangan.
8	Kedungwuluh	Kalimanan	Pelatihan ketrampilan di BLK	elatihan keterampilan di BLK Perbengkelan untuk warga Desa Kedungwuluh sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan dalam bidang perbengkelan, sehingga warga dapat lebih mandiri dan produktif. Dengan pelatihan ini, diharapkan warga dapat membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor perbengkelan, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian desa.
9	Bedagas	Pengadegan	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	Kurangnya tenaga profesional
10	Pasunggingan	Pengadegan	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	SDM Masyarakat relatif rendah
11	Kajongan	Bojongsari	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	untuk meningkatkan kemampuan berwira usaha
12	Karangreja	Karangreja	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	Banyaknya pelajar yg lulus sekolah SMA ingin kursus
13	Selakambang	Kaligondang	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	Banyaknya Pengangguran khususnya bagi remaja laki-laki pasca sekolah , Remaja membutuhkan pelatihan / Kursus agar tidak bergantung kepada sektor pekerjaan PT, Pelatihan yang diharapkan agar pemuda bisa mandiri membuka usaha
14	Gumiwang	Kejobong	Pelatihan ketrampilan di BLK	Keterbatasan warga untuk keterampilan menjahit
15	Kejobong	Kejobong	Pelatihan ketrampilan di BLK	anak anak lulusan sekolah belum siap kerja
16	Palumbungan	Bobotsari	Pelatihan ketrampilan di BLK	Untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja dan Pengangguran diperlukan adanya Pelatihan Perbengkelan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketenagakerjaan dalam Visi Indonesia Emas 2045 memiliki peran yang sangat strategis, karena menjadi satu dari lima sasaran pembangunan, yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Sasaran pembangunan Indonesia ke depan dirancang melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan nasional. Delapan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen visi Indonesia emas 2045 adalah:

- i. Transformasi Sosial
- ii. Transformasi Ekonomi
- iii. Transformasi Tata Kelola
- iv. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- v. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- vi. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- vii. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- viii. Kestinambungan Pembangunan

Aspek ketenagakerjaan setidaknya tercakup dalam dua misi pembangunan nasional di masa depan, yaitu transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Dalam transformasi sosial memiliki tiga arah tujuan pembangunan yang mencakup indikator kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif. Satu indikator dalam transformasi ekonomi yang memiliki kaitan erat dengan ketenagakerjaan adalah indikator ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan produktivitas ekonomi. Setidaknya terdapat empat arah tujuan pembangunan di masa mendatang yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam proses pembangunan nasional. Bidang ketenagakerjaan menjadi penerima estafet dari proses pendidik SDM yang diampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanggung jawab untuk menciptakan pasar kerja yang kondusif. Sementara, dari sisi kebutuhan tenaga kerja merupakan ranah dari

pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang dibutuhkan tentu berkaitan dengan banyak hal, termasuk negosiasi dalam investasi pembangunan ekonomi.

Tantangan ketenagakerjaan akan semakin berat mengingat pertumbuhan penduduk usia lanjut yang diperkirakan akan semakin meningkat. Penduduk lansia di masa mendatang akan tetap produktif pada masa tuanya dan diperkirakan derajat kesehatannya semakin membaik dibandingkan lansias pada generasi sebelumnya. Tantangan serius yang akan dihadapi dalam pembangunan tenaga kerja di masa mendatang adalah kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, produktivitas yang masih rendah, ketimpangan pendapatan dan disparitas antar wilayah yang belum merata, serta pergeseran ekonomi global yang mengakibatkan kerentanan perdagangan dan keuangan di tingkat global dan regional. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan upaya peningkatan ekonomi hijau juga akan menjadi permasalahan ekonomi masa mendatang.

Arah pembangunan ekonomi yang mengalami perubahan dan percepatan didukung dengan perkembangan teknologi digital serta otomatisasi membutuhkan penyesuaian strategi dalam pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 pada misi ke 1 yaitu Bangkitkan Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian. Salah satu tujuan dari misi ke 1 yang erat kaitannya dengan ketenagakerjaan adalah menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pada RPJMD 2025-2029, disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Ketenagakerjaan termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran investasi atau penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran investasi atau penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan ketenagakerjaan merupakan bagian dari Misi ke-1 yaitu Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM. eksisting saja namun juga dapat menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif. Dinas Tenaga kerja Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah yang ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-1 yaitu Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM. Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang dapat didukung pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi OPD di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mempunyai tujuan “Meningkatnya Kesempatan dan Hubungan Industrial yang Harmonis “.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kesempatan kerja;
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu ditemukan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

a. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan pada Tahun 2030 sebesar 4,26-3,92 %;

b. Tingkat Kesempatan Kerja

Nilai Tingkat Kesempatan Kerja yang ditargetkan pada Tahun 2030 sebesar 96,30 %;

c. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata kelola Kerja yang Layak

Nilai persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata kelola Kerja yang Layak ditargetkan pada Tahun 2030 sebesar 100 %;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

Berdasarkan anggaran perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga tahun 2025 terdapat anggaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Perubahan 2025 (Rp)	Usulan Anggaran 2026	+/-
1	Belanja	6.698.347.000	6.704.875.000	6.528.000
	- Langsung	6.698.347.000	6.704.875.000	6.528.000

Secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan Anggaran Belanja Dinas Tenaga kerja adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2025

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 Keg	4.918.177.000
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Keg	2.169.000
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2 Keg	945.339.000
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1 Keg	358.024.000
5.	Program Hubungan Industrial	2 Keg	474.638.000
6.	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	1 Keg	0
Jumlah		14 Keg	6.674.971.000

Tabel 13.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7				
	TENAGA KERJA					6.704.875.000				6.777.420.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan Lembaga Pengawas Yang Ditindaklanjuti	Purbalingga	Angka	100	5.260.558.000		Terlaksananya Temuan Lembaga Pengawas Yang Ditindaklanjuti	100	5.289.227.000
1)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	Purbalingga	persen	100	2.568.000		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100	3.000.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Purbalingga	dokumen	9	1.430.000	APBD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	9	1.500.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Purbalingga	Laporan	9	1.138.000	APBD	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	9	1.500.000
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Purbalingga	persen	100	3.968.650.000		Terselesainya administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.982.026.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Purbalingga	orang	26	3.911.346.000	APBD	Terlaksananya ASN yang menerima gaji dan tunjangan	26	3.911.346.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Purbalingga	dok	12	16.624.000	APBD	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	30.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	dok	12	40.680.000	APBD	Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	40.680.000
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Purbalingga	persen	100	6.940.000		Terlaksananya barang milik daerah yang terpelihara	100	6.940.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Lap	12	6.940.000	APBD	Terlaksananya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	6.940.000

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7				
4)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	Purbalingga	persen	100	5.000.000		Terlaksananya pegawai yang mendapat pelatihan	100	5.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	Purbalingga	orang	5	5.000.000	APBD	Terlaksananya pegawai yang mendapat pelatihan	5	5.000.000
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Purbalingga	persen	100	38.747.000		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100	44.608.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Purbalingga	paket	1	5.000.000	APBD	Terlaksananya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	5.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Purbalingga	paket	1	19.139.000	APBD	Tersedianya paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	25.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	Purbalingga	dok	6	1.000.000	APBD	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	6	1.000.000
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Lap	12	2.400.000	APBD	Tersedianya laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	2.400.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Lap	12	6.680.000	APBD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	6.680.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	Purbalingga	dok	12	4.528.000	APBD	Tersedianya dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	12	4.528.000
6)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	persen	100	1.000.000		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	10.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purbalingga	Buah	1	1.000.000	APBD	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1	10.000.000

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7				
7)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Purbalingga	persen	100	899.876.000		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	899.876.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Lap	12	600.000	APBD	Tersedianya laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	600.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Purbalingga	Lap	12	194.584.000	APBD	Terlaksananya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	194.584.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Purbalingga	Lap	12	1.000.000	APBD	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	1.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Purbalingga	Lap	12	703.692.000	APBD	Terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	703.692.000
8)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Purbalingga	persen	100	337.777.000		Terlaksananya barang milik daerah yang terpelihara	100	337.777.000
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Purbalingga	unit	29	147.777.000	APBD	Terlaksananya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	147.777.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	paket	1	5.000.000	APBD	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	5.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Purbalingga	unit	1	185.000.000	APBD	Terlaksananya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	185.000.000

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7				
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	Purbalingga	persen	100	5.094.000		Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	100	20.000.000
9)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	Purbalingga	dokumen	1	5.094.000		Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja tersusun	1	20.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Purbalingga	Buku	1	5.094.000	APBD	Tersedianya buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	1	20.000.000
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Purbalingga	persen	3,86	901.930.000		Tercapainya pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	3,86	901.930.000
10)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan	Purbalingga	paket	20	900.500.000		Tersedianya Jumlah paket pelat	20	900.500.000
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Purbalingga	orang	360	900.000.000	APBD	Terlaksananya tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	360	900.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	Purbalingga	lembaga	5	500.000	APBD	Tersusunnya Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan produktivitas	5	500.000
11)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Presentase LPKS yang Terakreditasi	Purbalingga	persen	100	1.430.000		Terlaksananya LPKS yang Terakreditasi	100	1.430.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	Purbalingga	LPKS	8	1.430.000	APBD	Terlaksananya LPKS yang dibina	8	1.430.000

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7				
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	Purbalingga	persen	50,23	58.024.000		Terpenuhinya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	50,23	75.000.000
12)	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	Purbalingga	persen	100	58.024.000		Terpenuhinya tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD dan AKAN	100	75.000.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD	Purbalingga	orang	200	58.024.000	APBD	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKL, AKAD	200	75.000.000
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	Purbalingga	persen	87	474.638.000		Tercapainya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	87	491.263.000
13)	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Pembinaan ke Perusahaan	Purbalingga	persen	100	474.638.000		Terlaksananya Pembinaan ke Perusahaan	100	491.263.000
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	Purbalingga	perkara	5	12.765.000	APBD	Terlaksananya perselisihan yang dicegah	5	25.000.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Purbalingga	perkara	5	10.610.000	APBD	Terlaksananya perkara perselisihan yang terselesaikan	5	15.000.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Purbalingga	orang	2164	451.263.000	APBD	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2164	451.263.000
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Purbalingga	KK	3	4.631.000		Terlaksananya transmigran yang ditempatkan	3	20.000.000
14)	Kegiatan Penataan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Purbalingga	Persen	100	4.631.000		Terlaksananya calon transmigran yang difasilitasi	100	20.000.000
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Purbalingga	KK	3	4.631.000	APBD	Terlaksananya transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3	20.000.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	95 %
		Meningkatkan penempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	6.995
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Orang	430
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis		Persentase angka perselisihan yang terselesaikan	Persen	100 %
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase pekerja yang mendapat program BPJS Ketenagakerjaan	Persen	88,45 %
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINNAKER		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	46
		Meningkatnya implementasi SAKIP Dinnaker	Nilai SAKIP DINNAKER	Angka	73,70

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketenagakerjaan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga


YANI SUTRISNO UDHINUGROHO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 198603 1 028

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KECAMATAN KARANGREJA**

Jalan Raya Karangreja No. ☎ (0281) 7700135

PURBALINGGA 53358

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Perubahan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2021- 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangreja disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Karangreja di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Karangreja. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Karangreja pada tahun-tahun yang akan datang.

Karangreja, 30 Juni 2025
CAMAT KARANGREJA



SUPRIYANTI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700407 198903 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2022	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja	57
3.3. Program dan Kegiatan	60
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA	
	64
BAB V. PENUTUP	
	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangreja menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya.

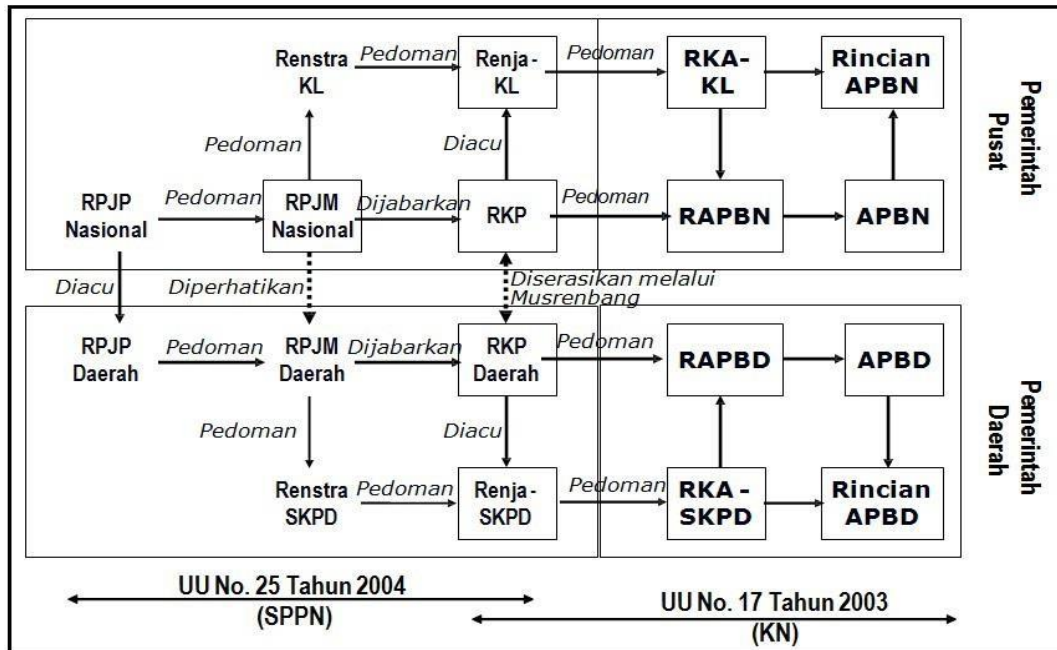
Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Karangreja dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas/fungsi Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangreja

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran

- Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
 36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangreja Tahun 2025.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TW I Sampai April 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 – 2026;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja;
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangreja

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TW I Sampai April 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangreja merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Karangreja, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Karangreja tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja tahun 2025 dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) s/d Tahun 2023
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%	100%	100%
7	011	2	01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%	100%	100%
7	011	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	NA	NA	100	100	100%	100%	100%
7	011	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	NA	NA	100	100	100%	100%	100%

7	0 1	0 1	2	0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%
7	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	3,1	4,8	155%	3,4	100%	100%
7	0 2	0 2	2	0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	4 dokumen	4	100%	4 dokumen	100%	100%
7	0 2	0 2	2	0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	NA	NA	16 jenis	16	100%	16 jenis	100%	100%
7	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	97,96	98%	100%	100%	100%
7	0 3	0 3	2	0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	NA	NA	5 kegiatan	5	100%	5 kegiatan	100%	100%
7	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	7	58%	12 dokumen	100%	100%
7	0 4	0 4	2	0 3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	NA	NA	12 kegiatan	12	100%	12 kegiatan	100%	100%

						dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum								
7	0 5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 5	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 6	0 6	2	0 1		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen	100%	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan belum semua terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangreja. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangreja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangreja meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	s.d TW I Tahun 2025		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Laporan	12	12	3	25%
2	Persentase potensi konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Persen	75 %	50 %	20 %	40%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas

- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan
- b. Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	s.d TW I Tahun 2025		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	75%	50%	20%	40%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara berkala;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 7(tujuh) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten

- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2.4
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Karangreja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2025)	Realisasi Pada Triwulan I (TAHUN 2025)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	90	86,56				
2	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	angka	34					
B	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	90	86,56				
2	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	64					
C	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	25				25
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	25				25
3	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	25				25
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	25				25
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	61				61

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2025)	Realisasi Pada Triwulan I (TAHUN 2025)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	25				25
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,10 – 5,00					
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	100	100				100
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1	Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	laporan	12	3				3
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1	Persentase potensi konflik yang tertangani	persen	100	100				100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	persen	50	20				20

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karangreja, antara lain :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) revidi dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
NILAI SAKIP KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	20,10
Pengukuran Kinerja	12,90
Pelaporan Kinerja	6,30
Evaluasi Internal	12,75
NILAI TOTAL	52,06

Sumber : Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.2

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
KARANGREJA	3303102007	GONDANG	0,84	0,6	0,9333	0,7911	MAJU
KARANGREJA	3303102006	KARANGREJA	0,88	0,8833	0,8	0,8544	MANDIRI
KARANGREJA	3303102002	KUTABAWA	0,72	0,85	0,8667	0,8122	MAJU
KARANGREJA	3303102001	SERANG	0,9943	1	1	0,9981	MANDIRI
KARANGREJA	3303102003	SIWARAK	0,7314	0,5667	0,8667	0,7216	MAJU
KARANGREJA	3303102005	TLAHAB KIDUL	0,8686	0,8167	0,6667	0,784	MAJU
KARANGREJA	3303102004	TLAHAB LOR	0,9029	0,7667	0,7333	0,801	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2023

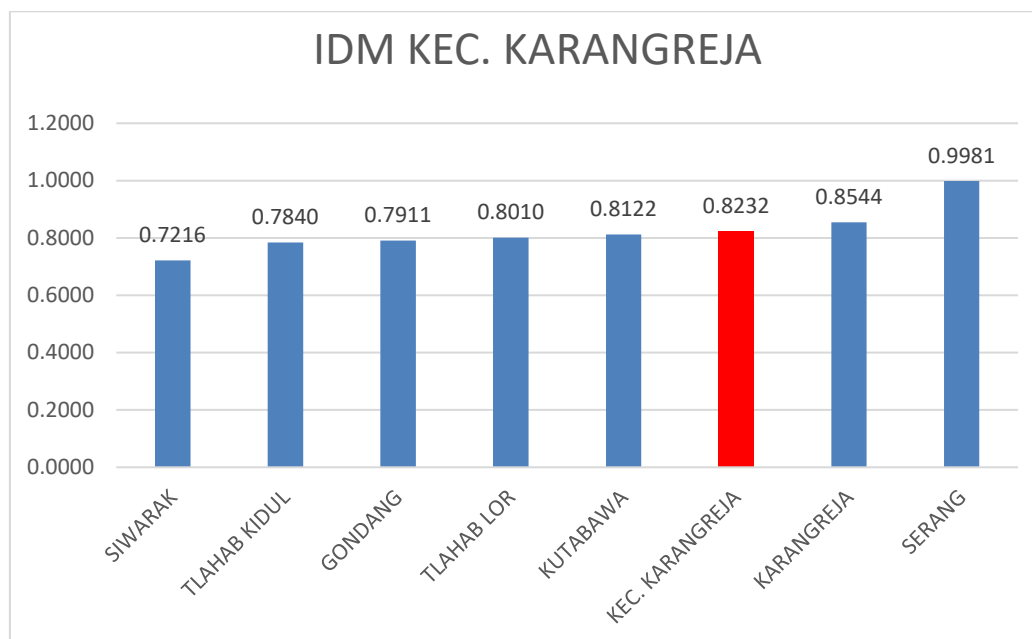
Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Kutabawa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Tlahab Kidul.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Serang, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Serang, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Serang.

Terdapat 2 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Serang dan Desa Karangreja, dan 5 desa dengan status maju.

Gambar 3.2

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Karangreja Tahun 2023



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Siwarak, Desa Tlahab Kidul, Desa Gondang, Desa Tlahab Lor dan Desa Kutabawa. Sementara 2 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Serang dan Desa Karangreja.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi,

Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Karangreja memiliki 3 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

PROFIL BUMDES KECAMATAN KARANGREJA

TAHUN 2023

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bintang Persadi	Kecamatan Karangreja	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Karangreja
2.	Maju Berkah	Jl. Raya Karangreja rt. 01 rw. 04 Karangreja	- Jasa internet : jasa internet - Jasa : jasa pengelolaan pasar - Wisata : jasa pariwisata - Air bersih : air bersih - Jasa : jasa sewa gantangan burung - Pengelolaan sampah	Maju	Karangreja
3.	Ngudi Rejo	Desa Tlahab Kidul	- Air bersih : pengelolaan air bersih - Persewaan : sewa peralatan - Wisata : wisata	Tumbuh	Tlahab Kidul, Karangreja
4.	Serang Makmur Sejahtera	Serang	- Pariwisata - air bersih - simpan pinjam - pertanian - peternakan	Maju	Serang

5.	Makmur	Tlahab Lor	- air bersih - internet - pengelolaan sampah - kios desa (sewa)	Berkembang	Tlahab Lor
6.	Lawa Mas	Siwarak	- air bersih - internet - pengelolaan sampah	Tumbuh	Siwarak
7.	Mitra Raharja	Kutabawa	- Agrobisnis - Perdagangan - Pengelolaan sampah - Pertanian	Tumbuh	Kutabawa
8.	Ngudi Makmur	Gondang	- air bersih - sewa jenset - pertanian	Tumbuh	Gondang

4. Stunting

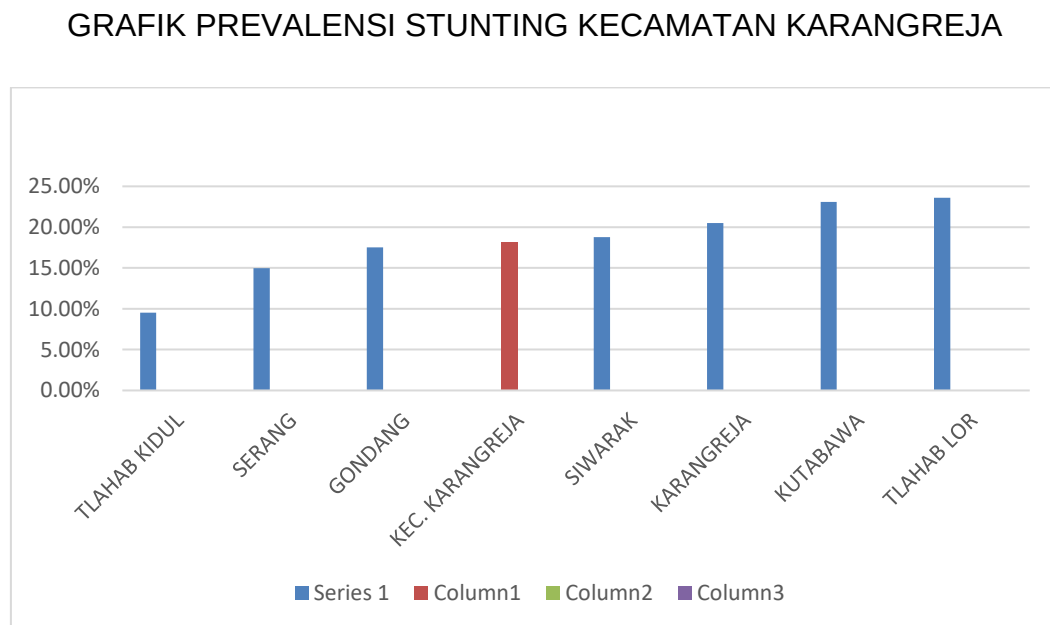
Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel 3.4

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KARANGREJA	2368	103	329	432	18,24%
GONDANG	285	11	39	50	17,54%
KARANGREJA	156	7	25	32	20,51%
KUTABAWA	264	10	51	61	23,11%
SERANG	561	19	65	84	14,97%
SIWARAK	378	16	55	71	18,78%
TLAHAB KIDUL	262	4	21	25	9,54%
TLAHAB LOR	462	36	73	109	23,59%

Gambar 3.3



Gambar 2.x

XXXXXXX

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja, Desa Siwarak, dan Desa Kutabawa

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;

3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
 4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
 6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Karangreja untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel 3.5
TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA
1	KARANGREJA	GONDANG
2	KARANGREJA	SIWARAK
3	KARANGREJA	TLAHAB LOR

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin)

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
74	165	205

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
79	115	221

Pada Kecamatan Karangreja terdapat 74 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 165 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 205 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 79 anak, SMP/SMPLB sejumlah 115 anak, SMA/SMALB sejumlah 221 anak.

2.4. Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- Program prioritas pembangunan daerah dan
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangreja. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Karangreja yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Karangreja sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangreja baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.705.717	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.614.098	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	10.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	7.124	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5.310	Efisiensi ATK, Kertas, Perjadin
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.814	Efisiensi ATK, Kertas, Perjadin
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.441.016	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.359.710	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	1.425.956	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	1.344.860	Gaji dan Tunj
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	900	ATK, Perjadin
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	14.160	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	13.950	honor pengelola keu, atk

			SKPD					SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD/persentase pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	12 laporan	1.440	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD/persentase pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	12 laporan	1.140	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.440	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.140	Honor pengurus barang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah kegiatan administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	28.735	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah kegiatan administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	22.598	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.056	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.056	kabel, lampu dll
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.499	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13.382	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200	langganan koran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	2.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.160	makan minum rapat
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	5.280	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	3.300	honor opr
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	25.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	25.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	25.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	25.000	printer dan scanner
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	83.526	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	72.990	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	19.530	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	16.800	listrik, internet
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	63.996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	56.190	Honor THL (1 S1, 1 SLTA), iuran Jamkes, Jkk, JKM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	22 unit	116.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	22 unit	125.536	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	79.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	79.000	BBM Kend dinas, pemel kend dinas, pajak dll
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.000	Alat/bahan komputer, pemel komputer, laptop, printer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	30.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	39.536	Pemel bangunan kantor dan lainnya, pengecatan, perbaikan pendopo dll
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangreja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	9.144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangreja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	7.340	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100%	8.504	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100%	7.020	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	8.504	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	7.020	ATK, Kertas, bahan komp, makmin rapat, perjadin
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangreja	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	100%	640	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangreja	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	1	320	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	17 dokumen	640	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	17 dokumen	320	kertas
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangreja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100%	25.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangreja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	1	18.141	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	7 lembaga kemasyarakatan	25.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	7 lembaga kemasyarakatan	18.141	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	5.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	4.191	ATK, bahan komp, makmin rapat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	13.950	makmin, perjadin, pkk,
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	33.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	32.200	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 kegiatan	33.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 kegiatan	32.200	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	24.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	22.200	ATK, makmin rapat, honor forkopimcam
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	10.000	makmin rapat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangreja	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	30.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangreja	Persentase potensi konflik yang tertangani	1	26.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 laporan	30.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 laporan	26.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang	30.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang	26.000	ATK, kaos paskibra dll, makmin, honorarium, sewa
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	50%	15.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	50%	3.960	
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan desa yang dibina oleh kecamatan	100%	15.000	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan desa yang dibina oleh kecamatan	100%	3.960	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	14.950	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	3.910	ATK, makmin, honorarium, perjadi
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa Tlahab Kidul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	50	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa Tlahab Kidul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	50	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Perubahan Kecamatan Karangreja juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri***

dan Sejahtera”. maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu Kecamatan Karangreja Tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGREJA

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA
1	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa Fasilitas publik seperti Balai Desa di Desa Gondang masih jauh dari kata layak, karena sudah rusak berat di bagian atap dan lainnya	Jl. Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
2	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Terjadinya Disintegrasi tanah yang longsor di area makam Desa Gondang, karena belum tersedianya Talud Aliran Sungai	Gondang RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
3	Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SMP/MTs	Belum Tersedianya ruang kelas baru bagi siswa MTs Ma'arif NU Gondang, Karena seharusnya sudah Paralel Kelas dari kelas VII sampai dengan kelas IX	Jl. Gondang-Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
4	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Air Meluap ke Jalan Kabupaten Depan Balai Desa, mengakibatkan Batu dan Sampah meluap ke jalan bahkan ke rumah Warga	Jl. Gondang- Sirandu, Kab. Purbalingga	Gondang
5	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Rusak dan susah dilalui	Gondang RT 006 RW 001, Kab. Purbalingga	Gondang
6	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Masih banyaknya Potensi Rumput untuk Budidaya Kambing	Jl Gondang - Sirandu, Kab. Purbalingga	Gondang
7	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Potensi Olahraga Desa yang luarbiasa, tapi kurangnya Fasilitas Olahraga yang memadai	Waringin Kembar, Kab. Purbalingga	Gondang

8	Penanganan persampahan skala desa	Belum Tersediannya Tempat Pembuangan Akhir Sampah mengakibatkan warga membuang sampah ke sungai dan kali disekitar wilayah2 yang rawan erosi	Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
9	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Saluran drainase yang ada sudah tidak layak, karena banyak yang rusak dan tidak bisa menampung debit air secara maksimal	Dusun II Adireja Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
10	Pelatihan pengelolaan persampahan	Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang penanganan sampah	Dusun III Penariban, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
11	Penanganan persampahan skala desa	Tidak memiliki alat pengolahan sampah yang memadai	Dusun III Penariban, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
12	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya alat pertanian yang memadai	Desa Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor

13	Penanganan persampahan skala desa	Pengelolaan yang belum efisien	Dusun II Rt 01 Rw 04, Kab. Purbalingga	Karangreja
14	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih ada rumah warga yang belum layak	Dusun I RT 01 Rw 03 dan Rt 03 Rw 01, Kab. Purbalingga	Karangreja
15	Pembangunan jalan kabupaten	Pelebaran jalan dari tahun 2020 namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut, sementara kondisi jalan sudah rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. jika hujan lebat, tebing sisi jalan longsor mengakibatkan banjir di rumah warga di sekitar jalan tersebut.	Dusun IV s/d Dusun V Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
16	Pembangunan jembatan kabupaten	Jembatan terlalu sempit dan rusak, sangat membahayakan pengguna jalan.	RT 002 RW 007 Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
17	Bantuan modal pertanian/ peternakan/ UMKM	Masyarakat butuh keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi	dusun IV Bayeman Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
18	Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	Banyaknya warga yang memiliki usaha dirumah akan tetapi perlengkapannya masih kurang lengkap	Dusun I , II, dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
19	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum tersediannya jalan yang memadai	Dusun I Rt 05 Rw 03, Dusun II Rt 01 Rw 05, Dusun II Rt 01 Rw 04, Kab. Purbalingga	Karangreja
20	Pengadaan alat kesehatan	Tidak memiliki alat transportasi kesehatan (Mobil Siaga)	Desa Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor

21	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum tersediannya Tribun Lapangan Desa	Dusun I Rt 002 Rw 002, Kab. Purbalingga	Karangreja
22	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada tindak lanjut setelah kegiatan TMMD Tahun 2020. Kondisi jalan malah semakin parah dan tidak bisa dilewati kendaraan.	RT 001 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
23	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Adanya lahan desa yang memiliki potensi wisata akan tetapi fasilitas belum memadai	Dusun II Rt 01 Rw 05, Kab. Purbalingga	Karangreja
24	Revitalisasi makam desa	Belum ada pengaman (Talud) di keliling tanah makam	Dusun Adireja Desa Tlahab Lor RT 001 RW 005, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
25	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya fasilitas Alat pertanian, bibit pertanian dan Pupuk Organik	Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
26	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Di Desa Serang belum memiliki fasilitas gedung olahraga.	RT 003 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
27	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Adanya kelompok yang ingin mengelola usaha di bidang peternakan	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
28	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Atap Gedung TPQ sudah banyak yang bocor dan kurangnya meubelair yang memadai	Dusun III (Penariban) RT 001 RW 006 Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
29	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan Penghubung Desa Serang dan Desa Pengalusan yang sudah rusak parah	Dusun I Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
30	Pengadaan alat kesehatan	Fasilitas Bidang Kesehatan yang masih belum memadai dan perlu untuk pembaharuan	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja

31	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	belum tersediannya alat kesenian rebana dan gamelan untuk kelompok	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
32	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Festival Gunung Slamet merupakan event tahunan yang membutuhkan dana besar	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
33	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	belum tersediannya Meja Tenis Meja tiap Dusun	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
34	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah buah nanas dan belum tersedianya peralatan yang memadai untuk pengolahan buah nanas.	Dusun I Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
35	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Kurangnya prasarana lembaga untuk RT RW PKK Karangtaruna dan LPM	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
36	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Desa Serang belum memiliki peralatan sepak bola yang memadai.	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
37	Pelatihan pengelolaan persampahan	Desa Serang sudah memiliki gedung TPS 3R namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas Tim pengelola persampahan.	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
38	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Desa belum memiliki gamelan sebagai upaya melestarikan kebudayaan	Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
39	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	banyaknya jalan desa yang rusak (Pengaspalan Jalan Penghubung Desa dan Dusun)	Karangreja-Tlahab Lor dan Karangreja-Gondang, Kab. Purbalingga	Karangreja

40	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Kurangnya koleksi buku dan literasi di Perpustakaan Desa Serang.	RT 003 RW 004 Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
41	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Gedung balai desa saat ini sudah tidak layak digunakan.	RT 003 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
42	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	belum tersediannya penerangan jalan desa	Dusun II Rt 01 Rw 05, Rt 01,02, 03 Rw 04, Rt 04 Rw 03 dan Rw 01, Kab. Purbalingga	Karangreja
43	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Balai Desa yang ada sudah rusak dan kekurangan ruang	Jalan Lingkar Lapang No.08 RT 004 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
44	Pengadaan alat kesehatan	Desa tidak memiliki alat transportasi kesehatan berupa mobil	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
45	Pembangunan PKD	Belum adanya gedung PKD di Desa	Jalan Lingkar Lapang RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga	Kutabawa
46	Pembangunan PKD	kurang strategis PKD yang sekarang	Dusun I Rt 03 Rw 02, Kab. Purbalingga	Karangreja
47	Pengadaan alat kesehatan	Belum adanya transportasi kesehatan desa	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
48	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani yang ada belum memadai (baru makadam)	RT 008 RW 003 Desa Kutabawa Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kutabawa
49	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani yang ada belum memadai (baru makadam)	RT 013 RW 003 Desa Kutabawa Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kutabawa
50	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Drainase yang ada sudah rusak dan mengakibatkan tanah	RT 008, 009, 010 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa

		tergerus		
51	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Belum adanya Drainase mengakibatkan air naik ke jalan	RT 002 RW 001, RT 014, 015, 16 RW 004 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
52	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih adanya rumah yang belum layak	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
53	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Membahayakan bagi pengguna jalan di malam hari karena belum ada lampu penerangan jalan umu	RT 008, 009, 010 RW 003, RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga	Kutabawa
54	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Togor yang ada sudah rusak dan jumlah rumah bertambah	RT 008, 009, 010 RW 003 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
55	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Pembangunan Green House untuk meningkatkan wisata pertanian dan edukasi	RT 007 RW 002, RT 001 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
56	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Pembangunan pagar keliling dan tribun lapangan kuncup mekar Desa Kutabawa	RT 005 RW 002 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
57	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	untuk mengarahkan bakat warga di bidang kesenian budaya	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
58	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	kurangnya ruang kelas	RT 002 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
59	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan yang ada sudah rusak dan berlubang	RT 017, 018, 019 RW Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
60	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan yang ada masih makadam	RT 019 RW 005 ke Perhutani, Kab. Purbalingga	Kutabawa
61	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Sedikitnya pohon untuk resapan air	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
62	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Untuk menampung dan mengarahkan bakat warga dibidang olahraga	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
63	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Untuk menambah varian tanaman (bibit kopi, jambu kristal, alpukat, pinus)	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
64	Pelatihan penanganan gangguan keamanan	Pendidikan dan pelatihan ketertiban	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa

	masyarakat desa	keamanan desa		
65	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	Pengadaan peralatan dan penanggulangan dan pasca bencana (tenda, matras dll)	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
66	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Pengadaan dan pelatihan modal usaha bagi kelompok tani Sri Rejeki (pengolahan produk lokal desa seperti kentang, wortel, labu siam dll)	RT 008, 009, 010 RW 003 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
67	Pemeliharaan jalan poros desa	Kondisi Jalan Poros Desa Siwarak (Sipetung) ke Desa Tlahab Lor (Cumbut)	Siwarak Dusun IV RW 07 RT 04, Kab. Purbalingga	Siwarak
68	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Kondisi jalan Pertanian belum memadai untuk akses transportasi pertanian	Siwarak Dusun I RW 01 s/d RW 02, Kab. Purbalingga	Siwarak
69	Pemeliharaan jalan kabupaten	Kondisi Jalan sudah rusak dan dapat membahayakan pengguna jalan	Jalan Sidamukti Dusun I RW 05 dan RW 06, Kab. Purbalingga	Siwarak
70	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Kekurangan Ruangan untuk Pelayanan di Kantor Desa	Dusun I RW 04, Kab. Purbalingga	Siwarak
71	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Dibutuhkan Alat dan Pupuk untuk Pertanian warga Desa Siwarak	Kelompok Tani Desa Siwarak, Kab. Purbalingga	Siwarak
72	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Gedung atau Ruang kelas kurang memadai karena bertambahnya santriwan dan santriwati	TPQ Al Hidayah Dusun IV RW 08, Kab. Purbalingga	Siwarak
73	Pelebaran jalan kabupaten	Sempitnya Jalan Akses Antar Dusun	Dusun IV s/d Dusun III Desa Siwarak, Kab. Purbalingga	Siwarak
74	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten Tembus Desa Tlahab Kidul-Gondang Rusak Berat	Dusun Sawangan Desa Tlahab Kidul - Gondang, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
75	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan dalam keadaan rusak terutama untuk bagian pagar pembatas jembatan	Dusun Siletreng Rt 01 Rw 01, Dusun Tlahab Rt 01 Rw 05, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

76	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Kurangnya penerangan jalan di Jalur Tlahab Kidul Gondang	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
77	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Drinase Jalan Kabupaten Rusak, Jika Hujan dan debit air tinggi, air meluap ke jalan .	Dusun Siletreng, Dusun Sawangan, Dusun Tlahab Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
78	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Ada satu RT yang belum teraliri listrik karena berada jauh dari pemukiman	Dusun Sawangan RT 05 RW 04 Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
79	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih banyak terdapat rumah tidak Layak Huni	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalin, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
80	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	Belum Pernah diadaan Pelatihan dan pencegahan Mitigasi bencana	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
81	Pelatihan pengelolaan persampahan	Sampah menjadi permasalahan klasik yang ada di desa, sehingga perlu diadakan pelatihan sistem pengelolaan sampah	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
82	Pembangunan DAM	DAM Parit Rusak	Desa Tlahab Kidul RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
83	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Desa Wisata Masih Berkembang, masih perlu banyak pengembangan fasilitas pariwisata	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
84	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum mempunyai fasilitas Gedung PKK	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbaling, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
85	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Dalam memberdayakan masyarakat untuk melestarikan budaya, masih menggunakan gamelan pinjaman dari kecamatan.	Tlahab Kidul RT 05 Rw 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

86	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Belum mempunyai Gedung Sarana Olahraga	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
87	Pelatihan kelembagaan desa	Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
88	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
89	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Gedung Kantor Desa Rusak	Dusun Siletreng Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
90	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Masih Kurangnya Fasilitas Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
91	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan membutuhkan perawatan dan pemeliharaan terutama pagar pembatas jembatan yang sudah rapuh	Dusun Siletreng RT 01 RW 01 Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
92	Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit	DAM Parit Rusak Karena Bencana Banjir	Desa Tlahab Kidul RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
93	Penanganan persampahan skala desa	Sampah menjadi permasalahan klasik yang ada di desa, sehingga perlu penanganan persampahan skala desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan **Tahap Kedua** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani delapan misi (Asta Cita) Presiden Prabowo, delapan prioritas nasional tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.
2. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri
4. Taruna karya mandiri melalui program kartu milenial untuk membuka lapangan kerja
5. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
6. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren

7. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
8. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi
9. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.
10. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
11. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk ***“Bangkitkan ekonomi rakyat, Akselerasi pembangunan infrastruktur, Reformasi birokrasi, dan Unggulkan kualitas SDM”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk memperkuat ekonomi, infrastruktur, birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) unggul, meliputi :

1. **Infrastruktur Berkelanjutan dan Konektivitas Wilayah:** Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi menjadi fokus utama, serta pengembangan hunian layak dan fasilitas publik. Program unggulan "Alus Dalane" (jalan halus) juga menjadi andalan untuk program ini.
2. **Penguatan Ekonomi Rakyat:** Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), modernisasi sektor pertanian (termasuk smart farming dan corporate farming), serta menarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:** Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik melalui

tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif, termasuk digitalisasi pelayanan publik.

4. **Pengunggulan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja melalui program beasiswa, pendirian Sekolah Rakyat, pemberdayaan tenaga kesehatan, dan pelatihan kompetensi untuk menghadapi era digital.
5. **Ketahanan Ekologi dan Lingkungan Hidup:** Menerapkan sistem pengelolaan sampah modern, mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan melakukan monitoring kualitas air secara real-time dengan teknologi seperti ON-LIMO.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- I.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsidan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Karangreja dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangreja yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			87	87	88	89	83,93			
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	50,66		70	70
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100

7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	100	93	93	93
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	83,93			
1	Nilai evaluasi pelayanan publik			NA	3,1	3,2	3,5	4,8		3,2	3,5
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97
5	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karangreja Tahun Anggaran 2023,

maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Progran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Lapangan;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

6. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
7. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
8. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
9. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
10. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Karangreja dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar : dari
.....

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Unsur Kewilayahan								
						Bidang Urusan Kecamatan								
7	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	1.771.428.000	DAU APBD		100%	1.763.458.000
7	01	01	2	01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	10.000.000	DAU APBD		100%	2.030.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kec. Karangreja	2 dokumen	6.000.000	DAU APBD		1 dokumen	1.130.000
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPI, KLJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Kec. Karangreja	3 dokumen	4.000.000	DAU APBD		3 dokumen	900.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Karangreja	100%	1.506.727.000	DAU APBD		100%	1.506.727.000

7	01	01	2	02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayar tepat waktu	Kec. Karangreja	11 Orang	1.491.667.000	DAU APBD		11 Orang	1.491.667.000
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Karangreja	11 Orang	900.000	DAU APBD		11 Orang	900.000
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
7	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
7	01	01	2	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	Kec. Karangreja	12 bulan	14.160.000	DAU APBD		12 bulan	14.160.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	Kec. Karangreja	100%	116.000.000	DAU APBD		100%	116.000.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Karangreja	12 unit	79.000.000	DAU APBD		12 unit	79.000.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	7.000.000	DAU APBD		12 bulan	7.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Karangreja	1 paket	30.000.000	DAU APBD		1 paket	30.000.000
7	01	01	2			Administrasi Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kec. Karangreja	100%	1.440.000	DAU APBD		100%	1.440.000
7	01	01	2	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya milik daerah	Kec. Karangreja	12 bulan	1.440.000	DAU APBD		12 bulan	1.440.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kec. Karangreja	100%	28.735.000	DAU APBD		100%	28.735.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Karangreja	12 bulan	1.056.000	DAU APBD		12 bulan	1.056.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	15.499.000	DAU APBD		12 bulan	15.499.000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000	DAU APBD		12 bulan	1.200.000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000				2.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	Kec. Karangreja	142 orang	3.700.000	DAU APBD		142 orang	3.700.000
7	01	01	2	06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	Kec. Karangreja	3 OB	5.280.000	DAU APBD		3 OB	5.280.000

7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	Kec. Karangreja		25.000.000				25.000.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karangreja	1 jenis	25.000.000	DAU APBD			25.000.000
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Karangreja	1 unit	-	DAU APBD			
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kec. Karangreja	100%	83.526.000	DAU APBD		100%	83.526.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jas Telekomunikasi	Kec. Karangreja	12 bulan	19.530.000	DAU APBD		12 bulan	19.530.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Kec. Karangreja	6 jenis					
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersihan	Kec. Karangreja	3 OB	63.996.000	DAU APBD		3 OB	63.996.000
7	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kec. Karangreja	3,1	9.144.000	DAU APBD		3,1	17.114.000
7	02	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	4 dokumen	8.504.000	DAU APBD		4 dokumen	16.474.000
7	02	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kec. Karangreja	26 kegiatan	8.504.000	DAU APBD		26 kegiatan	16.474.000
7	02	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	Kec. Karangreja	16 jenis	640.000	DAU APBD		16 jenis	640.000
7	02	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat Nonperizinan	Kec. Karangreja	12 dokumen	640.000	DAU APBD		12 dokumen	640.000
7	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	Kec. Karangreja	100	25.600.000	DAU APBD		100	25.600.000
7	03	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	Kec. Karangreja	5 kegiatan	25.600.000	DAU APBD		5 kegiatan	25.600.000
7	03	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Karangreja	7 desa	5.600.000	DAU APBD		7 desa	5.600.000
7	03	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Karangreja	7 desa	20.000.000	DAU APBD		7 desa	20.000.000

7	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Karangreja	12 dokumen	33.000.000	DAU APBD		12 dokumen	33.000.000
7	04	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	12 kegiatan	33.000.000	DAU APBD		12 kegiatan	33.000.000
7	04	04	2	03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	Kec. Karangreja	12 kegiatan	24.000.000	DAU APBD		12 kegiatan	24.000.000
7	04	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Karangreja	4 kegiatan	9.000.000	DAU APBD		4 kegiatan	9.000.000
7	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	Kec. Karangreja	12 dokumen	30.000.000	DAU APBD		12 dokumen	30.000.000
7	05	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Karangreja	12 dokumen	30.000.000	DAU APBD		12 dokumen	30.000.000
7	05	05	2	01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Karangreja	4 kegiatan	30.000.000	DAU APBD		4 kegiatan	30.000.000
7	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	15.000.000	DAU APBD		28%	15.000.000
7	06	06	2	01		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	15.000.000	DAU APBD		28%	15.000.000
7	06	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	Kec. Karangreja	7 desa	15.000.000	DAU APBD		7 desa	15.000.000

1.884.172.000

1.884.172.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangreja pada Tahun 2025.

Kecamatan Karangreja sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangreja dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangreja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Karangreja, 30 Juni 2025

CAMAT KARANGREJA



SUPRIYANTI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19700407 198903 2 001